



BUPATI SARMI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka Panjang daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah adalah Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomo 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI

Dan

BUPATI SARMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarmi.

2. Bupati...../5

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarmi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah badan yang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sarmi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sarmi untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
14. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
15. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran/output, hasil/outcome, dan dampak/impact).
17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari hasil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Daerah
- c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
- e. Bab V : Penutup

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - b. Rencana Strategis PD
 - c. Rencana Kerja PD; dan
 - d. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya, pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan RENSTRA PD dan RENJA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala/7

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. Capaian target indikator kinerja daerah;
 - c. Efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - d. Efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
 - a. RKPD dengan RPJMD; dan
 - b. RENJA PD dengan RENSTRA PD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan RENJA PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD DAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. Hasil...../8

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.
- (2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
 - (4) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan RKPD dan Perubahan RENSTRA PD.
 - (5) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RENSTRA PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan RENSTRA PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. Terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian muatan RENSTRA PD sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan RENSTRA PD per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Hasil...../9

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. Kondisi strategis daerah; atau
 - c. Fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan RENJA PD dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan RENSTRA PD dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 23 Oktober 2025

BUPATI SARMI
CAP/TTD
DOMINGGUS CATUE, S.KM. M.Kes.


Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 27 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
CAP/TTD
EDUWARD P DIMOMONMAU. S.T, M.KP.
PEMBINA TK I
NIP. 19760207 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2025 NOMOR 3

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA NOMOR 03/2025. NOMOR URUT PERDA KABUPATEN SARMI NOMOR 3 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL I. AYEMI, SH

Salinan. Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
 3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
-



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat menyelesaikan penyusunan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029**.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki kedudukan sangat strategis, karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 dilakukan melalui serangkaian proses yang partisipatif, teknokratis, politis, top-down dan bottom-up. Proses ini mencakup analisis capaian pembangunan sebelumnya, evaluasi terhadap RPJMD periode 2018-2022, penyelarasan dengan RPJPD Kabupaten Sarmi, RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua, serta Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain itu, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme Musrenbang serta forum konsultasi publik juga menjadi bagian penting dalam perumusan dokumen ini.



Dokumen RPJMD ini diharapkan dapat menjadi **arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarmi selama lima tahun ke depan**, dengan fokus pada pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas, peningkatan daya saing daerah, pemerataan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Keseluruhan kebijakan, program, dan kegiatan yang tercantum di dalamnya disusun untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang dimiliki Kabupaten Sarmi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan RPJMD ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Sarmi, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Untuk itu, kami menyampaikan **ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya** kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhirnya, besar harapan kami agar **RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029** dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan rencana kerja tahunan serta menjadi acuan bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sarmi yang **Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**.

Sarmi, 23 Oktober 2025

BUPATI SARMI
CAP/TTD
DOMINGGUS CATUE. S.KM. M.Kes.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	6
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	9
	1.5 Sistematika Penulisan	I	9
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	II	1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	2
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	29
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	47
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	58
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II	68
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	69
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	99
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	107
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	130
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	130
	2.3.2 Isu Strategis	II	137
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sararan	III	1
	3.1.1 Visi	III	1
	3.1.2 Misi	III	2
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	4
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah	III	13
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	13
	3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	33
	3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sarmi 2025-2029	III	53
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	56
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Penetapan Indikator Kinerja	IV	33
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	33
	4.1.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	36
BAB V	PENUTUP	V	1
	5.1. Pedoman Transisi	V	1
	5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	V	2
	5.3 Kaidah Pelaksanaan	V	2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Kecamatan / Distrik di Kabupaten Sarmi	II	3
Tabel II.2	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sarmi Tahun 2024	II	5
Tabel II.3	Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Sarmi Tahun 2024	II	6
Tabel II.4	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Sarmi Tahun 2024	II	6
Tabel II.5	Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi (PDRB ADHK) Tahun 2020-2024 dalam Miliar Rupiah	II	7
Tabel II.6	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Sarmi	II	10
Tabel II.7	Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033	II	11
Tabel II.8	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Sarmi Tahun 2023	II	13
Tabel II.9	Status Daya Dukung Permukiman Kabupaten Sarmi 2023	II	15
Tabel II.10	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi, 2020-2024	II	17
Tabel II.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	21
Tabel II.12	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Sarmi 2020-2024	II	30
Tabel II.13	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sarmi, 2020-2024	II	32
Tabel II.14	Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022	II	44
Tabel II.15	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sarmi, 2020-2024	II	49
Tabel II.16	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sarmi (miliar rupiah), 2024	II	50
Tabel II.17	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	52
Tabel II.18	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi Sarmi 2020-2024	II	53
Tabel II.19	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	54
Tabel II.20	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Sarmi Tahun 2024	II	61
Tabel II.21	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022	II	62
Tabel II.22	Skala interval Otonomi Fiskal	II	70
Tabel II.23	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sarmi, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	70
Tabel II.24	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	72
Tabel II.25	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (rupiah)	II	79
Tabel II.26	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (Rupiah)	II	85

Tabel II.27	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	88
Tabel II.28	Rasio Lancar Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	95
Tabel II.29	Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	96
Tabel II.30	Analisis Rasio Hutang terhadap Total Aktiva Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	97
Tabel II.31	Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	98
Tabel II.32	Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	99
Tabel II.33	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	100
Tabel II.34	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	II	103
Tabel II.35	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024	II	104
Tabel II.36	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024	II	104
Tabel II.37	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024 (dalam juta)	II	106
Tabel II.38	Asumsi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	II	115
Tabel II.39	Asumsi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	II	122
Tabel II.40	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	II	125
Tabel II.41	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	127
Tabel II.42	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	II	128
Tabel II.43	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030	II	129
Tabel II.44	Highlight intervensi RPJMN terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Sarmi	II	143
Tabel II.45	Keterkaitan Isu KLHS RPJMD dengan Isu Strategis Kabupaten Sarmi	II	149
Tabel III.1	Penjabaran Makna Pokok Visi RPJMD Kabupaten Sarmi	III	2
Tabel III.2	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	6
Tabel III.3	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029	III	11
Tabel III.4	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029	III	14
Tabel III.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029	III	18
Tabel III.6	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029	III	34
Tabel III.7	Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Proyek Strategis Kepala Daerah Kabupaten Sarmi	III	53
Tabel IV.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sarmi Tahun 2025 - 2030	IV	2

Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030	IV	34
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030	IV	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain	I	6
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Sarmi	II	2
Gambar II.2	Peta Topografi Kabupaten Sarmi	II	4
Gambar II.3	Satuan Pembangunan Wilayah Kabupaten Sarmi	II	11
Gambar II.4	Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Sarmi Tahun 2023	II	14
Gambar II.5	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi 2020-2024	II	16
Gambar II.6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023	II	17
Gambar II.7	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Sarmi 2019-2023	II	18
Gambar II.8	Persentase Penduduk Kabupaten Sarmi Berakses Air Minum Tahun 2019-2021	II	19
Gambar II.9	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2021	II	20
Gambar II.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2023	II	21
Gambar II.11	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Sanitasi Layak di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2021	II	22
Gambar II.12	Peta Kerawanan Banjir di Kabupaten Sarmi	II	23
Gambar II.13	Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Sarmi	II	23
Gambar II.14	Peta Kerawanan Longsor di Kabupaten Sarmi	II	24
Gambar II.15	Peta Kerawanan Tsunami di Kabupaten Sarmi	II	25
Gambar II.16	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	26
Gambar II.17	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	27
Gambar II.18	Rasio Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	28
Gambar II.19	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	29
Gambar II.20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi (persen), 2020-2024	II	31
Gambar II.21	Angka Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (%)	II	32
Gambar II.22	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (dalam %)	II	33
Gambar II.23	PDRB Perkapita Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (dalam Ribu Rupiah)	II	34
Gambar II.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (dalam %)	II	36
Gambar II.25	Indeks Gini Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023	II	37
Gambar II.26	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	38
Gambar II.27	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	39
Gambar II.28	Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi Tahun 2021-2022	II	40
Gambar II.29	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023	II	41
Gambar II.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023	II	42
Gambar II.31	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	45
Gambar II.32	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023	II	46

Gambar II.33	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023	II	47
Gambar II.34	Angka Ketergantungan Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023	II	48
Gambar II.35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023	II	51
Gambar II.36	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	51
Gambar II.37	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2021 (%)	II	55
Gambar II.38	Rasio Pemukiman Layak Huni Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2021 (%)	II	56
Gambar II.39	Rasio cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten sarmi tahun 2019-2021	II	56
Gambar II.40	Perkembangan Inflasi (Laju PDRB Deflator) Kabupaten Sarmi Tahun 2018-2022 (%)	II	57
Gambar II.41	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022 (%)	II	60
Gambar II.42	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	73
Gambar II.43	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024	II	75
Gambar II.44	Pendapatan Transfer Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	II	75
Gambar II.45	Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023 (juta rupiah)	II	76
Gambar II.46	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024	II	81
Gambar II.47	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024	II	81
Gambar II.48	Proporsi Struktur Belanja Modal Kab. Sarmi Tahun 2020-2024	II	82
Gambar II.49	Target Komposisi PAD Kab Sarmi Tahun 2026-2030	II	112
Gambar II.50	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030	II	113
Gambar II.51	Target Belanja Operasi Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	117
Gambar II.52	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Meodal Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030	II	119
Gambar II.53	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	119
Gambar II.54	IPM Kabupaten Sarmi dan Kabupaten sekitar di Provinsi Papua	II	132
Gambar III.1	Keterkaitan Misi RPJMN dengan Misi Ranwal RPJMD Kabupaten Sarmi	III	4
Gambar III.2	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	III	5
Gambar III.3	Tema Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030	III	14
Gambar III.4	Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua Pada RPJM Nasional 2025-2029	III	58

BAB 1

Pendahuluan

RPJMD Kabupaten Sarmi adalah rencana pembangunan lima tahun yang memuat arah kebijakan, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah sebagai wujud visi dan misi kepala daerah. Bab I ini menyajikan gambaran awal mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami bahwa dokumen ini adalah panduan bersama untuk mewujudkan pembangunan Sarmi yang lebih terarah dan berkesinambungan.



1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum

1.3

Hubungan Antar Dokumen

1.4

Maksud dan Tujuan

1.5

Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sarmi adalah salah satu wilayah yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Sarmi merupakan singkatan dari nama suku-suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Keberadaan masyarakat ini telah lama menjadi perhatian antropolog Belanda, Van Kouhen Houven, yang kemudian memberikan nama Sarmi. Setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan seni budaya yang khas, mencerminkan identitas lokal yang kuat. Alam Sarmi juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan pantai-pantai indah, hutan tropis yang lebat, serta sungai-sungai besar yang membentang, memberikan pesona alami yang sulit ditemukan di tempat lain.

Potensi Kabupaten Sarmi sangat besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan kehutanan. Dengan garis pantai yang panjang dan keindahan laut yang menawan, kabupaten ini memiliki peluang untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Selain itu, wilayah ini kaya akan sumber daya pada sektor pertanian, perikanan, yang menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan perikanan berkelanjutan. Hutan-hutan di Sarmi juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang bisa mendukung sektor kehutanan serta penelitian ilmiah.

Karakteristik Sarmi yang menonjol adalah kehidupan masyarakatnya yang masih sangat dekat dengan alam. Harmoni antara manusia dan lingkungan di Sarmi mencerminkan kearifan lokal yang telah terjaga selama bertahun-tahun. Namun, dengan meningkatnya arus modernisasi, tantangan besar adalah bagaimana menjaga identitas lokal ini sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan global.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang terlayani baik, mempunyai aktivitas dan kehidupan yang berlangsung teratur dan sumber daya manusia yang semakin berkualitas disertai lingkungan hidup yang terpelihara dengan baik. Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, secara berkesinambungan guna mencapai harapan yang dicita-citakan. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perencanaan yang baik dan tepat akan menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan.

Dilantiknya Bapak Dominggus Catue, S.KM, M.Kes sebagai Bupati Sarmi dan Ibu H. Jumriati, SH sebagai Wakil Bupati Sarmi yang diselenggarakan pada

20 Februari 2025 maka pembangunan Kabupaten Sarmi periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Sarmi harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan adanya Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

- 1) *Teknokratik*, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- 3) *Politis*, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD; dan
- 4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
- 5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
- 6) *Integratif*, Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.
- 7) *Spasial*, Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi, pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis

kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi. RPJMD menjadi pedoman dalam arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Sarmi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan **Kabupaten Sarmi**, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

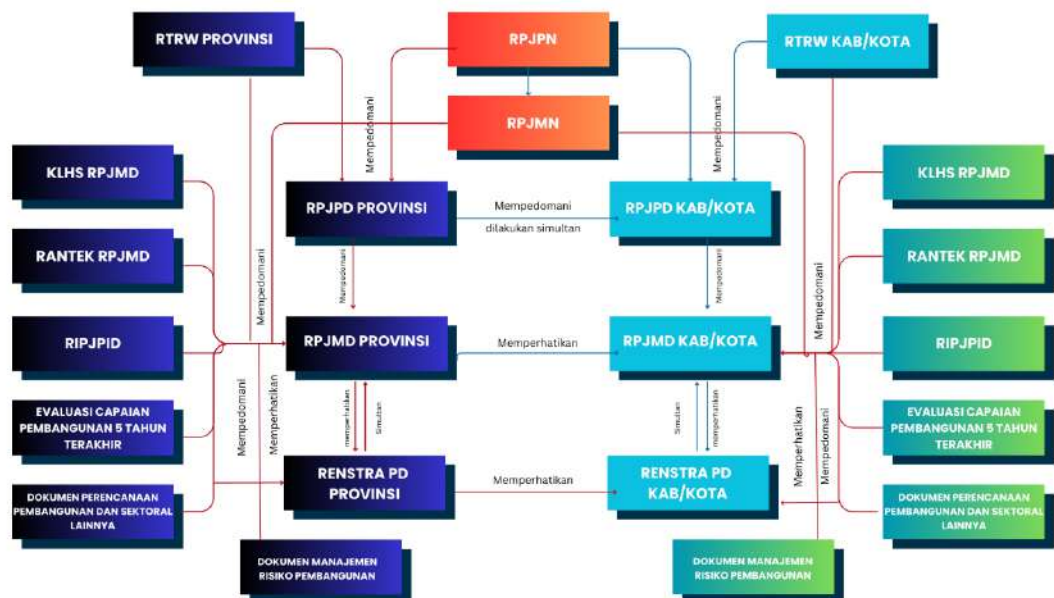
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 23 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2013 Nomor 2);

- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarmi tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 3); dan
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan Perlindungan & Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I. 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas:

a. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Sarmi dan RPJMN

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terletak pada keterpaduan visi, misi, dan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Sarmi, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat daerah, disusun dengan merujuk pada arahan strategis dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga pelaksanaan program di tingkat lokal dapat memberikan kontribusi nyata terhadap capaian target pembangunan nasional. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Sarmi mengintegrasikan isu-isu strategis daerah, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal, dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing ekonomi, guna menciptakan pembangunan yang holistik dan berkesinambungan.

b. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Papua

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Papua sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Papua. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Papua untuk sinkronisasi kebijakan.

c. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sarmi

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2045 tahap pertama. RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan lanjutan dari tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi Kabupaten Sarmi tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahap keempat ini, berbagai kebijakan dalam dokumen jangka Panjang dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Sarmi

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Papua dan RTRW Kabupaten Sarmi sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sarmi. RPJMD Kabupaten Sarmi juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Sarmi.

e. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi

RPJMD menjadi landasan utama bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Renstra PD, sebagai rencana strategis lima tahunan, harus selaras dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan kata lain, Renstra PD menjabarkan bagaimana setiap PD akan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sarmi yang tertuang dalam RPJMD. Dengan ini integrasi antara RPJMD dan Renstra untuk memastikan adanya keterpaduan dan sinergi dalam upaya pembangunan di seluruh sektor dan tingkatan pemerintahan daerah.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi, KLHS berfungsi memberikan analisis mendalam tentang potensi dampak lingkungan dari berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS membantu mengarahkan RPJMD agar mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan. Hubungan ini memastikan bahwa pembangunan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang, terutama mengingat kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Sarmi.

g. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan sektoral dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi bersifat sinergis dan saling melengkapi. RPJMD sebagai dokumen induk pembangunan lima tahunan daerah harus mengintegrasikan visi, misi, serta prioritas pembangunan kepala daerah dengan rencana sektoral yang mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dokumen perencanaan sektoral menyediakan detail teknis, analisis kebutuhan, dan strategi implementasi yang mendukung tercapainya tujuan dalam RPJMD. Melalui sinkronisasi ini, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen strategis, tetapi juga operasional, memastikan bahwa setiap sektor bergerak dalam kerangka pembangunan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi secara berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. Hal ini agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Sarmi Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- 3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarmi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sarmi Tahun 2025-2029;
- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- 5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
- 8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sarmi selama 5 (lima) tahun;
- 9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Papua; dan
- 10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi .

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Sarmi sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sarmi.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, diberikan panduan pelaksanaan RPJMD 2025-2029 agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

BAB 2

Gambaran Umum Daerah

Bab II RPJMD Kabupaten Sarmi menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang menjadi landasan analisis dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan. Uraian mencakup aspek geografi dan demografi yang memberikan profil wilayah serta karakteristik penduduk, gambaran keuangan daerah sebagai cerminan kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang harus direspons dalam periode perencanaan. Analisis ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah, strategi, dan prioritas pembangunan yang dirumuskan memiliki dasar empiris yang kuat, relevan, serta selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang mengiringi. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Sarmi.

Pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Pembangunan tersebut masih harus diupayakan percepatan pencapaiannya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah.

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Sarmi baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan periode sebelumnya. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif dan valid pada gambaran

umum kondisi daerah ini, mampu menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Sarmi.

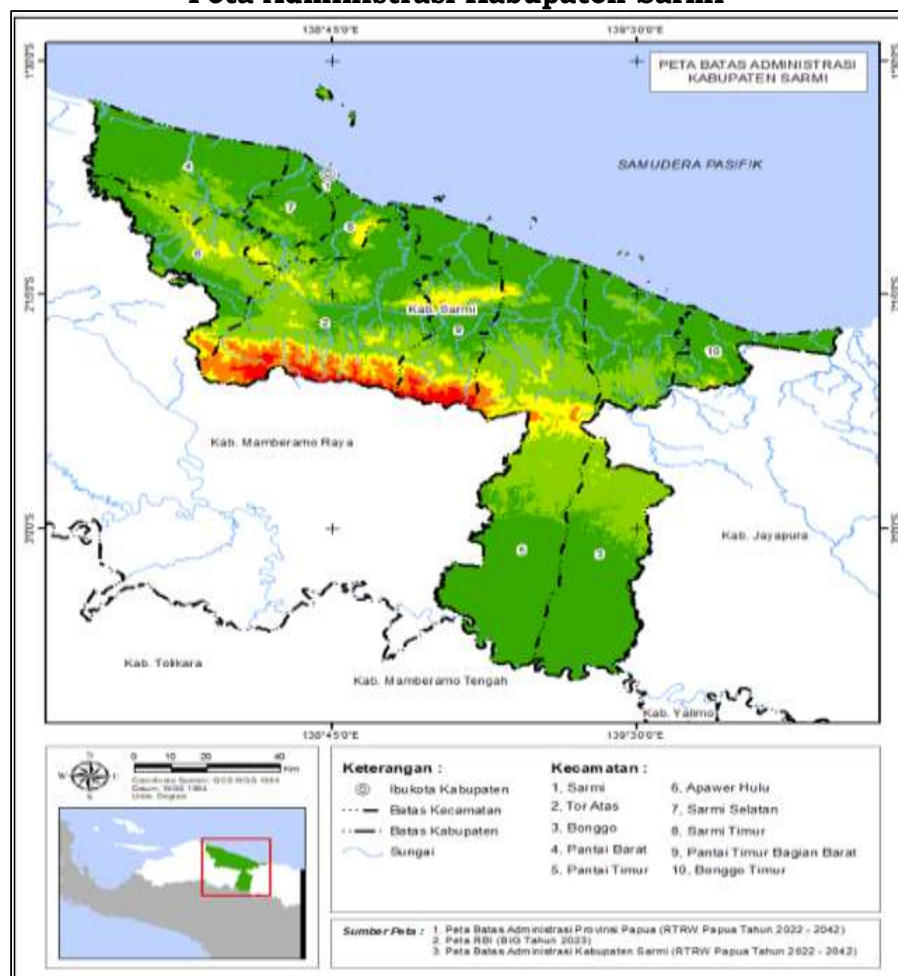
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Papua yang berada di Pulau Papua, dengan luas wilayah sebesar 1.406.767,08 hektar atau 14.067,67 km², atau sekitar 17,01 persen dari luas total Provinsi Papua. Luas laut Kabupaten Sarmi berdasarkan data RTRW Provinsi Papua Tahun 2023–2042 adalah sebesar 3.185 hektar (luas pesisir sampai jarak 12 mil) dengan panjang garis pantai sekitar 306,04 km. Kabupaten Sarmi secara geografis terletak pada 1035' dan 30 35' Lintang Selatan (LS) serta 138⁰⁰5' dan 140⁰³⁰' Bujur Timur (BT). Secara umum wilayah Kabupaten Sarmi berada pada ketinggian 10,59 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi adalah Distrik Apawer Hulu dengan ketinggian 92,03 mdpl. Selanjutnya Distrik Apawer Hilir merupakan wilayah terendCah dengan ketinggian 5,60 mdpl.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Sarmi



Sumber: Peta Dasar Revisi RTRW Kab. Sarmi hasil Konsultasi BIG Tahun 2023

Secara geografis, Kabupaten Sarmi terletak di 138°8'16,32" – 140°0'34,24" Bujur Timur dan 1°34'44,87" – 3°29'28,58" Lintang Selatan, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Lautan Pasifik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah (Provinsi Papua Pegunungan);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sarmi memiliki total luas wilayah sebesar 1.406.767,08 hektare yang terbagi ke dalam 10 distrik. Dari keseluruhan wilayah tersebut, Distrik Pantai Timur merupakan distrik terluas dengan luas mencapai 359.578,01 hektare atau sekitar 25,56% dari total wilayah kabupaten. Disusul oleh Distrik Bonggo seluas 279.048,37 hektare (19,84%) dan Distrik Tor Atas seluas 235.491,16 hektare (16,74%). Ketiga distrik ini menguasai lebih dari separuh total wilayah Kabupaten Sarmi.

Sementara itu, distrik dengan luas wilayah terkecil adalah Distrik Sarmi yang hanya mencakup 8.149,84 hektare atau 0,58% dari total luas. Distrik lainnya seperti Bonggo Timur, Sarmi Selatan, dan Sarmi Timur memiliki proporsi wilayah yang relatif kecil, masing-masing berkisar antara 2% hingga 4%.

Distribusi luas wilayah yang tidak merata ini dapat memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, distribusi penduduk, dan penyediaan layanan publik. Distrik dengan wilayah yang luas kemungkinan menghadapi tantangan dalam hal jangkauan pelayanan dan infrastruktur, sedangkan distrik dengan luas kecil cenderung lebih padat dan mudah dijangkau.

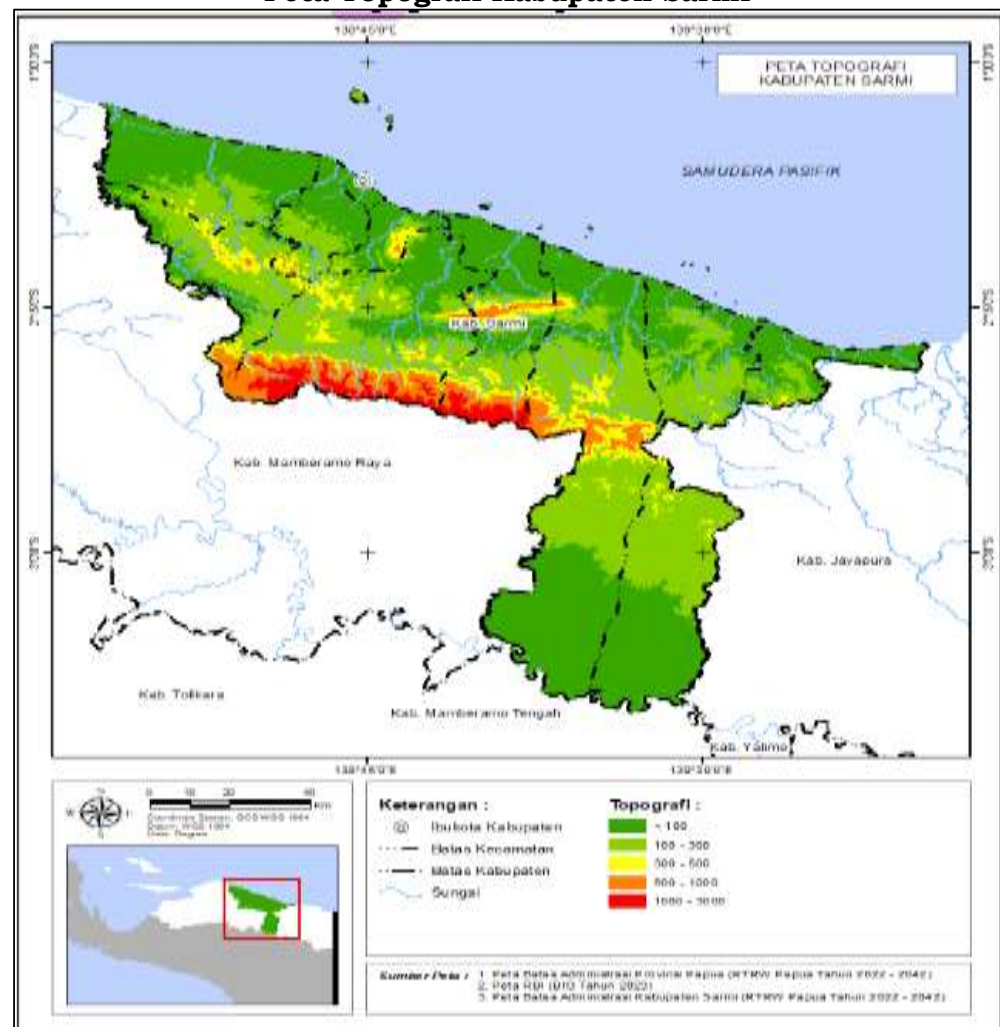
Tabel II.1
Luas Wilayah Kecamatan / Distrik di Kabupaten Sarmi

No	Kecamatan	Luas (ha)	Luas (%)
1	Apawer Hulu	110,971.13	7.89
2	Bonggo	279,048.37	19.84
3	Bonggo Timur	57,839.18	4.11
4	Pantai Barat	133,216.16	9.47
5	Pantai Timur	359,578.01	25.56
6	Pantai Timur Bagian Barat	130,205.08	9.26
7	Sarmi	8,149.84	0.58
8	Sarmi Selatan	60,338.28	4.29
9	Sarmi Timur	31,929.88	2.27
10	Tor Atas	235,491.16	16.74
	Total	1,406,767.08	100.00

C. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Sarmi didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0 – 100 mdpl seluas kurang lebih 670,481.11 hektar atau sekitar 47.64 % dan dataran dengan ketinggian 100 – 300 mpdl seluas 533,190.23 hektar atau sekitar 37.88 % dari luas total Kabupaten Sarmi. Pada daerah selatan terdapat beberapa wilayah di Distrik Apawer Hulu, Pantai Timur, Pantai Timur Bagian Barat dan Tor Atas yang memiliki wilayah dengan ketinggian >1000 mpdl, dengan total luas sebesar 35,970.65 hektar atau sekitar 2,56 dari luas total Kabupaten Sarmi. Kondisi topografi Kabupaten Sarmi seperti dijelaskan pada Gambar 2.2.

Gambar II.2
Peta Topografi Kabupaten Sarmi



Sumber: Hasil olahan Data DEMNAS Tahun 2024

D. Kondisi Klimatologi

Suhu udara di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 berkisar antara 21,90°C hingga 34,80°C. Suhu minimum terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 21,90°C, sedangkan suhu minimum tertinggi terjadi pada bulan April sebesar

23,90°C. Suhu maksimum tertinggi tercatat pada bulan Mei dan Juni, masing-masing mencapai 34,80°C, sedangkan suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Agustus dan September sebesar 32,10°C. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2024 berada dalam rentang 27,21°C hingga 28,24°C, dengan rata-rata tertinggi tercatat pada bulan November.

Tingkat kelembaban udara di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 menunjukkan variasi antara 50% hingga 100%. Kelembaban minimum terendah tercatat pada bulan Juni sebesar 50%, sementara kelembaban maksimum mencapai 100%, yang terjadi di beberapa bulan seperti Januari, April, Mei, Juni, dan Juli. Rata-rata kelembaban udara bulanan berada dalam kisaran 87,91% hingga 93,12%, dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juni. Informasi tentang suhu udara dan kelembaban udara Kabupaten Sarmi tahun 2022 disajikan pada Tabel II.3.

Tabel II.2

Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kabupaten Sarmi Tahun 2024

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Suhu Minimum (°C)	Suhu Rata-rata (°C)	Suhu Maksimum (°C)	Kelembaban Minimum (%)	Kelembaban Rata-rata (%)	Kelembaban Maksimum (%)
Januari	23,2	27,68	33	65	90,74	100
Februari	23,3	27,43	33,2	63	89,58	99
Maret	23,2	27,85	33,8	61	88,54	99
April	23,9	27,93	32,6	62	89,24	100
Mei	21,9	27,75	34,8	58	91,78	100
Juni	23,3	27,53	34,8	50	93,12	100
Juli	23,4	27,21	33,6	73	90,63	100
Agustus	23,3	27,41	32,1	81,5	89,43	99
September	23,4	27,91	32,1	82,25	89,09	94,25
Oktober	23,6	27,65	32,2	83,25	90,02	99
November	22,9	28,24	33,2	79,5	87,91	96,25
Desember	23,6	27,55	34,2	83,25	91,23	99

Sumber: BPS Kabupaten Sarmi

Kecepatan angin di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 berkisar antara 0 hingga 6,69 Knot. Kecepatan angin maksimum terendah tercatat pada bulan Januari sebesar 4,10 Knot, sedangkan kecepatan angin maksimum tertinggi terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 6,69 Knot. Beberapa bulan lainnya seperti Maret, Juni, dan Oktober juga mencatat kecepatan maksimum di atas 6 Knot.

Tekanan udara permukaan di atas landasan (QFF) tertinggi pada tahun 2024 tercatat pada bulan Agustus sebesar 1.009,90 mb, sedangkan tekanan udara permukaan di atas laut (QFE) tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 1.014,50 mb. Informasi tentang kecepatan angin dan tekanan udara Kabupaten Sarmi tahun 2022 disajikan pada di bawah ini.

Tabel II.3**Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Sarmi Tahun 2024**

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan Udara (mb)		
	Kecepatan Angin Min (Knot)	Rata-rata (Knot)	Maksimum (Knot)	QFE Minimum (mb)	QFE Rata-rata (mb)	QFE Maksimum (mb)
Januari/January	0	1,46	4,1	1.003,50	1.008,69	1.013,80
Februari/February	0	1,46	5,7	1.003,50	1.009,59	1.014,50
Maret/March	0	1,63	6,2	1.005,10	1.009,59	1.013,90
April/April	0	1,57	4,6	1.004,40	1.008,62	1.011,70
Mei/May	0	1,53	6	1.002,60	1.008,23	1.013,10
Juni/June	0	1,45	6,2	1.005,60	1.009,56	1.013,50
Juli/July	0	1,47	5,14	1.006,20	1.010,06	1.013,10
Agustus/August	0	1,69	5,66	1.009,90	1.011,15	1.013,00
September/September	0	1,71	6,69	1.007,30	1.010,64	1.014,00
Oktober/October	0	1,57	6,17	1.008,20	1.010,63	1.012,80
November/November	0	1,7	5,14	1.007,90	1.009,96	1.013,20
Desember/December	0	1,32	5,14	1.006,90	1.009,06	1.012,50

Sumber : Kabupaten Sarmi Dalam Angka, 2023

Tingkat curah hujan di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 berkisar antara 30,40 mm hingga 469,20 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, hanya mencapai 30,40 mm, sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember, yaitu sebesar 469,20 mm.

Jumlah hari hujan di Kabupaten Sarmi tahun 2024 berkisar antara 15 hingga 31 hari. Hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Mei dengan 15 hari, sedangkan jumlah hari hujan tertinggi, yaitu 31 hari, terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Rata-rata lama penyinaran matahari harian di Kabupaten Sarmi sepanjang tahun 2024 berada dalam rentang 3,83 hingga 6,31 jam per hari. Lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 3,83 jam per hari, sementara lama penyinaran tertinggi tercatat pada bulan Juni sebesar 6,31 jam per hari. Informasi tentang kecepatan angin dan tekanan udara Kabupaten Sarmi tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel II.4**Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Sarmi Tahun 2024**

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Lama Penyinaran Matahari (jam/hari)
Januari/January	247,6	22	5,15
Februari/February	254,7	23	4,57
Maret/March	398,9	18	5,84
April/April	146,2	20	5
Mei/May	233,6	15	4,88
Juni/June	379,1	16	6,31
Juli/July	30,4	25	4,39
Agustus/August	134,7	31	5,86
September/September	219,2	30	5,65
Oktober/October	463,3	31	5,08
November/November	130,8	30	4,6
Desember/December	469,2	31	3,83

E. Kontribusi

Pada Subsubbab 2.1.1 mengenai Posisi dan Peran Strategis Daerah, selain memaparkan aspek geografis yang mencakup letak, luas wilayah, serta karakteristik topografi Kabupaten Sarmi, juga disajikan analisis mengenai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) sebagai indikator utama kinerja ekonomi daerah. Lebih lanjut, subsubbab ini turut menguraikan kontribusi sektor infrastruktur, yang berperan strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka aksesibilitas terhadap pelayanan dasar, serta menjadi pendorong utama dalam peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.5

Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi (PDRB ADHK)

Tahun 2020-2024 dalam Miliar Rupiah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK Sarmi	1.834,11	3.103,77	3.315,80	3.562,53	3.824,65
PDRB ADHK Papua	137.787,29	158.675,15	172.907,29	49.549,83	51.587,16
Kontribusi PDRB Sarmi	1,33111697	1,95605298	1,917675073	7,189792579	7,413957272

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sarmi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan (ADHK) Provinsi Papua menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Nilai kontribusi ini dihitung dengan membagi PDRB ADHK Kabupaten Sarmi dengan PDRB ADHK Provinsi Papua setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi Sarmi hanya sebesar 1,33%, kemudian meningkat menjadi 1,96% di tahun 2021. Namun, kenaikan angka terjadi pada tahun 2023 dan 2024 dengan kontribusi mencapai 7,19% dan 7,41%.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Potesi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Sarmi merupakan wilayah memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup potensial. Hal ini seperti diuraikan dalam kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabuoaten Sarmi (RTRW) tahun 2013-2033. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan berdasar Perda Kabupaten Sarmi No. 2 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarmi Tahun 2013-fstrategi yang ditetapkan adalah pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi-fungsi pusat-pusat pelayanan. Dengan demikian ditetntukan

sentral pelayanan yang dapat menyediakan pelayanan yang optimal di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi. Rencana Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan (Pusat Kegiatan) Kabupaten Sarmi ditujukan agar terjadi peningkatan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebab hal tersebut terkait dengan peneuhan kebutuhan masyarakat atas ketersediaan sarana dan prasarana utama dan penunjang.

Pengembangan pusat kegiatan dilaksanakan melalui pengembangan pusat permukiman, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dilakukan agar Kawasan permukiman di daerah perkotaan dan pedesaan dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pelayanan pemerintah dan penyediaan layanan pada sektor jasa. Adapun sasaran pembunan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Sarmi diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Sarmi dibagi ke dalam tiga Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarmi, ketiga Sub-SSWP mencakup SSWP Sarmi, SSWP Bonggo dan SSWP Arbais. Masing-masing Sub-SSWP mencakup beberapa distrik, diantaranya: (i) SSWP Sarmi mencakup empat distrik diantaranya; Distrik Sarmi Selatan, Sarmi, Sarmi Timur dan Tor Atas; (ii) SSWP Bonggo mencakup empat distrik diantaranya; Distrik Bonggo Timur, Bonggo, Pantai Timur dan Pantai Timur Barat, dan (iii) SSWP Arbais terdiri mencakup dua Distrik diantaranya; Distrik Pantai Barat dan Apawer Hulu. Tujuan untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah merupakan alasan rencana pengembangan wilayah yang dibagi dalam tiga Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP).

Masing-masing wilayah yang terbagi kedalam tiga Sub-SSWP tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh ketiga wilayah tersebut. Pertama, SSWP Sarmi merupakan wilayah ditujuak untuk pengembangan berbagai fasilitas sosial, diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadataZn, pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta pengembangan kawasan pusat olahraga dan ruang terbuka hijau berupa taman kota. Kedua, SSWP Bonggo merupakan wilayah yang ditujukan untuk pengembangan berbagai fasilitas, baik fasilitas sosial maupun pengembangan sektor pertanian yang mencakup: pengembangan fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau serta pengembangan gudang dan terminal agribisnis. Ketiga, SSWP Arbais ditujukan untuk pengembnagn

berbagai, diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan serta pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau.

Pembangian wilayah kedalam tiga Sub-SSWP memiliki beberapa tujuan, tujuan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Beberapa fungsi SSWP Sarmi diantaranya adalah sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat fasilitas pelayanan umum, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, Kawasan permukiman, simpul transportasi regional, serta sentra industri kecil dan sedang;

b. Beberapa fungsi SSWP Sarmi diantaranya adalah sebagai pusat kegiatan perdagangan dan sektor jasa, pusat fasilitas pelayanan umum, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, Kawasan permukiman, simpul transportasi regional, serta sentra industri kecil;

c. Beberapa fungsi SSWP Sarmi diantaranya adalah sebagai pusat kegiatan perdagangan dan sektor jasa, pusat fasilitas pelayanan umum, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan dan Permukiman.

Penetapan sentra pertumbuhan wilayah berdasarkan Sub-SSWP didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah, karena potensi satu wilayah tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Seperti dijelaskan pada Gambar 2.3. tentang peta pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki Sub-SSWP di Kabupaten Sarmi. Berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah akan saling menunjang terhadap pertumbuhan wilayah lainnya, dengan kata lain setiap wilayah akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lainnya. Uraian tentang pengembangan wilayah di Kabupaten Sarmi berdasarkan potensi masing-masing Sub-SSWP diuraikan pada Tabel di bawah ini

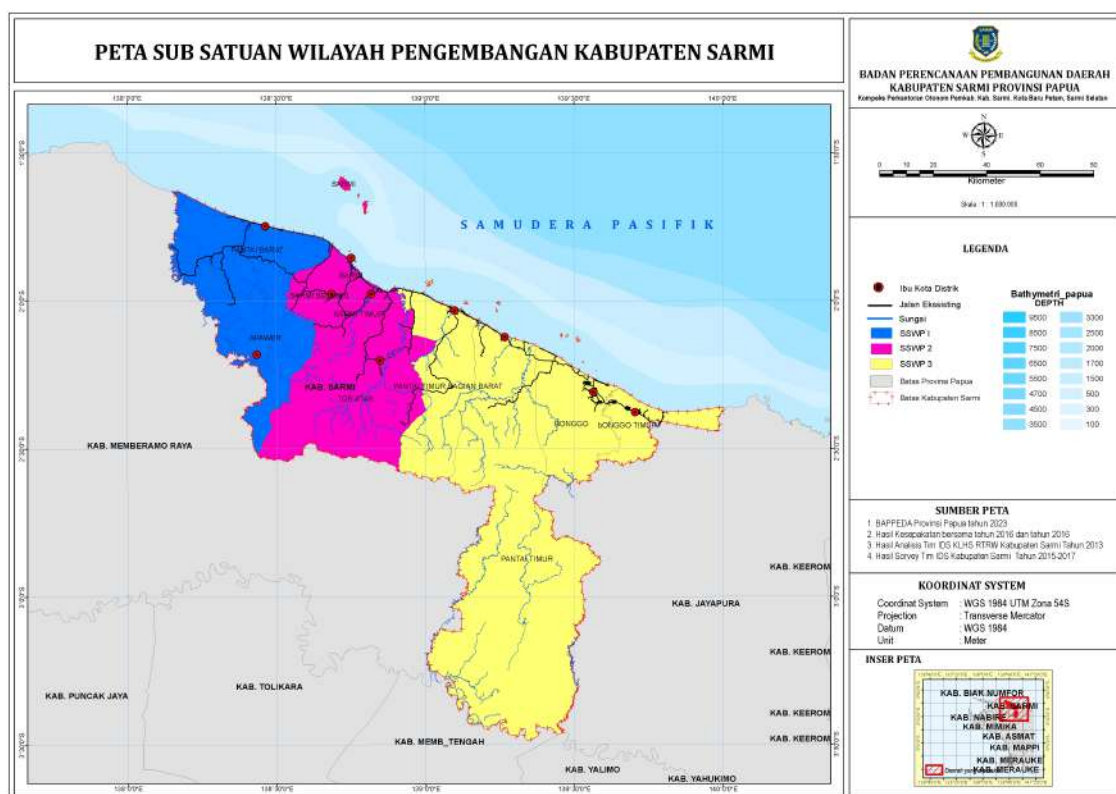
Tabel II.6

Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Sarmi

SSWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Fungsi SSWP	Rencana Pengembangan Fasilitas
SSWP 1	Sarmi	Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kabupaten 2. Pusat perdagangan dan jasa 3. Pusat fasilitas pelayanan umum 4. Pertanian 5. Perikanan 6. Pariwisata 7. Pemukiman 8. Simpul transportasi regional 9. Industri kecil dan sedang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pendidikan: pengembangan pendidikan setara akademi 2. Fasilitas perdagangan dan jasa: pasar umum, bank, swalayan, hotel/penginapan, tempat hiburan dan jasa 3. Fasilitas kesehatan: rumah sakit daerah tipe C, rumah sakit swasta dan puskesmas rawat inap 4. Fasilitas peribadatan: masjid, gereja, pura, dan lainnya 5. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 6. Pengembangan kawasan pusat olahraga dan ruang terbuka hijau berupa taman kota
SSWP 2	Bonggo	Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Pantai Timur Barat, Pantai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan dan jasa 2. Fasilitas pelayanan umum 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Peternakan 6. Pemukiman 7. Industri kecil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pendidikan: pengembangan pendidikan setara SMU/SMK 2. Fasilitas perdagangan dan jasa: pasar umum, bank, warung/rumah makan, pasar agribisnis 3. Fasilitas kesehatan: puskesmas rawat inap 4. Fasilitas peribadatan: masjid, gereja, pura dan lainnya 5. Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau 6. Pengembangan gudang dan terminal agribisnis
SSWP 3	Arbais	Distrik Pantai Barat, Distrik Apawer Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan dan jasa 2. Fasilitas pelayanan umum 3. Pertanian 4. Perkebunan 5. Peternakan 6. Pemukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pendidikan: pengembangan pendidikan setara SMU/SMK 2. Fasilitas perdagangan dan jasa: pasar umum, warung/rumah makan, pertokoan 3. Fasilitas kesehatan: puskesmas rawat inap 4. Fasilitas peribadatan: masjid, gereja, pura dan lainnya 5. Pengembangan ruang terbuka hijau berupa taman dan jalur hijau

Sumber : RTRW Kabupaten Sarmi 2013-2033

Gambar II.3
Satuan Pembangunan Wilayah Kabupaten Sarmi



Sumber : Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2025

2. Rencana Sistem Perkotaan dan Pedesaan

Sesuai dengan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional ada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Sarmi. Dalam upaya untuk mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan pengembangan wilayah di Kabupaten Sarmi, langkah awal yang harus dilakukan adalah merumuskan serta menentukan lokasi kegiatan-kegiatan utama dalam pengemangan wilayah di Kabupaten Sarmi. Pusat kegiatan wilayah kabuapten harus merujuk pada kebijakan pengembangan sistem kegiatan nasional seperti dijelaskan dalam RTRWN maupun RTRW Pulau serta kebijakan penataan ruang provinsi yang dituangkan dalam RTRW Provinsi Papua. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana PKL, PPK, dan PPL di Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2032 seperti diuraikan pada Tabel 2.7.

Tabel II.7
Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sarmi
Tahun 2013-2033

No	Nama Kota	Sistem Kota	Fungsi Utama
1	Sarmi di Distrik Sarmi	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten; • Perdagangan dan jasa; • perikanan
2	Bonggo di Distrik Bonggo	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan distrik; • Perkebunan; • Pertanian; dan • Wisata
3	Petani di Sarmi Selatan	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten; • Perdagangan dan jasa;
4	Holmafen Distrik Sarmi Timur	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan distrik; • Perikanan; • Perkebunana; • Pertanian.
5	Samanente Distrik Tor Atas	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan distrik, • Perikanan dan • Pertanian.
6	Arbais Distrik Pantai Barat	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan distrik, • Pertanian.
7	Pulau Liki di Distrik Sarmi	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan Kampung • Perikanan.
8	Aurimi Distrik Apawer Hulu	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan Kampung; • Pertanian.
9	Nengke Distrik Pantai Timur Barat	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan Kampung; • Pertanian

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya, sementara Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks daya dukung dan daya tampung ini akan digunakan hanya 1 jenis daya dukung yaitu Daya Dukung Penyediaan Air berdasarkan SK. MENLHK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, sedangkan untuk Daya Dukung Pangan belum dapat dihitung karena kurang tersedianya data produktivitas komoditas daerah penghasil kalori di Kabupaten Sarmi. Selain kondisi Daya Dukung Air, dalam sub bab ini juga akan dihitung kondisi Daya Dukung Permukiman dalam rangka memberikan gambaran kondisi eksisting luas lahan yang diperuntukan untuk area penggunaan lain dengan kondisi penggunaan lahan yang saat ini terjadi Kabupaten Sarmi

A. Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Kabupaten Sarmi dihitung menggunakan data volume air per wilayah distrik dan disebarkan dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air. Sementara itu, nilai kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan air bersih untuk domestik per kapita dan tutupan lahan. Berdasarkan data Daya Dukung dan Daya Tampung Air sesuai SK MENLHK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, jumlah total ketersediaan air di Kabupaten Sarmi mencapai 19.785.099.096,55 m³/tahun, dengan kebutuhan air domestik dan air lahan mencapai 109.101.170,54 m³/tahun. Maka terlihat selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air di tahun 2023 masih mencapai 19.675.997.926,02 m³/tahun. Dengan demikian, status daya dukung air di Kabupaten Sarmi pada tahun 2023 masih dalam kondisi Belum Terlampaui.

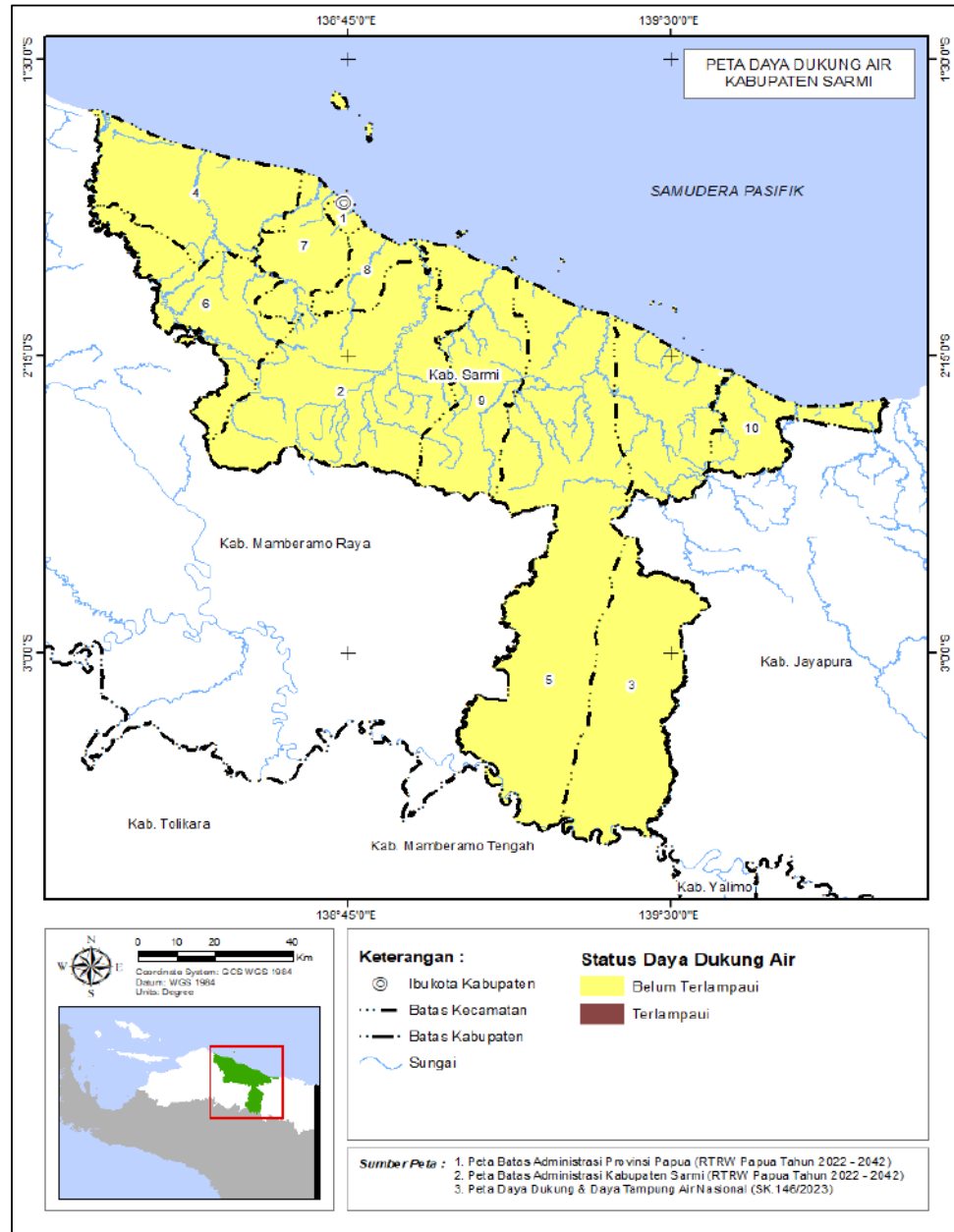
Tabel II.8

Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Sarmi Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air Domestik (m ³)	Kebutuhan Air Lahan (m ³)	Selisih (m ³)	Status
1	Apawer Hulu	1.739.761.751,97	26.697,60	2.134.380,70	1.737.600.673,67	Belum Terlampaui
2	Bonggo	3.825.583.656,96	505.353,60	7.507.980,45	3.817.570.322,90	Belum Terlampaui
3	Bonggo Timur	580.455.008,21	1.291.075,20	4.798.377,05	574.365.555,96	Belum Terlampaui
4	Pantai Barat	2.225.598.923,00	188.524,80	39.360.327,16	2.186.050.071,04	Belum Terlampaui
5	Pantai Timur	4.773.706.067,38	343.699,20	20.233.401,15	4.753.128.967,02	Belum Terlampaui
6	Pantai Timur Bagian Barat	1.785.282.873,45	699.926,40	12.853.235,12	1.771.729.711,93	Belum Terlampaui
7	Sarmi	133.315.867,26	116.553,60	7.374.258,62	125.825.055,03	Belum Terlampaui
8	Sarmi Selatan	794.834.846,18	512.956,80	3.056.581,77	791.265.307,61	Belum Terlampaui
9	Sarmi Timur	416.613.901,71	489.801,60	5.625.518,54	410.498.581,57	Belum Terlampaui
10	Tor Atas	3.509.946.200,44	500.601,60	1.481.919,57	3.507.963.679,27	Belum Terlampaui
Jumlah Total		19.785.099.096,55	4.675.190,40	104.425.980,14	19.675.997.926,02	

Gambar II.4

Status Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Sarmi Tahun 2023



Sumber: Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

B. Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung (Carrying Capacity Ratio/CCR) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Dalam menyusun daya dukung lahan permukiman, diperlukan besaran luas lahan permukiman yang layak untuk bermukim dan standar luas

kebutuhan lahan tiap penduduk. Standar luas kebutuhan penduduk per kapita Standar menurut Nasional Indonesia Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan adalah sebesar 26 m² per kapita.

Status Daya Dukung Permukiman. Perhitungan daya dukung permukiman dilakukan menggunakan batas delineasi Kabupaten Sarmi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula di atas, terlihat bahwa status DDPm di seluruh kecamatan/distrik di Kabupaten Sarmi masih mampu (Belum Terlampaui) untuk menampung penduduk untuk bermukim (DDP > 1), dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel II.9

Status Daya Dukung Permukiman Kabupaten Sarmi 2023

No	Kecamatan	Luas (ha)	LKRB (ha)	LKL (ha)	Penduduk 2023	Koef. (m ²)	DDPm (ha)	Status
1	Apawer Hulu	110,971.13	27,254.00	45,098.14	1,9	26	7,817.61	Belum Terlampaui
2	Bonggo	279,048.37	43,784.00	60,875.44	4,5	26	14,905.04	Belum Terlampaui
3	Bonggo Timur	57,839.18	14,436.00	0.00	3,4	26	4,909.86	Belum Terlampaui
4	Pantai Barat	133,216.16	34,515.00	1,328.64	2,2	26	17,023.17	Belum Terlampaui
5	Pantai Timur	359,578.01	52,145.00	109,718.20	2,9	26	26,222.12	Belum Terlampaui
6	Pantai Timur Bagian Barat	130,205.08	26,532.00	43,932.24	5,2	26	4,418.70	Belum Terlampaui
7	Sarmi	8,149.84	3,282.00	42.28	16	26	116.00	Belum Terlampaui
8	Sarmi Selatan	60,338.28	16,425.00	10,196.55	3,3	26	3,929.69	Belum Terlampaui
9	Sarmi Timur	31,929.88	9,006.00	6,309.58	1,9	26	3,363.22	Belum Terlampaui
10	Tor Atas	235,491.16	47,819.00	97,108.07	1,4	26	24,880.24	Belum Terlampaui
Luas Total		1,406,767.08	275,198.00	374,609.14			107,585.65	

Sumber: Hasil Analisa POKJA KLHS Kabupaten Sarmi Tahun 2024

Keterangan:

- LKL = luas kawasan lindung, meliputi Luas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Alam/Perlindungan Alam
- LKRB = luas kawasan rawan bencana, meliputi Luas areal multi bahaya dengan potensi tinggi
- Koef. luasan kebutuhan ruang perkapita, menurut SNI 03-1733-2004 sebesar 26m²
- DDPm : daya dukung permukiman

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

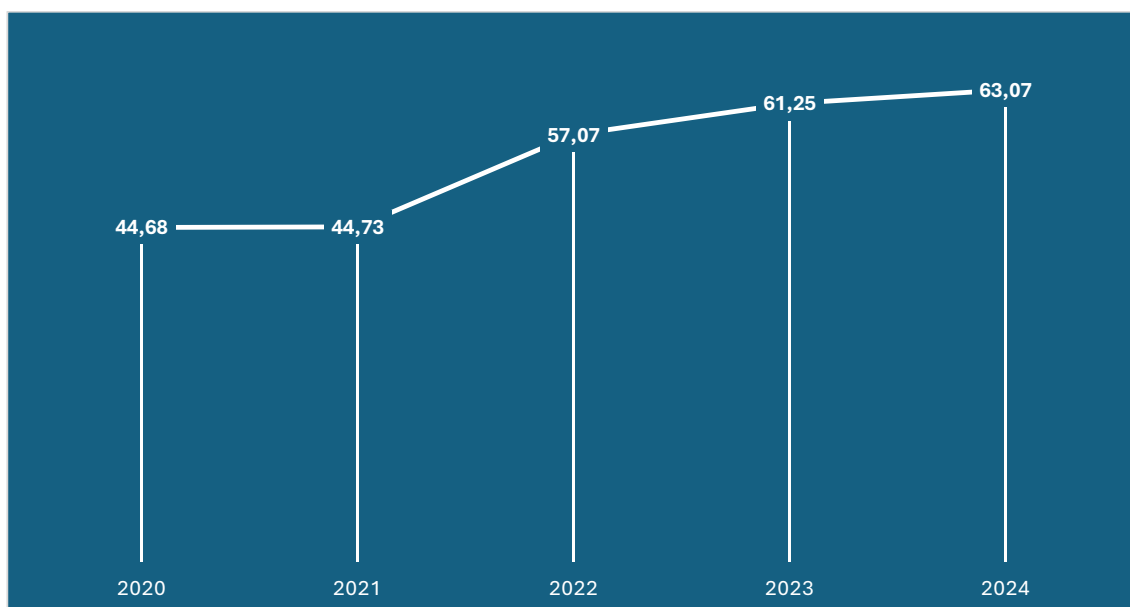
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka 44,68 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44,73. Meskipun peningkatan di awal tergolong lambat, namun lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian indeks sebesar 57,07. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Sarmi.

Perkembangan positif terus berlanjut pada tahun 2023, di mana indeks meningkat menjadi 61,25. Tren ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya penguatan ketahanan pangan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak nyata. Kemudian, pada tahun 2024, indeks kembali mengalami kenaikan hingga mencapai angka 63,07, yang menandakan semakin kokohnya ketahanan pangan di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi meningkat sebesar 18,39 poin. Hal ini menjadi bukti bahwa program-program penguatan sektor pertanian, pengembangan sistem distribusi pangan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah.

Gambar II.5

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

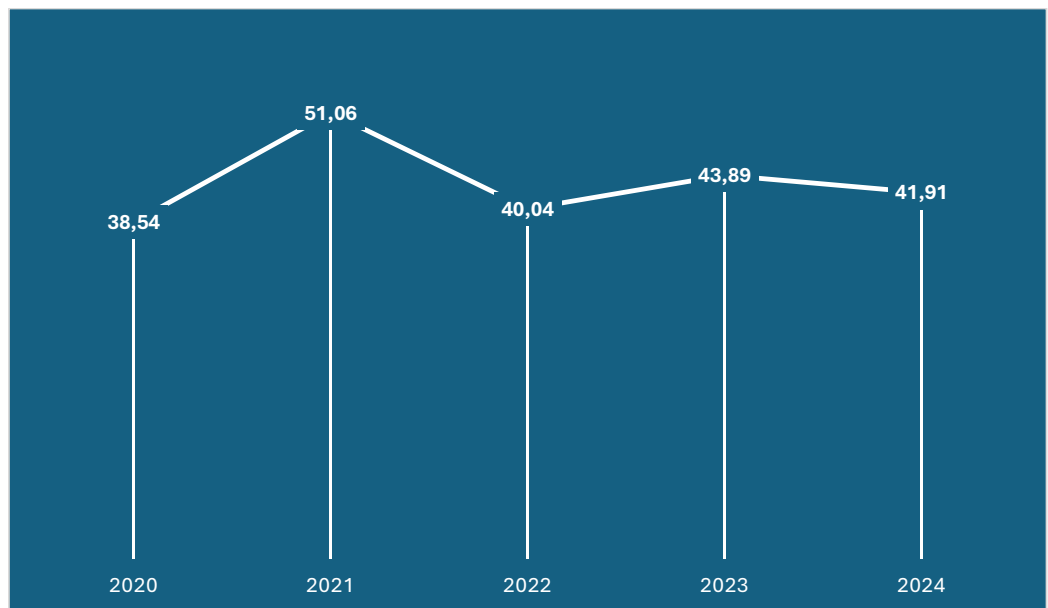
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment / PoU) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk dalam suatu wilayah yang tidak mendapatkan cukup asupan energi pangan (kalori) untuk memenuhi kebutuhan minimum harian guna menjalani kehidupan yang sehat dan aktif.

Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Sarmi dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan tren yang mencerminkan masih rentannya ketahanan pangan masyarakat. Pada tahun 2020, angka ketidakcukupan pangan berada pada level 38,54 persen dan melonjak pada tahun 2021 menjadi 51,06 persen, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19

terhadap akses dan distribusi pangan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, angka ini kembali naik menjadi di tahun 2023, sebelum sedikit menurun ke 41,91 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen penduduk Kabupaten Sarmi masih belum memiliki akses pangan yang cukup dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun aksesibilitas pangan, untuk menurunkan angka ketidacukupan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

Gambar II.6

**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Sarmi
Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sarmi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, seperti Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat yang meningkat dari 947 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 1.007 pelanggan pada tahun 2022. Begitu pula dengan Kecamatan Bonggo yang mencatatkan kenaikan dari 1.312 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 1.359 pelanggan pada tahun 2022.

Kecamatan Sarmi yang memiliki jumlah pelanggan terbesar, tercatat 4.898 pelanggan pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 5.261 pada tahun 2022. Di sisi lain, Kecamatan Sarmi Selatan mengalami peningkatan signifikan dari 502 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 852 pelanggan pada tahun 2022.

Tabel II.10

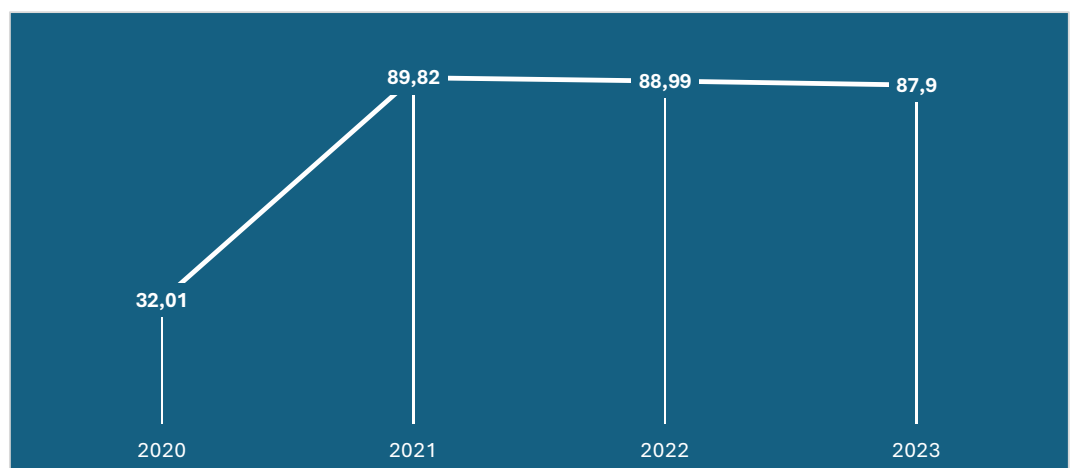
**Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi,
2020-2024**

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pantai Timur Bagian Barat	947	995	1,007
2	Pantai Timur	766	756	767
3	Sungai Biri	-	-	-
4	Veen	-	-	-
5	Bonggo	1,312	1,321	1,359
6	Bonggo Timur	730	789	803
7	Bonggo Barat	-	-	-
8	Tor Atas	-	-	-
9	Ismari	-	-	-
10	Sarmi	4,898	5,047	5,261
11	Sarmi Timur	452	476	486
12	Sarmi Selatan	502	759	852
13	Sobey	-	-	-
14	Muara Tor	-	-	-
15	Verkam	-	-	-
16	Pantai Barat	312	317	324
17	Apawer Hulu	-	-	-
18	Apawer Hilir	-	-	-
19	Apawer Tengah	-	-	-
20	Total Sarmi	9,919	10,46	10,859

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sarmi mengalami perubahan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 tercatat 32,01% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak. Namun, kondisi ini membaik secara drastis pada tahun 2021 dengan capaian 89,82%, yang kemudian relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 88,99% pada tahun 2022 dan 87,9% pada tahun 2023. Secara umum, tren sejak 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, menandakan adanya upaya yang berhasil dalam memperluas akses air minum layak bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

Gambar II.7

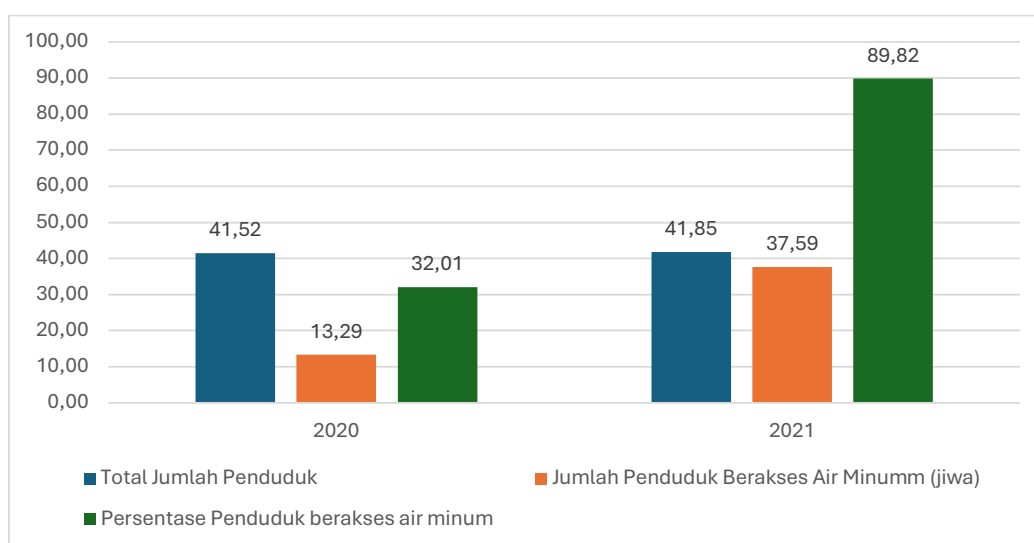
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Sarmi 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

Air minum merupakan kebutuhan primer bagi Masyarakat selain makan dan pakaian. Ketersediaan air minum harus diperhatikan dari segi kuantitas maupun kualitas, sebab hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum yang sehat dan dalam jumlah yang cukup. Persentase penduduk kabupaten sarmi yang memiliki akses air dijelaskan pada Gambar II.8.

Gambar II.8
Persentase Penduduk Kabupaten Sarmi Berakses Air Minum Tahun 2020-2021

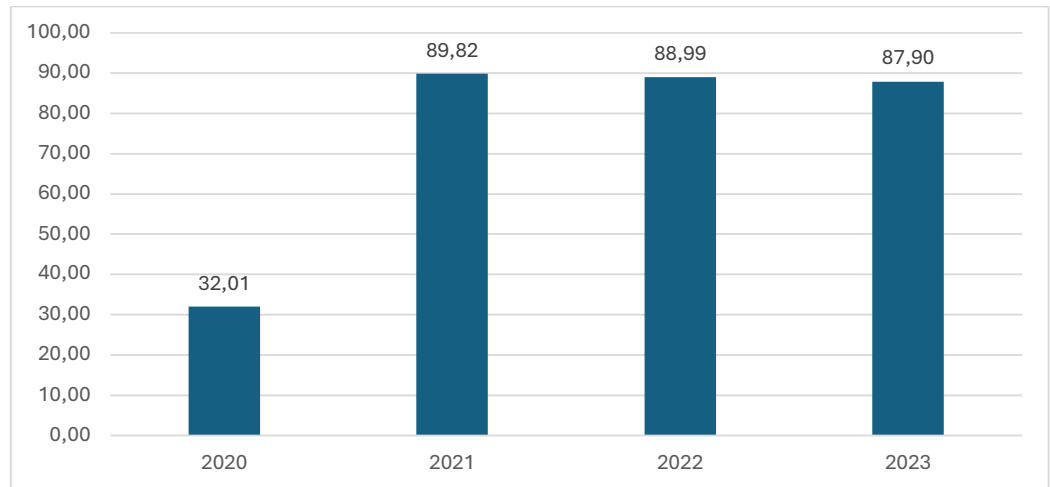


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum pada tahun 2020 hanya sebesar 32,01%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak sedikit penduduk dari total penduduk Kabuapten Sarmi yang memiliki akses air minum. Kemudian jumlah penduduk kabupaten sarmi tahun 2021 adalah sebanyak 41.849 Jiwa, persentase penduduk yang memiliki akses air minum terjadi peningkatan yakni menjadi 89,82%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki akses air minum mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 37.589 Jiwa dari total jumlah penduduk Kabuapten Sarmi.

Ketersediaan air minum yang layak untuk dikonsumsi merupakan salah satu kebutuhan pokok Masyarakat yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah. Pemerintah harus menyediakan sarana air minum layak yang dapat diakses oleh Masyarakat setempat, sebab ketersediaan sarana air minum layak yang memadai merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup Masyarakat.

Gambar II.9
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



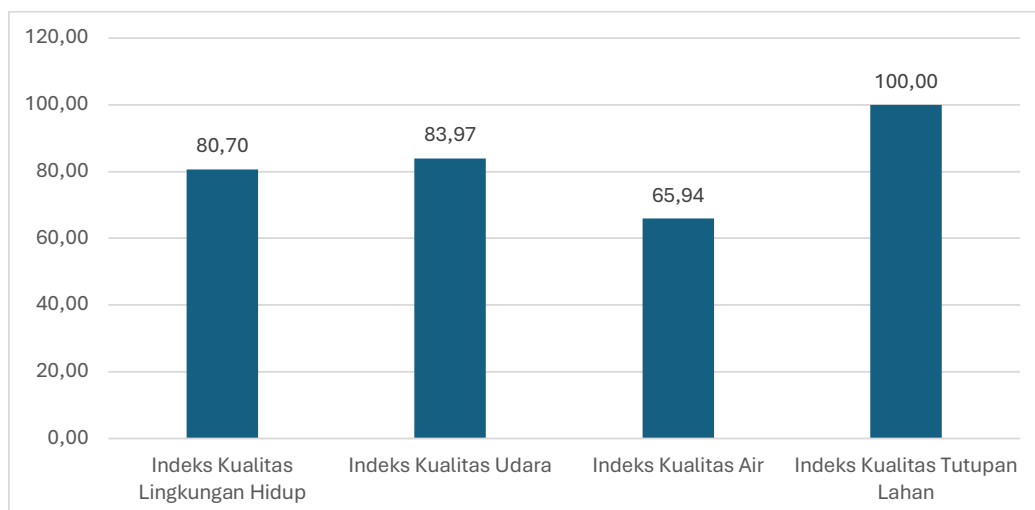
Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sarmi secara umum mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, hanya 32,01% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, mencerminkan kondisi keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Namun, lonjakan drastis terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 89,82%, yang menandakan adanya percepatan pembangunan layanan air minum layak. Tren ini relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 88,99% pada 2022 dan 87,90% pada 2023. Peningkatan akses yang signifikan sejak 2021 mengindikasikan kemajuan penting dalam pelayanan publik, namun penurunan bertahap dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta jangkauan layanan air minum layak di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Gambar II.10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2023

Setelah diketahui nilai indeks dari setiap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka selanjutnya ditentukan kategori angka rentang sebagai berikut:

Kategori Sangat Baik: $90 \leq x \leq 100$

Kategori Baik: $70 \leq x < 90$

Kategori Sedang: $50 \leq x < 70$

Kategori Kurang: $25 \leq x < 50$

Kategori Sangat Kurang: $0 \leq x < 25$

Berdasarkan kategori angka rentang ini, maka dapat disimpulkan bahwa kategori Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) masuk dalam kategori Sangat Baik, Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masuk dalam kategori Baik, dan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masuk dalam kategori Sedang. Secara keseluruhan, terlihat bahwa nilai IKLH, IKU, dan IKA Kabupaten Sarmi masih berada di bawah nilai indeks Provinsi Papua.

Tabel II.11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

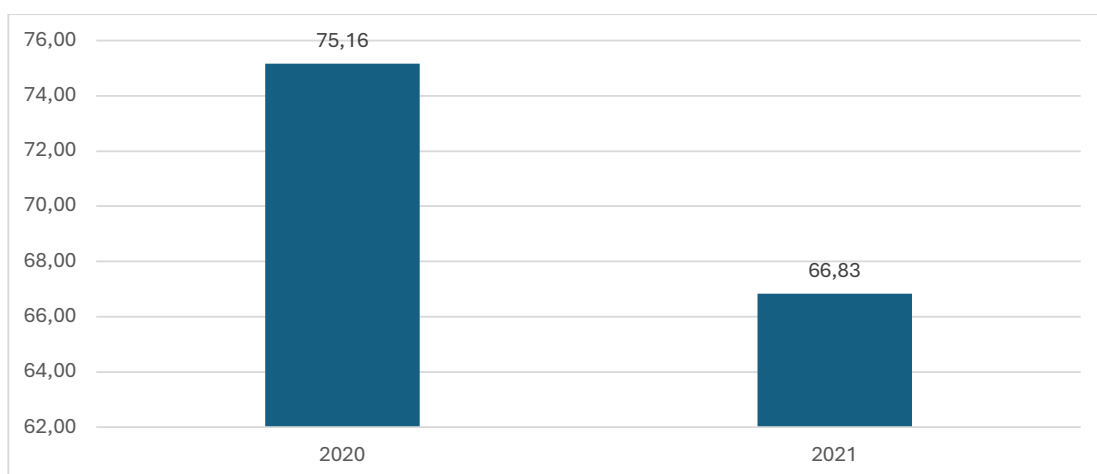
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				80,70	
Indeks Kualitas Air (IKA),				65,94	
Indeks Kualitas Udara (IKU) dan				83,97	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).				100,00	

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Menurut Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS), sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2023, ada beberapa kriteria sanitasi disebut layak: (i) kloset menggunakan leher angsa; (ii) tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau septic tank; dan (iii) tempat pembuangan akhir tinja ada instalasi/sistem pengolahan air limbah (IPAL/SPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Sarmi sejak tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan angka yang terus meningkat, namun angka yang rendah seperti dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar II.11

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Sanitasi Layak di Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2021



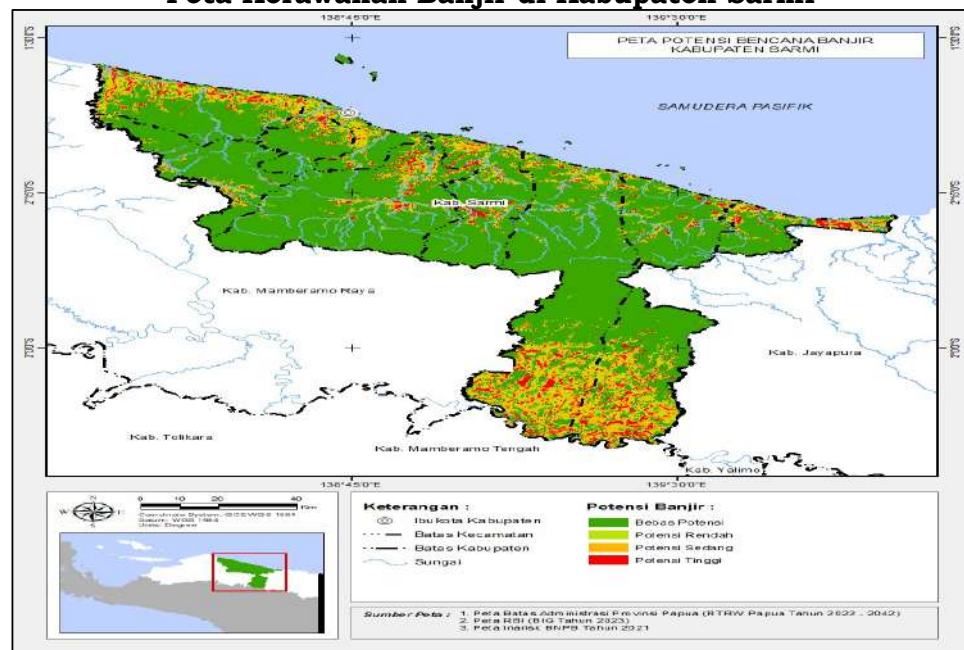
Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber sanitasi layak di Kabupaten Sarmi mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat bahwa 75,16% rumah tangga telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kelayakan. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut menurun menjadi 66,83%, yang menunjukkan adanya penurunan cakupan layanan sanitasi layak di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali akses terhadap sanitasi yang aman dan layak guna mendukung kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

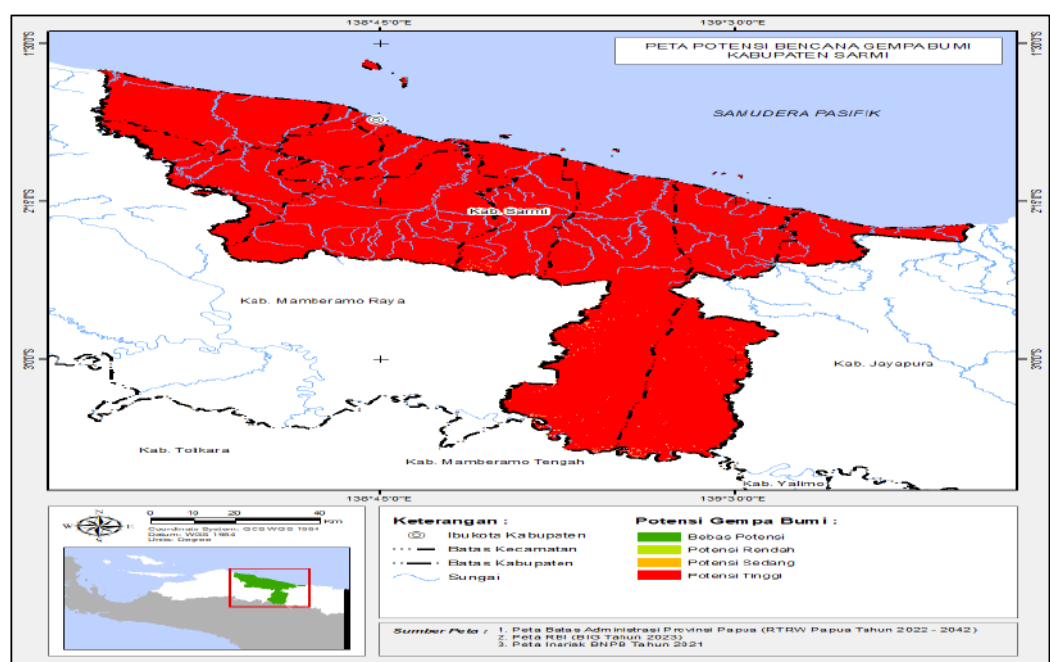
Kabupaten Sarmi merupakan wilayah yang memiliki potensi terjadinya bencana alam. Hal ini berdasarkan kondisi bentang alam Kabupaten Sarmi merupakan wilayah yang rawan terjadi beberapa bencana alam seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa dan lain-lain. Berdasarkan hasil identifikasi potensi bencana di Kabupaten Sarmi, beberapa wilayah yang dianggap rawan terjadi bencana alam seperti dijelaskan pada Gambar di bawah ini.

Gambar II.12
Peta Kerawanan Banjir di Kabupaten Sarmi



Sumber : Sumber : Hasil Olahan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Sarmi tahun 2025

Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Sarmi



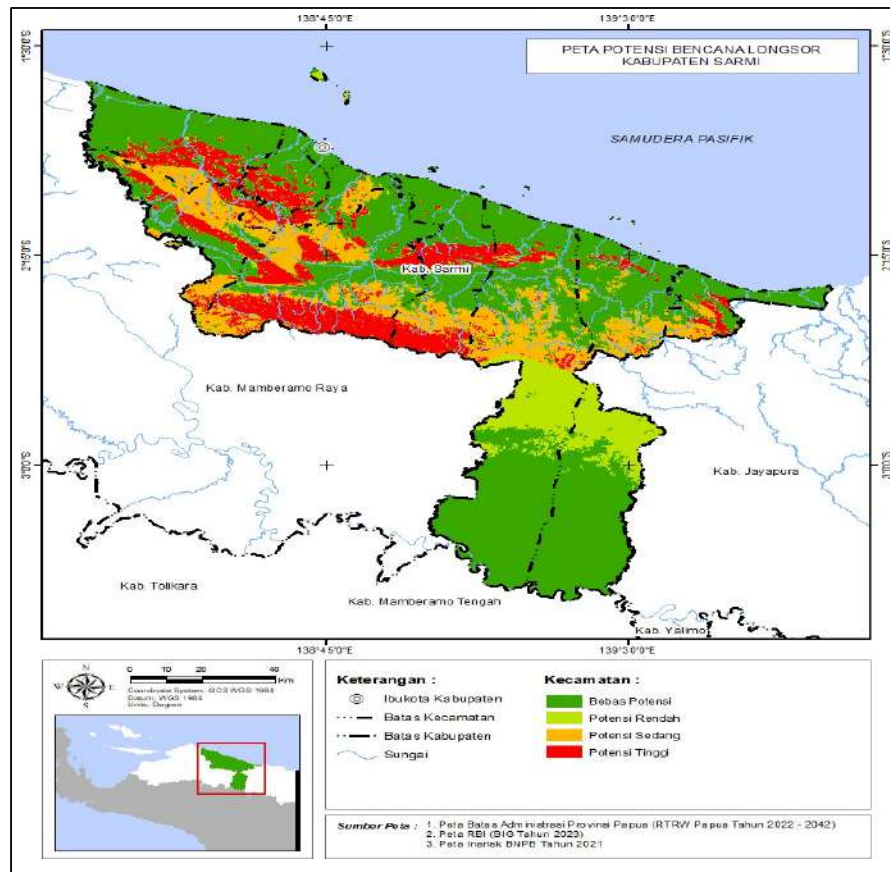
Sumber: Hasil olahan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Sarmi termasuk wilayah yang rawan akan terjadi beberapa bencana alam lainnya, misalnya gerakan tanah, rawan gempa. Adapun peta wilayah yang memiliki potensi terjadinya bencana alam gerakan tanah dan gempa bumi, seperti dijelaskan pada Gambar di atas.

Beberapa wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana berupa banjir akibat luapan atau peningkatan volume air Sungai merupakan wilayah yang berada di kawasan sepanjang daerah aliran sungai. Beberapa wilayah yang berada pada Kawasan daerah aliran Sungai mencakup Ditrik Bonggon Timur, Ditrik Bonggo, Ditrik Pantai Timur Barat, Ditrik Sarmi Timur, Ditrik Sarmi Sealatan, Ditrik Sarmi, dan Ditrik Pantai Barat. Demikian juga wilayah lainnya dengan kondisi kelerengan $\geq 40\%$, merupakan Kawasan yang rawan terjadi tanah longsor, termasuk daerah dengan tutupan vegetasi sangat kurang merupakan wilayah rawan terjadi bencana alam tersebut. Wilayah tersebut mencakup Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Barat, Distrik Apawer Hulu, Distrik Sarmi Selatan, dan Distrik Bonggo Timur. Adapun peta potensi daerah yang rentang terhadap bencana longsor diilustrasikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar II.13

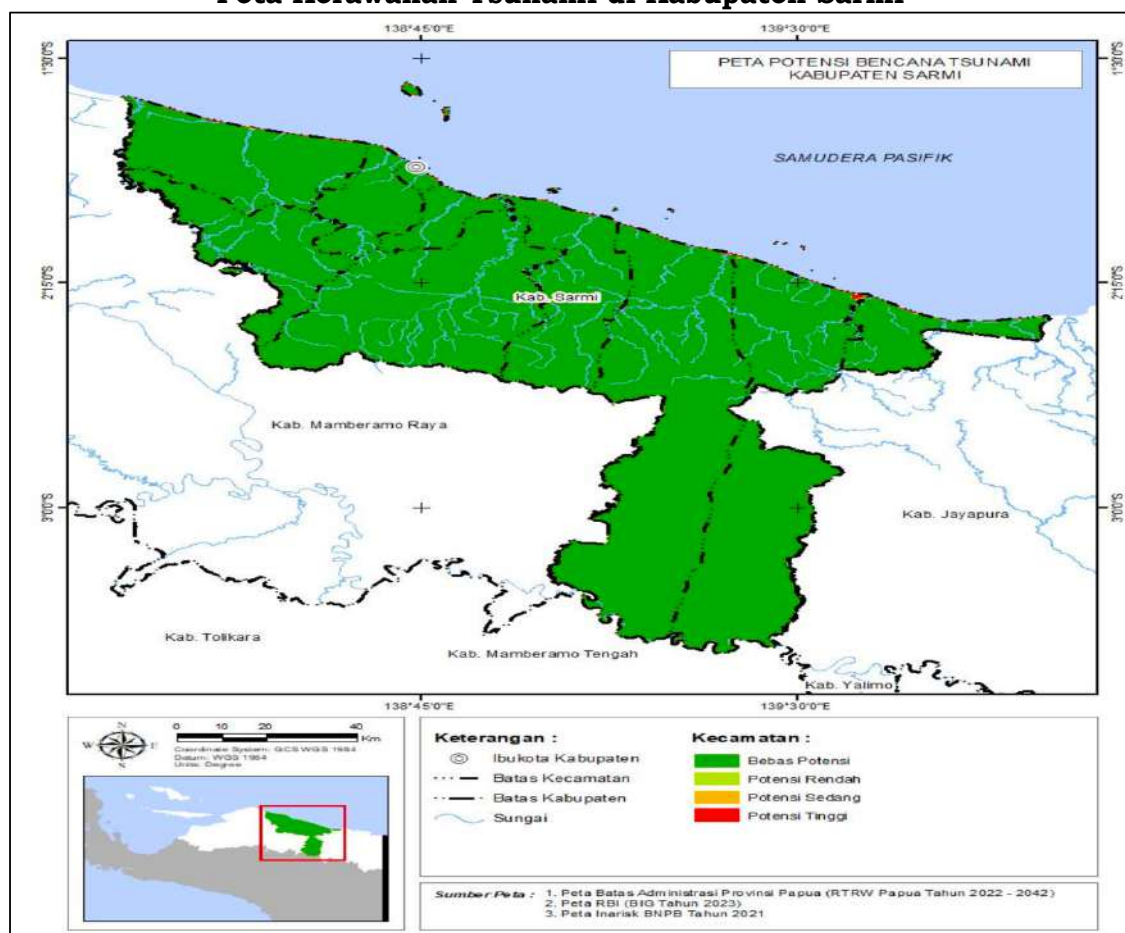
Peta Kerawanan Longsor di Kabupaten Sarmi



Sumber: Hasil Analisa POKJA KLHS Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sarmi mencakup wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan kondisi ini maka secara geografis Kabupaten Sarmi termasuk wilayah yang rentan terjadi bencana alam tsunami. Wilayah yang rentan terhadap bencana alam tsunami seperti dijelaskan pada Gambar di bawah ini mencakup Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Sarmi Timur, Distrik Tor Atas, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Kota, Distrik Pantai Barat, dan sebagian Distrik Apawer Hulu.

Gambar II.14
Peta Kerawanan Tsunami di Kabupaten Sarmi



Sumber: Hasil Analisa POKJA KLHS Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sarmi dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang tergolong tinggi, dengan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 171,60, yang mencerminkan tingkat risiko bencana yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.

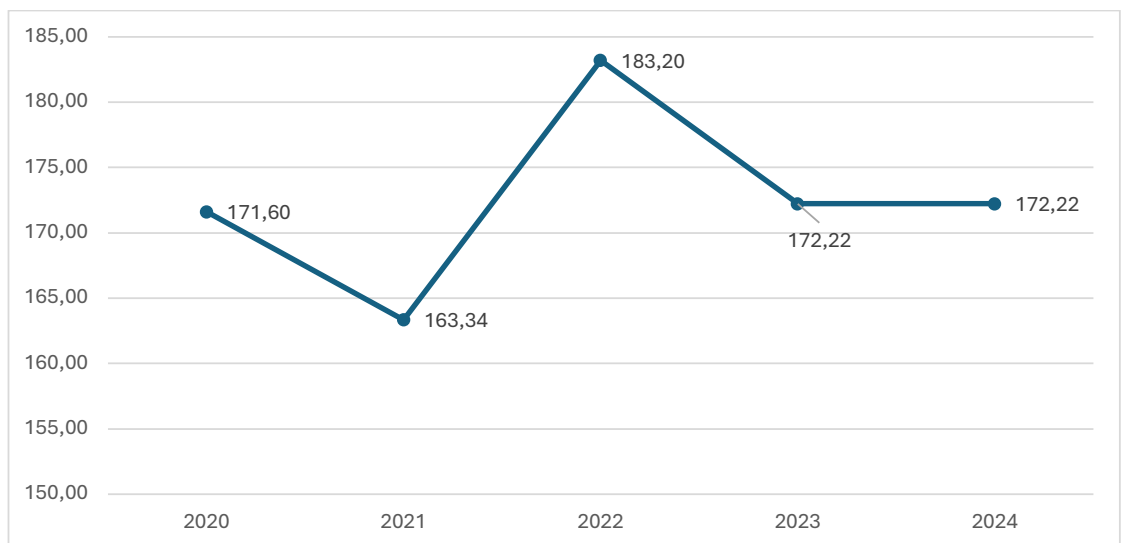
Pada tahun 2021, terjadi penurunan indeks menjadi 163,34, yang mengindikasikan adanya perbaikan atau penguatan terhadap kapasitas penanggulangan bencana maupun pengurangan risiko di beberapa sektor.

Namun demikian, pada tahun 2022, nilai indeks kembali meningkat cukup signifikan menjadi 183,20, menjadikan tahun tersebut sebagai periode dengan risiko tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya potensi kejadian bencana, keterbatasan mitigasi risiko, atau kerentanan yang masih tinggi di masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024, indeks risiko bencana menurun kembali ke angka 172,22, yang meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, masih menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi berada pada kategori risiko bencana yang tinggi. Konsistensi nilai indeks dalam dua tahun terakhir menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penguatan sistem mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana perlu menjadi prioritas guna menurunkan indeks risiko bencana secara berkelanjutan dan menjamin keselamatan serta ketahanan wilayah Kabupaten Sarmi terhadap berbagai potensi bencana.

Gambar II.15

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2025

2.1.1.7 Demografi

Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sarmi pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif melambat dibandingkan awal periode. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,25%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,95%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, di

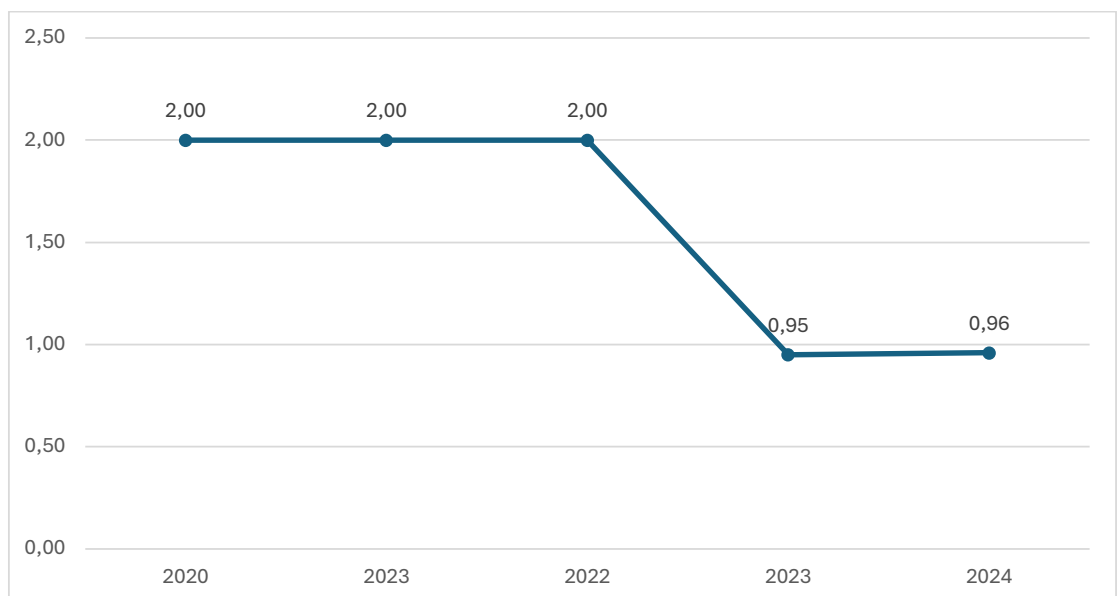
mana laju pertumbuhan kembali menurun menjadi 0,14%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk meningkat kembali menjadi 0,95%, dan stabil di angka 0,96% pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit kenaikan dalam dua tahun terakhir, secara umum data ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sarmi cenderung melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sarmi ditunjukkan pada Gambar di bawah ini sebagai bagian dari evaluasi dinamika demografi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Gambar II.16

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



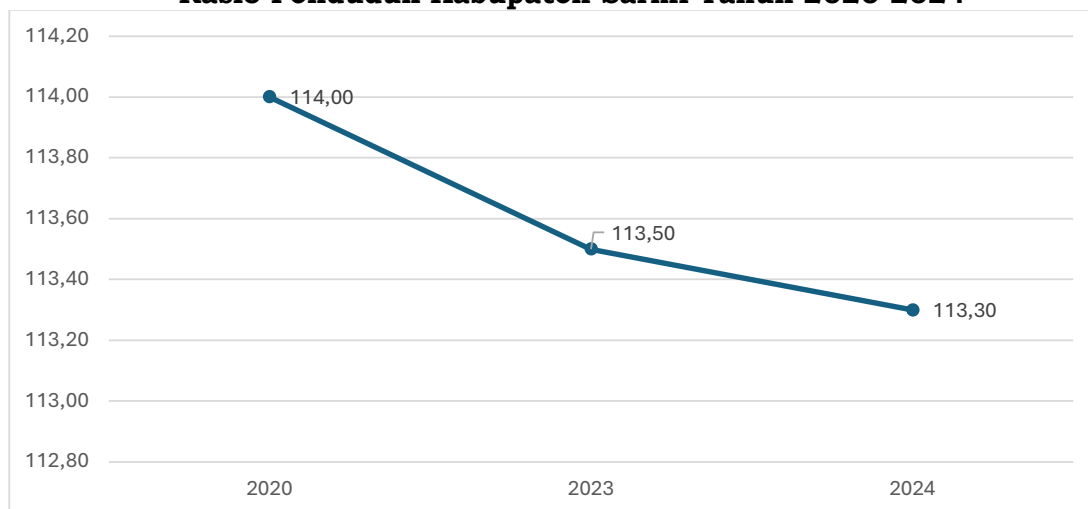
Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2025

Rasio Penduduk

Rasio penduduk Kabupaten Sarmi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio penduduk tercatat sebesar 114,00, kemudian mengalami penurunan menjadi 113,50 pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024, rasio penduduk kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 113,30.

Rasio penduduk ini mencerminkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Penurunan yang terjadi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan distribusi penduduk yang semakin seimbang antara laki-laki dan perempuan. Meskipun perubahannya relatif kecil, hal ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan dasar yang berbasis pada kebutuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Gambar II.17
Rasio Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



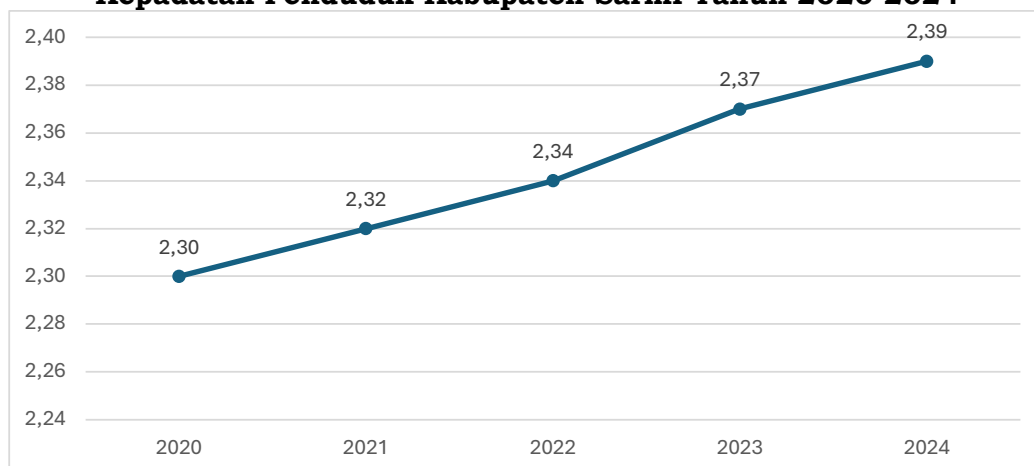
Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2025

Kepadatan penduduk Kabupaten Sarmi selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan angka 2 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan ini tercatat tetap pada tahun 2020, 2023, dan 2024, yang mencerminkan karakteristik wilayah Sarmi sebagai daerah dengan tingkat hunian yang rendah dan penyebaran penduduk yang tersebar luas.

Kondisi kepadatan penduduk yang rendah ini mencerminkan luas wilayah Kabupaten Sarmi yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, serta masih dominannya kawasan hutan dan wilayah non-permukiman. Stabilitas angka kepadatan penduduk juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap daya dukung lahan dan lingkungan. Hal ini menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kepadatan Penduduk

Gambar II.18
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Sarmi dalam Angka 2020-2024

Kepadatan penduduk Kabupaten Sarmi menunjukkan tren peningkatan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 2,30 jiwa per kilometer persegi, dan secara bertahap meningkat menjadi 2,39 jiwa/km² pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan karakteristik wilayah Kabupaten Sarmi yang luas dengan persebaran penduduk yang masih sangat jarang, serta menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk relatif stabil dan belum memberikan tekanan berarti terhadap daya dukung ruang dan layanan dasar di wilayah tersebut. Angka ini tetap perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan aksesibilitas antarwilayah di daerah dengan kepadatan rendah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sarmi menurut lapangan usaha menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang mencerminkan perubahan volume produksi barang dan jasa di setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Analisis ini penting untuk memahami sektor-sektor mana yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah serta mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam struktur ekonomi Kabupaten Sarmi.

Tabel II.12

**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Sarmi 2020-2024**

No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	-1,07	-1,64	0,01	2,22	-0,92
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	1,35	1,16	1,83	2,63	0,35
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	0,29	0,91	1,81	2,28	1,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	4,32	6,86	4,98	9,42	2,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	1,24	2,21	2,74	3,19	3,95
F	Konstruksi / Construction	0,07	3,79	3,85	3,11	5,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,88	4,71	6,68	6,7	6,19
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	-14,28	-5,9	17,98	6,56	5,99

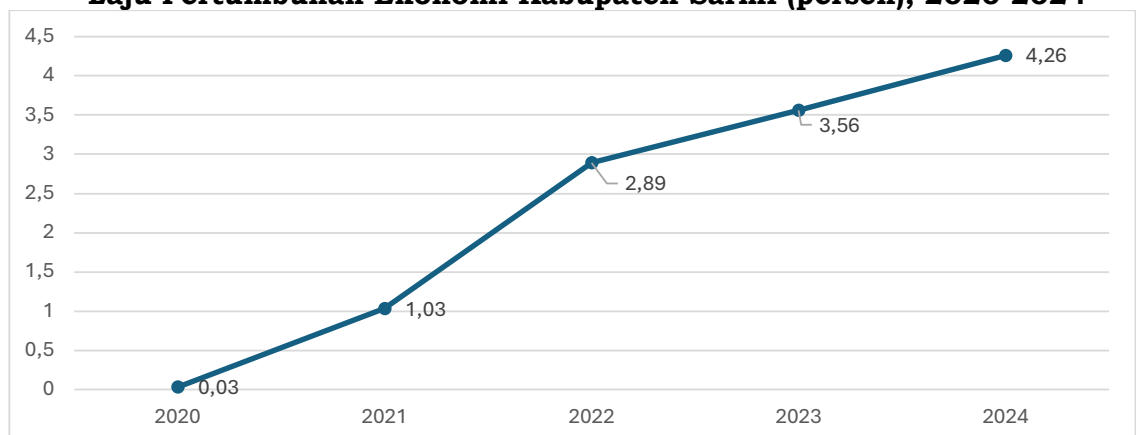
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	4,38	5,01	6,27	8,85	6,4
J	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	10,85	7,65	5,42	0,86	8,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	1,76	2,18	2,22	1,01	5,68
L	Real Estat / Real Estate Activities	2,75	3,56	4,74	7,24	7,84
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	5,46	4,35	4,43	2,2	3,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,5	-0,54	-1,12	3,29	8,63
P	Jasa Pendidikan / Education	3,17	1,07	3,81	3,2	5,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	10,36	6,46	1,62	2,91	6,88
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Services Activities	4,21	3,47	4,37	4,19	6,85
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		0,03	1,03	2,89	3,56	4,26

Sumber : BPS Kabupaten Sarmi 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang konsisten, mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19. Dimulai dari angka yang sangat rendah pada tahun 2020 sebesar 0,03 persen, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 1,03 persen di tahun 2021 dan terus naik menjadi 2,89 persen pada 2022, menandakan pulihnya aktivitas ekonomi.

Tren ini berlanjut dengan pertumbuhan sebesar 3,56 persen pada 2023 dan mencapai 4,26 persen di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam mempercepat pembangunan ekonomi, terutama melalui penguatan sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa, yang mulai menunjukkan kinerja yang lebih kompetitif dan produktif. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten ini menjadi indikator penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ke depan yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar II.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarmi (persen), 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2025

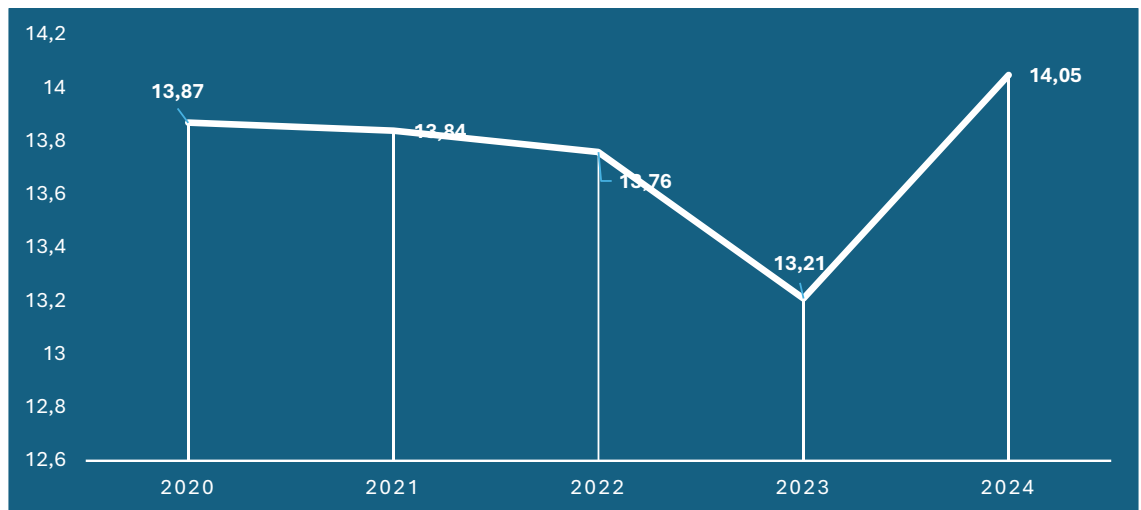
Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarmi selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 13,87 persen, kemudian mengalami penurunan kecil pada tahun 2021 menjadi 13,84 persen. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana angka kemiskinan turun menjadi 13,76 persen, dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 13,21 persen. Pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan angka kemiskinan menjadi 14,05 persen. Kenaikan ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan agar program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan.

Gambar II.20

Angka Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Tabel II.13
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Sarmi, 2020–2024

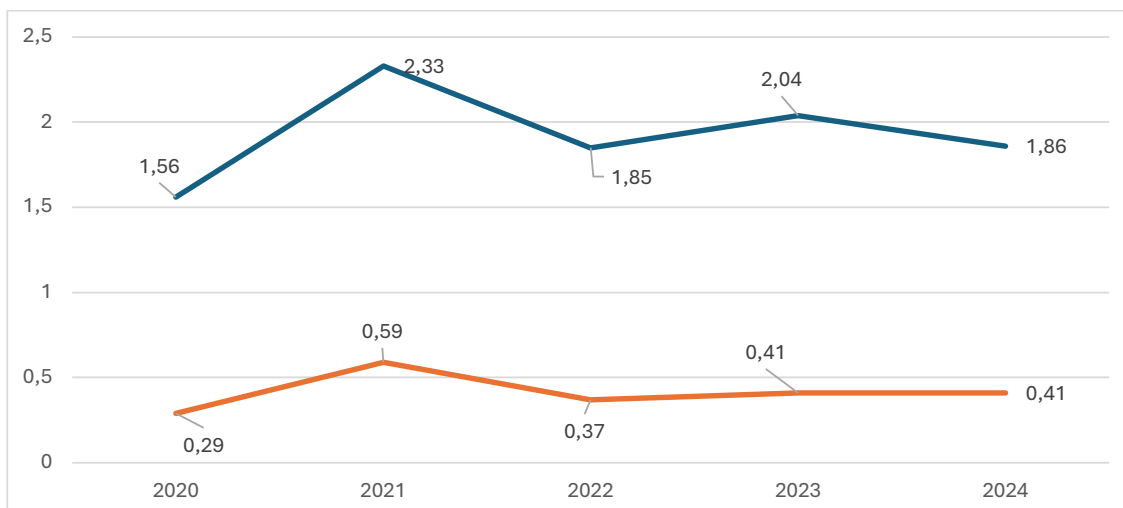
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	535.586	5,70	13,87
2021	554.491	5,56	13,84
2022	584.626	5,60	13,76
2023	633.124	5,45	13,21
2024	653.436	5,87	14,05

Sumber : Kabupaten Sarmi Dalam Angka, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Sarmi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dari Rp535.586 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp653.436 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Setelah sempat menurun dari 5,70 ribu orang pada 2020 menjadi 5,45 ribu orang pada 2023, jumlah tersebut kembali meningkat pada 2024 menjadi 5,87 ribu orang. Kenaikan jumlah penduduk miskin di tengah peningkatan garis kemiskinan menunjukkan adanya tekanan daya beli yang dialami sebagian masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Gambar II.21
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sarmi Tahun
2020-2024 (dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Gambar di atas menunjukkan Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sarmi sepanjang tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang naik turun. Pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan berada pada angka 1,56 persen, kemudian mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 2,33 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks ini kembali mengalami penurunan menjadi 1,85 persen, namun meningkat kembali menjadi 2,04 persen di tahun 2023, dan menurun sedikit menjadi 1,86 persen di tahun 2024. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mulai menyempit, meskipun fluktuasi tetap terjadi dalam periode tersebut.

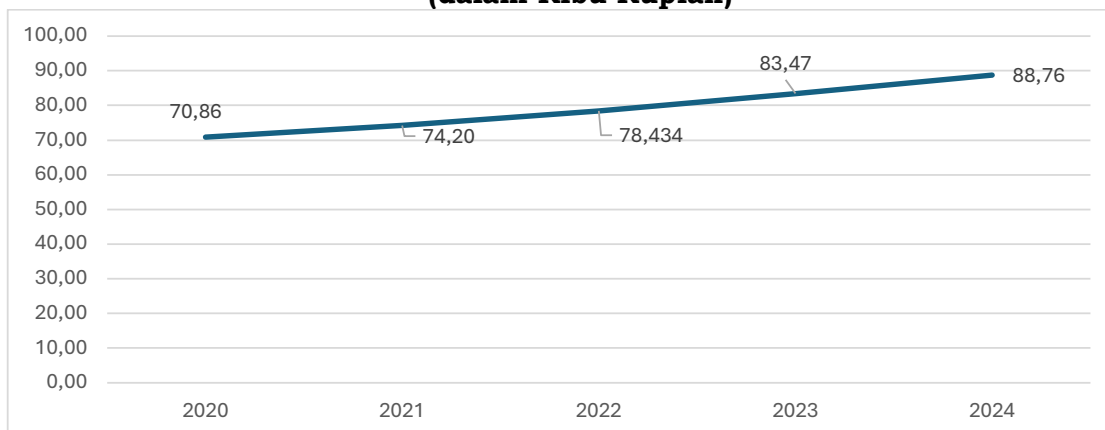
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index - P2) memberikan gambaran mengenai tingkat penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2024 juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 0,29 persen, naik menjadi 0,59 persen pada tahun 2021, lalu menurun ke 0,37 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, indeks ini relatif stabil di angka 0,41 persen.

Tahun 2020 tetap menjadi tahun dengan capaian Indeks Keparahan Kemiskinan terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2019) yang mencapai 0,95 persen, turut dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan kontraksi besar terhadap sektor ekonomi, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pandemi juga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, yang tergambarkan melalui menurunnya pendapatan per kapita. Kejadian pandemi ini berimplikasi besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga memengaruhi pola pendapatan dan belanja rumah tangga secara menyeluruh.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah.

Gambar II.22
PDRB Perkapita Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024
(dalam Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten Sarmi selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp70,86 juta, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp74,20 juta pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp78,43 juta, dan meningkat kembali menjadi Rp83,47 juta pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Sarmi mencapai Rp88,76 juta.

Kenaikan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif serta peningkatan kontribusi rata-rata pendapatan masyarakat terhadap perekonomian daerah. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan daya saing ekonomi lokal, yang didukung oleh perbaikan infrastruktur, peningkatan investasi daerah, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Tingkat Pengangguran Terbuka

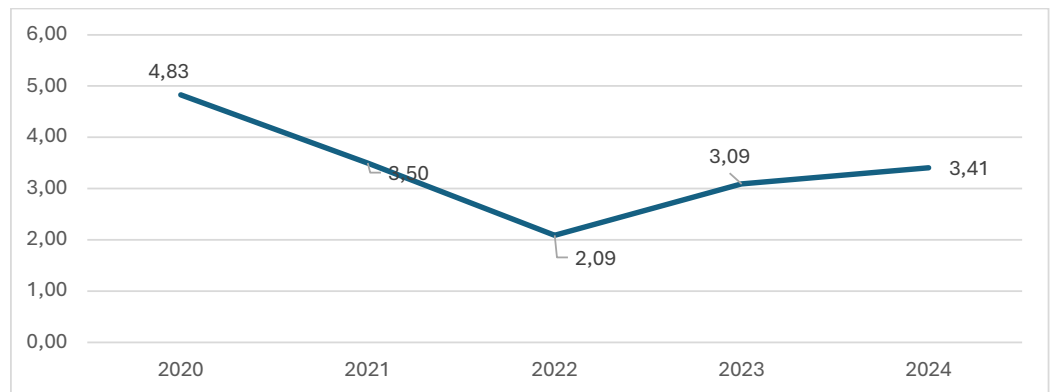
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menggambarkan besarnya persentase angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja. TPT yang tinggi menunjukkan masih terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarmi pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,83 persen. Angka ini mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 3,50 persen, dan mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan angka 2,09 persen. Artinya, pada tahun tersebut hanya sekitar dua orang dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Namun demikian, TPT kembali meningkat menjadi 3,09 persen pada

tahun 2023 dan mengalami sedikit kenaikan lagi di tahun 2024 menjadi 3,41 persen.

Perubahan TPT selama lima tahun terakhir mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sarmi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, program penyerapan tenaga kerja, dan dampak pemulihan pasca pandemi. Meskipun demikian, tren jangka panjang masih menunjukkan arah yang relatif positif dengan TPT yang lebih rendah dibandingkan awal periode.

Gambar II.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024
(dalam %)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Pengangguran sering kali mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemiskinan, ketika pengangguran meningkat akan diikuti pula dengan peningkatan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, pengurangan angka kemiskinan akan berhasil apabila lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang ada, terutama pada sektor-sektor padat karya dan menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk digolongkan penduduk miskin.

Pemerintah Kabupaten Sarmi perlu memperhatikan sektor-sektor padat karya yang ada sehingga dapat mendorong terserapnya tenaga kerja dan akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran.

Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

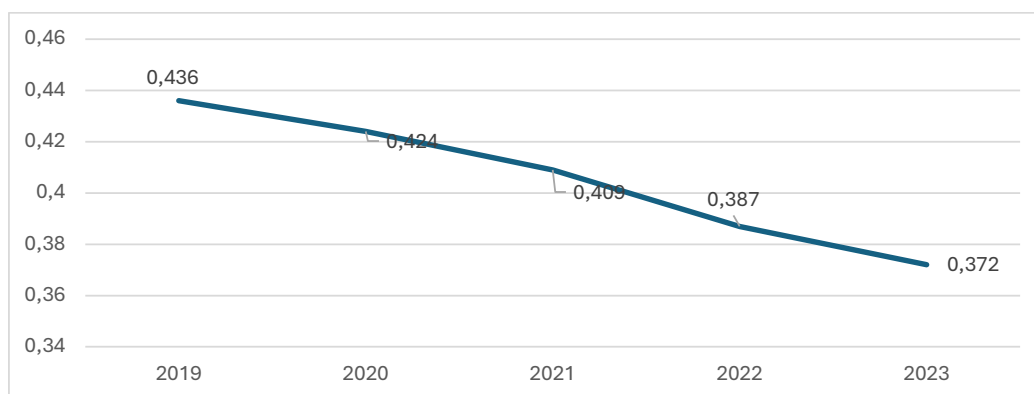
Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks

Indeks Gini Kabupaten Sarmi selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan membaiknya distribusi pengeluaran penduduk. Pada tahun 2019, nilai Indeks Gini tercatat sebesar 0,436, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,424 pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 0,409 pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 0,387 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 0,372.

Penurunan nilai Indeks Gini ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Sarmi cenderung semakin mengecil. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan telah menunjukkan hasil yang positif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, nilai Indeks Gini yang masih berada di atas 0,35 menandakan bahwa ketimpangan masih tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Gambar II.24

Indeks Gini Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

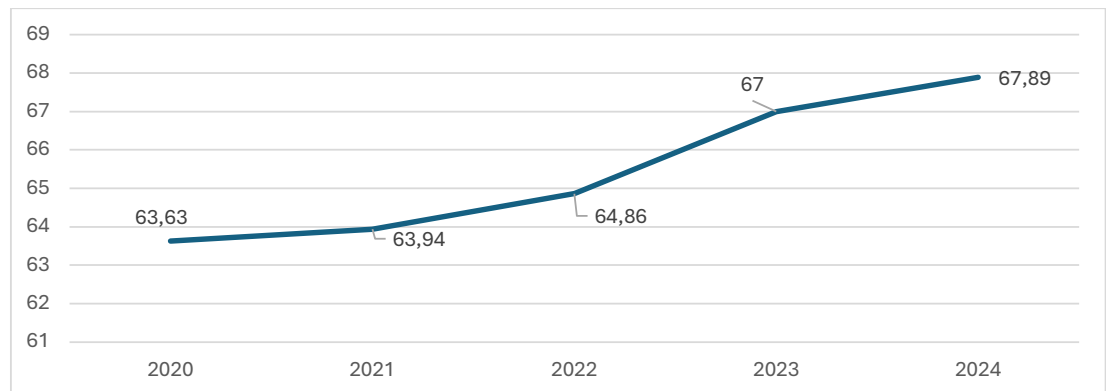
Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).

Terdapat tiga dimensi atau Indikator pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Gambar II.25

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Sarmi tercatat sebesar 63,63 poin. Kemudian, angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 63,94 poin dan pada tahun 2022 menjadi 64,86 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Sarmi meningkat lagi menjadi 67,00 poin dan pada tahun 2024 mencapai 67,89 poin.

Peningkatan IPM ini menggambarkan kemajuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli di Kabupaten Sarmi. Meskipun mengalami tren peningkatan, IPM Kabupaten Sarmi masih berada dalam kategori "sedang" menurut skala internasional yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai IPM yang lebih tinggi.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan di Kabupaten Sarmi mencakup seluruh penduduk sepanjang siklus hidup mereka meliputi semua kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sarmi, baik laki-laki maupun perempuan. Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di daerah ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari usia dini hingga lanjut usia, di seluruh

wilayah Kabupaten Sarmi. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial, dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan menjalani hidup sehat.

Usia Harapan Hidup

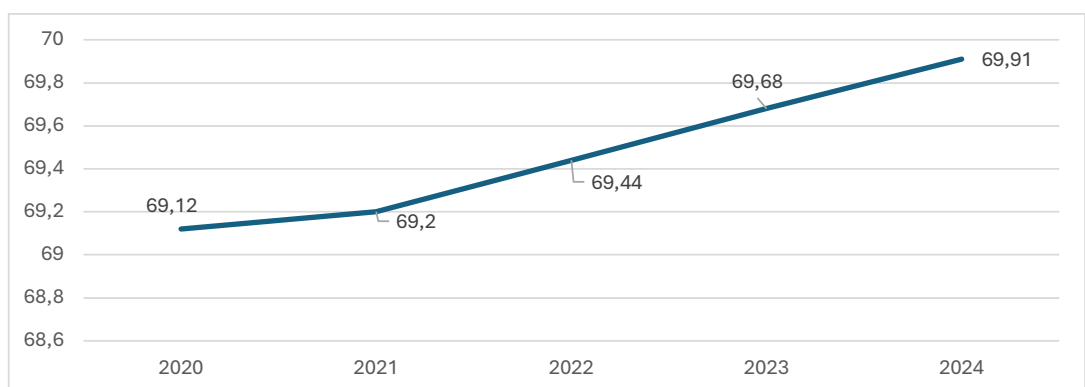
Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dijadikan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan masyarakat.

Capaian Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sarmi sepanjang tahun 2020–2024 cenderung menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, Angka Usia Harapan Hidup tercatat sebesar 69,12 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2024 mencapai 69,91 tahun. Artinya, harapan hidup seorang bayi yang lahir di Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai usia hampir 70 tahun.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sarmi mengalami perbaikan yang signifikan sepanjang periode tersebut. Capaian ini tidak lepas dari peran serta layanan kesehatan yang semakin baik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta, serta semakin mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, peningkatan kesadaran penduduk dalam menjaga kesehatan juga turut berkontribusi terhadap membaiknya kualitas hidup secara umum.

Gambar II.26

Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Keterangan:

- [Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

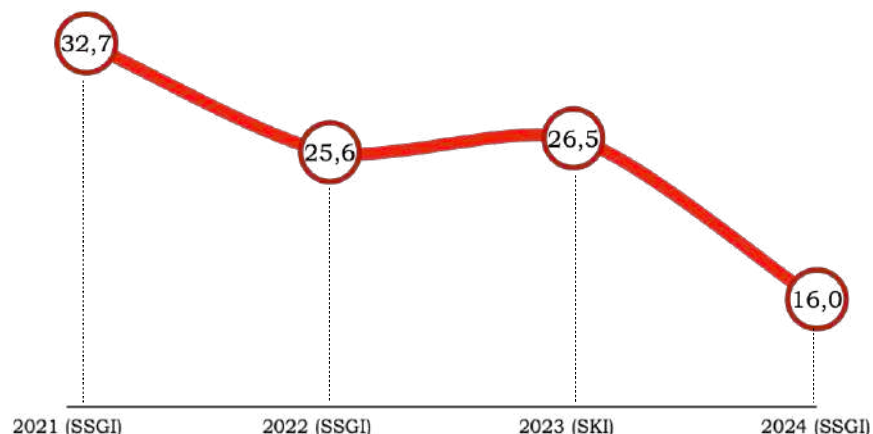
Indeks Keluarga Sehat

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Sarmi selama periode 2021-2022 menunjukkan perubahan yang cukup naik turun. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting mencapai hingga angka 32,7%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut sebelum turun pada tahun 2022 menjadi 25,6%.

Perubahan ini mencerminkan dinamika berbagai faktor yang memengaruhi kondisi gizi anak di Kabupaten Sarmi, seperti akses terhadap makanan bergizi, sanitasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan gizi seimbang. Penurunan angka stunting pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan intervensi dan program penanggulangan stunting yang dijalankan pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Namun demikian, angka tersebut masih berada di atas ambang batas standar nasional, sehingga upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Gambar II.27
Prevalensi Stunting Kabupaten Sarmi Tahun 2021-2024



Sumber : data SSGI tahun 2021-2024

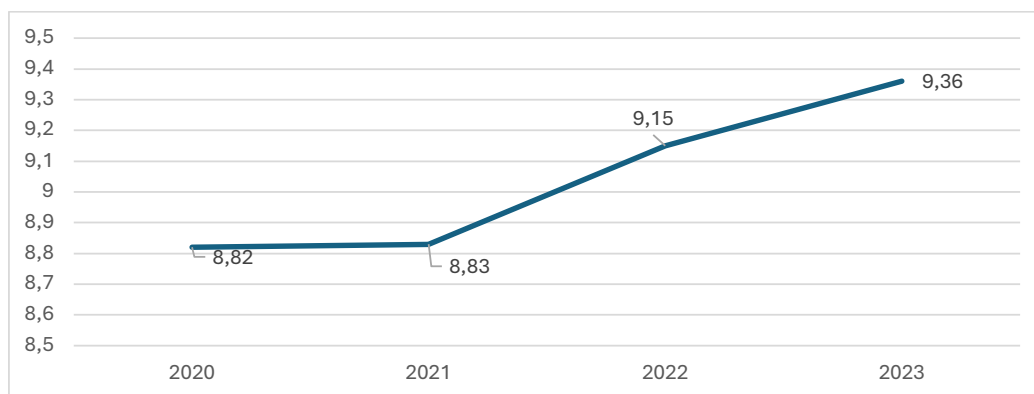
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah (RLS) dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Gambar II.28

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sarmi sepanjang tahun 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih belum mencapai target program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,82 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 9,36 tahun pada tahun 2023. Artinya, rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Sarmi telah menempuh pendidikan setara dengan kelas IX atau tahun terakhir jenjang SMP.

Peningkatan ini menjadi sinyal positif bagi sektor pendidikan di Kabupaten Sarmi, yang mencerminkan membaiknya akses, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Namun, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk belum dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta pemerataan layanan pendidikan masih perlu terus diperkuat. RLS yang lebih tinggi akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh..

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Angka ini mencerminkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menikmati pendidikan formal, dan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

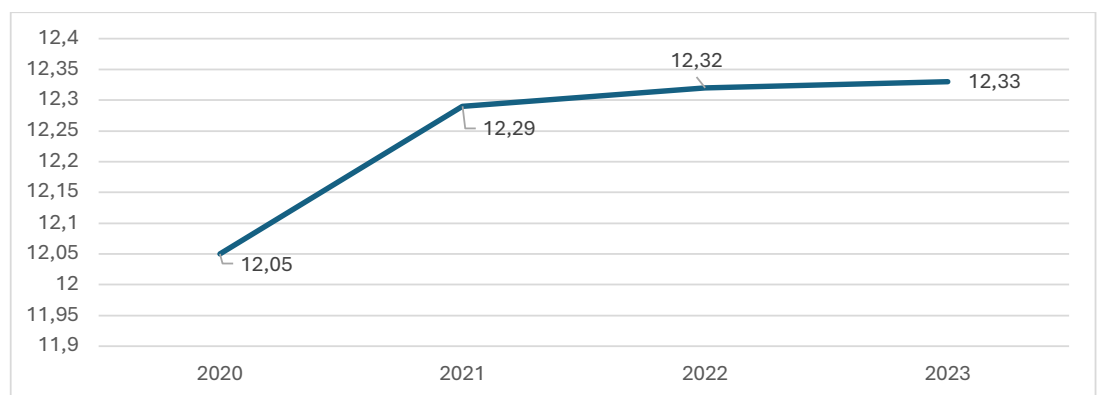
Selama lima tahun terakhir, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sarmi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, HLS tercatat sebesar 11,81 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 12,33

tahun pada tahun 2023. Artinya, secara rata-rata, seorang anak usia 7 tahun di Kabupaten Sarmi yang memulai pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk menempuh pendidikan selama 12,33 tahun, atau setara dengan menyelesaikan jenjang pendidikan hingga lulus SMA/SMK atau setara.

Capaian ini menggambarkan kemajuan yang positif dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sarmi. Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masih perlu menjadi perhatian, agar capaian HLS tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar yang berkelanjutan.

Gambar II.29

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



Keterangan:

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2025

Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi mencerminkan kemampuan dasar masyarakat dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran sepanjang hayat dan sangat menentukan keberhasilan dalam jenjang pendidikan formal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Sarmi, peningkatan literasi dan numerasi menjadi bagian penting dari pembangunan sektor pendidikan, mengingat kondisi geografis dan tantangan akses pendidikan yang masih dihadapi sebagian wilayah. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengakses informasi, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang mengukur ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya literasi seperti perpustakaan, buku, serta program pembelajaran nonformal.

Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan budaya literasi di luar pendidikan formal. Di Kabupaten Sarmi, penguatan pembangunan literasi masyarakat menjadi penting untuk menjembatani keterbatasan akses pendidikan formal di beberapa distrik. Melalui dukungan fasilitas seperti taman bacaan masyarakat, kegiatan literasi berbasis komunitas, dan penguatan peran perpustakaan daerah, diharapkan minat baca dan budaya belajar masyarakat Sarmi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara cerdas, kritis, dan etis. Hal ini mencakup pemahaman terhadap penggunaan perangkat digital, keamanan data, etika bermedia, serta kemampuan berpikir kritis dalam mengakses informasi daring. Bagi Kabupaten Sarmi, peningkatan literasi digital menjadi salah satu kunci penting dalam memperkecil kesenjangan informasi dan memperluas akses terhadap pendidikan serta layanan publik. Dengan penguatan literasi digital, masyarakat Sarmi dapat lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan sosial.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja menjadi bagian penting dari perlindungan sosial yang adaptif, karena memberikan jaminan bagi pekerja terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau masa pensiun. Di Kabupaten Sarmi, peningkatan cakupan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan jaminan keberlanjutan hidup bagi tenaga kerja, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, perkebunan, dan sektor ekonomi lokal lainnya. Upaya perlu terus dilakukan agar lebih banyak pekerja terlindungi oleh skema jaminan sosial yang tersedia.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks ini menggambarkan kondisi hubungan antarumat beragama yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. Di Kabupaten Sarmi yang memiliki keberagaman suku dan agama, menjaga kerukunan umat beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan hidup yang damai. Upaya penguatan nilai-nilai toleransi dan interaksi sosial

yang positif antarumat beragama terus menjadi prioritas dalam pembangunan sosial budaya di daerah ini.

Tempat ibadah atau rumah ibadah merupakan sarana social yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten sarmi agar semua Masyarakat dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua dalam Angka 2023, agama Isalm, Protestan, Katolik dan Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sarmi. Sebagian besar atau 70,78% penduduk Kabupaten Sarmi menganut kepercayaan Kristen protestan. Dengan demikian dibutuhkan ketersediaan rumah ibadah bagi semua penganut agama di Kabupaten Masyarakat, jumlah rumah ibadah di Kabupaten Sarmi diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel II.14
Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk di Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Ibadah	Rasio Tempat Ibadah Per 1000 Penduduk
2020	41.515	178	1 : 233
2021	41.849	178	1 : 235
2022	42.233	178	1 : 237

Sumber : BPS Provinsi Papua, Data diolah 2023

Rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Sarmi selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan yang semakin melebar, meskipun jumlah tempat ibadah tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebanyak 41.515 jiwa dan 178 tempat ibadah, rasio tercatat 1 tempat ibadah untuk setiap 233 penduduk. Seiring pertumbuhan penduduk, rasio ini menjadi 1 : 235 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 1 : 237 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan rohani masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan atau penambahan jumlah tempat ibadah belum mengalami peningkatan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pelayanan keagamaan yang inklusif dan merata di Kabupaten Sarmi.

Indeks ini mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, pemajuan seni, bahasa daerah, serta peran masyarakat dalam aktivitas kebudayaan. Kabupaten Sarmi yang kaya akan budaya lokal dan tradisi khas Papua memiliki potensi besar dalam memajukan pembangunan berbasis kearifan lokal. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

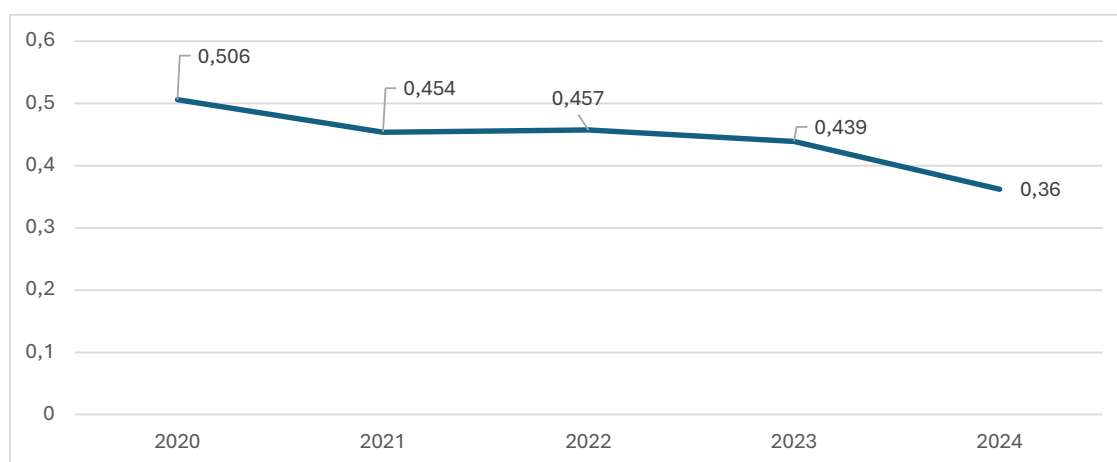
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ini menunjukkan sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial. Di Kabupaten Sarmi, upaya pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender menjadi bagian penting dari pembangunan inklusif. Kesetaraan gender akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah secara aktif.

Gambar II.30

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Sarmi menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,506, kemudian menurun menjadi 0,454 pada 2021, dan sedikit meningkat menjadi 0,457 di tahun 2022. Namun, tren penurunan kembali berlanjut pada tahun 2023 dengan indeks sebesar 0,439, hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 0,360. Penurunan nilai IKG ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi maupun politik semakin mengecil, serta menunjukkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses terhadap berbagai kesempatan pembangunan.

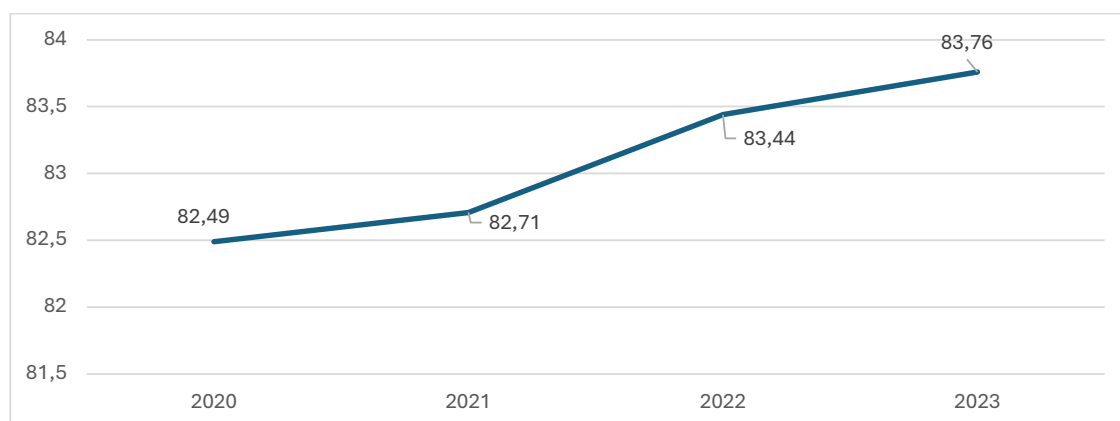
Indeks Pembangunan Gender

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 82,49%, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 82,71%. Tren positif ini terus berlanjut dengan capaian 83,44% pada tahun 2022, hingga mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 83,76% pada tahun 2023.

Kenaikan IPG ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Peningkatan yang stabil ini menjadi sinyal positif bahwa Kabupaten Sarmi semakin berhasil mendorong peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, serta mengurangi kesenjangan gender yang masih ada.

Gambar II.31

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



Keterangan: menggunakan UHH hasil SP2020 LF), 2022-2023

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

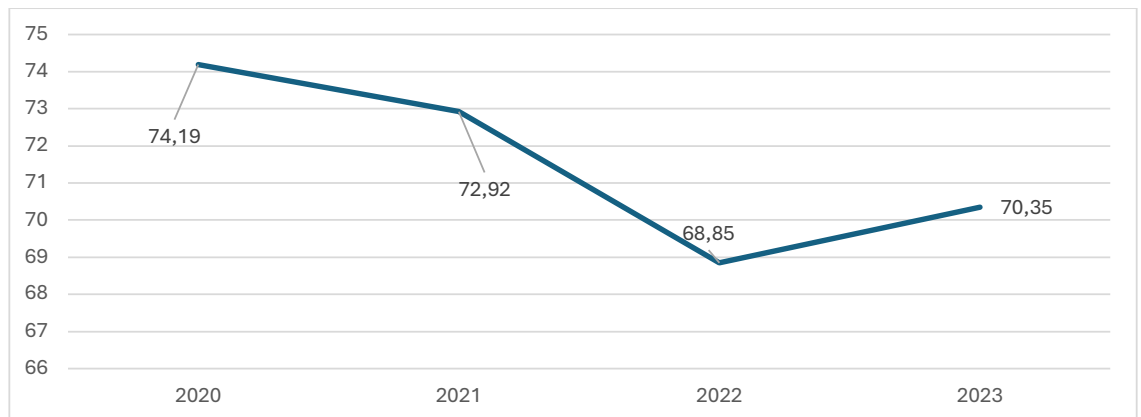
Indeks Pemberdayaan Gender

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2023 menunjukkan tren yang naik turun. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 74,19 persen. Namun, setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022, dengan IPG mencapai angka terendah pada tahun 2022 sebesar 68,85 persen. Di tahun 2023, indeks ini kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 70,35 persen.

Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika dalam keterlibatan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di Kabupaten Sarmi. Penurunan IPG dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi indikasi bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi akses, kesempatan, maupun dukungan lingkungan sosial.

Gambar II.32

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks ini mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, pemajuan seni, bahasa daerah, serta peran masyarakat dalam aktivitas kebudayaan. Kabupaten Sarmi yang kaya akan budaya lokal dan tradisi khas Papua memiliki potensi besar dalam memajukan pembangunan berbasis kearifan lokal. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan

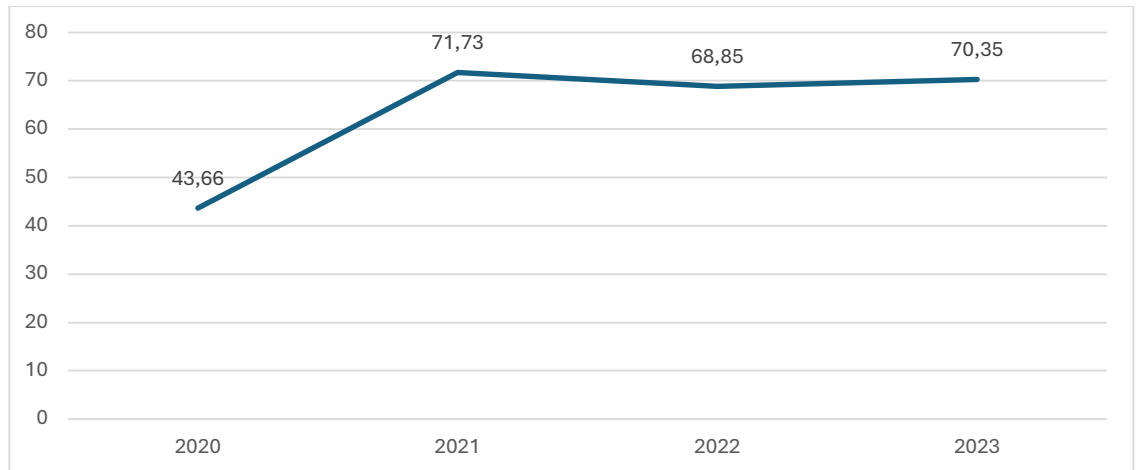
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berusia 0–14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ini menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam mendukung penduduk yang belum atau tidak lagi produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Sarmi selama periode 2020–2023 menunjukkan tren yang naik turun. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 43,66%, kemudian naik menjadi 70,35% pada tahun 2023.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Sarmi semakin besar, dengan peningkatan jumlah penduduk yang tergolong belum produktif (usia 0–14

tahun) dan yang sudah tidak produktif (usia 65 tahun ke atas). Hal ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial-ekonomi, agar dapat memastikan keberlanjutan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar II.33
Angka Ketergantungan Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Dari sisi kontribusi sektoral, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Sarmi masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Setelah itu diikuti oleh sector Konstruksi. Hal ini berarti bahwa mulai terjadi pergeseran dari sector primer pada sector sekunder. Nampak bahwa kontribusi sector pertanian selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, dan sebaliknya terjadi peningkatan pada sector konstruksi setiap tahunnya. Adapun sektor ketiga yang juga mendominasi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel II.15

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sarmi, 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	31,51	30,42	29,63	29,4	27,81
B	Pertambangan dan Penggalan / Mining and Quarrying	1,18	1,16	1,13	1,14	1,09
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	1,86	1,83	1,81	1,78	1,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi / Construction	20,21	20,82	21,19	21,18	21,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	9,16	9,48	9,9	10,15	10,39
H	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	5,24	5,09	5,68	6,01	6,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service Activities	0,65	0,67	0,7	0,75	0,77
J	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	3,1	3,29	3,39	3,43	3,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	1,3	1,33	1,36	1,34	1,35
L	Real Estat / Real Estate Activities	3,27	3,36	3,46	3,57	3,63
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	0,56	0,57	0,58	0,56	0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	15,18	15,09	14,27	13,84	14,37
P	Jasa Pendidikan / Education	2,84	2,76	2,75	2,7	2,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	2,37	2,51	2,52	2,5	2,6
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Services Activities	1,5	1,52	1,54	1,55	1,58
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Papua, 2025

Tabel II.16

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sarmi (miliar rupiah), 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	571,66	562,26	562,34	574,82	569,53
Pertambangan dan Penggalian	26,68	26,99	27,48	29,2	29,3
Industri Pengolahan	39,04	39,39	40,11	41,02	41,57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,71	0,76	0,8	0,87	0,9
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,18	1,21	1,24	1,28	1,33
Konstruksi	347,94	361,12	375,02	386,68	408,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	180,25	188,74	201,35	214,83	228,12
Transportasi dan Pergudangan	94,52	88,95	104,94	111,82	118,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,28	12,9	13,71	14,92	15,87
Informasi dan Komunikasi	59,62	64,18	67,66	68,24	73,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	20,95	21,41	21,88	22,1	23,36
Real Estat	58,88	60,97	63,86	68,49	73,86
Jasa Perusahaan	11,13	11,61	12,12	12,39	12,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	270,39	268,92	265,89	274,65	298,36
Jasa Pendidikan	63,12	63,79	66,22	68,34	72,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,64	48,59	49,38	50,81	54,31
Jasa Lainnya	30,13	31,17	32,54	33,9	36,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1.834,11	1.852,96	1.906,55	1.974,37	2.058,50

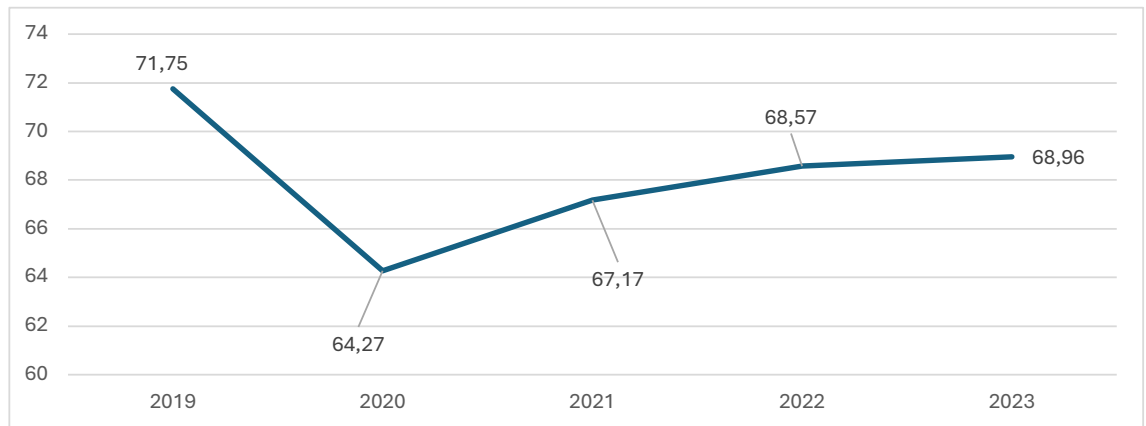
Sumber: BPS Papua, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar II.34

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023



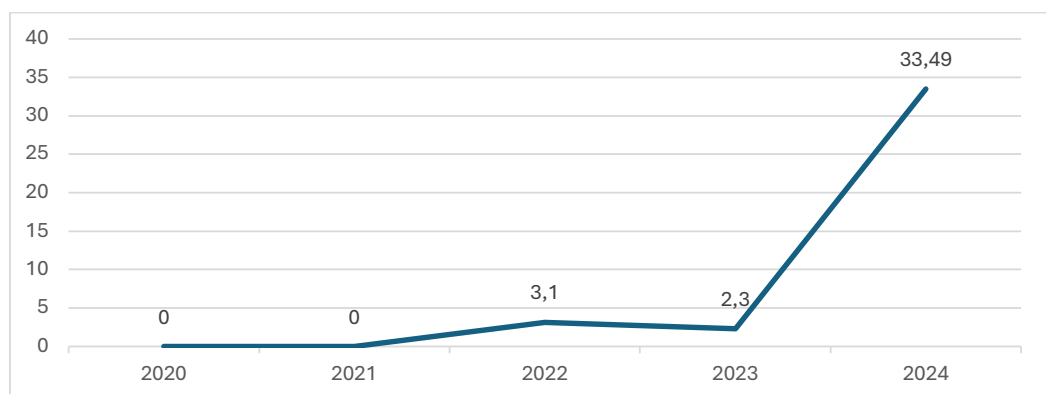
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Gambar di atas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sarmi sepanjang tahun 2018-2022. Presentase TPAK pada tahun 2018 tercatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sarmi adalah sebesar 71,75 persen, angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 64,27 persen, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 68,96 persen. Meskipun mengalami peningkatan tetapi angka tersebut berada lebih rendah di bawah capaian pada tahun 2018. Capaian TPAK berada dalam kisaran atau rata-rata diatas 50%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 50 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu.

Penurunan angka TPAK dapat mengindikasikan bahwa semakin menurunnya jumlah penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif melakukan aktifitas ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa di Kabupaten Sarmi.

Gambar II.35

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024



Sumber : Keputusan Kemendagri Tentang Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Kabupaten Sarmi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan naiknya angka indeks inovasi daerah, walaupun masih berada pada kategori Kurang Inovatif. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks inovasi sebesar 0 sehingga tidak dapat dinilai, yang mencerminkan belum tersedianya data atau minimnya aktivitas inovasi yang dilaporkan secara sistematis. Mulai tahun 2022, Kabupaten Sarmi mulai menunjukkan adanya upaya dalam pengembangan inovasi daerah. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana indeks inovasi melonjak menjadi 33,49, meskipun masih dalam kategori "Kurang Inovatif" menurut klasifikasi Kementerian Dalam Negeri. Masih perlu peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan dokumentasi agar dapat mencapai kategori yang lebih tinggi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Sarmi terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap sektor pembangunan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, perikanan berkelanjutan, hingga konservasi ekosistem pesisir dan laut. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Tabel II.17

Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-1,07	-1,64	0,01	2,22	-0,92
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	31,51	30,42	29,63	29,40	27,81

Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sarmi tercermin dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara umum, terdapat fluktuasi dalam pembangunan ekonomi berbasis lingkungan hidup berkelanjutan di sektor ini. Pada tahun 2020 hingga 2022, sektor

pertanian mengalami tekanan, dengan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -1,07 persen di tahun 2020 dan -1,64 persen di tahun 2021, sebelum mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen di tahun 2022. Pemulihan berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 2,22 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 kembali terjadi perlambatan, di mana sektor pertanian mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,92 persen.

Perubahan angka ini turut memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Kabupaten Sarmi. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 31,51 persen. Namun dalam lima tahun terakhir, terjadi tren penurunan kontribusi, hingga pada tahun 2024 hanya mencapai 27,81 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan strategi pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan lingkungan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sarmi menunjukkan dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,85 persen, menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di tahun tersebut. Namun, tren pertumbuhan menurun terjadi dalam dua tahun berikutnya, yakni 7,65 persen pada 2021 dan 5,42 persen pada 2022. Penurunan ini mencapai titik terendah pada tahun 2023, dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,86 persen. Meskipun demikian, sektor ini kembali menunjukkan pemulihan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 8,40 persen.

Tabel II.18

Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Komunikasi dan Informasi Sarmi 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	10,85	7,65	5,42	0,86	8,40
Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	3,10	3,29	3,39	3,43	3,55

Sumber: Kabupaten Sarmi Dalam Angka, 2025

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap PDRB tercatat sebesar 3,10 persen dan

terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 3,55 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fluktuatif dari sisi pertumbuhan, sektor ini tetap memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran.

Tabel II.19
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Sarmi
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,15	2,83	4,73	3,31	2,20
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,87	48,65	50,29	49,94	48,10
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-54,91	-51,93	-53,01	-53,31	-50,28

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sarmi, terlihat adanya dinamika dalam struktur perekonomian, khususnya pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Kontribusi PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 48,87 persen pada tahun 2020 menjadi 48,10 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi dari komponen PMTB juga mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,73 persen, namun melambat menjadi 2,20 persen pada tahun 2024.

Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB menunjukkan angka negatif yang cukup tinggi, mencerminkan ketergantungan Kabupaten Sarmi terhadap impor barang dan jasa. Pada tahun 2020 kontribusi net ekspor tercatat sebesar -54,91 persen, dan sedikit membaik menjadi -50,28 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya defisit perdagangan yang berkelanjutan, meskipun dengan tren penurunan secara bertahap.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Kabupaten Sarmi masih menghadapi tantangan, khususnya dalam meningkatkan investasi barang modal dan mengurangi ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar daerah.

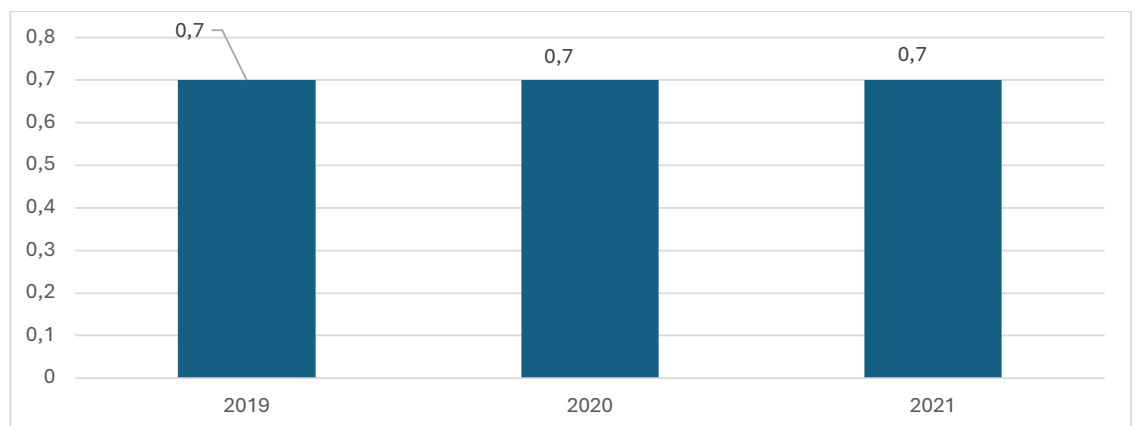
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Sarmi sejak tahun 2019-2021 menunjukkan angka yang tidak mengalami perubahan. Rasio rumah layak huni tahun 2019-2021 adalah sebesar 0,70%. Meskipun demikian, rasio tersebut masih lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 dan 2018 dengan rasio masing-masing sebesar 0,67 dan 0,68. Artinya selama tiga tahun terakhir rasio rumah layak huni menunjukkan angka yang meningkat. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sarmi dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar II.36

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2021 (%)

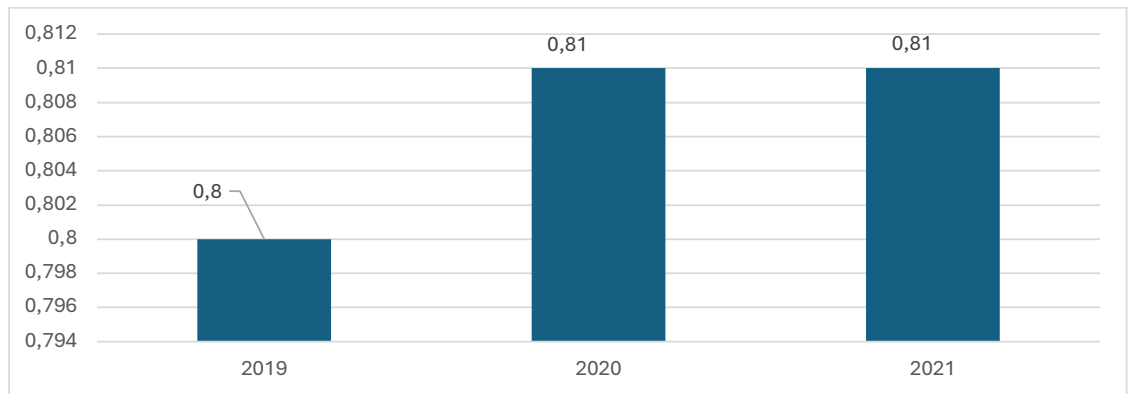


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarmi, 2023

Perkembangan rasio pemukiman layak huni di Kabupaten Sarmi tahun 2019-2021 menunjukkan angka yang cenderung stabil. Rasio rumah layak huni tahun 2019 adalah sebesar 0,80. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan, meskipun pada angka yang tidak signifikan yakni menjadi 0,81. Sedangkan rasio permukiman layak huni tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020, yaitu sebesar 0,81. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Sarmi dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar II.37

Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2021

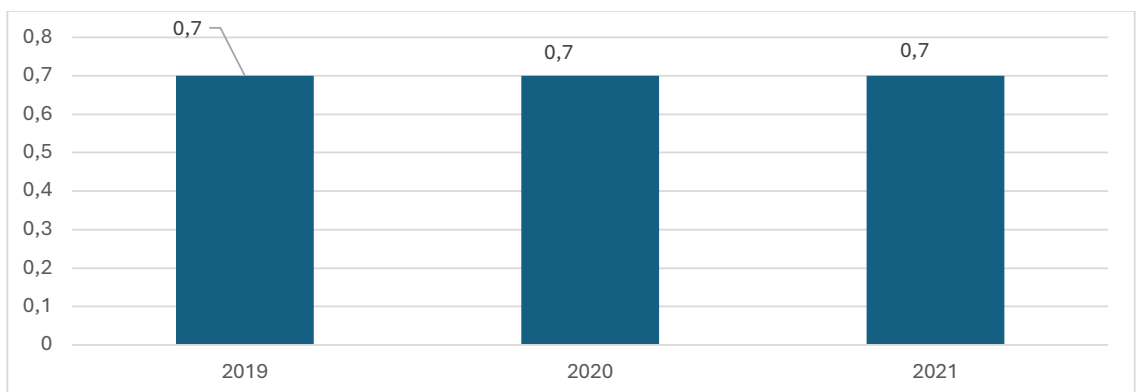


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarmi, 2023

Perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sarmi pada tahun 2019-2021 menunjukkan angka yang stabil atau tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sarmi belum tersedia bagi penduduk sekitar. Rasio cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten sarmi tahun 2019-2021 dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar II.38

Rasio cakupan ketersediaan rumah layak huni di kabupaten sarmi tahun 2019-2021



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarmi, 2023

Persentase Desa Mandiri

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

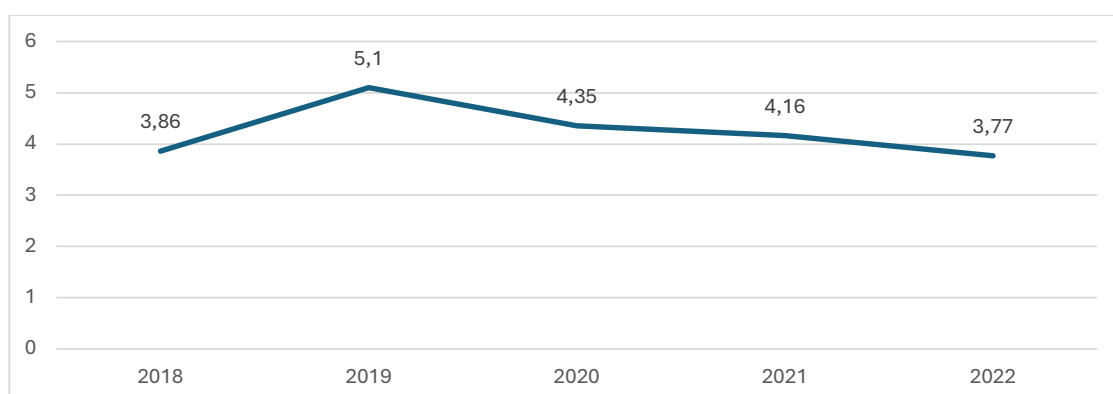
Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Tingkat Inflasi

Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru), atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Gambar II.39 .

Perkembangan Inflasi (Laju PDRB Deflator) Kabupaten Sarmi Tahun 2018-2022 (%)



Berdasarkan data perkembangan inflasi (laju PDRB deflator) Kabupaten Sarmi selama periode 2018–2022, terlihat bahwa laju inflasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, inflasi tercatat sebesar 3,86%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 5,10% pada tahun 2019. Setelah itu, laju inflasi mulai menunjukkan tren penurunan, yakni menjadi 4,35% pada tahun 2020, kemudian turun lagi menjadi 4,16% pada tahun 2021, dan mencapai titik terendahnya dalam lima tahun terakhir pada tahun 2022 dengan angka 3,77%. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat meningkat, inflasi di Kabupaten Sarmi secara umum menunjukkan kecenderungan stabil hingga menurun dalam beberapa tahun terakhir.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sarmi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Acuan utama yang digunakan meliputi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang memuat indikator dan target pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Indeks Reformasi Hukum

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Dalam upaya peningkatan serta menciptakan kondisi pembangunan yang nyaman dan tertib, maka perlu adanya perwujudan stabilitas keamanan daerah.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan baik untuk pelayanan publik maupun pelayanan internal pemerintahan diwujudkan dengan baik. Digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan tidak hanya terfokus pada optimalisasi pelayanan publik, tetapi juga mencakup efisiensi dan efektivitas dalam proses pelayanan internal pemerintahan. Dengan semakin terintegrasinya sistem digital dalam berbagai aspek administrasi dan layanan, Kabupaten Sarmi berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani.

2.1.4.5 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan kondisi pembangunan yang nyaman dan tertib, maka perlu adanya perwujudan stabilitas keamanan daerah.

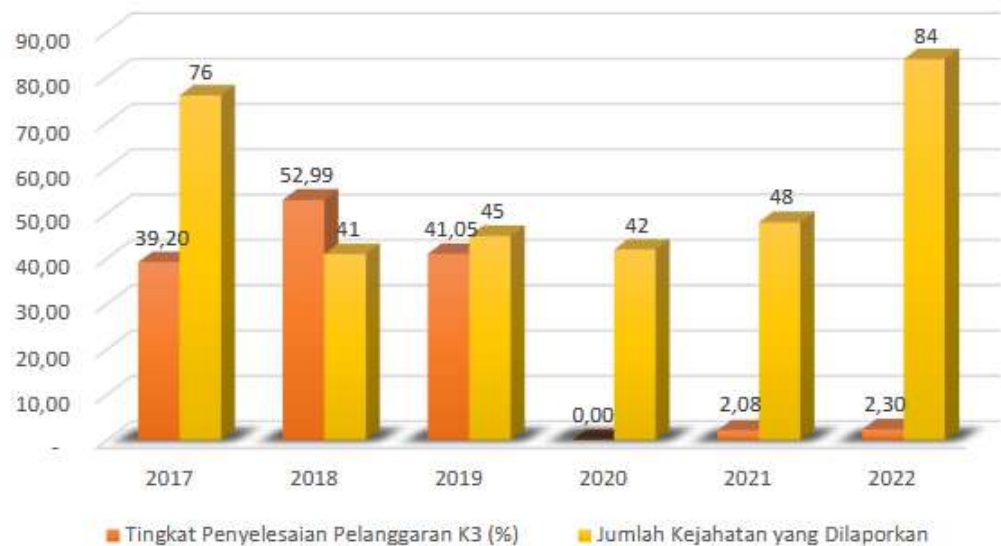
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Jumlah kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi pada tahun 2017-2020 menunjukkan angka yang terus menurun, namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan dengan angka yang sangat signifikan. Seperti dijelaskan pada Gambar 2.81, menunjukkan bahwa jumlah kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi pada tahun 2017 adalah sebanyak 76 kasus, kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 41 kasus. Setelah mengalami penurunan di tahun 2018, jumlah kasus pelanggaran K3 pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan namun dengan angka yang tidak signifikan yakni menjadi 45 kasus. Penurunan jumlah kasus pelanggaran K3 kembali terjadi pada tahun 2020, yakni menjadi 42 kasus. Tahun 2020 merupakan periode waktu dengan jumlah kasus pelanggaran K3 terendah di Kabupaten Sarmi.

Setelah terjadi penurunan jumlah kasus pada tahun 2020, jumlah kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi kembali mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir. Jumlah kasus pelanggaran K3 pada tahun 2021 adalah sebanyak 48 kasus. Meskipun mengalami peningkatan, namun berada pada angka yang tidak signifikan. Sedangkan pada tahun 2022 merupakan periode waktu dengan jumlah kasus pelanggaran K3 dengan peningkatan yang sangat

signifikan. Selain itu, jumlah kasus pelanggaran K3 pada tahun 2022 merupakan periode waktu dengan jumlah kasus tertinggi di Kabupaten Sarmi pada tahun 2017-2022.

Gambar II.40
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi
Tahun 2017-2022 (%)



Persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi tahun 2017-2019 menunjukkan angka yang bersifat fluktuatif. Berdasarkan jumlah kasus pelanggaran K3 sebanyak 76 kasus pada tahun 2017, sebanyak 39,20% diantaranya telah dilakuakn tindakan atau penyelesaian secara hukum. Kemudian pada tahun 2018 persentase penyelesaian kasu pelanggaran kasus K3 mengalami peningkatan yakni menjadi 52,99%. Namun ada hal yang harus diperhatikan bahwa jumlah kasus pelanggaran K3 pada tahun 2018 mengalami penurunan. Artinya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran K3 pada tahun 2017 dan 2018 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 30 kasus dari 76 kasus pelanggaran K3. Sedangkan jumlah penyelesaian kasus pelanggaran K3 pada tahun 2018 adalah sebanyak 21 kasus dari 41 kasus pelanggaran K3 ditahun 2018.

Demikian halnya pada tahun 2019, persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 adalah sebesar 41,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 hanya sebanyak 18 kasus penyelesaian pelanggaran K3. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah penyelesaian kasus pelanggran K3 pada tahun 2019 menunjukkan angka yang semakin menurun. Selanjutnya persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 pada tahun 2020 berdasarkan sumber data yang diperoleh menunjukkan angka sebesar 0,00%. Artinya seluruh jumlah

kasus pelanggaran K3 pada tahun 2020 sebanyak 42 kasus belum ada penyelesaian atas pelanggaran K3 tersebut.

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran K3 tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan jika dibanding pada tahun 2020. Namun masih berada pada angka yang sangat rendah, masing-masing sebesar 2,08% dan 2,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hanya sebanyak 10 kasus yang dilakukan penyelesaian secara hukum. Sedangkan pada tahun 2022 hanya sebanyak 19 kasus pelanggaran K3 yang dilakukan penyelesaian secara hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa tingkat penyelesaian kasus pelanggaran K3 di Kabupaten Sarmi terus mengalami penurunan sejak tahun 2017-2022.

2.1.4.6 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Indeks Daya Saing Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Tabel II.20

Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Sarmi Tahun 2024

Nilai Indeks	2024
Pilar Institusi	-
Pilar Infrastruktur	2,92
Pilar Adopsi TIK	2,45
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	4,58
Pilar Kesehatan	3,51
Pilar Keterampilan	4,11
Pilar Pasar Produk	5
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,63
Pilar Sistem Keuangan	2,33
Pilar Ukuran Pasar	3,38
Pilar Dinamisme Bisnis	1,92
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,48
Indeks Daya Saing Daerah	-

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan melaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sarmi dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.21

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB TP (ADHB)	Persen	11.25	10.69	11.35	4.38		
Pertumbuhan PDRB DP (ADHB)	Persen	11.36	10.57	11.26	4.38		
Pertumbuhan PDRB TP (ADHK)	Persen	6.95	6.36	5.93	0.06		
Pertumbuhan PDRB DP (ADHK)	Persen	7.10	6.24	5.86	0.08		
PDRB (ADHB)	(Miliar Rp)		2,534,41	2,815,55			
PDRB (ADHK)	(Miliar Rp)		1,732,12	1,834,77			
Pertumbuhan Ekonomi			6,24	5,93			
PDRB per kapita TP (ADHB)	Juta Rupiah	59,166,160,33	63,504,462,19	68,776,196,75	70,461,317,48		
PDRB per kapita DP (ADHB)	Juta Rupiah	59,990,021,67	64,315,850,93	69,596,245,41	71,300,058,05		
PDRB per kapita TP (ADHK)	Juta Rupiah	41,980,087,37	43,295,924,28	44,608,192,52	43,808,214,47		
PDRB per kapita DP (ADHK)	Juta Rupiah	42,668,389,65	43,955,727,61	45,257,957,11	44,454,562,57		
Pendapatan Perkapita (ADHB)	(Juta Rupiah)		64,32	69,49			
Pendapatan Perkapita (ADHK)	(Juta Rupiah)		43,96	45,29			
Indeks Gini	Indeks	0.400	0.420	0.436	0.424	0.409	
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	13.75	14.51	14.41	13.87	13.84	13,76
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	2.74	1.72	3.01	1.56	2.33	1,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0.92	0.30	0.95	0.29	0.59	0,37
Jumlah Penduduk Miskin	(Ribu Jiwa)	5.23	5.67	5.80	5.70	5.56	
Persentase Penduduk Miskin	Persen	13.75	14.51	14.41	13.87	13.84	13,76
Rasio kesenjangan kemiskinan:							
40% berpendapatan rendah	Persen			13.68	15.59		
40% berpendapatan sedang	Persen			37.50	36.74		
20% berpendapatan tinggi	Persen			48.82	47.67		
Angka Kemiskinan			14,51	14,41			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	62,31	63,00	63,45	63,63	63,94	64,86
Angka melek huruf 15 tahun keatas	Persen	92.33	94.91	95.68	97,09	93,84	94,66

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka rata-rata lama sekolah	Persen	8.34	8.52	8.53	8.82	8.83	9,15
Harapan Lama Sekolah		11,29	11,55	11,81			
Angka usia harapan hidup	Persen	65.82	66.00	66.26	66.36	66.46	66,74
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Persen	72,05	71,75	64,27	67,17	68,57	68,96
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,03	3,00	5,26	4,83	3,50	2,09
Rasio penduduk yang bekerja	Persen	0,92	0,97	0,95			
Angka Pengangguran			3,00	5,26			
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Keluarga	668	1.987	3.577	3.577		
Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga	446	456	1.212	1.212		
Keluarga Sejahtera I	Keluarga	222	1.531	2.365	2.365		
Opini BPK	Opini	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rupiah		1,040,789	1,169,781	1,073,259		
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen		47.44	45.17	39.21		
Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita	Persen		52.56	54.83	60.79		
Indeks Kemahalan Kontruksi	Persen	188,91	163,77	145,09	138,83		
Rasio ketergantungan	Persen	78,33%	76,82%	73,74%	79,19%	75,34%	
Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan							
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
APK PAUD	Persen	22,51	24,14	25,43			
Angka partisipasi kasar SD	Persen	111.46	105.13	109.51	109,51	108,46	105,67
Angka partisipasi kasar SMP	Persen	93.20	91.66	92.81	101,28	102,79	99,63
Angka partisipasi kasar SMA	Persen	71.37	82.24	89.62	87,52	89,64	90,95
Angka Partisipasi Murni							
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	93.78	91.39	91.93	91,61	91,02	85,19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	75.79	74.99	77.15	77,07	77,70	62,29
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	48.83	52.22	51.81	49,53	50,17	55,39
Angka partisipasi sekolah							
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	93.76	92.26	92.97			
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	90.61	90.40	91.33			
Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	61.73	69.72	72.08			
Fasilitas Pendidikan							
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	1,00	1,00	1,00			
Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		65	65	65			

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh sekolah SD/MI		65	65	65			
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Persen						
Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik		1,00	1,00	1,00			
Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTskondisi bangunan baik		18	18	18			
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs		18	18	18			
Sekolah pendidikan SMA/MA Kondisi Bangunan Baik		1,00	1,00	1,00			
Jumlah sekolah pendidikan SMA/MA kondisi bangunan baik		4	4	4			
Jumlah seluruh sekolah SMA/MA		4	4	4			
Sekolah pendidikan SMK/MA Kondisi Bangunan Baik		1,00	1,00	1,00			
Jumlah sekolah pendidikan SMK/MA kondisi bangunan baik		5	5	5			
Jumlah seluruh sekolah SMK/MA		5	5	5			
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD)	Persen	0,07	0,07	0,07			
Jumlah Guru (SD/MI)	10.000	443	436	455			
Jumlah Murid (SD/MI)		6.701	6.040	6.583			
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SMP)	Persen	0,07	0,08	0,08			
Jumlah Guru (SMP/MTs)	10.000	191	208	206			
Jumlah Murid (SMP/MTs)		2.712	2.476	2.654			
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (SMA)	Persen	0,08	0,07	0,07			
Jumlah Guru (SMA/MA)	10.000	90	90	97			
Jumlah Murid (SMA/MA)		1.178	1.240	1.408			
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (SMK)	Persen	0,13	0,12	0,11			
Jumlah Guru (SMK/MA)	10.000	51	51	42			
Jumlah Murid (SMK/MA)		395	441	397			
Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100.00	100.00	99.67			
Persentase Penduduk 5 Tahun keatas menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah	Persen						
Tidak Bersekolah Lagi							
Laki-Laki			38,00	37,53			
Perempuan			30,38	30,57			
Masih Bersekolah							
Laki-Laki			12,91	13,93			
Perempuan			12,30	11,39			

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Bersekolah							
Laki-Laki			2,70	3,14			
Perempuan			3,71	3,43			
Kesehatan							
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persen	9,95	9,64	13,84			
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,26	0,25	0,25			
Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	6,02	5,84	5,68			
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Persen	5,76	5,58	5,43			
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	4	4	4			
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	68,09	68,09	55,1			
Angka kejadian Malaria	Kasus						
MALARIA PV		2.260	1.596	1.596			
MALARIA PF		2.246	972	972			
MALARIA KLINIS							
Cakupan puskesmas	Persen	0,58	0,58	0,58			
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	0,23	0,23	0,23			
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	441	431				
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Pekerjaan Umum							
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	107,88	37,83	52,86	58,55	62,11	
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	km/pernduduk	59,87	61,74	63,48	64,68	64,68	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	0,17	0,06	0,08	0,09	0,10	
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah KK	50 KK	100 KK & 4 PAUD	166 KK	40 KK	32 KK	
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	0,27	0,68	0,91	0,98	1,00	
Rasio Jaringan Irigasi	Persen	0,47	0,74	0,90	0,97	1,00	
Persentase penduduk berakses air minum	Persen			40,25	32,01	89,82	
Persentase Penduduk berakses air bersih	Persen			59,27	57,96	66,48	
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	unit/penduduk	39,26	43,14	41,96			
Penataan Ruang							

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
Rasio rumah layak huni	Persen	0,67	0,68	0,70	0,70	0,70	
Rasio permukiman layak huni	Persen	0,77	0,79	0,80	0,81	0,81	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni		0,67	0,68	0,70	0,70	0,70	
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	0,67	0,68	0,70	0,70	0,70	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	42,36	31,20	31,20			
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		55,13	55,09	43,28			
Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional		42,36	31,20				
Indeks Pemberdayaan Gender		65,29	62,23	73,09	74,19	72,92	
Indeks Pembangunan Gender		82,12	82,31	82,15	82,35	82,56	
Indeks Pembangunan Manusia Perempuan		56,18	57,10	57,25			
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan		37,09	36,99				
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)				77,16	88,43	95,19	
Persentase Penduduk 17 Tahun ke Atas yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)				79,26	88,59	94,66	
Persentase Penduduk 0-4 Tahun yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)				36,26	55,55	61,84	
Persentase Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)				73,92	85,67	85,67	
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1.86	3.13	2.81			
Komunikasi dan Informatika							
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang				58,78	69,95	73,37	

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel							
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler				52,52	56,62	64,04	
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer				9,22	17,03	12,96	
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet				35,27	42,98	48,56	
Keuangan							
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	TMP	TMP	TMP	WDP		
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,52	0,51	0,51	0,52	0,50	
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung							
Belanja Langsung	Persen	0,71	0,63	0,56	0,62	0,60	
Belanja Tidak Langsung	Persen	0,29	0,37	0,44	0,38	0,40	
Persentase PAD terhadap pendapatan		2,41%	0,46%	1,24%	1,46%	1,68%	
Rasio ketergantungan	Persen	78,33%	76,82%	73,74%	79,19%	75,34%	

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Perencanaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun rencana anggaran yang tepat sasaran dengan mengacu pada prioritas pembangunan serta kebijakan nasional. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penting untuk melakukan analisis kebutuhan daerah secara komprehensif agar alokasi anggaran dapat mengakomodasi program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan juga diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel.

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi dinamika yang cukup kompleks di tengah upaya pemulihan pascapandemi dan tantangan global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, meskipun proyeksi dari Bank Dunia sedikit lebih rendah pada angka 5,1%. Kebijakan fiskal dan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui alokasi anggaran sebesar Rp3,621 triliun guna mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas masih menjadi perhatian utama, mengingat fluktuasi harga global dapat berdampak signifikan pada penerimaan negara.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih menghadapi masalah struktural, seperti menurunnya jumlah kelas menengah hingga 20% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah, sehingga konsumsi domestik sebagai motor penggerak ekonomi melambat. Selain itu, reformasi perpajakan juga menjadi sorotan penting, terutama dalam upaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 23% tanpa menaikkan tarif pajak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai reformasi ekonomi dan sosial agar pertumbuhan yang berkelanjutan dapat tercapai, terutama melalui penguatan sektor industri dan program kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Mendasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Struktur ekonomi Kabupaten Sarmi secara umum masih didominasi oleh Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi Sarmi dengan sumbangan lebih dari 30 persen, disusul dengan sektor konstruksi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Hal tersebut memberikan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi lokal, serta pelatihan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam diversifikasi ekonomi Sarmi. Berikut gambaran mengenai kinerja Keuangan masa lalu Kabupaten Sarmi.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan dengan ekonomis, efektif dan efisien. Kinerja keuangan masa lalu dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa lalu adalah melihat kemampuan kemandirian fiskal yang mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka, sehingga diartikan daerah tersebut stabil dan memiliki keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik

atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 22
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) cukup berfluktuasi yaitu mengalami penurunan dari tahun 2020 (1,68%) sampai 2022 (1,22%) kemudian pada tahun 2023 (1,60%) mengalami peningkatan cukup signifikan dan pada tahun 2024 (1,67%) kembali mengalami peningkatan kembali. Persentase rata-rata DOFD Kabupaten Sarmi dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mencapai 1,54% dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Sarmi masih masuk di kategori “sangat kurang”. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Sarmi perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya baik dari pajak maupun retribusi dengan cara yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Sarmi periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II. 23
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Sarmi, Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	17.382.042.003	1.037.349.126.601	1,68
2	2021	14.223.671.299	973.887.020.182	1,46
3	2022	14.550.906.424	1.132.565.834.889	1,28
4	2023	17.646.697.170	1.105.413.881.869	1,60
5	2024	17.948.818.353	1.075.924.964.037	1,67
	Rata-Rata	16.350.427.050	1.065.028.165.516	1,54

Sumber: BPKAD Kabupaten Sarmi. 2025 (diolah)

2.2.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak

daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan. Dana Insentif Daerah. Dana Otonomi Khusus. dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah. Dana Darurat. Pendapatan Lainnya

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Sarmi terus mengalami pertumbuhan yang positif di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp 1,04 triliun menjadi Rp 1,08 triliun di tahun 2024. Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi sebagian besar berasal dari pos pendapatan transfer. Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 0,92%. Secara rinci sumber pendapatan Kabupaten Sarmi dapat dilihat pada tabel berikut.

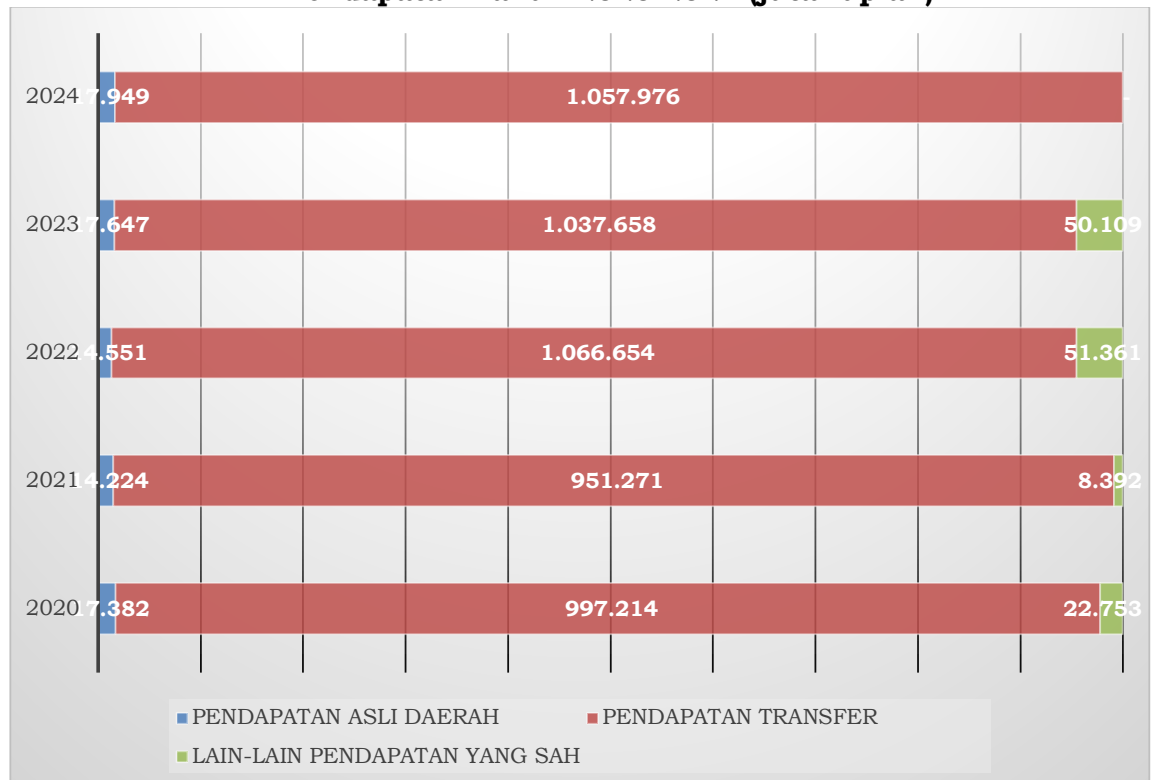
Tabel II. 24
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.037.349	973.887	1.132.566	1.105.414	1.075.925	0,92
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.382	14.224	14.551	17.647	17.949	0,81
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.600	2.357	3.146	4.144	3.595	8,44
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	846	489	739	279	271	-24,77
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.029	5.031	5.082	4.933	5.859	9,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.907	6.346	5.583	8.291	8.223	-4,55
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	997.214	951.271	1.066.654	1.037.658	1.057.976	1,49
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	990.016	939.990	1.056.805	1.026.247	1.045.101	1,36
1.2.1.1	Dana Perimbangan	827.039	783.552	832.645	814.987	822.693	-0,13
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	17.611	-	-	-	8.659	-16,26
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	643.305	-	-	-	684.266	1,56
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	138.272	-	-	-	102.880	-7,13
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	11.389	-	-	-100,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	44.405	45.631	127.339	123.149	130.493	30,93
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	44.405	45.631	127.339	123.149	130.493	30,93
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	118.572	110.806	85.433	88.111	91.916	-6,17
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	7.198	11.281	9.849	11.411	12.875	15,65
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.198	11.281	9.849	11.411	12.875	15,65
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	22.753	8.392	51.361	50.109	-	-100,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.753	-	39.641	33.753	-	-100,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	8.392	11.720	16.355	-	-100,00

Sumber: BPKAD Kab. Sarmi. 2025 (diolah)

Proporsi pendapatan Daerah di Kabupaten Sarmi berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer hampir di atas angka 90% di tiap tahunnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil yaitu di bawah 10%. Dapat dikatakan bahwa kemandirian Kabupaten Sarmi masih tergolong Rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Selengkapnya proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.42
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Berdasarkan Jenis
Pendapatan Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai diberlakukan pada 5 Januari

2025.

Perkembangan pajak daerah mengalami tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 8,44% dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara keseluruhan, meskipun pajak daerah mengalami pertumbuhan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari pajak daerah, ke depannya akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan dilakukan sinergitas dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Sarmi dalam tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -24,77% dari Rp 846 juta (2020) dan menurun di tahun 2024 menjadi Rp 271 juta. Melihat kondisi ini maka perlu dicari momentum tumbuhnya kembali retribusi daerah terutama pada sumber-sumber yang potensial.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

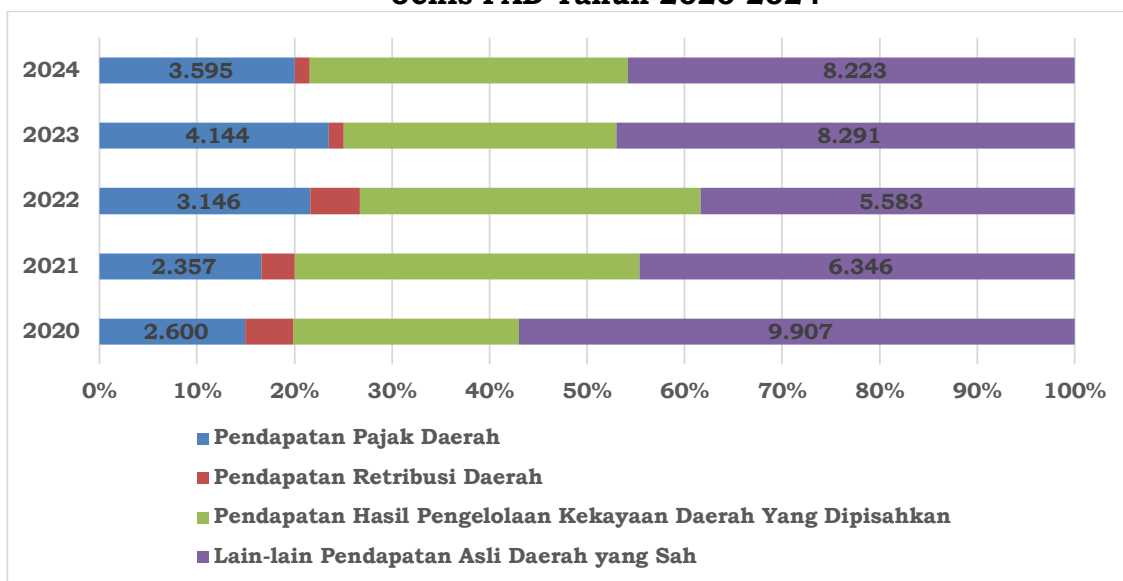
Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,81% dari Rp 4,03 miliar (2020) menjadi Rp 5,86 miliar (2024). Untuk meningkatkan dividen BUMD ke depan, opsi peningkatan manajemen BUMD dan suntikan modal bisa menjadi pertimbangan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kontraksi yaitu sebesar 4,55% dari Rp 9,90 miliar (2020) menjadi Rp 8,22 miliar (2023). Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja BLUD yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.43
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi Berdasarkan
Jenis PAD Tahun 2020-2024



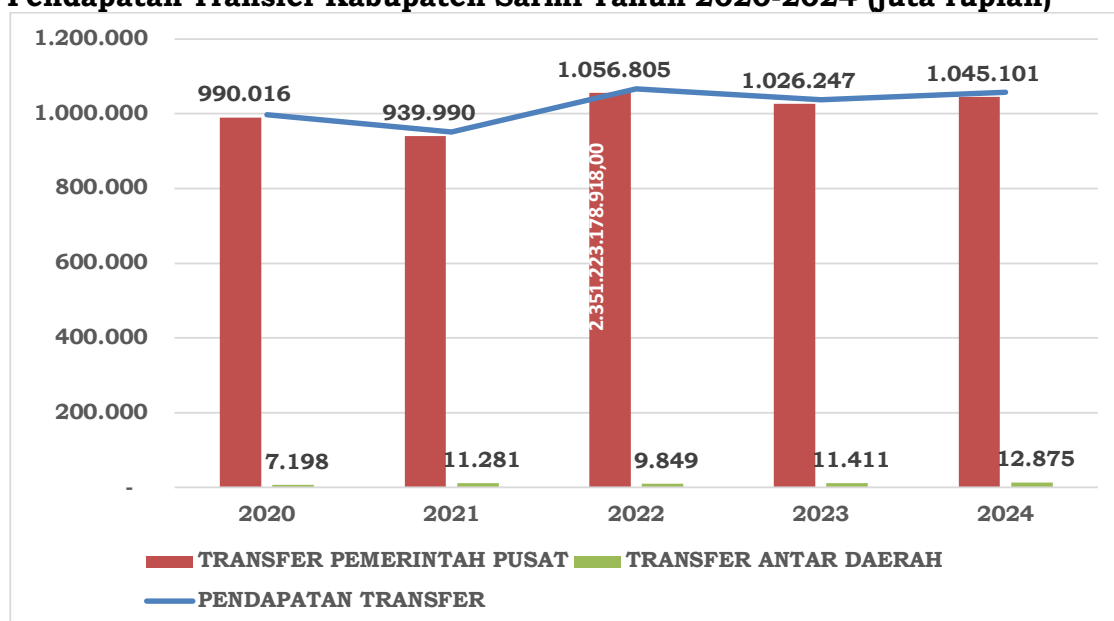
Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Sarmi.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. pada tahun 2020 pendapatan transfer sebesar Rp 997,21 miliar meningkat menjadi sebesar Rp 1,06 Triliun pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.

Gambar II.44
Pendapatan Transfer Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



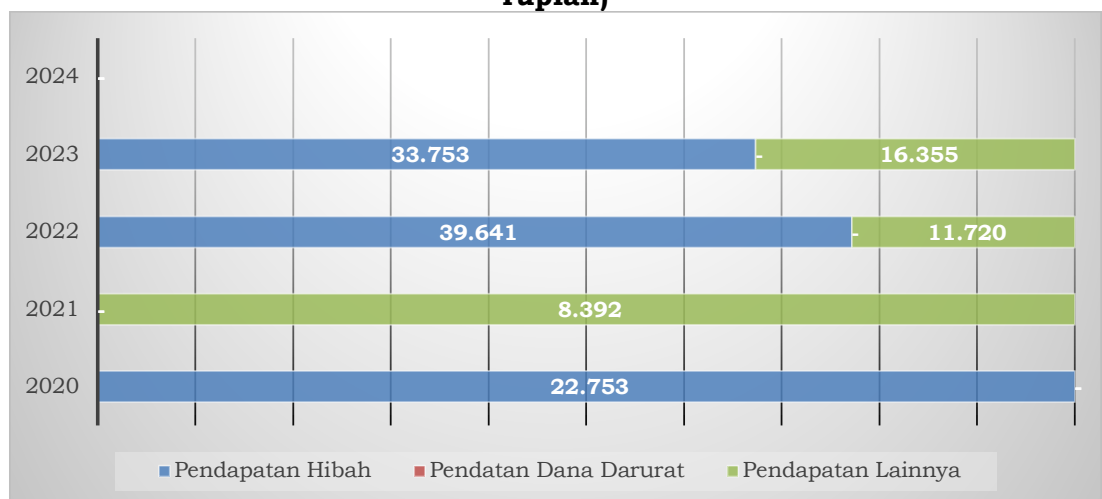
Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

Pendapatan Transfer Kabupaten Sarmi berasal dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer Antar Daerah. Secara proporsi pendapatan Transfer ini masih didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) secara rata-rata di atas 90% selama lima tahun terakhir. sedangkan yang bersumber dari Transfer antar daerah di bawah 10%.

c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan cukup signifikan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2023. pada tahun 2020 pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 22,75 Miliar meningkat menjadi sebesar Rp 50,11 Miliar pada tahun 2023. pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Sarmi ini bersumber dari Pendapatan Hibah. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.

Gambar II.45
Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2023 (juta rupiah)



Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi. seperti pengembangan aset daerah. kerja sama dengan sektor swasta. atau pendapatan dari investasi.
- Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya. serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah. seperti pariwisata. pertanian. yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut

2.2.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah. belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Sarmi selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat. dari sebesar Rp 1,07 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 1,09 triliun pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2020-2024 sebesar 0,67%. dimana pertumbuhan paling besar yaitu belanja operasi sebesar 4,03%. Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sarmi meliputi belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Tabel II. 25
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (rupiah)

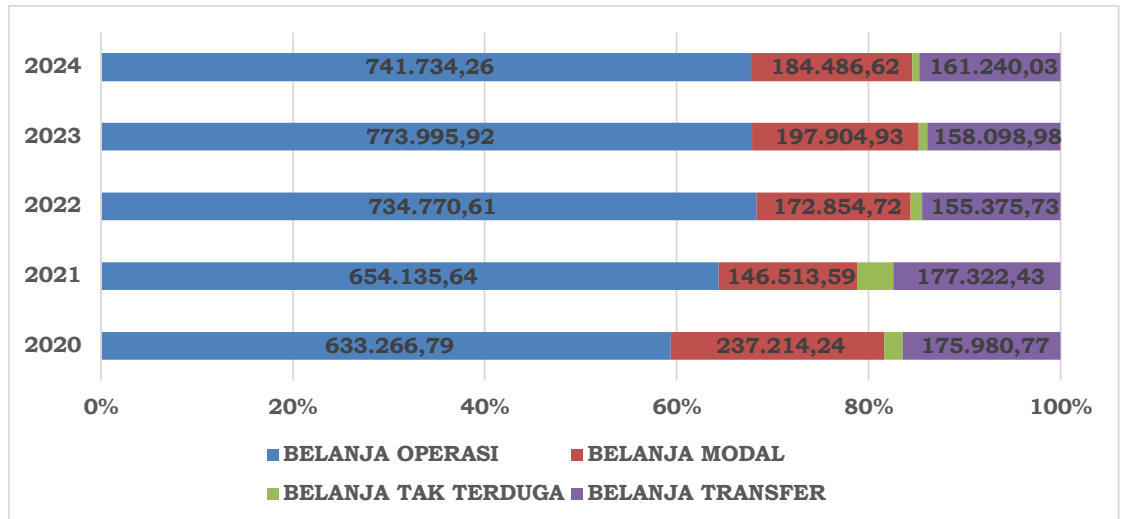
No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1.066.676.77	1.016.586.54	1.075.681.65	1.140.381.79	1.095.354.69	0,67
2.1	BELANJA OPERASI	633.266.79	654.135.64	734.770.61	773.995.92	741.734.26	4,03
2.1.1	Belanja Pegawai	277.300.98	212.623.94	221.571.31	231.189.35	273.854.02	-0,31
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	309.715.46	402.124.17	463.606.81	461.186.52	380.886.83	5,31
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	33.914.58	31.295.53	27.799.18	71.396.23	65.445.19	17,86
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.335.77	8.092.00	21.793.31	10.223.82	21.548.22	14,96
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	237.214.24	146.513.59	172.854.72	197.904.93	184.486.62	-6,09
2.2.1	Belanja Tanah	19.348.00	4.757.00	15.882.08	-	10.000.00	-15,21
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.407.84	20.921.27	20.412.72	24.318.90	18.369.35	-18,39
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	74.479.07	45.658.52	54.147.81	53.142.53	44.091.94	-12,28
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.582.44	73.584.31	81.464.08	118.235.64	111.828.16	2,69
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.396.89	1.592.50	948.04	1.807.86	197.16	-38,71
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	400.00	-	-100,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	20.214.97	38.614.88	12.680.59	10.381.96	7.893.78	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	20.214.97	38.614.88	12.680.59	10.381.96	7.893.78	
2.4	BELANJA TRANSFER	175.980.77	177.322.43	155.375.73	158.098.98	161.240.03	-2,16
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	175.980.77	177.322.43	155.375.73	158.098.98	161.240.03	(2,16)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Provinsi						
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	174.988,68	177.322,43	155.375,73	158.098,98	161.240,03	-2,02
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	992,09	-	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.327,64)	(42.699,52)	56.884,19	(34.967,91)	(19.429,73)	-9,78

Sumber: Dokumen LRA Audited. 2025

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren yang fluktuatif. Proporsi belanja Daerah Kabupaten Sarmi paling mendominasi yaitu Belanja Operasi dengan rasio sebesar hampir rerata di atas 67%. kemudian disusul oleh Belanja Transfer dengan rasio rerata 21% lebih, disusul Belanja Modal yang masih cukup sedikit yaitu di bawah 15% dan belanja tidak terduga rerata di bawah 1%. Seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar II.46
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2020-2024

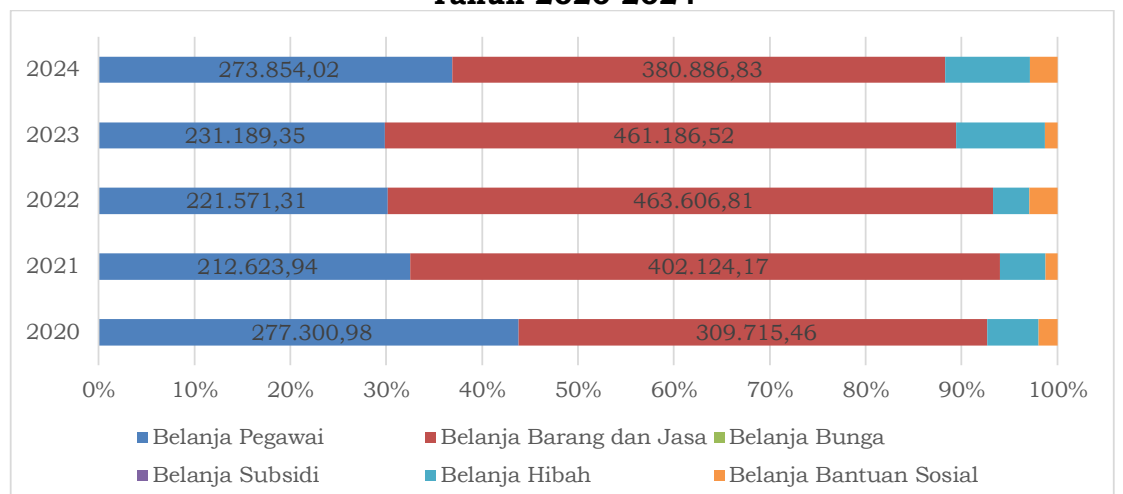


Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Sarmi telah tumbuh 4,03% pertahun dari Rp 663,26 miliar (2020) menjadi Rp 741,73 miliar (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja barang dan jasa terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 48,91% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 51,35% di tahun 2024. Sementara belanja operasi lainnya (belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 8%.

Gambar II.47
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Sarmi
Tahun 2020-2024



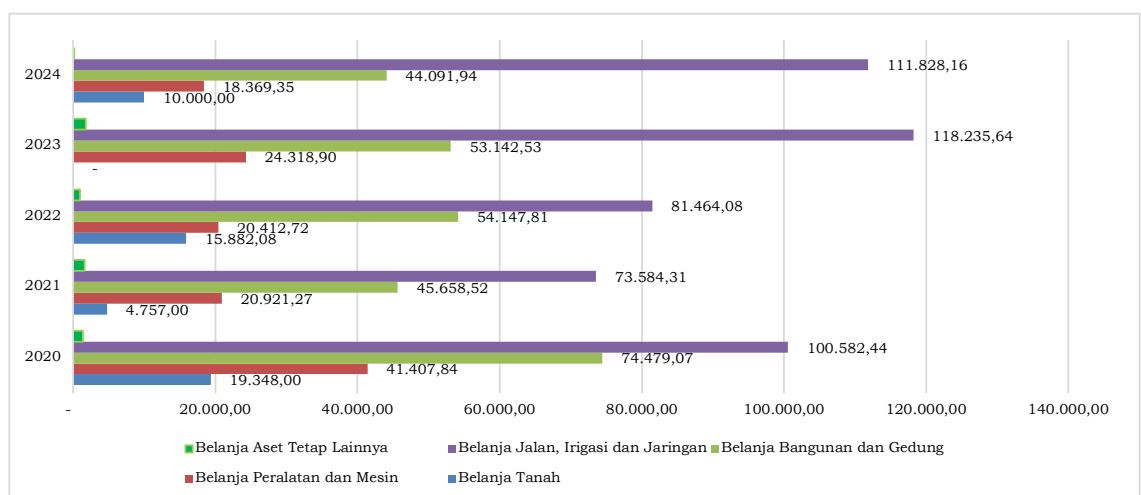
Sumber: BPKAD Kabupaten Sarmi. 2024 (diolah)

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus ditekan agar semakin mengecil namun secara nominal nilainya mengalami fluktuasi dari Rp 277,30 miliar (2020) menjadi Rp 221,57 miliar (2022) lalu mengalami peningkatan lagi tahun 2024 menjadi 273,85 miliar atau rata-rata pertumbuhannya adalah -0,31% pertahun. Fluktuasi nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan agar proporsi belanja pegawai di tahun 2027 tidak lebih dari 30% dan meningkatkan proporsi belanja modal tentunya khususnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah. Posisi proporsi belanja pegawai Kabupaten Sarmi dalam 5 (lima) tahun terakhir masih berkisar 40-50% sehingga perlu Langkah-langkah strategis untuk menurunkan rasionya baik dengan memangkas besaran tunjangan maupun memperbesar pendapatan Daerah khususnya dari sumber PAD

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Sarmi mengalami tren menurun cukup signifikan yaitu -6,09% pertahun dari Rp 237,21 miliar (2020) menjadi Rp 184,48 miliar (2024). Menurunnya belanja modal tersebut disebabkan oleh menurunnya hampir semua komponen belanja modal yaitu Belanja tanah (-15,21% pertahun). Belanja Bangunan dan Gedung (-12,28% pertahun). Belanja peralatan dan mesin (-18,39 pertahun). dan Belanja Aset Lainnya (hanya terisi data tahun 2023). Sementara hanya Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami peningkatan yaitu 2,69 % pertahun dari Rp 100,58 miliar menjadi Rp 111,83 miliar (2024)

Gambar II.48
Proporsi Struktur Belanja Modal Kab. Sarmi Tahun 2020-2024



Selain untuk menjalankan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam hal meningkatkan proporsi belanja modal. Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi

besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Posisi saat ini, proporsi belanja modal rata-rata hanya sebesar - 0,88% pertahun hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat untuk mendorong tumbuhnya investasi yang berdampak pada perekonomian daerah secara umum diperlukan infrastruktur yang memadai. Untuk itu arah kebijakan belanja ke depan harus berpijak pada peningkatan proporsi belanja modals secara bertahap dan berkelanjutan.

c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Sarmi mengalami penurunan cukup signifikan yaitu -32,76% pertahun dari Rp 20,21 miliar (2020) menjadi Rp 7,89 miliar (2024). Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Sarmi relative menurun dengan rata-rata kontraksi sebesar 2,16% pertahun dari Rp 175,98 miliar (2020) menjadi Rp 161,24 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relative menurunnya belanja transfer bantuan keuangan (desa) sebesar 2,02% dari Rp 174,99 miliar (2020) menjadi Rp 161,24 miliar (2024).

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir surplus belanja terjadi di tahun 2022 yang nilai surplus sebesar Rp 56,88 miliar. Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia, beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) Prioritas Belanja Modal: melakukan efisiensi di pos belanja lainnya khususnya belanja pegawai untuk dialokasikan pada belanja modal khususnya pada jenis belanja modal yang mempunyai daya ungkit terhadap masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas

yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

- 4) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 5) **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 6) **Pengembangan Pendapatan Alternatif:** Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 7) **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 8) **Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

2.2.1.3 PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari sebesar Rp 133,93 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 75,26 Miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan Daerah selama tahun 2020-2024 sebesar -13,42%, yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan rerata sebesar -13,64%. Kinerja pengeluaran pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 hanya terdapat dalam pos penyertaan modal yang hanya terdapat di tahun 2020, 2023 dan 2024. Secara rinci Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 26
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	PEMBIAYAAN	133.933.178.689	104.071.988.076	61.372.497.907	113.248.900.226	75.260.631.069	-13,42
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138.933.178.689	104.071.988.076	61.372.497.907	118.248.900.226	77.260.631.069	-13,64
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	138.933.178.689	104.071.988.076	61.372.497.907	118.248.900.226	77.260.631.069.00	-13,64
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;						
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	2.000.000.000	-20,47
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo						
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	5.000.000.000			5.000.000.000	2.000.000.000	-20,47
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;						
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;						
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	PEMBIAYAAN NETTO	133.933.178.689	104.071.988.076	61.372.497.907	113.248.900.226	75.260.631.069	-13,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKEWAAN	104.605.536.940	61.372.463.878	118.256.685.246	78.280.988.357	55.830.903.263	-14,53

Sumber: Dokumen LRA Audited

2.2.1.4 NERACA DAERAH

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat, nilai aset Kabupaten Sarmi dari tahun 2020-2023 relatif mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan mencapai 0,87% per tahun, dari Rp2,17 triliun (2020) menjadi Rp2,11 triliun (2023). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah aset lancar (2,49%), dan investasi jangka panjang (2,41%), aset tetap (1,75%). Aset lancar yang mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -0,09 % serta aset lainnya -14,42%.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Sarmi dalam kurun waktu tahun 2020-2023 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek mengalami tren meningkat cukup signifikan sebesar 57,90% per tahun dari Rp119,95 miliar (2020) menjadi Rp472,20miliar (2023). Jika dilihat lebih dalam, maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang perhitungan pihak ketiga, yang trennya juga relatif meningkat dari Rp91,44miliar (2020) menjadi Rp460,79miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang

dimiliki pemerintah daerah. sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Sarmi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. namun secara agregat mengalami sedikit perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,88% per tahun. Pada tahun 2020. ekuitas tercatat sebesar Rp 2,17 triliun. menurun menjadi Rp2,11 triliun pada tahun 2023. Ekuitas menunjukkan fluktuasi hingga tahun 2023

Penurunan nilai ekuitas dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas. mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan. berinvestasi dalam proyek baru. atau mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu. manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang cermat menjadi penting untuk memitigasi risiko penurunan ekuitas.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menekan penurunan nilai ekuitas yaitu mencegah dan menekan kerugian investasi. mencegah dan menekan penurunan nilai aset. mengelola operasional dengan efisien untuk mencegah penurunan pendapatan atau peningkatan biaya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Sarmi disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II. 27
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	102.882.095.756	57.901.647.507	107.901.286.217	70.400.715.707	(100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan				78.677.460	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.109.614.062	2.578.162.863	9.628.353.431	5.923.859.226	(100,00)
Kas di BLUD					0
Kas di Bendahara FKTP	108.996.396	134.077.454	68.316.971	178.702.860	(100,00)
Kas di Bendahara BOS	504.830.726	758.576.054	658.728.627	678.675.817	(100,00)
Kas dana BOK Puskesmas					0
Kas Lainnya	91.441.724	311.484.058	32.460.740	460.794.908	(100,00)
Setara Kas					0
Investasi Jangka Pendek					
Piutang Pendapatan	5.648.850.880				
Piutang Pajak		126.641.595	126.641.595	126.641.595	0
Penyisihan Piutang Pajak					

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
Piutang Retribusi		68.811.000	68.811.000	68.811.000	0
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>					
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>					
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			6.140.995		0
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>					
Piutang Transfer Pemerintah Pusat					0
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>					
Piutang Transfer Antar Daerah		1.053.775.219	1.425.379.875		0
Piutang Lainnya	1.917.808				0
<i>Penyisihan Piutang</i>			(195.451.145)	(195.451.145)	0
Beban Dibayar Dimuka					0

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
Persediaan	8.048.389.737	26.559.690.303	29.400.852.793	49.739.621.817	(100,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi					
Jumlah Aset Lancar	118.396.137.089	89.492.866.052	149.121.521.099	127.461.049.244	(100,00)
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	
Dana Bergulir					
Penyisihan					
Investasi Jangka Panjang					
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	72.500.000.000	(100,00)
Jumlah Investasi Permanen	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	72.500.000.000	(100,00)
Jumlah Investasi Jangka Panjang	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	72.500.000.000	(100,00)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET TETAP					
Tanah	84.150.544.155	84.825.468.951	99.391.584.951	99.879.084.950	(100,00)
Peralatan dan Mesin	573.479.630.403	581.535.087.563	598.261.797.611	617.829.130.560	(100,00)
Gedung dan Bangunan	687.942.210.967	701.944.461.271	752.665.377.141	832.294.068.065	(100,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.642.504.081.402	1.712.755.323.036	1.792.241.160.102	1.883.687.367.790	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	50.009.103.937	50.119.103.937	50.124.603.937	37.344.210.150	(100,00)
Konstruksi dalam Pengerjaan	53.536.717.116	57.449.097.612	57.449.097.612	50.784.607.829	(100,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.281.396.413.454)	(1.423.016.760.335)	(1.571.274.145.240)	(1.716.642.842.190)	(100,00)
Jumlah Aset Tetap	1.810.225.874.527	1.765.611.782.035	1.778.859.476.114	1.805.175.627.154	(100,00)
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	
ASET LAINNYA					
Tagihan					0
Penjualan Angsuran					0
Tuntutan Ganti					0
Kerugian Daerah					0
Kemitraan					0
dengan Pihak Ketiga					0
Aset Tak Berwujud	846.142.765	1.172.764.000.00	1.594.184.000	21981.683.000	(100,00)

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>		(421.218.702)	(849.383.000)	(1.137.972.786)	0
Aset Lain-Lain	173.725.067.074	242.230.178.697	248.615.561.697	152.089.154.84	(100,00)
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>		(18.103.629.176)	(19.461.468.830)	(46.067.998.898)	0
Tagihan Jangka Panjang					
Kas yang Dibatasi Penggunaannya					
Dana Transfer Treasury Deposit Facility			25.320.513.564	1.534.766.000	(100,00)
Jumlah Aset Lainnya	174.571.209.839	224.878.094.819	255.219.407.431	109.399.631.499	(100,00)
H ASET JUMLAH	2.170.693.221.454	2.147.482.742.907	2.250.700.404.643	2.114.536.307.898	(100,00)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	91.441.724	311.484.058	32.460.740	460.794.908	(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka					0
Utang Beban	11.412.000	11.412.000			(100,00)
Utang belanja				11.412.008	0
Utang Bunga					0

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.100.008	17.100.008			(100,00)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	119.953.732	339.996.066	60.972.748	472.206.916	(100,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank					
Utang Dalam Negeri - Obligasi					
Utang Jangka Panjang Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	

Uraian	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
JUMLAH KEWAJIBAN	119.953.732	339.996.066	60.972.748	472.206.916	(100,00)
EKUITAS					
Equitas					0
Sisa Kas BLUD	2.170.573.267.722	2.147.142.74.841	2.250.639.431.894	2.114.064.100.982	(100,00)
Sisa Kas JKN					
JUMLA H EKUITAS	2.170.573.267.722	2.147.142.746.841	2.250.639.431.894	2.114.064.100.982	(100,00)
JUMLA H KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.170.693.221.454	2.147.482.742.907	2.250.700.404.642	2.114.536.307.898	(100,00)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Sarmi periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 7,66 % (2020) menjadi 4,57% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 4-5 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik terutama pada tahun 2023 dan 2024 karena nilainya dibawah 5. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Tabel II. 28

Rasio Lancar Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	319.990.472.249	413.565.396.044	345.177.363.521	246.271.477.312	268.385.066.213
KEWAJIBAN LANCAR	41.790.047.964	63.997.463.893	36.584.708.423	58.789.647.976	58.789.647.976
RASIO LANCAR	7,66	6,46	9,44	4,19	4,57

Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

b. Rasio Solvabilitas

Rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,012. Sedangkan rasio utang (kewajiban) terhadap aset pada tahun yang sama juga sebesar 0,012. Hasil analisis Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100. Hal ini menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya berasal dari ekuitas. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarmi dilihat dari kinerja neraca daerah menunjukkan kondisi yang sangat sehat.

a) *Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)*

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai debt to equity ratio. Debt to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Sarmi dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 0,000% dan yang tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 0,00022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2022 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,0027% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 1,39% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2023 senilai 0,012 atau nilai kewajiban yang ada hanya 1,24% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Sarmi cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II. 29

Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	119.953.732	339.996.066	60.972.748	472.206.916	0
EKUITAS	2.170.573.267.722	2.147.142.746.841	2.250.639.431.894	2.114.064.100.982	0
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,000	0,000	0,000	0,000	

Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

b) *Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)*

Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva) merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Berdasarkan data yang tersedia, rasio hutang terhadap total aktiva Kabupaten Sarmi dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Rasio ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan rasio hutang terhadap ekuitas.

namun dalam perhitungan ini. total hutang dibandingkan dengan total nilai aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. sehingga nilainya sedikit lebih kecil.

Nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi pada tahun 2021. yaitu sebesar 0,0002. yang menunjukkan bahwa jumlah kewajiban mencapai proporsi tertinggi dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Sementara itu. nilai rasio terendah (terbaik) terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0,0000. yang berarti kewajiban memiliki proporsi yang sangat kecil terhadap total aset. Secara keseluruhan. Kabupaten Sarmi tidak memiliki risiko gagal bayar terhadap kewajiban yang ada. karena total aset daerah memiliki nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang yang dimiliki. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang relatif stabil dan terkendali.

Tabel II. 30
Analisis Rasio Hutang terhadap Total Aktiva Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	119.953.732	339.996.066	60.972.748	472.206.916	-
AKTIVA	2.170.693.221.454	2.147.482.742.907	2.250.700.404.643	2.114.536.307.898	-
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0001	0,0002	0,0000	0,0002	

Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

c. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarmi menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah. gedung. jalan. kendaraan. mesin-mesin. perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Sarmi dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2022 mencapai 0,008 dan meningkat hingga 0,010 di tahun 2023. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik di mana pada tahun 2022 dari Rp1,805 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp17,646 miliar atau 0,98% dari nilai aset tetap.

Tabel II. 31
Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Sarmi
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023
PAD	17.382.042.003	14.223.671.299	14.550.906.424	17.646.697.170
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	1.810.225.874.527	1.765.611.782.035	1.778.859.476.114	1.805.175.627.154
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,010	0,008	0,008	0,010

Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap. perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Sarmi dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif di mana rasio dari nilai 0,008 di tahun 2020 menjadi 0,008 di tahun 2023. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 0,8% dari nilai total aset itu sendiri.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong. bangunan tidak terpakai. atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan. pusat hiburan. atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini. pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan. Jembatan. atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan. atau lahan pertanian yang luas. pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran. pusat pemerintahan. atau fasilitas publik lainnya

yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II. 32

Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Sarmi Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	17.382.042.003	14.223.671.299	14.550.906.424	17.646.697.170	17.948.818.353
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.170.693.221.454	2.147.482.742.907	2.250.700.404.643	2.114.536.307.898	-
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,008	0,007	0,006	0,008	

Sumber: Dokumen LRA Audited. diolah

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarmi 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata persentasenya sebesar 39,85%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 25,88% sedangkan capaian terakhir tahun 2023 sebesar 24,96%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 43% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat namun perlu ditekan ke depan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten SarMI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 33
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten SarMI Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2019	277.300.98	1.071.676.77	25,88%
2	2020	212.623.94	1.016.586.54	20,92%
3	2021	221.571.31	1.075.681.65	20,60%
4	2022	231.189.35	1.145.381.79	20,18%
5	2023	273.854.02	1.097.354.69	24,96%
Rata-Rata		243.307.92	1.081.336.29	22.50%

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah

seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,34% pertahun dari Rp 524,747 miliar (2020) menjadi Rp 531,981 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah (17,86%). Belanja transfer bantuan (3,12%). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp 1,078 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 0,34%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) Formulasi dan Pemanfaatan Pinjaman Daerah yang Efektif: melakukan formulasi pinjaman daerah untuk pembangunan yang sifatnya produktif dan berdampak luas.
- 2) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi. Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 3) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 4) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 5) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 6) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

- 7) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II. 34
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	323.551.33	252.011.47	271.163.80	312.809.40	360.847.43	2,76
1.1	Belanja Pegawai	277.300.98	212.623.94	221.571.31	231.189.35	273.854.02	(0,31)
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	33.914.58	31.295.53	27.799.18	71.396.23	65.445.19	17,86
1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.335.77	8.092.00	21.793.31	10.223.82	21.548.22	14,96
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Transfer	175.980.77	177.322.43	155.375.73	158.098.98	161.240.03	(3,12)
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	175.980.77	177.322.43	155.375.73	158.098.98	161.240.03	(3,12)
3	Belanja Tak Terduga	20.214.97	38.614.88	12.680.59	10.381.96	7.893.78	(20,95)
4	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.00	-	-	5.000.00	2.000.00	(20,47)
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0
4.2	penyertaan modal daerah;	5.000.00	-	-	5.000.00	2.000.00	(20,47)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	524.747.06	467.948.78	439.220.11	486.290.35	531.981.24	0,34

2.2.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2021 dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp -42,699 juta Rp -39,967 juta. Sementara pada tahun 2022 terjadi surplus anggaran.

Tabel II. 35
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.037.349.13	973.887.02	1.132.565.83	1.105.413.88	1.075.924.96
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.066.676.77	1.016.586.54	1.075.681.65	1.140.381.79	1.095.354.69
3	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.00	-	-	5.000.00	2.000.00
	(Defisit Riil)	- 34.327.64	- 42.699.52	56.884.19	- 39.967.91	- 21.429.73

Sumber : Dokumen LRA Audited. Diolah

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Sarmi pada tahun 2020 – 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel II. 36
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.933.18	104.071.99	61.372.50	118.248.90	77.260.63
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	138.933.18	104.071.99	61.372.50	118.248.90	77.260.63

Sumber : Dokumen LRA Audited. diolah

Dengan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Sarmi dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Sarmi. Secara rinci perhitungan analisa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Kabupaten Sarmi 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel II. 37
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sarmi 2020-2024 (dalam juta)

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	138.933,18	100%	104.071,99	100%	61.372,50	100%	118.248,90	100%	77.260,63	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	138.933,18	100%	104.071,99	100%	61.372,50	100%	118.248,90	100%	77.260,63	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber : Dokumen LRA Audited

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan yaitu pengeluaran pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pada analisis kerangka pendanaan juga telah diasumsikan berlakunya ketentuan pada UU HKPD maupun ketentuan teknis yang telah tercantum pada Permendagri 15/2023.

2.2.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target APBD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Sarmi masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Sarmi masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. *Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.*

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Sarmi tahun 2026-2030 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 3,28$ pertahun dari Rp 1,086 triliun (2026) menjadi Rp 1,120 triliun (2030). Hal ini didasarkan pada kebijakan efisiensi dari pusat yang diperkirakan akan ada penurunan transfer pemerintah pusat. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2024 ataupun target tahun 2025.

Untuk proyeksi PAD sendiri diproyeksikan pada tahun 2025-2029 tumbuh $\pm 10,42\%$ pertahun dari Rp 18,359 miliar (2026) menjadi Rp 22,892 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD Pendapatan Retribusi Daerah sebesar (2,50%). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (5,00%). dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh (2,00%) pertahun. Target proyeksi ini didasarkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir yang rata-rata pertumbuhannya relatif kecil.

2.2.3.1.1 PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Proyeksi PAD dilakukan secara detil per komponen pembentuk PAD yaitu:

a. **Proyeksi Pajak Daerah**

Proyeksi pajak daerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap ke-8 jenis pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) Kabupaten Sarmi. Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar $\pm 4,09\%$ pertahun dari Rp 8,500 miliar (2026) menjadi Rp 11,351 miliar (2030) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang juga tumbuh $\pm 7,50\%$ pertahun. Fokus pertumbuhan pajak ini dengan memanfaatkan potensi opsen PKB dan opsen BBNKB yang akan mampu mendorong pajak daerah secara signifikan. Selain itu juga dengan memaksimalkan potensi pajak lainnya khususnya dari pos pajak hotel, restoran

dan hiburan.

Adapun secara umum target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Sarmi. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Seperti halnya pajak daerah, proyeksi retribusi daerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap ke-3 jenis retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD) Kabupaten Sarmi. Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan tumbuh $\pm 2,50\%$ pertahun dari Rp 399,75 miliar (2026) menjadi Rp 441,25 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan

retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -24,77% pertahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 845,706 miliar. Diperlukan strategi untuk terus bisa memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan kesehatan, persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan Retribusi: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD. Proyeksi pada Tahun 2026-2029 mendasari draft akhir Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal Tahun 2026-2030. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 5,00\%$ pertahun dari Rp 6,460 miliar (2026) menjadi Rp 7,852 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan

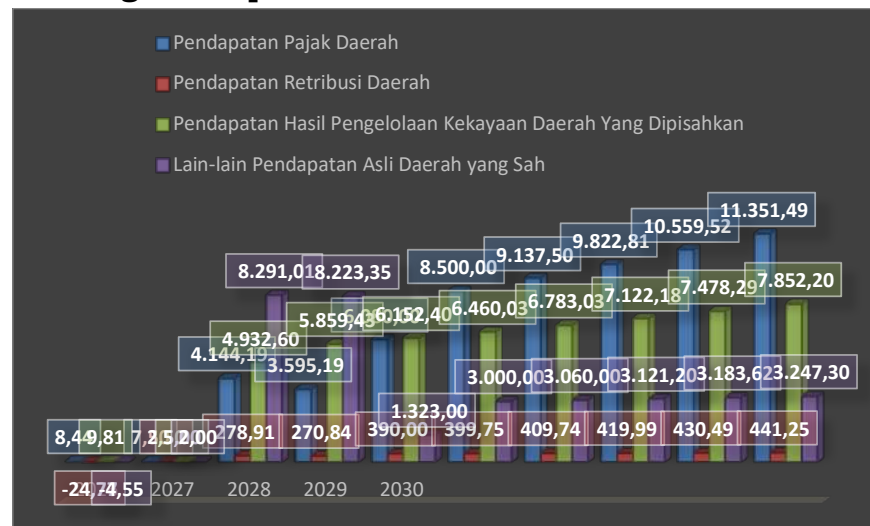
masa lalu yang secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,81% pertahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif agar dalam meningkatkan labanya sehingga porsi dividen yang didapat juga semakin besar melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

d. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 ditargetkan sebesar 2,00% pertahun dan stagnan dari 2026 hingga 2030 di Rp 3,247 miliar. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD bersamaan dengan optimlaisasi hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Gambar II.49
Target Komposisi PAD Kab Sarmi Tahun 2026-2030

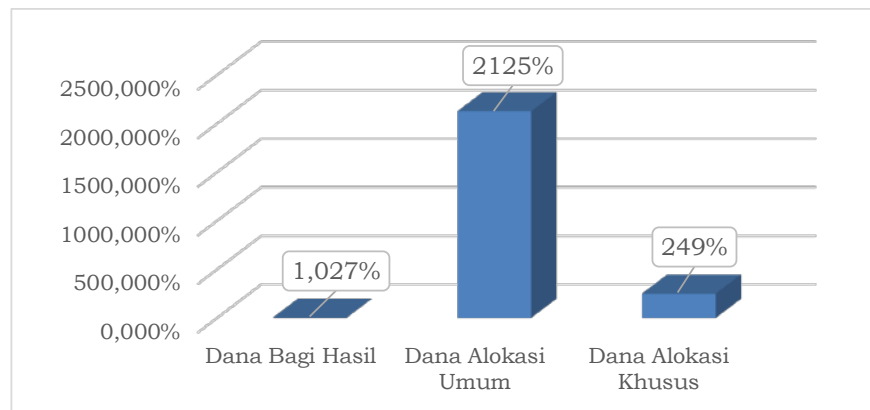


2.2.3.1.2 PROYEKSI PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan Pendapatan Transfer ditargetkan melambat di 1,49% tetap dari Rp 2,43 triliun di 2026 menjadi Rp 2,62 triliun di 2030. setiap tahun dari tahun 2026 sampai tahun 2030 Proyeksi pendapatan transfer dilakukan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan transfer antardaerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua.

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat dilakukan terhadap dana perimbangan dan dana desa, sedangkan insentif fiskal tidak diproyeksikan dan dianggap sebagai bagian dari dana bagi hasil. Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan 1,49% per tahun dengan target Rp1,065triliun di 2026 menjadi 1,094 triliun di 2030. Distribusi dana perimbangan terbesar adalah Dana Alokasi Umum sebesar 69% dari total dana perimbangan. Transfer Pemerintah pusat lainnya, tidak ditargetkan

Gambar II.50
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030



2.2.3.1.3 PROYEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Selama ini, lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah khususnya dari pemerintah pusat. Hingga penyusunan Rancangan RPJMD ini belum terdapat informasi dari pemerintah pusat mengenai adanya skema hibah sehingga tidak diasumsikan selama Tahun 2026-2030.

Tabel II. 38
Asumsi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PENDAPATAN	0,92	3,28	1.105.413	1.075.924	953.868	1.086.959	1.095.231	1.103.645	1.112.207	1.120.923	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,81	10,42	17.646	17.948	13.945	18.359	19.390	20.486	21.651	22.892	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,44	7,50	4.144	3.595	6.080	8.500	9.137	9.822	10.559	11.351	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-24,77	2,50	278	270	390	399	409	419	430	441	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,81	5,00	4.932	5.859	6.152	6.460	6.783	7.122	7.478	7.852	
1.1.4	Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-4,55	2,00	8.291	8.223	1.323	3.000	3.060	3.121	3.183	3.247	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,49	3,17	1.037.658	1.057.976	936.464	1.065.140	1.072.381	1.079.700	1.087.096	1.094.572	
1.2.1	TRANSFER PUSAT	1,36	3,06	1.026.247.11	1.045.100	928.922	1.051.943	1.058.854	1.065.834	1.072.884	1.080.005	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	-0,13	0,69	814.987	822.692	-	829.535	836.446	843.426	850.476	857.596	
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	-16,26	0,00	-	8.659	-	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	1,56	1,00	-	684.266	-	691.108	698.019	704.999	712.049	719.170	
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	-7,13	0,00	-	102.879,65	-	102.879,65	102.879,65	102.879,65	102.879,65	102.879,65	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	30,93	0,00	123.149	130.492	-	130.492	130.492	130.492	130.492	130.492	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	30,93	0,00	123.149	130.492	-	130.492	130.492	130.492	130.492	130.492
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-6,17	0,00	88.110	91.915	-	91.915	91.915	91.915	91.915	91.915
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	15,65	14,07	11.411	12.875	7.541	13.197	13.527	13.865	14.212	14.567
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	15,65	2,50	11.411	12.875	7.541	13.197	13.527	13.865	14.212	14.567
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-100,00	0,00	50.108	-	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459
1.3.1	Pendapatan Hibah	-100,00	0,00	33.753	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Penyusun. 2025

2.2.3.2 PROYEKSI BELANJA DAERAH

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sarmi yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sarmi
- e. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sarmi akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Sarmi, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Sarmi dalam 5 (lima) tahun ke depan

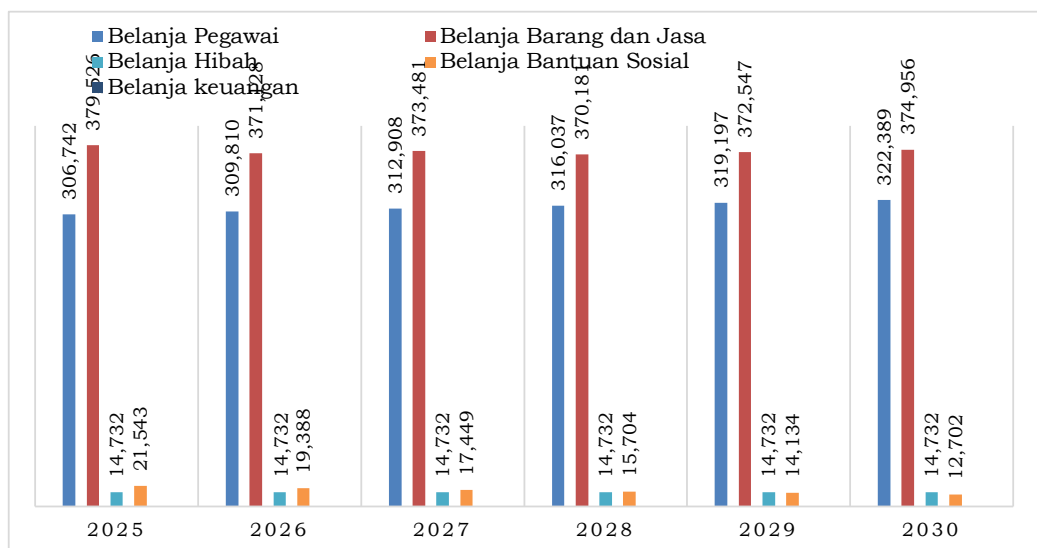
diproyeksinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 2,03\%$ pertahun dari Rp 3,143 triliun (2026) menjadi Rp 3,415 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relative lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang mengalami kontraksi $\pm 3,38\%$ pertahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan;

A. PROYEKSI BELANJA OPERASI

Proyeksi belanja operasi dilakukan pada setiap komponen belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk Belanja Operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2024 Rp 741,734 miliar) maupun target APBD tahun 2025 Rp 722,544 miliar. Adapun belanja operasi mulai tahun 2026 akan ditargetkan meningkat $\pm 0,62\%$ pertahun dari Rp 722,544 miliar (2025) menjadi Rp 724,799 miliar (2030).

Gambar II.51
Target Belanja Operasi Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030
(dalam juta)



e. Proyeksi Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan 1,00% per tahun pada komponen gaji dan tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan ASN dengan *baseline* dari APBD Tahun 2025. Asumsi kenaikan ini seiring dengan adanya rencana pemerintah pusat menaikkan gaji dan tunjangan ASN sebesar inflasi setiap tahunnya. Selain itu belanja pegawai juga diharapkan dapat terus menurun proporsinya terhadap total belanja daerah. Hal ini sebagai upaya pemenuhan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% dari

total belanja yang akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

f. Proyeksi Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -0,24% per tahun dari APBD Tahun 2025 seiring dengan asumsi adanya perubahan tingkat harga setiap tahunnya

g. Proyeksi Belanja Hibah

Belanja hibah pada Tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,00% per tahun dari APBD Tahun 2025 seiring dengan asumsi adanya perubahan tingkat harga setiap tahunnya. Belanja hibah pada Tahun 2028 dan 2029 diasumsikan juga mencakup hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029. Mendasari pelaksanaan hibah Pilkada pada Tahun 2024. pada Tahun n-1 Pilkada akan dihibahkan sebesar 40% dan sisanya sebesar 60% akan dihibahkan pada Tahun n Pilkada. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023. belanja hibah bersama dengan belanja bantuan sosial dan belanja modal merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

h. Proyeksi Belanja Bantuan Sosial

Seperti halnya belanja hibah. belanja bantuan sosial pada Tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami penurunan -10,00% per tahun. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023. belanja bantuan sosial bersama dengan belanja hibah dan belanja modal merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

B. PROYEKSI BELANJA MODAL

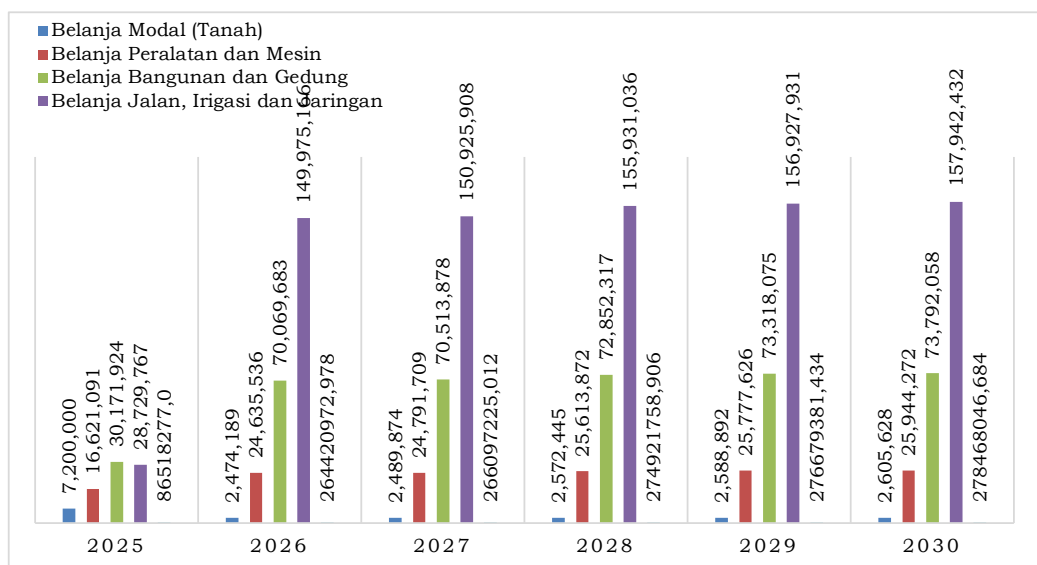
Belanja modal pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan akan terus meningkat dimana bersama dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023. Selain itu. belanja modal diharapkan diprioritaskan karena dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah.

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 25,76\%$ pertahun dari Rp 247,419 miliar (2026) menjadi Rp 260,562 miliar (2030).

Gambar II.52
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Meodal Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030



Gambar II.53
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (dalam juta)



Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan irigasi dan jaringan (56,29%). kemudian belanja bangunan dan Gedung (26,61%) kemudian belanja peralatan dan mesin (11,64%). dan sisanya belanja aset tetap lainnya (1%). Arah pembangunan jalan. irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunannya juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. Harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan publik seperti perkantoran. fasilitas umum. dan sejenisnya.

C. PROYEKSI BELANJA TIDAK TERDUGA

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2025-2030 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp 2,0 miliar pertahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

D. PROYEKSI BELANJA TRANSFER

Belanja transfer pada Tahun 2025-2030 diproyeksikan mengalami penurunan pada komponen transfer dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah di luar PKB dan BBNKB. Belanja transfer khususnya yang bersumber dari Dana Desa diharapkan dapat diarahkan untuk pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting*). Untuk Belanja Transfer ditargetkan sedikit mengalami penurunan yaitu $\pm -1,67\%$ pertahun dari Rp588,26 miliar (2026) menjadi Rp 603,18 miliar (2030).

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya yang berupa belanja modal yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang

canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

- 5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara lengkap asumsi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 39
Asumsi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	BELANJA	0,67	3,81	1.140.381	1.095.354	962.636	1.134.959	1.140.731	1.147.770	1.154.076	1.160.649	
2.1	BELANJA OPERASI	4,03	0,06	773.995	741.734	722.544	715.059	718.571	716.655	720.612	724.799	
2.1.1	Belanja Pegawai	-0,31	1,00	231.189	273.854	306.742	309.810	312.908	316.037	319.197	322.389	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5,31	-0,24	461.186	380.886	379.526	371.128	373.481	370.181	372.547	374.956	
2.1.5	Belanja Hibah	17,86	0,00	71.396	65.445	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14,96	-10,00	10.223	21.548	21.543	19.388	17.449	15.704	14.134	12.720	
2.2	BELANJA MODAL	-6,09	25,76	197.904	184.486	82.820	247.419.	248.987	257.244	258.889	260.562	
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-15,21	-18,40	-	10.000	7.200	2.474	2.489	2.572	2.588	2.605	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-18,39	9,31	24.318	18.369	16.621	24.635	24.791	25.613	25.777	25.944	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-12,28	19,59	53.142	44.091	30.171	70.069	70.513	72.852	73.318	73.792	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,69	40,62	118.235	111.828	28.729	149.975	150.925	155.931	156.927	157.942	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-38,71	26,34	1.807	197	86	264	266	274	276	278	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-100,00	-100,00	400	-	11	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-32,76	0,00	10.381	7.893	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-20,95	0,00	10.381	7.893	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
2.4	BELANJA TRANSFER	-2,16	2,30	158.098	161.240	149.370	164.581	165.272	165.970	166.675	167.387	
2.4.1	Belanja Transfer	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	Belanja Transfer	(2,16)	2,30	158.098	161.240	149.370	164.581	165.272	165.970	166.675	167.387	
2.4.2.1	Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-2,02	2,30	158.098	161.240	149.370	164.581	165.272	165.970	166.675	167.387	
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Tim Penyusun. 2025

2.2.3.3 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memproyeksikan pembiayaan pada lima tahun mendatang, yaitu tahun 2025-2030. Pembiayaan yang dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai catatan pembiayaan daerah tahun 2025 mendasari pembiayaan daerah pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sarmi Nomor 37 Tahun 2025, sehingga proyeksi dilakukan untuk asumsi pembiayaan daerah pada Tahun 2025-2030.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

A. PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Proyeksi penerimaan pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 dimana dalam penganggaran nantinya SiLPA ini digunakan atau dialokasikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diharapkan SiLPA dapat diminimalisir;

B. PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Proyeksi pengeluaran pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

- b. Penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan berdasarkan *draft* Narasi Akademik Perda Penyertaan Modal pada Tahun 2025-2030 yang diharapkan dapat ditetapkan tahun depan;

Berdasarkan perhitungan asumsi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, setiap tahun dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 diperoleh *netto* pembiayaan bernilai positif yang dapat digunakan untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah. Secara lengkap asumsi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 40
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi 2023	Target 2024	Proyeksi						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	PEMBIAYAAN	-13,42	188,14	113.248	75.260	200	48.000	45.500	44.125	41.868	39.725	
3.1	PENERIMAAN	-13,64	79,26	118.248	77.260	2.200	50.000	47.500	45.125	42.868	40.725	
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	-13,64	-5,00	118.248	77.260	2.200	50.000	47.500	45.125	42.868	40.725	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN	-20,47	-12,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-20,47	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-13,42	188,14	113.248	75.260	200.00	48.000	45.500	44.125	41.868	39.725

Sumber : Tim Penyusun. 2025

2.2.3.4 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendanai pembangunan daerah pada RPJMD Tahun 2025-2030, dilakukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, setelah dikurangi belanja gaji dan tambahan penghasilan ASN, termasuk DAU Earmark untuk gaji P3K, gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan, DAK Non Fisik sertifikasi guru, serta pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mendanai belanja prioritas daerah. Seperti tercantum pada tabel di atas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah diharapkan akan terus meningkat dari Rp 453.780 juta pada RKPD Tahun 2025 menjadi Rp 635.519 juta pada Tahun 2030.

Tabel II. 41
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	953.868	1.086.959	1.095.231	1.103.645	1.112.207	1.120.923
2.	Penerimaan Pembiayaan	2.200	50.000	47.500	45.12	42.868	40.725
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	502.288	518.412	520.262	521.344	523.639	526.130
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	453.780	618.547	622.468	627.425	631.437	635.519

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang meningkat juga tiap tahun dimana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2025 hingga 2030 secara berturut-turut.

Tabel II. 42
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030
(Juta Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	953.868	1.086.959	1.095.231	1.103.645	1.112.207	1.120.923
2.	Penerimaan Pembiayaan	2.200	50.000	47.500	45.12	42.868	40.725
	TOTAL PENERIMAAN	956.068	1.136.959	1.142.731	1.148.770	1.155.076	1.161.649
	(Dikurangi):						
3	Belanja Transfer	149.370	164.581	165.272	165.970	166.675	167.387
4	Belanja Tak Terduga	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Kapasitas Riil Pagu OPD	796.797	962.478	967.558	973.900	979.501	985.361

Sumber : Tim Penyusun. 2025

Kapasitas riil pagu OPD yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas seperti tercantum pada Tabel di bawah. dimana belanja prioritas terbagi menjadi Prioritas I. II dan III Prioritas I terdiri dari:

- a. Belanja yang bersifat mandatori dan diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 karena diperoleh pendapatan/penerimaan mandatori yang diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 yaitu belanja DAK Fisik. DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru). DAK Non Fisik BOS. DAU *Earmark* Pendidikan. Kesehatan. Pekerjaan Umum dan Kelurahan. Belanja Tidak Terduga. Transfer Dana Desa dan ADD. Iuran BPJS Perangkat Desa. serta Belanja BLUD; serta
- b. Belanja mandatori yang diasumsikan mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatkan pendapatan/penerimaannya yaitu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. DBHCHT. Hibah *Reimburse*. Iuran BPJS dari BHP Rokok (sebesar 37,5% dari pendapatan pajak rokok yang merupakan komponen pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Papua serta Belanja Hibah Pilkada.

Untuk prioritas II rencananya akan dialokasikan untuk:

- a. belanja operasional dan prioritas OPD (yaitu belanja rutin kantor. belanja program pencapaian target dan sasaran Renstra OPD) yang diasumsikan naik 5% per tahun mengikuti asumsi adanya kenaikan perubahan tingkat harga; serta
- b. belanja kebijakan daerah dalam rangka akselerasi pencapaian target dan sasaran pembangunan yang diharapkan akan terus meningkat.

Tabel II. 43
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	796.797	962.478	967.558	973.900	979.501	985.361
2	Prioritas I	443.178	535.330	538.156	541.683	544.798	548.058
3	Prioritas II	239.039	288.743	290.267	292.170	293.850	295.608
4	Prioritas III	114.579	138.404	139.134	140.046	140.852	141.695
	JUMLAH	796.797	962.478	967.558	973.900	979.501	985.361

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Sarmi, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sarmi. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan pembangunan, Kabupaten Sarmi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Sarmi, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional/Global, Nasional, Regional dan isu dalam lingkup Kabupaten Sarmi, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-

masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya sistem pengendalian intern, yang dibuktikan dengan opini BPK Kab. Sarmi masih WDP

Belum optimalnya sistem pengendalian intern di Kabupaten Sarmi menjadi salah satu pokok permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaan anggaran, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Kelemahan dalam pengendalian intern ini juga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Hal ini dapat dilihat dari indikator indeks pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sarmi masih pada peringkat C di tahun 2022. Kemudian Opini WTP dari BPK masih Wajar dengan Pengecualian, selain itu tingkat maturitas SPIP Sarmi masih di angka 1,99 dari nilai 4. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat maturitas SPIP Kabupaten Sarmi. Terkait dengan kinerja akuntabilitas hal ini dapat dilihat dari Nilai Sakip masih di angka 38,99 atau masuk kategori D. Kemudian nilai indeks SPBE masih di angka 1,53 dengan angka maksimal SPBE 5, hal ini menunjukkan masih perlu adanya peningkatan terkait pelaksanaan e-government di Kabupaten Sarmi.

Memahami permasalahan ini, maka kedepannya perlu memperkuat sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan akuntansi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik. Dengan memperbaiki sistem pengendalian intern, Kabupaten Sarmi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

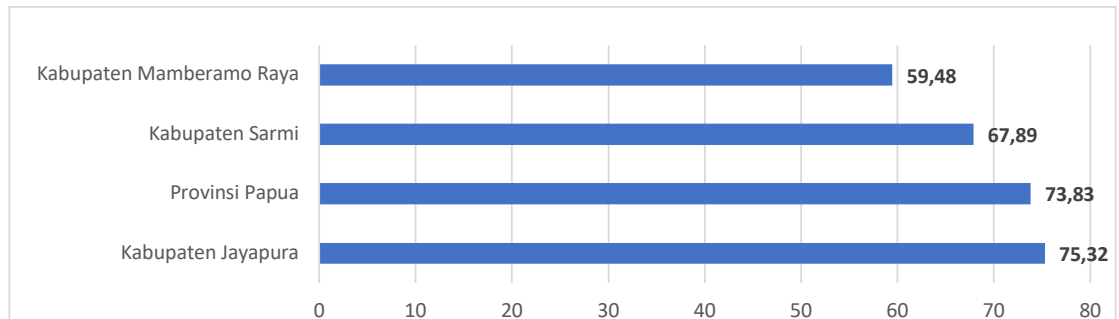
2. Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan dan pendidikan Kabupaten Sarmi

Belum optimalnya akses dan layanan kesehatan serta pendidikan di Kabupaten Sarmi menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat tidak mendapatkan layanan yang memadai. Keterbatasan jumlah tenaga medis dan pendidik yang berkualitas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, menyebabkan rendahnya kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan dan pendidikan anak-anak, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi daerah. Nilai IPM

2024 Sarimi, masih dibawah Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.54

IPM Kabupaten Sarimi dan Kabupaten sekitar di Provinsi Papua



Sumber: BPS Provinsi Papua Tahun 2025

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Sarimi menjadi perhatian serius, tercermin dari masih tingginya angka gizi kronis atau stunting pada anak-anak. Kondisi ini tidak hanya mengancam tumbuh kembang fisik dan kognitif generasi penerus, tetapi juga berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Faktor-faktor kompleks seperti keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai, serta kurangnya pemahaman dan praktik pemberian makanan yang tepat pada bayi dan anak menjadi akar permasalahan yang perlu diatasi secara komprehensif. Dampak jangka panjang dari stunting dapat meliputi penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa, serta memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sarimi. masalah gizi kronis pada anak-anak di Kabupaten Sarimi memerlukan intervensi yang terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, termasuk pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, pemberian makanan tambahan yang tepat sasaran, serta edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui menjadi langkah krusial. Selain itu, perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan, penyediaan air bersih yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dan praktik pengasuhan yang baik juga memegang peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Sarimi. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif dari keluarga merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan generasi Sarimi yang sehat dan berkualitas.

Kabupaten Sarimi masih dihadapkan pada permasalahan ketimpangan gender yang cukup signifikan, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, partisipasi yang rendah dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun publik, serta adanya pembagian peran gender yang cenderung tradisional membatasi potensi perempuan untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Selain itu, isu kekerasan berbasis gender dan kerentanan ekonomi yang lebih tinggi juga menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan secara

individu, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Sarmi secara keseluruhan karena potensi sumber daya manusia yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Kabupaten Sarmi menghadapi tantangan serius terkait stabilitas sosial, di mana toleransi dalam kehidupan bermasyarakat cenderung kurang stabil dan konflik sosial masih sering terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kesejahteraan. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dapat memicu polarisasi dan ketidakpercayaan antar kelompok, yang kemudian termanifestasi dalam berbagai bentuk konflik. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, ditambah dengan potensi provokasi dan isu-isu sensitif, semakin memperburuk kerentanan sosial di Kabupaten Sarmi, menghambat terciptanya harmoni dan persatuan yang esensial bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk membangun kualitas SDM dari berbagai aspek dengan pemenuhan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran Masyarakat. Selain itu, program-program yang fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan juga harus digalakkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, yang akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3. Perekonomian Kabupaten Sarmi masih bergantung pada aktivitas pemerintah daerah, yang terlihat dari kontribusi sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial yang wajib menjadi pembentuk PDRB terbesar

Perekonomian Kabupaten Sarmi yang masih bergantung pada aktivitas pemerintah daerah menjadi salah satu pokok permasalahan yang signifikan dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kontribusi sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial yang mendominasi Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor-sektor ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Ketergantungan yang tinggi pada anggaran pemerintah dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, terutama ketika terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal atau pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini juga menghambat diversifikasi ekonomi yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Sarmi masih bergantung pada aktivitas pemerintah daerah ditandai kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dalam pembentukan PDRB. Permasalahan perekonomian yang belum optimal di Kabupaten Sarmi terlihat dari angka PDRB Perkapita dengan capaian 83,36 juta ditahun 2023, dan lebih rendah dibandingkan PDRB Perkapita Kabupaten Jayapura yang mencapai 111,38 Juta. Dengan ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Sarmi masih belum termaksimal secara maksimal, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan

infrastruktur, aksesibilitas yang sulit, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor unggulan daerah. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian pada distribusi perekonomian di Papua, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Jayapura, menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan. Kabupaten Sarmi, dengan kontribusi sebesar 4,4 terhadap PDRB regional, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura yang mendominasi dengan kontribusi sebesar 23,89. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan investasi di Kabupaten Sarmi masih belum termaksimalkan secara optimal. Keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, pengembangan sumber daya manusia, serta investasi yang belum merata menjadi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap disparitas ini, menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah tersebut. Dengan ini diperlukan kebijakan dan intervensi yang lebih fokus untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi di Sarmi dan Mamberamo Raya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berimbang di tingkat regional.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sarmi yang masih belum optimal juga memiliki keterkaitan dengan angka pengangguran. Angka pengangguran di Kabupaten Sarmi sebesar 3,41 persen masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mamberamo Raya yang hanya 1,05 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan perekonomian di Sarmi, meskipun belum separah beberapa wilayah lain di Papua, tetap menjadi perhatian yang signifikan. Tingkat pengangguran yang moderat ini bisa jadi mencerminkan adanya sektor-sektor ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja, namun potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas masih perlu dioptimalkan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan pengembangan sumber daya manusia kemungkinan menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi angka pengangguran di Sarmi ke tingkat yang lebih rendah, idealnya mendekati atau bahkan melampaui capaian Kabupaten Mamberamo Raya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kedepannya pemerintah daerah perlu untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang memiliki potensi besar di Kabupaten Sarmi. Upaya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif akan sangat penting dalam menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dalam bidang kewirausahaan dan pengelolaan sumber daya alam juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang usaha baru. Dengan diversifikasi ekonomi yang baik, Kabupaten Sarmi dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pemerintah dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan

Masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sarmi menjadi salah satu permasalahan yang mendesak untuk diatasi dalam rangka mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor, distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan, sementara segelintir individu atau kelompok menikmati kekayaan yang berlebihan. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang tidak merata berkontribusi pada ketimpangan ini. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar, yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di dalam masyarakat.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Sarmi sebesar 14,05% relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Papua (17,26%) dan jauh di bawah angka kemiskinan Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai 30,29%, permasalahan kemiskinan di Sarmi tetap menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Angka kemiskinan Kabupaten Sarmi mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian besar penduduk Sarmi yang berada di bawah garis kemiskinan, menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Jayapura yang memiliki angka kemiskinan 11,60%, Kabupaten Sarmi masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Kondisi ini menyoroti adanya tantangan struktural dan ekonomi spesifik di Kabupaten Sarmi yang perlu diidentifikasi dan diatasi melalui kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran untuk secara signifikan menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kabupaten Sarmi menunjukkan permasalahan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Indeks Gini Kabupaten Sarmi yang mencapai 0,430 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mamberamo Raya (0,394), Kabupaten Jayapura (0,362), bahkan setara dengan rata-rata Provinsi Papua (0,362). Angka Indeks Gini yang lebih tinggi mengindikasikan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, di mana sebagian kecil penduduk menguasai proporsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar penduduk lainnya. Kondisi ini mengisyaratkan adanya disparitas ekonomi yang perlu diatasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sarmi. Ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memicu permasalahan sosial di kemudian hari. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Program-program yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang kurang beruntung harus diperkuat. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas juga sangat penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan pertumbuhan

ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Belum optimalnya pemenuhan layanan dasar seperti listrik, jalan dan jembatan, air bersih, rumah layak huni, perhubungan, dan komunikasi informasi

Belum optimalnya pemenuhan layanan dasar di Kabupaten Sarmi, seperti listrik, jalan dan jembatan, air bersih, rumah layak huni, perhubungan, dan komunikasi informasi, menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat perkembangan daerah. Banyak wilayah, terutama yang terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan tersebut, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang rusak dan tidak terawat, menghambat mobilitas barang dan orang, sehingga mengurangi peluang ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kurangnya akses terhadap listrik dan air bersih juga berkontribusi pada masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sarmi menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang merata akibat kondisi geografis dan topografi yang unik. Bentangan wilayah yang luas dengan hutan lebat dan morfologi perbukitan menyulitkan akses daratan ke sebagian besar ke daerah pedalaman, menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Akibatnya, masih banyak rumah tangga yang belum menikmati akses listrik PLN, dengan cakupan pemenuhan kebutuhan air minum layak baru mencapai 63,96%. Selain itu, akses terhadap rumah layak huni belum merata, diperparah oleh belum tersedianya jaringan transportasi yang memadai baik darat, udara, maupun laut yang dapat menghubungkan seluruh wilayah secara efisien. Keterbatasan ini juga berdampak pada belum memadainya cakupan dan akses pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat, semakin mempersempit peluang untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Sarmi. Kompleksitas geografis ini menuntut solusi pembangunan infrastruktur yang inovatif dan adaptif, mempertimbangkan karakteristik wilayah serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu merumuskan dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan. Prioritas harus diberikan pada pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kerja sama dengan pihak swasta terutama dengan investor juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan. Dengan meningkatkan pemenuhan layanan dasar, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

6. Masih tingginya pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia

Masih tingginya pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia di Kabupaten Sarmi menjadi salah satu permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Aktivitas pertambangan, deforestasi, dan penggunaan bahan kimia

dalam pertanian yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran air, tanah, serta udara. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. Pencemaran lingkungan yang terus berlanjut dapat mengurangi kualitas hidup dan menghambat potensi ekonomi daerah, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat.

Kabupaten Sarmi menghadapi permasalahan serius terkait tingginya pencemaran lingkungan yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerentanan daerah terhadap bencana alam seperti longsor dan banjir semakin meningkat akibat pengelolaan lingkungan yang kurang optimal. Permasalahan persampahan menjadi krusial karena ketiadaan tempat pengelolaan sampah yang memadai untuk menampung volume sampah yang dihasilkan, menyebabkan penumpukan dan potensi pencemaran. Lebih lanjut, alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan perkantoran, ruko, dan perumahan turut berkontribusi pada penurunan kualitas lahan, mengancam keberlanjutan lingkungan dan potensi sumber daya alam di Kabupaten Sarmi. Kondisi ini memerlukan tindakan mitigasi dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat dari dampak buruk pencemaran dan bencana alam.

Untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan. Pemerintah daerah harus mengembangkan regulasi yang ketat terkait pengelolaan sumber daya alam dan pencemaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Program rehabilitasi lingkungan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian dan industri juga perlu didorong. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu strategis internasional menjadi isu global dari RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional yang dapat memberikan pengaruh pada

pembangunan Kabupaten Sarmi. Isu global ini akan menjadi *warning action* dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Geopolitik dan geoekonomi di Kabupaten Sarmi, Papua, merupakan aspek penting yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Kabupaten Sarmi terletak di pesisir utara Papua, yang menjadikannya sebagai titik strategis dalam hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil laut dan potensi pertambangan, menjadikan Sarmi sebagai daerah yang menarik bagi investasi dan pengembangan ekonomi. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya ini sering kali muncul, terutama terkait dengan isu-isu lingkungan dan hak masyarakat lokal. Dalam konteks geopolitik, Kabupaten Sarmi juga menghadapi tantangan dari berbagai kepentingan, baik domestik maupun internasional. Ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat sering kali menjadi sorotan, terutama dalam hal penguasaan lahan dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, posisi Sarmi yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya rentan terhadap pengaruh asing, yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola hubungan ini dengan bijaksana agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Dampak perubahan iklim global di Kabupaten Sarmi, semakin terasa dengan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Perubahan pola cuaca ini mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber utama penghidupan mereka. Selain itu, naiknya permukaan air laut mengancam daerah pesisir, berpotensi menyebabkan hilangnya lahan dan merusak ekosistem yang ada. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga dapat memicu krisis pangan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Di sisi lain, perubahan iklim juga mempengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah Sarmi. Ekosistem yang kaya akan spesies endemik mulai terancam akibat perubahan suhu dan kondisi lingkungan yang tidak stabil. Ancaman ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat lokal. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan melindungi lingkungan di Kabupaten Sarmi.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di Kabupaten Sarmi, Papua, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan adanya akses internet yang semakin luas, masyarakat Sarmi kini dapat terhubung dengan dunia luar, membuka peluang untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan akses pasar yang lebih baik. Teknologi komunikasi juga memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan penyampaian informasi dan layanan publik yang lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan isu-isu penting, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Selain itu, teknologi pertanian dan perikanan juga mulai diterapkan di Kabupaten

Sarmi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor-sektor tersebut. Penggunaan alat dan mesin modern, serta teknik budidaya yang lebih efisien, membantu petani dan nelayan dalam mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik. Inovasi dalam teknologi ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perkembangan teknologi di Sarmi berpotensi membawa perubahan positif bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat setempat.

d. Industri 5.0

Industri 5.0 di Kabupaten Sarmi, Papua, mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi canggih dengan kebutuhan lokal. Industri 5.0, yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin, dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proses ini agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, penerapan Industri 5.0 di Sarmi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan praktik pertanian pintar, Kabupaten Sarmi dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi industri ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melestarikan lingkungan.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut :

a. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Resiliensi perekonomian di Kabupaten Sarmi, Papua, menunjukkan tanda-tanda yang positif meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan infrastruktur. Masyarakat Sarmi telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mereka. Sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal, mulai menerapkan praktik berkelanjutan dan inovatif untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam bentuk pelatihan dan akses ke teknologi baru juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Prospek perekonomian Kabupaten Sarmi ke depan terlihat cerah, terutama dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan

keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Dengan investasi yang tepat dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, Sarmi dapat menarik lebih banyak investor dan wisatawan, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan membangun resiliensi, Kabupaten Sarmi memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan di masa depan.

b. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Sarmi, merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh daerah ini. Dengan ekosistem yang kaya, Sarmi menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Hutan tropis yang lebat, terumbu karang yang indah, dan lahan basah yang subur memberikan habitat bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta mendukung kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Keanekaragaman ini tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penelitian ilmiah. Potensi lingkungan di Kabupaten Sarmi juga sangat menjanjikan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada, masyarakat dapat mengembangkan praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan, serta produk-produk lokal yang bernilai tinggi. Selain itu, upaya konservasi dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.

c. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sarmi, sangat menjanjikan, terutama dengan keberagaman budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakatnya. Masyarakat Sarmi memiliki keterampilan tradisional yang kaya, seperti kerajinan tangan, seni, dan praktik pertanian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, generasi muda di Sarmi semakin mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, berkat upaya pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, mereka dapat mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah, sehingga meningkatkan daya saing mereka di tingkat lokal maupun nasional. Modal manusia di Kabupaten Sarmi juga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Program-program pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis dan kewirausahaan dapat membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang ada. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat Sarmi dapat

menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan modal manusia, sehingga Kabupaten Sarmi dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Kabupaten Sarmi, terlihat seiring dengan perkembangan ekonomi dan akses pendidikan yang semakin meningkat. Masyarakat yang sebelumnya tergolong dalam kelas bawah, terutama yang bergantung pada sektor pertanian tradisional, kini mulai beralih ke kelas menengah berkat peluang usaha baru dan peningkatan keterampilan. Dengan adanya akses terhadap pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan, banyak individu yang mampu menciptakan usaha kecil dan menengah, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Transformasi ini menciptakan dinamika sosial yang baru, di mana masyarakat mulai mengadopsi pola pikir yang lebih progresif dan berorientasi pada pengembangan diri. Namun, pergeseran ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun sebagian masyarakat berhasil meningkatkan status sosial mereka, masih ada kelompok yang tertinggal, terutama mereka yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, pergeseran struktur kelas masyarakat di Sarmi dapat menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Sarmi, menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki sistem administrasi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik. Melalui penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-government, masyarakat kini dapat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Namun, tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas masih ada, terutama dalam hal korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Masyarakat Sarmi perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah juga sangat

penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

f. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas di Kabupaten Sarmi, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian subur dan hasil perikanan yang melimpah, banyak petani dan nelayan yang masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Kurangnya akses terhadap teknologi modern, pelatihan, dan informasi pasar menyebabkan mereka tidak dapat memaksimalkan hasil produksi. Selain itu, faktor-faktor seperti infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan akses ke pasar juga berkontribusi pada rendahnya produktivitas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Program pelatihan dan penyuluhan yang berfokus pada teknik pertanian dan perikanan yang lebih modern serta ramah lingkungan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, sangat penting untuk memudahkan akses ke pasar dan mengurangi kerugian pasca-panen. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Sarmi dapat meningkatkan produktivitasnya, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

RPJMD Kabupaten Sarmi, penting untuk melakukan telaahan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaahan arahan RPJMN terhadap wilayah Papua, dan telaah RPJMD Provinsi Papua, RPJPD Kabupaten Sarmi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Sarmi dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

a. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Papua

Dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah daerah, penting untuk memahami konteks strategis yang lebih luas, khususnya keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional dengan karakteristik dan potensi lokal. Kabupaten Sarmi, sebagai bagian dari Provinsi Papua, termasuk dalam wilayah prioritas pembangunan nasional yang mendapat perhatian khusus dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis Kabupaten Sarmi

tidak hanya mengacu pada dinamika lokal, tetapi juga mempertimbangkan arahan RPJMN terhadap pembangunan wilayah Papua. Oleh karena itu, analisis isu strategis Kabupaten Sarmi harus mempertimbangkan fokus intervensi ini guna memastikan bahwa rumusan strategi dan arah kebijakan daerah dapat mengakomodasi mandat nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan potensi khas wilayah Sarmi. Sesuai arahan RPJMN pengembangan wilayah pada Provinsi Papua, maka beberapa highlight intervensi pada Kabupaten Sarmi disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.44
Highlight intervensi RPJMN terhadap pengembangan wilayah di
Kabupaten Sarmi

Lokasi Prioritas	Highlight Indikator Intervensi
Kawasan Potensial Swasembada Pangan:	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi) dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan budidaya laut (marine aquaculture), perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture), serta perikanan tangkap, melalui:
	<ul style="list-style-type: none"> penguatan produksi, dengan output: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik
Kecamatan Perbatasan Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output: piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan output: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan
Pengendalian penyakit :	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:

Lokasi Prioritas	Highlight Indikator Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
	<ul style="list-style-type: none"> pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan

Sebagai bagian dari wilayah strategis nasional di Provinsi Papua, Kabupaten Sarmi memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, pelayanan dasar, dan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan. Dalam kerangka pengembangan kawasan swasembada pangan, Kabupaten Sarmi diarahkan untuk memperkuat produksi tanaman pangan dan pangan akuatik melalui optimalisasi lahan, pengembangan kawasan padi, penyediaan pupuk, benih ikan, alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung, jaringan irigasi, jalan akses, serta fasilitas logistik. Intervensi ini menegaskan peran Kabupaten Sarmi sebagai salah satu sentra ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk perikanan laut dan perairan darat, untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi secara berkelanjutan.

Selain itu, sebagai daerah yang memiliki wilayah perbatasan, Kabupaten Sarmi juga memainkan peran penting dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di kawasan perbatasan, melalui pelatihan tematik dan pemanfaatan platform digital manajemen ASN. Di bidang kesehatan, Kabupaten Sarmi menjadi lokus prioritas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, dengan dukungan pembangunan dan pengadaan sarana seperti puskesmas, posyandu, alat kesehatan, serta pengembangan fasilitas modular di daerah terpencil. Lebih jauh, peranan Kabupaten Sarmi juga terlihat dalam intervensi pengendalian penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, seperti frambusia dan HIV/AIDS, melalui penyediaan tenaga kesehatan terlatih, penyuluhan, serta penguatan infrastruktur sanitasi. Upaya ini diperkuat dengan peran aktif Kabupaten Sarmi dalam kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan stunting, guna memperbaiki status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Seluruh intervensi tersebut menunjukkan pentingnya peran strategis Kabupaten Sarmi sebagai simpul pembangunan kawasan timur Indonesia yang inklusif, sehat, tangguh, dan mandiri.

b. Telaah RPJMD Provinsi Papua

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, dilakukan telaah terhadap isu-isu strategis berdasarkan pendekatan teknokratik RPJMD Provinsi Papua 2025–2029. Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat terarah, berbasis data, dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional di wilayah timur Indonesia. Pendekatan teknokratik ini sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang rasional, sistematis, dan berdasarkan pada kajian akademik serta proyeksi capaian pembangunan lima tahunan.

Hasil telaah menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan pembangunan utama di Provinsi Papua juga sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Sarmi. Di antaranya adalah tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi secara sektoral dan spasial, yang disebabkan oleh kondisi geografis yang berat, terbatasnya konektivitas antarkawasan, serta tingginya biaya distribusi logistik. Kabupaten Sarmi, yang memiliki wilayah pesisir dan perbukitan yang cukup luas, mengalami tantangan serupa dalam membuka akses antar kampung dan sentra ekonomi. Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah, akibat minimnya hilirisasi dan keterbatasan fasilitas produksi lokal. Kabupaten Sarmi masih mengandalkan sektor primer seperti pertanian, perikanan tangkap, dan kehutanan, yang belum memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang menonjol adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dan tingkat pendidikan yang terbatas. Hal ini menjadi hambatan bagi peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan. Kabupaten Sarmi juga menghadapi tantangan dalam menarik investasi produktif, akibat infrastruktur dasar yang belum merata dan belum optimalnya pelayanan publik, sebagaimana tercermin dari nilai ICOR Provinsi Papua yang tinggi. Di sisi lain, defisit perdagangan antarwilayah masih tinggi, menunjukkan bahwa Kabupaten Sarmi belum mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah dan meningkatkan ekspor antardaerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, RPJMD Provinsi Papua menetapkan 10 isu strategis utama yang memiliki relevansi kuat dengan Kabupaten Sarmi. Di antaranya adalah:

- (1) optimalisasi sumber daya alam kelautan, perikanan, dan pertanian berbasis masyarakat adat;
- (2) pelestarian dan penguatan budaya lokal sebagai identitas pembangunan;
- (3) pengembangan pusat pelayanan distrik untuk mengurangi kesenjangan kota–kampung;
- (4) pengentasan kemiskinan melalui ekonomi komunitas;
- (5) peningkatan lapangan kerja produktif di sektor perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif;
- (6) perluasan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil;
- (7) adaptasi teknologi digital untuk pelayanan dasar dan pemasaran hasil produksi lokal;

- (8) pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam mengelola ekosistem pesisir dan hutan dataran rendah;
- (9) transformasi birokrasi lokal dengan memperkuat kapasitas aparatur kampung dan distrik; serta
- (10) pengembangan perdagangan antardaerah melalui penguatan logistik laut dan promosi komoditas khas daerah seperti ikan laut, hasil hutan bukan kayu, dan olahan pangan lokal.

Isu-isu tersebut mendukung tema pembangunan Papua tahap I (2025–2029): "Penguatan fondasi transformasi dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, kelautan, industri dan pariwisata yang bersinergi dengan pola penghidupan masyarakat adat." Dalam konteks Kabupaten Sarmi, transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pelayanan dasar di kampung-kampung pesisir, hilirisasi hasil laut, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui koperasi dan pelatihan berbasis komunitas. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi lokal, serta arah kebijakan provinsi, maka integrasi RPJMD Kabupaten Sarmi ke dalam kerangka pembangunan Provinsi Papua menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

c. Telaah RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2045

Sebagai landasan perumusan RPJMD Kabupaten Sarmi 2025–2029, telaah terhadap isu-isu strategis dalam RPJPD 2025–2045 menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan arah pembangunan jangka menengah dengan visi jangka panjang daerah. Berdasarkan dokumen RPJPD, Kabupaten Sarmi menghadapi sejumlah tantangan lintas sektor, antara lain belum optimalnya pengelolaan bonus demografi, ketimpangan pendidikan dan kesehatan, tingginya angka pengangguran terbuka, serta terbatasnya infrastruktur dasar dan konektivitas antarkampung. Transformasi sosial menjadi fokus, termasuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang merata, peran aktif pemuda, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, isu-isu seperti kemiskinan ekstrem, degradasi budaya lokal, dan masih tingginya angka kekerasan terhadap kelompok rentan turut memperkuat urgensi integrasi kebijakan sosial dan kebudayaan ke dalam strategi pembangunan lima tahunan.

Di sisi lain, transformasi ekonomi dan tata kelola juga menjadi prioritas utama. Sektor ekonomi Sarmi masih bergantung pada pertanian dan perikanan yang belum optimal dari sisi nilai tambah, sementara sektor industri, pariwisata, dan perdagangan belum berkembang maksimal. Kebutuhan akan peningkatan investasi, produktivitas UMKM, serta konservasi sumber daya alam menjadi krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di bidang tata kelola, masih lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan kapasitas birokrasi, dan belum optimalnya layanan publik menuntut reformasi birokrasi yang adaptif dan berbasis digital. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 perlu memprioritaskan penguatan kelembagaan kampung, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta integrasi

data sektoral guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi menuju transformasi Sarmi 2045.

Visi RPJPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 -2045: 'Mewujudkan Sarmi Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Lokal Dan Kearifan Lokal. Upaya mewujudkan ini didukung dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Transformasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Lokal Yang Inklusif Dan Berkelanjutan
3. Mengoptimalkan Kemandirian dan Pemerataan Pembangunan Wilayah
4. Mentransformasikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Inovatif dan Bersih
5. Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Stabil dan Aman
6. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Yang Berkelanjutan
7. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Yang Berkualitas Dan Merata
8. Mewujudkan Pembangunan Yang Terintegrasi Dan Berkesinambungan

Adapun pada RPJMD 2025-2029 berkaitan dengan tema pembangunan Kabupaten Sarmi untuk periode 2025–2029 yang difokuskan pada peningkatan fondasi transformasi, yakni penguatan kapasitas pembangunan daerah di bidang sosial, ekonomi, dan politik secara berkelanjutan. Periode ini menjadi momentum penting untuk memperkuat capaian pembangunan sebelumnya dengan menempatkan masyarakat Asli Papua di Sarmi sebagai subjek utama pembangunan yang bermartabat. Transformasi tersebut diarahkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah kampung dan pesisir. Pendekatan ini bertujuan mewujudkan Sarmi yang lebih sejahtera, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

d. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS, pemerintah daerah berupaya mengenali secara dini berbagai isu strategis yang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, maupun tata kelola. Proses ini menjadi relevan bagi Kabupaten Sarmi yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan pesisir, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan tekanan ekologis lainnya.

Sebagai dasar kajian, dilakukan analisis terhadap capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Metadata 1 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017,

dengan total 220 indikator yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Melalui diskusi bersama Kelompok Kerja (POKJA), disepakati bahwa 9 indikator tidak relevan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarmi, sehingga dianalisis 211 indikator untuk periode 2018–2024. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, capaian TPB Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa hanya 18 indikator (8,53%) telah mencapai target nasional (SS), 79 indikator (37,44%) telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 21 indikator (9,95%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB), dan 93 indikator (44,08%) tidak atau belum tersedia datanya (TAD). Temuan ini mencerminkan tantangan nyata dalam penyusunan kebijakan yang responsif terhadap keberlanjutan pembangunan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis tersebut, isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sarmi dikelompokkan ke dalam empat pilar utama. Pada pilar sosial dan budaya, tantangan yang mencuat antara lain rendahnya kualitas hidup masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan; meningkatnya kesenjangan sosial khususnya menyangkut data Orang Asli Papua (OAP); belum optimalnya perlindungan bagi perempuan, anak, dan tenaga kerja; serta lambatnya pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif. Di bidang ekonomi dan infrastruktur, Kabupaten Sarmi menghadapi ketergantungan terhadap sektor primer yang rentan, nilai tambah komoditas unggulan yang belum maksimal, infrastruktur dasar yang belum memadai dan merata, serta lemahnya konektivitas wilayah dan dukungan terhadap pengembangan UMKM. Pada pilar lingkungan dan sumber daya alam, terdapat persoalan rendahnya ketahanan ekologi, pengelolaan SDA yang belum berbasis kearifan lokal, peningkatan pencemaran dan deforestasi, serta lemahnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan kapasitas mitigasi bencana. Sementara itu, di bidang tata kelola pemerintahan, permasalahan utama mencakup pemanfaatan dana otonomi khusus yang belum optimal, birokrasi yang belum efisien dan transparan, lemahnya penegakan hukum, partisipasi masyarakat dan lembaga adat yang masih rendah, serta belum terintegrasinya tata ruang dengan perencanaan pembangunan. Telaah ini menjadi fondasi penting dalam merancang arah kebijakan RPJMD yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis daya dukung serta daya tampung lingkungan. Adapun terdapat isu KLHS paling strategis di Kabupaten Sarmi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup melalui pemerataan layanan dasar dan perlindungan sosial
2. Diversifikasi ekonomi dengan pengembangan nilai tambah produk lokal
3. Pembangunan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan konektivitas
4. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis kearifan lokal
5. Penguatan tata kelola melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi, serta Pemberdayaan masyarakat adat dalam proses pembangunan

Isu-isu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sarmi memiliki keterkaitan yang erat dengan isu strategis pembangunan daerah, yang mencerminkan kebutuhan akan pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup

melalui pemerataan layanan dasar dan perlindungan sosial selaras dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi potensi bencana, terutama di wilayah-wilayah rentan. Diversifikasi ekonomi dengan pengembangan nilai tambah produk lokal mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendorong ekonomi kerakyatan, dan memperkuat kekayaan budaya serta kearifan lokal masyarakat adat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan konektivitas berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung ketahanan iklim. Terakhir, penguatan tata kelola melalui digitalisasi, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat adat sejalan dengan upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang menuntut tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif terhadap konteks lokal Papua. Keterkaitan isu KLHS dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Sarmi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.45

Keterkaitan Isu KLHS RPJMD dengan Isu Strategis Kabupaten Sarmi

ISU KLHS RPJMD KABUPATEN SARMI	ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN SARMI
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta upaya mitigasi potensi bencana
Peningkatan kualitas hidup melalui pemerataan layanan dasar dan perlindungan sosial	Peningkatan akses dan mutu pemenuhan kebutuhan dasar
Pembangunan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan konektivitas	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar
	Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan
Diversifikasi ekonomi dengan pengembangan nilai tambah produk lokal	Optimalisasi pendayagunaan potensi SDA secara berkelanjutan serta mendorong ekonomi kerakyatan
Penguatan tata kelola melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi, serta Pemberdayaan masyarakat adat dalam proses pembangunan	Optimalisasi kekayaan budaya serta kearifan lokal masyarakat adat dalam pembangunan
	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Otsu (Otonomi Khusus)

e. Telaah RTRW Kabupaten Sarmi

1) Tujuan Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarmi untuk periode 2013-2033 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Sarmi, tujuan penataan ruang Kabupaten tersebut dirinci sebagai berikut:

“Mewujudkan Daerah Yang Mandiri Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Alam Yang Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sarmi, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sarmi, yang perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Sarmi tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan mengenai Pola Ruang Kabupaten Sarmi, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan dengan strategi:
 1. meningkatkan dan memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani wilayah belakang;
 2. meningkatkan dan memantapkan sistem permukiman perkotaan dan perkampungan sebagai representasi keberadaan masyarakat; dan
 3. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan melalui pengembangan infrastruktur.
- b. Pengembangan kawasan perkampungan dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem pusat permukiman perkampungan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 2. mengembangkan pusat permukiman perkampungan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 3. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan perkampungan dan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 4. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dengan strategi:
 1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
 2. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi melalui pengembangan sistem jaringan seluler;
 3. meningkatkan jaringan prasarana energi dengan memanfaatkan energi terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 4. memanfaatkan potensi air permukaan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Sarmi sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi;
 5. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 6. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan persampahan dan limbah.
- d. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan strategi:
 1. menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 40% (empat puluh persen) dari seluruh wilayah;

2. menetapkan kawasan hutan paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) dari seluruh wilayah;
 3. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang alamnya berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan;
 4. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 5. mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;
 6. mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
 7. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 8. mencegah dan/atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis Kabupaten Sarmi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut; dan
 9. menetapkan dan mengakomodasi Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo – Foja menjadi Taman Nasional.
- e. Pengembangan kegiatan budidaya dengan strategi:
1. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 2. mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi;
 3. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan
 4. mengelola sumber daya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya
- f. Peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Sarmi dengan strategi:
1. pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang berdaya saing;
 2. penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan;
 3. penetapan kawasan agropolitan dan kawasan perikanan;
 4. penetapan kawasan spesifik terumbu karang sebagai daerah tangkapan ikan dengan cara tradisional;
 5. pengembangan potensi sumber daya alam, sejarah, dan religi sebagai tujuan wisata; dan
 6. pengembangan eksploitasi pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- g. Peningkatan fungsi kawasan dengan strategi:
1. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi

- khhusus pertahanan dan keamanan negara;
 2. menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 3. mengembangkan kegiatan budidaya secara terbatas di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional pertahanan dan keamanan negara;
 4. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 5. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah, terutama pada Pulau Liki yang merupakan Pulau Kecil Terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dengan strategi:
1. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 2. menetapkan kawasan strategis Kabupaten Sarmi dari sudut kepentingan ekonomi;
 3. mendorong perkembangan kawasan strategis Kabupaten Sarmi dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada kawasan tersebut;
 4. menciptakan iklim investasi yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan;
 5. melakukan promosi peluang investasi dengan lebih intensif; dan
 6. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Sarmi, terdiri atas :

- a. Pusat kegiatan wilayah yaitu kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi;
- b. Pusat Kegiatan Lokal terdiri atas :
 1. Kampung Kiren Distrik Bonggo; dan
 2. Kampung Petam Distrik Sarmi Selatan
- c. Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas :
 1. Kampung Betaf Distrik Pantai Timur;
 2. Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur;
 3. Kampung Samanente Distrik Tor Atas; dan
 4. Kampung Arbais Distrik Pantai Barat.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri dari :
 1. Pulau Liki di Distrik Sarmi;
 2. Kampung Aurimi Distrik Apawer Hulu; dan
 3. Kampung Nengke Distrik Pantai Timur Barat.

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. Rencana ini memberikan gambaran

tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Sarmi terdiri atas :

- Kawasan Lindung
 1. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya meliputi :
 - a. kawasan suaka margasatwa berupa Suaka Margasatwa Mamberamo – Foja di Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu.
 - b. Kawasan taman wisata alam laut terdapat di Pulau Liki, Pulau Armo, Pulau Wakde, Pulau Yamna dan Pulau Yarsun.
 - c. Kawasan cagar budaya dan ilmu Pengetahuan terdapat di Pulau Yamna, Gua Jepang Tanjung Batu dan Tugu Yamagata.
 2. Kawasan Hutan Lindung meliputi :
 - a. Distrik Bonggo;
 - b. Distrik Pantai Timur Barat;
 - c. Distrik Pantai Timur;
 - d. Distrik Tor Atas;
 - e. Distrik Sarmi;
 - f. Distrik Sarmi Timur;
 - g. Distrik Sarmi Selatan; dan
 - h. Distrik Apawer Hulu.
 3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :
 - a. Kawasan lahan gambut terdiri :
 - Distrik Bonggo;
 - Distrik Bonggo Timur;
 - Distrik Pantai Timur;
 - Distrik Pantai Timur Barat;
 - Distrik Tor Atas;
 - Distrik Sarmi Selatan;
 - Distrik Sarmi Timur;
 - Distrik Sarmi;
 - Distrik Pantai Barat; dan
 - Distrik Apawer Hulu.
 - b. Kawasan resapan air
 4. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai;
 - c. kawasan sempadan sekitar danau/ waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
 - e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - f. ruang terbuka hijau.
 5. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas :
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan longsor; dan
 - c. kawasan rawan gelombang pasang.
 6. Kawasan lindung geologi terdiri atas :

- a. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - b. kawasan rawan tsunami.
- 7. Kawasan lindung lainnya berupa terumbu karang terdapat pada Kepulauan Liki, Pulau Armo dan Pulau Yamna.
- Kawasan Budidaya
 - 1. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap terdiri atas :
 - a. hutan produksi terbatas;
 - b. hutan produksi; dan
 - c. hutan produksi yang dapat di konversi.
 - 2. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan hortikultura; dan
 - e. kawasan peruntukan peternakan.
 - 3. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
 - 4. Kawasan Peruntukan Pertambangan terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - 5. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - a. kawasan industri besar;
 - b. kawasan industri sedang; dan
 - c. kawasan industri kecil.
 - 6. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :
 - a. Kawasan wisata alam meliputi :
 - Pulau Liki, Pulau Armo, Pantai Kelapa Satu dan Pantai Bagaiserwar di Distrik Sarmi;
 - Air terjun Sewan dan Pantai Tanjung Batu di Distrik Sarmi Timur;
 - Air Terjun Ismari, Air terjun Safron, Sungai Tor dan Suaka Margasatwa Memberamo-Foja;
 - Pulau Yamna, Pulau Mengge, Pulau Masi-masi, Pulau Yarsun, Pulau Podena; dan
 - Danau Teuw, Danau Piamform dan Pulau Anus di Distrik Bonggo
 - b. Kawasan wisata budaya terdiri dari:
 - Tugu Yamagata dan Makam Tentara Jepang di Distrik Sarmi;
 - Gua Jepang Tanjung Batu di Distrik Sarmi Timur; dan
 - Basis pertahanan tentara Jepang di Pulau Yamna di Distrik Pantai Timur Barat
 - 7. Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
 - 8. Kawasan Peruntukan Lainnya terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan stadion dan perguruan tinggi;
 - c. kawasan peruntukan rumah sakit; dan

- d. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana.

3) Kawasan Strategis Kabupaten Sarmi

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sarmi, terdiri atas:

- o Kawasan Strategis Nasional yaitu Pulau Liki yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- o Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas :
 1. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Mamberamo-Sarmi;
 2. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu pesisir utara dan kepulauan Kabupaten Sarmi; dan
 3. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Memberamo-Foja yang terdapat dalam wilayah Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu
- o Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas :
 1. kawasan strategis kepentingan ekonomi meliputi :
 - a. kawasan pengembangan agropolitan Bonggo;
 - b. kawasan pengembangan ekonomi Sarmi; dan
 - c. kawasan pengembangan ekonomi Betaf.
 2. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan rawan bencana sepanjang pantai kabupaten Sarmi

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Sarmi

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan daerah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Sarmi yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Otsu (Otonomi Khusus)

Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi dan implementasi otonomi khusus (otsu) di Kabupaten Sarmi menjadi isu strategis yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang baik dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya praktik-praktik birokrasi yang lamban dan kurang adaptif, yang menghambat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penerapan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Implementasi otonomi khusus juga memerlukan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi

masyarakat. Dengan adanya otonomi khusus, Kabupaten Sarmi memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah secara lebih mandiri. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Dengan optimalisasi tata kelola pemerintah yang baik, Kabupaten Sarmi dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan memaksimalkan potensi otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan akses dan mutu pemenuhan kebutuhan dasar

Peningkatan akses dan mutu pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sarmi merupakan isu strategis yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus diperluas agar semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, peningkatan mutu layanan juga harus menjadi fokus utama, dengan memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang tersedia memenuhi standar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, seperti kurangnya anggaran, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan berkualitas.

3. Optimalisasi kekayaan budaya serta kearifan lokal masyarakat adat dalam pembangunan

Optimalisasi kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Sarmi merupakan isu strategis yang penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Sarmi memiliki beragam tradisi, seni, dan praktik budaya yang kaya, yang tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya ini, pemerintah daerah dapat menciptakan program-program yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan usaha berbasis budaya, seperti kerajinan tangan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembangunan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang inklusif dan menghargai kearifan lokal, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Optimalisasi pendayagunaan potensi SDA secara berkelanjutan serta mendorong ekonomi kerakyatan

Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan di Kabupaten Sarmi merupakan isu strategis yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sarmi memiliki kekayaan SDA yang meliputi hasil pertanian, perikanan, dan sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Namun, pemanfaatan SDA harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, agar tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA. Di sisi lain, mendorong ekonomi kerakyatan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan SDA dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang berbasis pada potensi lokal. Dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan pemasaran yang baik, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan pendapatan mereka. Melalui optimalisasi SDA dan penguatan ekonomi kerakyatan, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan

Ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sarmi menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Masyarakat perkotaan seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, sementara masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kurangnya investasi. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan migrasi penduduk dari desa ke kota, yang dapat memperburuk kondisi di kedua wilayah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang berfokus pada pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Program-program yang mendukung pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan harus menjadi prioritas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

6. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di Kabupaten Sarmi merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak daerah,

terutama yang terpencil, masih menghadapi tantangan serius dalam akses terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi akses terhadap layanan publik yang esensial, sehingga mengakibatkan ketidakmerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya alam dan ekonomi daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, yang berujung pada stagnasi dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah daerah perlu merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan berkelanjutan. Prioritas harus diberikan pada proyek-proyek yang dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga donor, dan masyarakat setempat sangat penting untuk mendanai dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sarmi dapat memastikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup serta upaya mitigasi potensi bencana

Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sarmi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini meliputi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penanaman pohon, serta pengurangan limbah dan polusi. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan juga perlu ditingkatkan agar kesadaran akan perlunya pelestarian lingkungan dapat terwujud. Dengan langkah-langkah ini, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga. Di sisi lain, mitigasi potensi bencana di Kabupaten Sarmi harus menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor. Strategi mitigasi yang efektif mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti tanggul dan saluran drainase yang baik, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Dengan mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, Kabupaten Sarmi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

BAB 3

Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab III RPJMD Kabupaten Sarmi berisi penjabaran visi, misi, tujuan, dan program prioritas pembangunan daerah. Bagian ini menjadi arah utama yang menuntun seluruh kebijakan dan langkah pembangunan lima tahun ke depan. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, tujuan yang terukur, serta program prioritas yang terarah, diharapkan pembangunan Kabupaten Sarmi dapat berjalan lebih fokus, konsisten, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.



DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.KES
BUPATI SARMI

HJ. JUMRIATLI SH
WAKIL BUPATI SARMI

3.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sararan

3.2

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Kabupaten Sarmi. Kabupaten Sarmi memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Sarmi dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi pembangunan ditindaklanjuti dengan perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan memiliki peran krusial dalam mengoperasionalkan visi dan misi ke dalam program pembangunan yang konkret. Penyusunan tujuan yang spesifik dan terukur akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Sarmi, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sarmi di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Sarmi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel III. 1
Penjabaran Makna Pokok Visi RPJMD Kabupaten Sarmi

Pokok Visi		Penjabaran Pokok Visi
1.	Bersatu	Pokok visi ini bertujuan untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sarmi untuk berperan serta dalam membangun Daerah guna mewujudkan Sarmi bermartabat. Seluruh lapisan masyarakat Sarmi merupakan aset Daerah dan Subyek Pembangunan Daerah.
2.	Maju	Bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sarmi menjadi daerah yang unggul dan terdepan di segala bidang, khususnya dari aspek Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Modal utama dalam mewujudkan visi ini adalah karakter masyarakat Sarmi yang akan dikelola menjadi pribadi yang memiliki etos kerja kuat, memiliki keinginan belajar yang tinggi, serta memiliki optimisme yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman.
3.	Sejahtera	Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Sarmi yang layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, terbebas dari kemiskinan, memiliki kualitas hidup secara fisik dan mental yang baik, terjamin keamanan dan ketenteramannya secara lahir dan batin, serta terpenuhi jaminan sosialnya
4.	Berkelanjutan	Fokus pada visi ini adalah untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarmi untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan yang berlangsung dilakukan dengan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) MISI 1: Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat.** Bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan, kelembagaan kampung dan

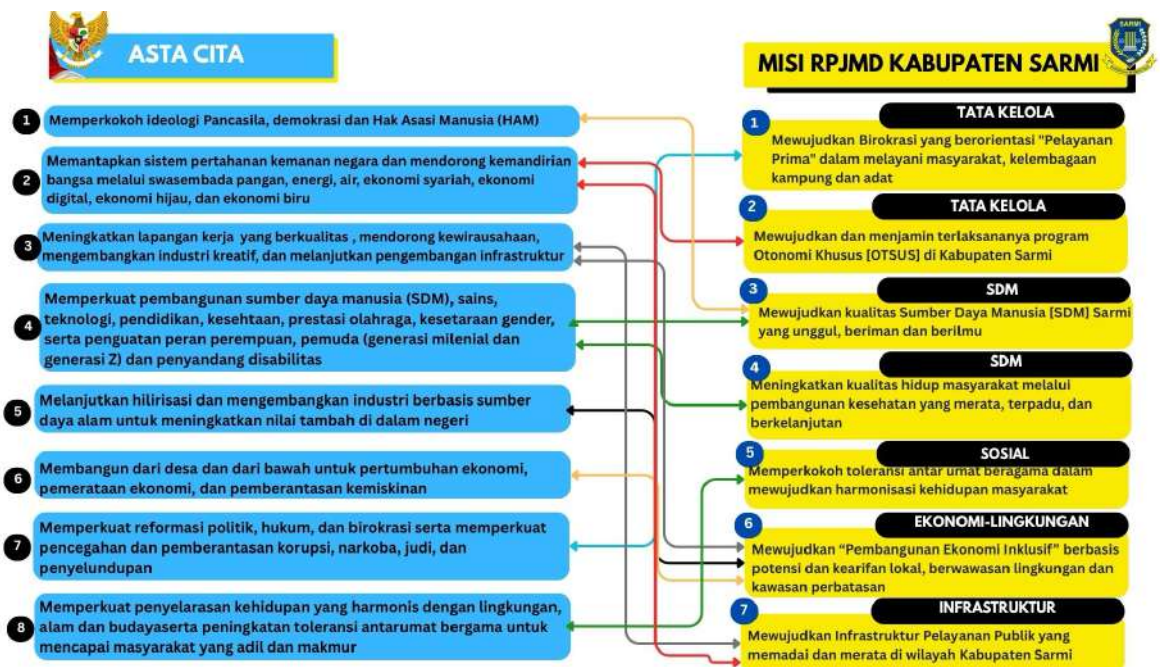
adat yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat melalui penyediaan layanan yang konsisten, efisien, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

- 2) **MISI 2: Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi**, keberhasilan pelaksanaan program otonomis secara optimal akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dan penganggaran diupayakan bersinergi dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) yang diatur dalam perundang-undangan. Misi ini dilakukan dengan mensinergikan program/kegiatan antar tingkat pemerintahan, sinergitas pendanaan, dan sinergitas antar pelaku pembangunan sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.
- 3) **MISI 3: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu**, misi ini diwujudkan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, beriman, dan berilmu. Ketercapaian misi ini dicerminkan dengan karakter SDM yang mumpuni, cerdas, serta dilandasi dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinannya.
- 4) **MISI 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan**, misi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Sarmi yang sehat, dan berkualitas. Oleh karena itu dilakukan langkah strategis yang bersifat progresif seperti pemenuhan gizi seimbang dan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan secara terpadu.
- 5) **MISI 5: Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat**, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan harmonis yang dicerminkan dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama.
- 6) **MISI 6: Mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan**, bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan keunggulan lokal. Kabupaten Sarmi memiliki potensi alam yang sangat berlimpah. Pengembangan potensi dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan memberdayakan seluruh masyarakat Sarmi melalui peningkatan skill serta memberikan perlindungan pekerja. Hal ini mampu mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7) **MISI 7: Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi**, Penyediaan Infrastruktur untuk layanan publik mencakup fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras dan

lunak yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi bukan hanya berfokus pada pembangunan yang bersentral untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Sarmi, namun juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Sarmi 2025-2029 juga diselaraskan dengan misi pembangunan nasional Asta Cita. Adapun gambaran keterkaitan antara Misi Kabupaten Sarmi dengan Misi RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar III.1
Keterkaitan Misi RPJMN dengan Misi Ranwal RPJMD
Kabupaten Sarmi



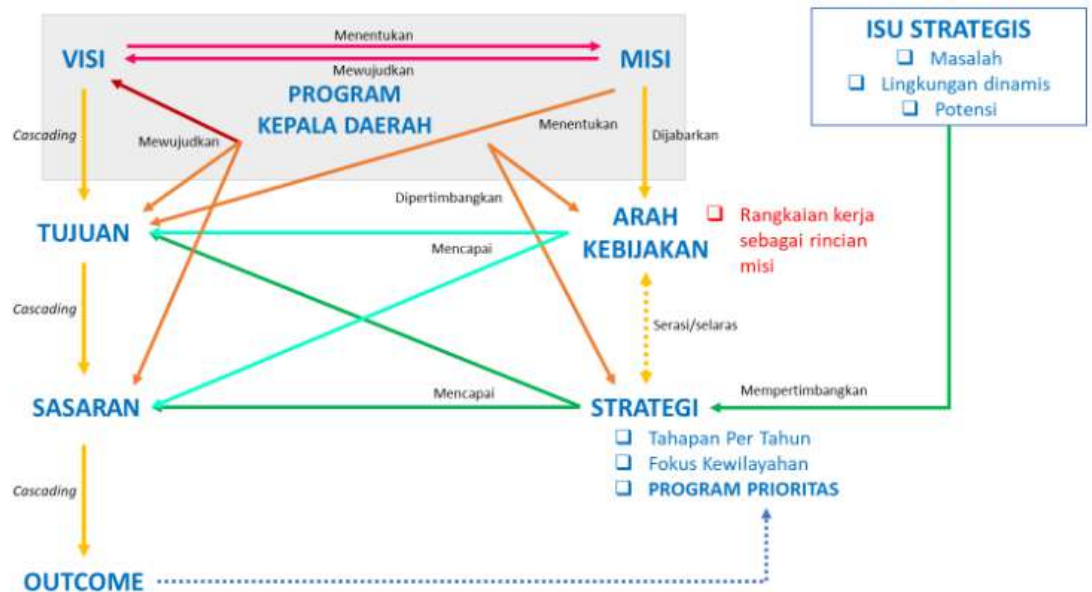
Secara garis besar, Misi Kabupaten Sarmi telah diintegrasikan dengan muatan yang terkandung pada 8 misi pembangunan nasional (Asta Cita) sehingga pembangunan di Kabupaten Sarmi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dan selaras dengan pembangunan yang ada di tingkat nasional.

3.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Secara skematik

keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat kami sajikan sebagai berikut:

Gambar III.2
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap

sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ☐ Meningkatnya akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi
- ☐ Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata
- ☐ Meningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan
- ☐ Meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Sarmi

2. T2. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdepan

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ☐ Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau
- ☐ Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah
- ☐ Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
- ☐ Penguatan pengarusutamaan gender

3. T3. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ☐ Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan
- ☐ Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi
- ☐ Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
- ☐ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

4. T4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ☐ Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak dan berkeadilan

5. T5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ☐ Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- ☐ Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana

6. T6. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai
- Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai
- Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut

Tabel III. 2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

VISI: “BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET PEMBANGUNAN						
					Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1: Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kumpang dan adat.	Tujuan 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	
	Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi	Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	
	Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69	
	Sasaran 1.3 Meningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan	Indeks Desa	Poin	0,5069*	0,52243	0,52816	0,53389	0,53962	0,54535	0,55108	
Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi		Indeks Pemenuhan hak-hak Orang asli Sarmi	Poin	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	
	Tujuan 2. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan terdepan	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91	

VISI: “BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu		Sasaran 2.1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99
MISI 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan		Sasaran 2.2 Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah	Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54
MISI 5: Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan		Sasaran 2.3 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50
		Sasaran 2.4 Penguatan pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender**	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00
	Tujuan 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91
	Sasaran 3.1		PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61
			LPE Kategori Pertanian,	%	-0,92	0,50	0,90	1,30	1,70	2,10	2,50

VISI: “BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
harmonisasi kehidupan masyarakat		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan	Kehutanan dan Perikanan								
		Sasaran 3.2 Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,33	2,28	3,22	4,17	5,11	6,06	7,00
		Sasaran 3.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi	%	4,45	4,95	5,46	5,96	6,46	6,96	7,47
		Sasaran 3.4 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,30	3,19	3,07	2,96	2,85	2,74
	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas	Tingkat Kemiskinan	%	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67	
		Sasaran 4.1 Pemenuhan Kehidupan Masyarakat yang layak dan berkeadilan	Rasio Gini*	Poin	0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344
			Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	Poin	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60

VISI: “BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana		Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32
			Indeks Risiko Bencana*	Poin	172,22*	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Poin	NA	78,93	79,19	79,45	79,71	79,97	80,23
		Sasaran 5.1 Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
MISI 7: Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi	Tujuan 6. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan		Indeks Infrastruktur	Poin	NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38
			Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	NA	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
		Sasaran 6.1 Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai	Persentase Ketercapaian	%	NA	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50

VISI: “BERSATU MEWUJUDKAN SARMI LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN ”											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN							
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Infrastruktur Perhubungan								
		Sasaran 6.2 Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	NA	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
		Sasaran 6.3 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman masyarakat	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	NA	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00

Sumber : Bappeda Kab. Sami, 2025 diolah

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh.

Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 adalah "Bersatu Mewujudkan Sarmi Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana

tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sarmi, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut:

Gambar III.3

Tema Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2026-2030



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Sarmi 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

Tema RPJPD Tahap I "Peningkatan Fondasi Transformasi"				
2026 (Tema I)	2027 (Tema II)	2028 (Tema III)	2029 (Tema IV)	2030 (Tema V)
Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Menuju Implementasi Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Pemantapan Perekonomian Daerah berbasis Pengelolaan SDA dan Ekonomi Kerakyatan	Perwujudan Sarmi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Strategi 1. Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Strategi 1. Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Strategi 1. Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani	Strategi 1. Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Strategi 1. Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT
Strategi 2. Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Strategi 2. Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Strategi 2. Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran	Strategi 2. Pembangunan kampung yang merata, produktif, dan aman	Strategi 2. Pembangunan kampung yang merata, produktif, dan aman
Strategi 3. Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi	Strategi 3. Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi	Strategi 3. Meningkatkan kesadaran, pendampingan dan pemerataan terhadap pendidikan untuk Orang Asli Papua	Strategi 3. Meningkatkan kesadaran, pendampingan dan pemerataan terhadap pendidikan dan pemerataan terhadap	Strategi 3. Meningkatkan kesadaran, pendampingan dan pemerataan terhadap pendidikan untuk Orang Asli Papua

Tema RPJPD Tahap I "Peningkatan Fondasi Transformasi"				
2026 (Tema I)	2027 (Tema II)	2028 (Tema III)	2029 (Tema IV)	2030 (Tema V)
Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar unggul, kreatif, dan inovatif	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya unggul, kreatif, dan inovatif	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Menuju Implementasi Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Pemantapan Perekonomian Daerah berbasis Pengelolaan SDA dan Ekonomi Kerakyatan	Perwujudan Sarmi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Strategi 4. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Strategi 4. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Strategi 4. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Strategi 4. Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat	Strategi 4. Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat
Strategi 5. Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Strategi 5. Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Strategi 5. Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya	Strategi 5. Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum marginal	Strategi 5. Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum marginal
Strategi 6. Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan	Strategi 6. Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas	Strategi 6. Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Strategi 6. Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Strategi 6. Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif

Tema RPJPD Tahap I "Peningkatan Fondasi Transformasi"				
2026 (Tema I)	2027 (Tema II)	2028 (Tema III)	2029 (Tema IV)	2030 (Tema V)
Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar daerah yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berkarakter dan Berbudaya unggulan daerah yang berdaya saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah Menuju Implementasi Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Pemantapan Perekonomian Daerah berbasis Pengelolaan SDA dan Ekonomi Kerakyatan	Perwujudan Sarmi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Strategi 7. Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif Strategi 8. Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Strategi 7. Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif Strategi 8. Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal	Strategi 7. Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif	Strategi 7. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana Strategi 8. Pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni dan berkesinambungan	Strategi 7. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana Strategi 8. Pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni dan berkesinambungan

b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sarmi 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai penjabaran langsung dari misi pembangunan daerah yang dirumuskan oleh kepala daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sarmi. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.5

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat.	Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi
	Pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan mudah diakses
Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi	Peningkatan kualitas penyerapan aspirasi dan hak dasar masyarakat adat Sarmi dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan pembangunan masyarakat Sarmi
	Penguatan pemanfaatan dana desa oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung intervensi pembangunan
Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu	Keterbukaan akses pendidikan melalui pemerataan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan keterjangkauan biaya pendidikan
	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan daerah
	Meningkatkan akselerasi pendidikan masyarakat yang berkualitas, khususnya Orang Asli Papua (OAP)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat
	Peningkatan kapasitas dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan
	Peningkatan upaya promotif dan preventif hidup sehat
	Pemenuhan gizi seimbang dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu, balita dan remaja putri
Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat	Peningkatan aktivitas pembangunan sosial budaya yang kreatif dan produktif
	Meningkatkan dukungan pendanaan dan fasilitasi untuk semua aktifitas keagamaan
	penguatan peran dan pengakuan komunitas hukum adat dalam sistem kenegaraan dengan pemberian ruang formal bagi praktik hukum adat
	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Misi	Arah Kebijakan
Mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan	Peningkatan fasilitasi sektor pertanian guna memberdayakan petani, meringankan pembiayaan petani, hingga pemenuhan sarana prasarana pertanian
	Penyediaan bibit unggul dan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan produk bernilai tambah dan akses pasar terpadu guna meningkatkan produktivitas komoditas kelapa
	Optimalisasi perlindungan, pemberdayaan, pendampingan dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha UMKM dan perwujudan kondusivitas iklim investasi daerah
	Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi angkatan kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Meningkatkan kualitas basis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang tepat sasaran
	Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin menuju kemandirian sosial
	Penguatan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup
	Pembangunan infrastruktur dan sumber daya tanggap bencana berbasis lingkungan
Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi	Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan, termasuk Pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terjangkau
	Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarmi 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Sarmi dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat, sebagai berikut:

a. Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif dan melayani

Implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani merupakan langkah strategis untuk membenahi tata kelola

pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, melainkan sebagai agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman. Profesionalisme ditunjukkan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penerapan sistem merit, dan penguatan integritas dalam menjalankan tugas. Sementara itu, adaptivitas diwujudkan dalam kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, teknologi, dan lingkungan kebijakan yang terus berubah, termasuk dalam konteks kultural dan geografis wilayah-wilayah adat.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima, reformasi birokrasi harus menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Pelayanan tidak boleh lagi bersifat *top-down*, kaku, dan birokratis, tetapi harus partisipatif, cepat tanggap, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, termasuk komunitas kampung dan masyarakat adat. Birokrasi dituntut tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga realitas sosial tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, penting dilakukan reorientasi sistem pelayanan agar lebih inklusif, menghargai nilai-nilai lokal, dan mampu menjembatani antara sistem pemerintahan modern dengan struktur sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Reformasi birokrasi yang menyentuh kelembagaan kampung dan adat juga menuntut adanya pengakuan terhadap peran strategis mereka sebagai mitra pemerintahan dalam pembangunan. Aparatur birokrasi harus mampu membangun komunikasi yang sejajar, memperkuat kapasitas kelembagaan kampung, dan membuka ruang bagi peran aktif lembaga adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pelayanan prima tidak hanya diukur dari efisiensi prosedur, tetapi juga dari sejauh mana birokrasi mampu menjadi jembatan keadilan, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi.

Arah kebijakan penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi merupakan pilar utama dalam mendukung strategi implementasi reformasi birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan ini menekankan pada penguatan struktur kelembagaan yang efektif dan efisien, pengembangan kompetensi aparatur yang responsif terhadap dinamika perubahan, serta tata kelola keuangan yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada “Pelayanan Prima” dalam melayani masyarakat, sekaligus memperkuat kelembagaan kampung dan adat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

b. Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT

Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT merupakan langkah yang mampu menciptakan birokrasi menjadi entitas yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan di berbagai wilayah, termasuk di daerah pedesaan dan adat, pemanfaatan IT menjadi instrumen strategis untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Digitalisasi layanan memungkinkan birokrasi mengubah prosedur yang rumit, meminimalkan praktik koruptif, dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terbuka.

Transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai modernisasi alat atau platform, melainkan harus diimbangi dengan transformasi cara pandang dan pola kerja birokrasi. Untuk mewujudkan pelayanan prima, pemanfaatan IT harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat, termasuk komunitas kampung dan masyarakat adat, yang sering kali terpinggirkan dari arus digitalisasi. Tanpa keberpihakan terhadap konteks lokal dan kesenjangan akses digital, digitalisasi justru berisiko memperdalam ketimpangan layanan. Oleh karena itu, kebijakan pelayanan berbasis IT harus disertai dengan penguatan literasi digital, penyediaan infrastruktur yang merata, serta desain sistem yang inklusif dan mudah digunakan.

Tidak hanya itu, pelayanan publik yang prima berbasis IT juga menuntut birokrasi yang adaptif dan kolaboratif dalam membangun hubungan dengan kelembagaan kampung dan adat. Sistem digital harus mampu mengakomodasi kebutuhan administratif kelembagaan lokal, memberikan ruang partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengawasan layanan, serta menghormati praktik-praktik adat yang relevan. Dengan cara ini, IT tidak hanya menjadi alat tetapi juga jembatan yang memperkuat konektivitas sosial dan budaya antara negara dan masyarakat. Birokrasi yang cerdas digital harus tumbuh bukan hanya di ruang server dan aplikasi, tetapi juga dalam relasi yang adil dan setara dengan rakyat yang dilayaninya. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan mudah diakses.

Arah kebijakan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, dan mudah diakses diarahkan pada penguatan sistem pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Melalui strategi akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT, pemerintah berupaya menciptakan layanan yang cepat, efisien, transparan, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelembagaan kampung dan adat. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada “Pelayanan Prima,” di mana pelayanan publik tidak hanya berfokus pada efektivitas administratif, tetapi juga mengutamakan kepuasan, kemudahan, dan keadilan bagi masyarakat sebagai wujud nyata birokrasi yang adaptif, profesional, dan melayani.

Misi 2. Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan dan menjamin terlaksananya program otonomi khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi, sebagai berikut:

a. Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat sasaran

Akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang akuntabel dan tepat sasaran merupakan tantangan sekaligus harapan dalam menjamin keberhasilan kebijakan afirmatif bagi masyarakat Papua. Dalam konteks Kabupaten Sarmi, pelaksanaan Otsus didorong dengan pendekatan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantive berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat asli Papua serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Akuntabilitas di sini bukan hanya soal pelaporan administratif, tetapi menyangkut pertanggungjawaban moral dan politik atas efektivitas dan dampak nyata dari setiap program Otsus yang dijalankan.

Untuk mewujudkan dan menjamin keberhasilan program Otsus di Kabupaten Sarmi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat adat, kelembagaan kampung, serta kelompok rentan yang selama ini tertinggal. Evaluasi yang tajam dan berbasis data sangat penting agar program tidak hanya sekedar formalitas tahunan. Mekanisme pengawasan juga harus diperkuat, tidak hanya dari lembaga negara, tetapi juga dari masyarakat sipil dan tokoh adat yang memiliki legitimasi kultural. Transparansi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan menjadi prasyarat mutlak untuk menghindari distorsi dan manipulasi program yang seharusnya bersifat afirmatif.

Percepatan pelaksanaan Otsus harus diletakkan dalam kerangka reformasi tata kelola lokal yang lebih inklusif dan kolaboratif. Kelembagaan kampung dan adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, agar program Otsus tidak bersifat top-down dan ahistoris. Tanpa partisipasi yang bermakna dari masyarakat, program Otsus berisiko gagal mencapai tujuan utamanya membangun Papua dari dalam, dengan pendekatan yang menghargai identitas, kearifan lokal, dan struktur sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan Otsus harus menjadi momentum untuk membangun model pembangunan yang lebih manusiawi, berakar pada konteks lokal, dan benar-benar memihak pada kesejahteraan rakyat Papua.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyerapan aspirasi dan hak dasar masyarakat adat Sarmi dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan pembangunan masyarakat Sarmi.

Arah kebijakan peningkatan kualitas penyerapan aspirasi dan pemenuhan hak dasar masyarakat adat Sarmi difokuskan pada penguatan peran serta masyarakat adat dalam mengatur dan mengurus pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan jati diri mereka. Melalui strategi akselerasi pelaksanaan program Otonomi Khusus yang

akuntabel dan tepat sasaran, pemerintah memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar menjawab kepentingan masyarakat adat secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus di Kabupaten Sarmi, di mana hak-hak dasar masyarakat adat terlindungi, aspirasi mereka terakomodasi, serta pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan nilai budaya, kearifan lokal, dan prinsip keberlanjutan.

b. Pembangunan kampung yang merata, produktif, dan aman

Pembangunan kampung yang merata, produktif, dan aman merupakan inti dari keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Sarmi. Kampung bukan hanya entitas administratif, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, implementasi Otsus harus berpijak pada penguatan kapasitas kampung sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan dari atas. Ketimpangan antar kampung, baik dalam akses infrastruktur, layanan dasar, maupun sumber daya ekonomi, mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan prinsip keadilan yang menjadi semangat Otsus.

Kampung yang produktif tidak hanya merupakan konteks ekonomi, tetapi juga dalam hal kemampuan masyarakatnya untuk mandiri, berdayasaing, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pelaksanaan Otsus di Sarmi harus memfasilitasi transformasi ekonomi lokal melalui dukungan terhadap usaha berbasis potensi kampung. Program ini akan berhasil jika didukung oleh akses pasar, pelatihan, pendampingan yang berkelanjutan, dan sistem kelembagaan kampung yang kuat. Tanpa itu, Otsus hanya akan menjadi program konsumtif yang tidak membangun kemandirian jangka panjang. Pemerintah daerah harus berhenti menempatkan kampung sebagai penerima bantuan pasif, dan mulai mengubahnya menjadi pusat inovasi lokal.

Aspek keamanan juga tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pembangunan kampung dalam kerangka Otsus. Rasa aman di kampung bukan hanya menyangkut tidak adanya konflik fisik, tetapi juga mencakup kepastian hak atas tanah, perlindungan sosial, serta keadilan dalam distribusi bantuan dan pembangunan. Ketidakamanan struktural yang dialami masyarakat adat karena marginalisasi, eksklusi dari pengambilan keputusan, atau konflik lahan harus diatasi dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan partisipatif. Mewujudkan kampung yang aman berarti membangun kembali kepercayaan antara negara dan masyarakat adat.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan pemanfaatan dana desa oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung intervensi pembangunan

Arah kebijakan penguatan pemanfaatan dana desa oleh Pemerintah Daerah difokuskan pada optimalisasi penggunaan anggaran desa agar lebih efektif dalam mendukung intervensi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kampung. Melalui strategi pembangunan kampung yang merata, produktif, dan aman, dana desa

diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan misi mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Sarmi, di mana pemanfaatan dana desa menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan selaras dengan aspirasi masyarakat adat serta kearifan lokal.

Misi 3. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mewujudkan kualitas sumber daya manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu, sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, dan inovatif

Peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas adalah pondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kreatif, dan inovatif, khususnya di Kabupaten Sarmi. Selama ini, kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan kampung-kampung terpencil masih menjadi tantangan serius. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini akan terus memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial dan memperlambat mobilitas masyarakat adat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan tidak hanya dengan membangun fasilitas fisik, tetapi harus diiringi dengan distribusi guru berkualitas, kurikulum kontekstual, serta pendekatan pembelajaran yang menghargai budaya lokal dan realitas kehidupan masyarakat Papua.

Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik semata, tetapi juga dari kemampuannya mencetak generasi yang berdaya cipta, mampu berpikir kritis, dan memiliki karakter kuat. Dalam konteks Sarmi, membentuk SDM yang unggul berarti menghasilkan anak-anak muda yang tidak meninggalkan budayanya, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan global. Untuk itu, pendidikan harus bersifat transformative tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran, kemandirian, dan kepekaan sosial. Pendidikan harus menjadi ruang yang membebaskan, bukan sekadar sistem penghafalan yang menjauhkan anak-anak Papua dari identitas dan potensi lokalnya.

Pendidikan yang merata dan bermutu menjadi prasyarat untuk mewujudkan SDM Sarmi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beriman dan berilmu. Keimanan dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada agama, tetapi juga pada nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, dan integritas pribadi. Pelayanan pendidikan harus diarahkan untuk mencetak manusia utuh yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin dan menjaga martabat masyarakatnya. Maka, investasi pendidikan harus menjadi agenda utama daerah bukan sekadar program, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk membebaskan masyarakat dari ketertinggalan dan membangun masa depan Sarmi yang mandiri dan bermartabat.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Keterbukaan akses pendidikan melalui pemerataan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan keterjangkauan biaya pendidikan.

Arah kebijakan keterbukaan akses pendidikan melalui pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta keterjangkauan biaya pendidikan ditujukan untuk memastikan seluruh masyarakat Sarmi memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya kesenjangan. Dengan strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah berupaya membentuk generasi yang unggul, kreatif, dan inovatif melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik yang profesional, serta biaya pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan. Kebijakan ini sejalan dengan misi mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sarmi yang unggul, beriman, dan berilmu, sehingga pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan mampu berdaya saing di berbagai bidang.

2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan daerah.

Arah kebijakan meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan daerah difokuskan pada pengembangan potensi generasi muda melalui pembinaan mental, keterampilan, dan bakat olahraga yang dapat menunjang prestasi sekaligus membentuk karakter positif. Kebijakan ini sejalan dengan strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas untuk membentuk pribadi yang unggul, kreatif, dan inovatif, di mana pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik tetapi juga mencakup penguatan fisik, disiplin, dan jiwa sportivitas. Hal tersebut mendukung misi mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sarmi yang unggul, beriman, dan berilmu, dengan menyiapkan pemuda yang sehat jasmani-rohani, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

b. Meningkatkan kesadaran, pendampingan dan pemerataan terhadap pendidikan untuk Orang Asli Papua

Meningkatkan kesadaran, pendampingan, dan pemerataan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) merupakan langkah mendasar dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, beriman, dan berilmu di Kabupaten Sarmi. Selama ini, rendahnya partisipasi pendidikan di kalangan OAP tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis atau ekonomi, tetapi juga oleh persoalan struktural seperti minimnya keberpihakan kebijakan, lemahnya kultur literasi, dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan harus menjadi gerakan kolektif melibatkan tokoh adat, gereja, lembaga pendidikan, dan pemerintah agar pendidikan tidak lagi dilihat sebagai beban atau keharusan luar, tetapi sebagai hak dan alat pembebasan.

Pendampingan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan formal dan realitas kehidupan masyarakat adat. Anak-anak OAP tidak hanya memerlukan guru yang mengajar, tetapi juga mentor yang memahami konteks sosial dan budaya mereka. Tanpa

pendekatan yang kontekstual dan humanis, sistem pendidikan hanya akan memaksakan standar luar yang asing dan tidak membumi. Pemerintah daerah perlu mendorong program-program afirmatif seperti beasiswa berbasis kampung, pelatihan guru lokal, serta model pembelajaran yang adaptif terhadap kearifan lokal. Dengan pendampingan yang tepat, pendidikan dapat menjadi jalan bagi OAP untuk bangkit tanpa kehilangan identitas dan martabat budayanya.

Pemerataan pendidikan bagi OAP bukan hanya soal distribusi sarana dan prasarana, tetapi soal keadilan sosial. Selama pendidikan hanya berkembang di pusat-pusat kota dan mengabaikan kampung-kampung terpencil, maka SDM yang unggul hanya akan lahir dari kelompok tertentu, sementara sebagian besar lainnya tertinggal. Mewujudkan SDM Sarmi yang beriman dan berilmu membutuhkan keberanian untuk melakukan intervensi yang berpihak, bukan sekadar merata secara statistik, tetapi adil secara substansial. Pendidikan harus hadir sebagai sarana pemerdekaan bagi Orang Asli Papua yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menguatkan kepercayaan diri, memperluas pilihan hidup, dan memungkinkan mereka menjadi pemimpin bagi tanahnya sendiri.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akselerasi pendidikan masyarakat yang berkualitas, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Arah kebijakan meningkatkan akselerasi pendidikan masyarakat yang berkualitas, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan yang setara melalui upaya peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Sarmi. Kebijakan ini diwujudkan melalui strategi meningkatkan kesadaran, pendampingan, serta pemerataan pendidikan bagi OAP, dengan menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan memahami konteks sosial budaya lokal. Langkah tersebut selaras dengan misi mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sarmi yang unggul, beriman, dan berilmu, sehingga OAP dapat tumbuh sebagai generasi yang cerdas, berakarakter, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah maupun bangsa.

Misi 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan, sebagai berikut:

a. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan

Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan merupakan hal yang penting dalam langkah pembangunan manusia yang berkeadilan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selama ini, ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran terutama di wilayah pedalaman dan kampung adat masih menjadi masalah yang menghambat perbaikan kesehatan publik. Pemerintah sering kali hanya fokus pada pembangunan fasilitas, namun

mengabaikan distribusi tenaga medis, ketersediaan obat, dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Tanpa upaya sistemik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, maka pembangunan kesehatan hanya akan menguntungkan sebagian kelompok dan memperkuat eksklusi bagi kelompok rentan.

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang terpadu dan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara pendekatan medis dengan pendekatan sosial dan kultural. Pelayanan kesehatan tidak hanya disediakan, tetapi juga harus diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Di banyak komunitas adat, ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan modern muncul akibat pengalaman diskriminatif, pelayanan yang tidak ramah, atau pendekatan yang tidak sensitif budaya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan harus mencakup pelatihan tenaga medis agar mampu berinteraksi dengan empati dan memahami konteks lokal. Pendekatan terpadu berarti kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan gizi, pendidikan, lingkungan hidup, dan ekonomi keluarga.

Pembangunan kesehatan yang berkelanjutan bukanlah proyek jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang yang harus didukung oleh kebijakan yang konsisten, pendanaan yang memadai, dan pengawasan yang partisipatif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kampung, tidak terkecuali yang terpencil, memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas. Lebih dari itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan. Dengan demikian, pembangunan kesehatan akan menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh untuk memastikan hidup yang sehat, bermartabat, dan setara bagi semua warga.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat.

Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat diarahkan untuk memperluas akses layanan yang adil, merata, dan bermutu, sehingga setiap warga Sarmi dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala jarak maupun biaya. Melalui strategi peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta menghadirkan inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2. Peningkatan kapasitas dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

Arah kebijakan peningkatan kapasitas dan pemerataan sarana serta prasarana kesehatan yang bermutu, disertai dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan, difokuskan pada terciptanya sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, modern, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui strategi peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan, langkah ini diwujudkan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak di setiap wilayah, melengkapi peralatan medis yang memadai, serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif. Kebijakan ini sejalan dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan, di mana kesehatan menjadi fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing.

b. Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat

Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat merupakan elemen fundamental dalam upaya membangun kualitas hidup yang berkelanjutan. Di banyak wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Sarmi, masalah gizi buruk dan kurang gizi masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada tingkat produktivitas, kecerdasan, dan daya tahan tubuh masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

Membangun pola hidup sehat tidak cukup hanya dengan perkataan, tetapi membutuhkan perubahan perilaku yang dibarengi dengan akses yang adil terhadap sarana hidup sehat. Pola konsumsi masyarakat sangat ditentukan oleh faktor ekonomi, budaya, dan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang terpadu harus mengintegrasikan aspek edukasi gizi, ketersediaan pangan lokal yang sehat, serta pemberdayaan masyarakat dalam memproduksi dan mengonsumsi makanan bergizi. Pemerintah daerah harus berani mendorong kolaborasi antara sektor kesehatan, pertanian, dan pendidikan untuk menciptakan ekosistem hidup sehat yang lebih mengedepankan pencegahan dan pemberdayaan.

Dalam konteks pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup tidak bisa bersifat reaktif, melainkan harus proaktif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Jika pembangunan kesehatan ingin benar-benar merata dan inklusif, maka intervensi gizi dan promosi gaya hidup sehat harus menyasar kelompok paling rentan masyarakat miskin, kampung adat, dan daerah tertinggal dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Dengan begitu, pembangunan kesehatan bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, tetapi juga membentuk masyarakat yang tangguh secara fisik, cerdas secara sosial, dan mandiri dalam menjaga kesehatannya.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya promotif dan preventif hidup sehat.

Arah kebijakan peningkatan upaya promotif dan preventif hidup sehat difokuskan pada pembentukan kesadaran dan perubahan perilaku

masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan diri maupun lingkungan melalui edukasi, kampanye, serta pemberdayaan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat, yang menekankan pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang, kebiasaan berolahraga, serta lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencegah timbulnya penyakit. Kebijakan ini mendukung misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat sebagai modal utama pembangunan daerah.

2. Pemenuhan gizi seimbang dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu, balita dan remaja putri.

Arah kebijakan pemenuhan gizi seimbang dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu, balita, dan remaja putri difokuskan pada upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta menjamin tumbuh kembang generasi muda yang optimal. Melalui strategi peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dan pola hidup sehat, langkah ini diwujudkan dengan penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses, program edukasi gizi, serta pendampingan intensif bagi kelompok rentan. Kebijakan ini selaras dengan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan, di mana pemenuhan gizi dan layanan kesehatan yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan produktif bagi masa depan Kabupaten Sarmi.

Misi 5. Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

a. Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran dan berbudaya

Peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran, dan berbudaya merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kehidupan sosial yang stabil dan berkeadaban. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Sarmi, perbedaan suku, agama, dan budaya bukan hanya keniscayaan, tetapi juga potensi besar jika dikelola dengan baik. Ketegangan sosial kerap muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, melainkan karena minimnya ruang dialog, lemahnya kehadiran negara dalam mengelola konflik sosial, dan rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pembangunan sosial tidak bisa hanya berorientasi fisik dan ekonomi, tetapi harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya yang menekankan pada toleransi dan kebersamaan.

Memperkokoh toleransi antar umat beragama menjadi bagian strategis dari agenda harmonisasi kehidupan masyarakat. Toleransi bukanlah sikap pasif menerima perbedaan, melainkan kemampuan aktif untuk menghargai,

berdialog, dan bekerja sama di tengah keragaman. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengatur regulasi tentang kerukunan, tetapi juga harus memfasilitasi ruang-ruang interaksi lintas iman, mendukung pendidikan multikultural, serta mencegah radikalisasi dan diskriminasi berbasis identitas. Dalam masyarakat adat, nilai-nilai gotong royong dan saling menghormati sebenarnya sudah hidup dan terinternalisasi yang dibutuhkan adalah pengakuan, penguatan, dan integrasi nilai-nilai lokal tersebut dalam kebijakan pembangunan sosial.

Masyarakat yang harmonis dan berbudaya tidak lahir dalam ruang sosial yang penuh ketimpangan, eksklusif, dan ketidakadilan. Tertib sosial dan kedamaian hanya dapat bertahan jika semua kelompok merasa diakui, didengar, dan dilibatkan. Oleh karena itu, pembangunan sosial harus berpihak pada penciptaan ruang partisipatif yang adil bagi semua golongan, termasuk minoritas agama dan kelompok adat. Pendidikan karakter, pelestarian budaya lokal, dan kebijakan sosial yang inklusif merupakan langkah konkret untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya hidup berdampingan secara formal, tetapi juga bersatu dalam semangat kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan begitu, harmonisasi sosial menjadi bukan hanya tujuan, tetapi juga proses berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat Sarmi yang kuat, damai, dan bermartabat.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan aktivitas pembangunan sosial budaya yang kreatif dan produktif.

Arah kebijakan peningkatan aktivitas pembangunan sosial budaya yang kreatif dan produktif diarahkan untuk mendorong lahirnya berbagai kegiatan masyarakat yang berlandaskan nilai budaya, kearifan lokal, serta semangat kebersamaan, sehingga mampu memperkuat identitas dan karakter sosial daerah. Melalui strategi peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran, dan berbudaya, kebijakan ini diwujudkan dengan mengembangkan ruang-ruang ekspresi budaya, memperkuat kegiatan seni dan tradisi, serta membangun interaksi sosial yang inklusif. Hal ini sejalan dengan misi memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, di mana pembangunan sosial budaya bukan hanya menciptakan kreativitas dan produktivitas, tetapi juga mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan rasa saling menghargai di tengah keberagaman.

2. Meningkatkan dukungan pendanaan dan fasilitasi untuk semua aktifitas keagamaan.

Arah kebijakan meningkatkan dukungan pendanaan dan fasilitasi untuk semua aktivitas keagamaan difokuskan pada upaya memastikan setiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan yang setara dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaannya secara aman, nyaman, dan bermartabat. Melalui strategi peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran, dan berbudaya, kebijakan ini diwujudkan dengan memberikan bantuan yang proporsional, fasilitas yang memadai, serta ruang interaksi lintas agama yang saling menghormati. Hal ini sejalan dengan misi memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam

mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, di mana dukungan terhadap aktivitas keagamaan tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan membangun kehidupan sosial yang damai dan inklusif.

3. Penguatan peran dan pengakuan komunitas hukum adat dalam sistem kenegaraan dengan pemberian ruang formal bagi praktik hukum adat.

Arah kebijakan penguatan peran dan pengakuan komunitas hukum adat dalam sistem kenegaraan dengan pemberian ruang formal bagi praktik hukum adat bertujuan mempertegas kedudukan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan ruang formal bagi praktik hukum adat, negara tidak hanya menghargai kearifan lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan masyarakat yang harmonis, tertib, toleran, dan berbudaya, di mana keberagaman hukum adat menjadi pilar terciptanya keteraturan sosial yang adil dan inklusif. Kebijakan ini juga mendukung misi memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, sebab pengakuan terhadap hukum adat memperkuat nilai kebersamaan, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan dalam keberagaman budaya dan keyakinan.

b. Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum marjinal

Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum marjinal adalah langkah mendasar dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Kelompok marjinal baik karena status ekonomi, gender, identitas budaya, maupun keyakinan agama sering kali tersisih dari proses pembangunan, terpinggirkan dalam kebijakan publik, dan tidak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar. Ketimpangan ini tidak hanya ketidakadilan struktural, tetapi juga menjadi sumber potensial konflik sosial. Dalam konteks memperkokoh toleransi antar umat beragama, pemberdayaan kaum marjinal adalah wujud nyata dari keadilan sosial. Dimana bahwa setiap warga, tanpa melihat identitasnya, berhak hidup bermartabat, dihormati, dan dilibatkan dalam kehidupan sosial.

Toleransi sejati tidak akan tumbuh dalam masyarakat yang dibiarkan terbelah secara sosial dan ekonomi. Selama masih ada kelompok yang diperlakukan secara subordinatif baik karena kemiskinan, keyakinan, maupun latar belakang budaya maka kehidupan yang harmonis hanya akan bersifat semu. Upaya perlindungan dan pemberdayaan harus diarahkan pada penguatan kapasitas kaum marjinal agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menjadi bagian aktif dari komunitas. Ini membutuhkan pendekatan lintas sector kebijakan afirmatif, pendidikan yang inklusif, pendampingan sosial, serta ruang dialog antar kelompok masyarakat yang selama ini terpisah oleh stereotip dan prasangka.

Tidak hanya sekadar intervensi programatik, perlindungan dan pemberdayaan kaum marjinal harus menjadi bagian integral dari visi

pembangunan sosial yang humanis. Pemerintah daerah bersama lembaga keagamaan, adat, dan masyarakat sipil harus membangun sistem sosial yang menjamin keadilan bagi semua, bukan hanya mayoritas. Dengan begitu, memperkokoh toleransi antar umat beragama tidak hanya berhenti pada seremoni atau slogan kerukunan, tetapi diwujudkan dalam praktik sosial yang menghargai martabat setiap individu, memberdayakan yang terpinggirkan, dan merawat keutuhan sosial secara berkelanjutan. Inilah pondasi yang sejati dari harmonisasi kehidupan masyarakat bukan semata bebas dari konflik, tetapi hadirnya rasa aman, dihargai, dan disetarakan bagi semua golongan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Arah kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan diarahkan untuk memastikan kesetaraan kesempatan, peran, dan manfaat bagi perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek pembangunan, sehingga tercipta keadilan sosial yang inklusif. Melalui strategi peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum marjinal, kebijakan ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, perlindungan dari diskriminasi, serta peningkatan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan misi memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat, karena kesetaraan gender akan memperkuat semangat saling menghargai, menumbuhkan solidaritas, serta mempererat kohesi sosial di tengah keberagaman agama, budaya, dan tradisi.

Misi 6. Mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan, sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing

Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah adalah pilar penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Namun, dalam konteks daerah seperti Kabupaten Sarmi yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap eksploitasi eksternal, pendekatan pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan angka statistik. Komoditas unggulan daerah sering kali tidak diperhatikan keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menata ulang strategi ekonomi daerah agar bertumpu pada penguatan kapasitas lokal, peningkatan nilai tambah di tingkat kampung, serta perlindungan terhadap akses dan hak atas sumber daya.

Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif berarti menempatkan masyarakat lokal, terutama kelompok adat dan pelaku ekonomi kecil, sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Komoditas unggulan tidak boleh hanya menjadi objek pasar bebas,

tetapi harus dikembangkan dengan memperhatikan kearifan lokal, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, peningkatan daya saing tidak bisa dibebankan hanya pada pelaku usaha, melainkan membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat seperti infrastruktur logistik, akses ke teknologi ramah lingkungan, pembiayaan inklusif, dan regulasi yang adil. Dalam konteks daerah perbatasan seperti Sarmi, ini juga berarti membuka konektivitas ekonomi tanpa mengorbankan kedaulatan lokal atas sumber daya dan pasar.

Aspek lingkungan harus menjadi dimensi tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berbasis komoditas. Selama ini, model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan degradasi lingkungan yang tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada ekosistem lokal. Oleh karena itu, ekonomi inklusif harus dibangun dengan wawasan ekologis, di mana keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan menempatkan potensi lokal sebagai landasan, memperkuat kapasitas pelaku lokal, dan menjadikan kearifan lingkungan sebagai panduan, Kabupaten Sarmi dapat membangun model ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil, lestari, dan berakar pada kekuatan masyarakatnya sendiri.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi sektor pertanian guna memberdayakan petani, meringankan pembiayaan petani, hingga pemenuhan sarana prasarana pertanian.

Arah kebijakan peningkatan fasilitasi sektor pertanian difokuskan pada upaya memberdayakan petani melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akses pembiayaan yang lebih ringan, serta pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing, di mana sektor pertanian dijadikan motor utama dalam menggerakkan perekonomian lokal dengan memperkuat daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas. Kebijakan ini mendukung misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, dengan menjadikan pertanian sebagai sektor strategis yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Sarmi.

2. Penyediaan bibit unggul dan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan produk bernilai tambah dan akses pasar terpadu guna meningkatkan produktivitas komoditas kelapa.

Arah kebijakan penyediaan bibit unggul dan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan produk bernilai tambah dan akses pasar terpadu difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas kelapa sebagai salah satu unggulan daerah. Melalui strategi peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan, langkah ini diarahkan pada

modernisasi sistem budidaya, penguatan peran kelompok tani, serta dorongan hilirisasi produk kelapa agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan terintegrasi dengan akses pasar. Kebijakan ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, dengan menjadikan kelapa sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sarmi secara merata.

3. Optimalisasi perlindungan, pemberdayaan, pendampingan dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Arah kebijakan optimalisasi perlindungan, pemberdayaan, pendampingan, dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Melalui strategi peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing, kebijakan ini diwujudkan dengan memberikan akses permodalan yang lebih mudah, pendampingan manajerial dan teknis, serta memperluas jaringan pemasaran berbasis teknologi dan pasar terpadu. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, dengan menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat yang produktif, mandiri, serta berperan penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Sarmi.

4. Peningkatan akses permodalan bagi pengusaha UMKM dan perwujudan kondusivitas iklim investasi daerah.

Arah kebijakan peningkatan akses permodalan bagi pengusaha UMKM dan perwujudan kondusivitas iklim investasi daerah difokuskan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi tumbuhnya sektor usaha lokal sekaligus menarik investor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui strategi peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis komoditas unggulan daerah yang berdaya saing, kebijakan ini diwujudkan dengan memperkuat sistem pembiayaan yang inklusif, menghadirkan regulasi yang ramah investasi, serta menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan aman. Langkah ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, di mana UMKM dan investasi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sarmi.

b. Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif

Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif merupakan komponen kunci dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, khususnya di daerah dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang tinggi seperti Kabupaten Sarmi. Namun, persoalan mendasar yang kerap

diabaikan adalah ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selama ini, tenaga kerja lokal seringkali terasingkan oleh sistem ekonomi yang lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural dan memperlemah daya saing masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus menjadi prioritas dengan strategi pelatihan yang kontekstual, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, tenaga kerja yang kompeten bukan hanya harus memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap nilai-nilai lokal, kearifan budaya, serta wawasan ekologis. Hal ini penting agar pembangunan tidak semata-mata mengejar produktivitas jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan struktur sosial masyarakat. Pelatihan kerja harus diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kekuatan daerah. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat adat dalam dunia kerja harus dipastikan bukan sekadar simbolis, melainkan dalam bentuk peran yang nyata dan strategis, baik sebagai pelaku produksi maupun pengambil keputusan ekonomi.

Kawasan perbatasan seperti Sarmi memiliki tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan tenaga kerja. Letak geografis yang terpencil sering dijadikan alasan keterlambatan pembangunan, padahal justru bisa menjadi basis keunggulan strategis jika dikelola dengan visi jangka panjang. Tenaga kerja lokal dapat diarahkan untuk menjadi pelaku utama dalam konektivitas ekonomi antarwilayah dan antarnegara, asalkan dibekali dengan keterampilan yang tepat dan akses pada pasar. Untuk itu, pemerintah daerah harus proaktif menjembatani dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan sektor riil agar terbentuk ekosistem ketenagakerjaan yang adil, partisipatif, dan inklusif. Dengan tenaga kerja yang berdaya saing namun tetap berpijak pada nilai lokal dan keberlanjutan, pembangunan ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan bermartabat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi angkatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan siap bersaing di berbagai sektor ekonomi, sekaligus membuka akses lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui strategi peningkatan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif, kebijakan ini diwujudkan dengan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Langkah ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, di mana tenaga kerja Sarmi tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata.

c. Penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integrative

Penurunan kemiskinan yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah strategis untuk memperbaiki efektivitas dan ketepatan intervensi program. Selama ini, persoalan klasik dalam penanggulangan kemiskinan terletak pada lemahnya validitas dan akurasi data penerima manfaat, yang menyebabkan kebijakan cenderung tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau justru mengabaikan kelompok paling rentan. DTSEN hadir sebagai kerangka nasional untuk menyatukan basis data sosial-ekonomi secara terintegrasi, sehingga kebijakan perlindungan sosial maupun program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan realitas objektif di lapangan.

Perlindungan sosial yang adaptif dan integratif menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan secara lebih struktural dan berkelanjutan. Adaptif berarti program sosial harus mampu merespons perubahan kondisi masyarakat seperti krisis ekonomi, bencana, atau fluktuasi harga pangan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, integratif mengharuskan sinergi antarprogram lintas sektor, seperti antara bantuan tunai, jaminan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan akses usaha produktif. Pendekatan ini penting untuk menciptakan graduasi atau mobilitas sosial, di mana masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga didorong keluar dari garis kemiskinan melalui penguatan kapasitas ekonomi. Integrasi ini juga harus melibatkan kelembagaan lokal, termasuk kampung dan adat, sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program yang kontekstual dan berbasis kebutuhan riil.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi dan kearifan lokal, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya menurunkan angka statistik, tetapi harus mengangkat martabat dan kemandirian masyarakat. DTSEN harus dimanfaatkan bukan hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi untuk merancang strategi ekonomi yang mengoptimalkan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan hilirisasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Program perlindungan sosial yang menyatu dengan pembangunan wilayah perbatasan akan menciptakan ekosistem ekonomi yang menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas basis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang tepat sasaran.

Arah kebijakan meningkatkan kualitas basis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang tepat sasaran difokuskan pada penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir untuk menjadi rujukan utama dalam perencanaan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui strategi penurunan kemiskinan berbasis DTSEN dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif, kebijakan ini memastikan bahwa intervensi pembangunan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan secara efektif. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, dengan menempatkan data sebagai fondasi

kebijakan yang berkeadilan, transparan, dan mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Kabupaten Sarmi.

2. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin menuju kemandirian sosial.

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin menuju kemandirian sosial difokuskan pada peningkatan kapasitas, akses, dan peluang usaha produktif agar kelompok tersebut mampu keluar dari ketergantungan dan bertransformasi menjadi masyarakat yang mandiri. Melalui strategi penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif, kebijakan ini diarahkan untuk memberikan intervensi yang tepat sasaran, berupa bantuan, pendampingan, dan program pemberdayaan yang terukur. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan kawasan perbatasan, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Sarmi

d. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di kawasan rentan seperti wilayah perbatasan. Selama ini, orientasi pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek sering kali tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali, konversi lahan besar-besaran, dan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur telah memperburuk degradasi lingkungan, mempertinggi risiko bencana, dan justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat lokal. Padahal, kerusakan lingkungan selalu berdampak paling besar terhadap kelompok miskin dan marjinal yang sangat bergantung pada alam untuk hidup.

Dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi dan kearifan lokal, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Banyak masyarakat adat dan kampung di daerah seperti Kabupaten Sarmi telah hidup selaras dengan alam melalui praktik-praktik tradisional yang terbukti ramah lingkungan. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan bukan saja menjaga identitas budaya, tetapi juga memperkuat ketahanan ekologis wilayah. Oleh karena itu, pembangunan harus bergeser dari pendekatan eksploitatif menjadi ekologis-partisipatif, di mana masyarakat lokal diberdayakan sebagai penjaga lingkungan sekaligus pelaku utama ekonomi berbasis sumber daya yang terbarukan.

Ketahanan bencana juga harus menjadi pilar dalam desain pembangunan wilayah perbatasan yang inklusif. Kawasan pesisir, hutan lebat, dan topografi ekstrim menjadikan banyak wilayah perbatasan sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau perubahan

iklim ekstrem. Pembangunan yang tidak memperhitungkan risiko ini hanya akan menciptakan kerugian jangka panjang dan menghambat mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara climate resilience, mitigasi risiko bencana, dan pembangunan ekonomi lokal harus menjadi agenda utama. Masyarakat harus dibekali dengan literasi bencana, infrastruktur harus tahan risiko, dan tata ruang harus berbasis risiko dan keberlanjutan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Arah kebijakan penguatan pengawasan aktivitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan hidup difokuskan pada upaya memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melalui strategi pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, kebijakan ini diwujudkan dengan memperketat regulasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan, di mana pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni dengan lingkungan agar keberlanjutan ekosistem dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dapat terjamin.

2. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya tanggap bencana berbasis lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya tanggap bencana berbasis lingkungan diarahkan untuk menciptakan sarana prasarana yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga mampu meminimalisir risiko bencana serta memperkuat kapasitas mitigasi masyarakat. Melalui strategi pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, kebijakan ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan, memperkuat sistem peringatan dini, serta menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan, di mana pembangunan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sekaligus menjamin keselamatan.

Misi 7. Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi, sebagai berikut:

a. Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien dan handal

Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien, dan handal merupakan pondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kesenjangan infrastruktur antara wilayah pusat dan pinggiran, termasuk di Kabupaten Sarmi, masih menjadi tantangan serius. Akses terhadap jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi di banyak kampung dan wilayah terpencil masih minim, sehingga membatasi mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan penyediaan layanan dasar. Ketimpangan ini bukan hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga disebabkan oleh perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan tidak mempertimbangkan keterpaduan antarsektor dan antarwilayah.

Untuk mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan merata, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data spasial serta sosial yang akurat. Infrastruktur tidak bisa lagi dibangun secara parsial atau simbolik, melainkan harus menjadi instrumen pemersatu antarwilayah dan penggerak utama aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Integrasi antar prasarana seperti menghubungkan jalan dengan sentra produksi lokal, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar harus menjadi perhatian utama. Efisiensi pembangunan juga harus dikedepankan, dengan menghindari proyek-proyek yang boros anggaran tetapi minim manfaat, serta mendorong pemanfaatan teknologi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.

Khusus di Kabupaten Sarmi yang memiliki karakteristik geografis perbukitan, pesisir, dan kampung-kampung terpencil, pembangunan infrastruktur harus bersifat kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal. Keandalan infrastruktur tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan durabilitas, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur tersebut mendukung aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan. Oleh karena itu, pembangunan sarana prasarana wilayah harus diletakkan dalam kerangka transformasi sosial: bukan sekadar membangun fisik, tetapi memperkuat konektivitas manusia, memperluas peluang ekonomi, dan mempercepat pelayanan publik. Hanya dengan demikian, pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi penopang keadilan dan kemajuan di seluruh pelosok Sarmi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan, termasuk Pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terjangkau.**

Arah kebijakan peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan, termasuk pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terjangkau, difokuskan pada percepatan pemerataan pembangunan yang mampu membuka aksesibilitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat integrasi pelayanan publik. Melalui strategi pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana wilayah yang terintegrasi, efisien, dan handal, kebijakan ini diwujudkan dengan membangun infrastruktur transportasi, energi, air

bersih, serta jaringan telekomunikasi yang modern dan inklusif. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi, di mana ketersediaan fasilitas dasar dan teknologi informasi yang terjangkau akan menjadi pendorong utama peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

b. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkesinambungan

Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkesinambungan merupakan hak dasar masyarakat dan sekaligus cerminan keberhasilan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Di Kabupaten Sarmi, tantangan dalam hal ini masih nyata, mulai dari keterbatasan hunian yang memadai, buruknya akses sanitasi, hingga kawasan permukiman yang rentan terhadap bencana dan terisolasi dari pusat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Banyak rumah masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di kampung-kampung, dibangun secara swadaya tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Hal ini memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.

Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai dan merata tidak cukup hanya membangun jalan atau gedung pemerintahan, tetapi juga harus mencakup penyediaan hunian yang layak, aman, dan mendukung kehidupan bermartabat. Perumahan harus dirancang sebagai bagian dari sistem kawasan, yang terhubung dengan air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan, serta ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan ekonomi warga. Kebijakan pembangunan perumahan tidak bisa bersifat teknokratik semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks lokal, kearifan budaya, serta aspirasi masyarakat, terutama dalam kawasan adat. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi multipihak, termasuk swasta, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal untuk mempercepat ketersediaan hunian yang inklusif dan berkelanjutan.

Di wilayah seperti Sarmi yang tersebar dan sulit dijangkau, pendekatan inovatif perlu dikembangkan, seperti pembangunan rumah modular, pemanfaatan material lokal, dan desain arsitektur yang adaptif terhadap lingkungan dan budaya setempat. Selain itu, penataan permukiman juga harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dengan cara ini, pemenuhan perumahan tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan manusia yang utuh, yang memperkuat integrasi wilayah, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan di Kabupaten Sarmi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1. Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai.**

Arah kebijakan penyediaan perumahan difokuskan untuk memastikan seluruh penduduk Kabupaten Sarmi mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan dukungan prasarana serta sarana utilitas yang memadai. Melalui strategi pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkesinambungan, kebijakan ini diwujudkan dengan pembangunan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, sekaligus memperhatikan daya dukung lingkungan serta keterjangkauan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi, di mana penyediaan rumah layak tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung terbentuknya lingkungan permukiman yang tertata, produktif, dan berkelanjutan.

3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi, tujuan, sasaran hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Sarmi. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
VISI KABUPATEN SARMi BERSATU MEWUJUDKAN SARMi LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN Misi 1 Mewujudkan Birokrasi yang berorientasi "Pelayanan Prima" dalam melayani masyarakat, kelembagaan kampung dan adat. Misi 2 Mewujudkan dan menjamin terlaksananya program Otonomi Khusus [OTSUS] di Kabupaten Sarmi Misi 3 Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM] Sarmi yang unggul, beriman dan berilmu	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Meningkatnya tata kelola anggaran Meningkatnya tata kelola akuntansi dan peleporan Meningkatnya kemandirian pembangunan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Persentase penurunan temuan BPK Derajat Otonomi Fiskal Daerah Persentase Keselaran RPJMD dengan RKPD Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Tingkat Ketersediaan Arsip	 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Arsip
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan merata	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pelayanan Publik Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
<p>Misi 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang merata, terpadu, dan berkelanjutan</p> <p>Misi 5 Memperkokoh toleransi antar umat beragama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat</p> <p>Misi 6 Mewujudkan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” berbasis potensi dan kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan kawasan perbatasan</p> <p>Misi 7 Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai dan merata di wilayah Kabupaten Sarmi</p>			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta pencatatan sipil yang diterbitkan bagi yang melapor	Program Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Meningkatkan pembangunan desa yang handal dan berkeadilan	Indeks Desa Tingkat penurunan desa (kampung) tertinggal	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			Meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Sarmi	Indeks Pemenuhan hak-hak Orang asli Sarmi	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah OAP (Orang Asli Papua)	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun OAP (Orang Asli Papua)	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun OAP (Orang Asli Papua)	
			Meningkatnya kualitas derajat kesehatan Orang Asli Papua	Angka Kematian Ibu (AKI) Orang Asli Papua (OAP)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Terperuhnya rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP)	Persentaserumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP)	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase OAP yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada Orang Asli Papua (OAP)	Persentase Penerima Manfaat Orang Asli Papua (OAP) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP)	Persentase tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang mengikuti pelatihan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah OAP yang rentan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian dan perkebunan Orang Asli Papua (OAP)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Orang Asli Papua (OAP)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Pertumbuhan Produksi Perkebunan Orang Asli Papua (OAP)	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian Orang Asli Papua (OAP) yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks Perkembangan Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
			Meningkatnya kapasitas UMKM Orang Asli Papua (OAP) yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan pengusaha UMKM Orang Asli Papua (OAP) yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkrm)
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan Orang Asli Papua (OAP)	Persentase perempuan Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja di sektor formal	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program perlindungan khusus anak

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio warasaha pemuda OAP	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga Orang Asli Papua (OAP)	Persentase atlet Orang Asli Papua (OAP) yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	Program Peminatan Perpustakaan
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase permasalahan adat yang terselesaikan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya kualitas perencanaan yang mendukung kesejahteraan OAP	Persentase kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kehidupan OAP	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase temuan penyelewengan anggaran otonomi khusus	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Indeks Pembangunan Manusia	
				Indeks Pendidikan	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
				Persentase atlet yang mendapatkan medali tingkat provinsi dan nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah OAP (Orang Asli Papua)	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun OAP (Orang Asli Papua)	Program pengelolaan pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun OAP (Orang Asli Papua)	
			Meningkatnya kesehatan murid TK dan SD	Persentase murid TK dan SD yang mendapatkan "Sarapan Sehat Harian"	Program pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				Indeks Kesehatan	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	
		Meningkatnya akses fasilitas kesehatan berkualitas di seluruh wilayah	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Indeks Pembangunan Kebudayaan**	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama**	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya	Meningkatnya pembangunan fasilitas keagamaan	Persentase tempat ibadah yang direnovasi/direhabilitasi	Program Pemerintahan Dan Kesenjahteraan Rakyat

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan pemuka agama, pegiat agama, dan sebagainya	Persentase jumlah pemuka agama/pegiat agama yang mendapatkan insentif	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Penguatan pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender**	
				Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
	Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan inklusif		dan peran perempuan dalam pembangunan		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				PDRB per Kapita	
				LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian dan perkebunan rakyat	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Pertumbuhan Produksi Perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	
		Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi		LPE Kategori Industri Pengolahan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang menjalin kemitraan	Program pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan pengusaha UMKM yang naik kelas	Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
				Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi	
			Meningkatnya kerjasama pembangunan Sarmi	Persentase kerjasama yang mendukung perekonomian daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas		Tingkat Kemiskinan	
				Rasio Gini*	
				Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR)	Program Pengendalian Penduduk
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mcpr)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Meningkatkan kualitas		Penurunan Intensitas Emisi GRK*	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
pengelolaan lingkungan hidup yang asri dan tahan bencana	Meningkatkan penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana* Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pertumbuhan Indeks Kualitas Air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
				Pertumbuhan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
				Indeks kinerja pengelolaan sampah	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Ketahanan Daerah	Program Pengelolaan Persampahan
		Penguatan wilayah yang tangguh dan responsif terhadap bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyerahan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	
			Meningkatnya tanggap bencana kebakaran	Respon Time Bencana Kebakaran	
				Indeks Infrastruktur	
				Persentase ketercapaian infrastruktur pekerjaan umum	
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan		Penyediaan infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang handal dan memadai		Persentase ketercapaian infrastruktur perhubungan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Persentase ketercapaian infrastruktur komunikasi dan informatika	
		Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dan memadai	Meningkatnya kualitas provider di Sarmi	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat		Persentase ketercapaian infrastruktur perumahan dan permukiman	
			Meningkatnya pemerataan dan kondisi bangunan sekolah	Persentase bangunan sekolah dalam kondisi baik	Program pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya pemerataan dan kondisi bangunan fasilitas kesehatan	Persentase bangunan fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman

3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sarmi 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif, melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat. Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Adapun berikut penjabaran program unggulan Bupati :

1. Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah

Kondisi birokrasi di Kabupaten Sarmi masih menghadapi tantangan. Masyarakat masih dihadapkan pada prosedur manual yang susah, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menuntut adanya transformasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, sederhana, dan bebas pungutan liar.

Program revitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik dihadirkan untuk memperkuat sistem digitalisasi pemerintahan. Pemerintah membangun aplikasi pelayanan, mengintegrasikan data antar-OPD, serta memperkuat infrastruktur teknologi agar pelayanan bisa dilakukan secara online dan terpusat. Upaya ini juga mencakup penguatan keamanan informasi agar data masyarakat tetap terlindungi.

Program ini sangat erat dengan misi birokrasi pelayanan prima. Dengan padanan program nomenklatur, yakni penyelenggaraan statistik sektoral dan persandian informasi, pemerintah daerah tidak hanya membangun sistem yang efisien tetapi juga akuntabel. Layanan publik digital menjadi fondasi untuk menciptakan birokrasi modern yang responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat.

2. Program penguatan reformasi birokrasi

Birokrasi di Kabupaten Sarmi belum optimal terhadap perubahan zaman. Hal ini menghambat kecepatan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Tanpa reformasi, birokrasi justru menjadi beban bagi masyarakat.

Melalui program penguatan reformasi birokrasi, pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan, menyederhanakan prosedur,

memperbaiki manajemen kinerja, serta menanamkan budaya integritas. Reformasi ini bertujuan mewujudkan aparatur yang profesional, efektif, dan fokus pada pelayanan publik.

Sejalan dengan nomenklatur penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program ini mendukung penciptaan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Program berkaitan langsung dengan misi birokrasi pelayanan prima, karena hanya dengan aparatur yang berintegritas, pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara [ASN] disertai pemberian reward dalam bentuk peningkatan kesejahteraan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan motor penggerak utama birokrasi, namun masih banyak ASN yang belum memiliki kompetensi sesuai tuntutan zaman. Kesejahteraan ASN yang terbatas juga berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan karier yang sistematis. Selain itu, reward berupa kesejahteraan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik. Dengan cara ini, ASN tidak hanya dibekali keterampilan teknis tetapi juga didorong untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

Sejalan dengan nomenklatur pengembangan SDM aparatur, program ini memperkuat misi birokrasi pelayanan prima dengan melahirkan aparatur yang profesional dan sejahtera. ASN yang kompeten dan termotivasi akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan ramah kepada masyarakat.

4. Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, termasuk Kabupaten Sarmi, masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam efektivitas penyaluran dana dan keberpihakan pada masyarakat adat. Dana yang besar seringkali belum berdampak optimal bagi peningkatan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP). Hal ini menuntut adanya pendekatan baru dalam tata kelola Otsus agar lebih transparan, tepat sasaran, dan berdaya guna.

Program “PRESISI” dihadirkan untuk mempercepat sekaligus merevitalisasi implementasi Otsus. Pemerintah daerah menekankan perencanaan yang matang, evaluasi yang ketat, serta fokus pada pembangunan kampung, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan pendekatan ini, manfaat Otsus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang selama ini paling membutuhkan.

Sejalan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat desa, program ini sangat erat kaitannya dengan misi menjamin terlaksananya Otsus. Otsus bukan sekadar kebijakan, melainkan instrumen nyata untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat kemandirian masyarakat adat, dan membangun Sarmi dengan berlandaskan kearifan lokal.

5. Program Kewirausahaan Digital (digital entrepreneurship) bagi generasi muda, angkatan kerja dan pelaku usaha di berbagai bidang usaha. [Program ini diperkenalkan sebagai tagline Pro K+DJ dibaca Pro Ke DJ]

Kabupaten Sarmi menghadapi tantangan dalam hal terbatasnya lapangan kerja formal dan keterampilan digital generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak potensi ekonomi lokal yang belum bisa dikembangkan secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan akses pasar digital. Program Kewirausahaan Digital hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Melalui program ini, pemerintah memberikan pelatihan keterampilan digital, pendampingan usaha, serta membuka akses ke platform perdagangan daring. Tujuannya adalah mendorong generasi muda dan pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha kreatif berbasis teknologi, sekaligus memperluas pasar produk lokal ke tingkat nasional bahkan internasional.

Program ini selaras dengan nomenklatur pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus mendukung misi pembangunan SDM unggul. Dengan membekali anak muda Sarmi dengan keterampilan digital, daerah ini tidak hanya mencetak wirausaha baru, tetapi juga menyiapkan generasi yang inovatif, beriman, dan berkarakter dalam memajukan daerahnya.

6. Program pemberdayaan dan peningkatan usaha super mikro melalui bantuan keuangan dan pelatihan kewirausahaan

Banyak keluarga di Kabupaten Sarmi menggantungkan hidup pada usaha super mikro, seperti perdagangan kecil, kerajinan rumah tangga, dan usaha berbasis kampung. Namun, usaha ini sering terhambat oleh keterbatasan modal, minimnya pelatihan, serta kurangnya akses ke pasar. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa bantuan keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan manajemen usaha. Dengan demikian, masyarakat kecil dapat memperkuat skala usahanya, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran.

Program ini sejalan dengan nomenklatur pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta mendukung misi SDM unggul. Pemberdayaan usaha super mikro bukan hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga membentuk etos kerja, kemandirian, dan keterampilan baru bagi masyarakat.

7. Program revitalisasi dan peningkatan Balai Latihan Kerja [BLK] bagi generasi muda dan angkatan kerja

Tingkat pengangguran di Sarmi masih cukup tinggi, salah satunya akibat minimnya keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada belum optimal dalam menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Oleh karena itu, revitalisasi BLK menjadi langkah strategis.

Program ini mencakup peningkatan fasilitas pelatihan, pembaruan kurikulum sesuai kebutuhan industri, serta peningkatan kualitas instruktur. Dengan pelatihan vokasi yang lebih modern, generasi muda Sarmi dapat menguasai keterampilan praktis yang bisa langsung digunakan dalam dunia kerja.

Keselarasan nomenklatur pelatihan vokasi menjadikan program ini selaras dengan misi SDM unggul. Dengan BLK yang kuat, Sarmi akan

melahirkan tenaga kerja terampil, berdaya saing, dan mampu bersaing di pasar kerja regional maupun nasional.

8. Program magang bagi Pemuda Sarmi pada perusahaan-perusahaan di Dalam Negeri dan Luar Negeri [Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melakukan kerjasama dengan Perusahaan Dalam Negeri dan Luar Negeri].

Pemuda Sarmi membutuhkan pengalaman kerja nyata agar mampu bersaing di dunia kerja modern. Namun, kesempatan untuk memperoleh pengalaman magang yang berkualitas masih terbatas. Program ini hadir untuk menjembatani pemuda dengan perusahaan nasional maupun internasional.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk membuka akses magang, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui magang, pemuda memperoleh keterampilan teknis, pengalaman kerja profesional, serta jejaring global yang akan berguna bagi masa depan mereka.

Sejalan dengan nomenklatur penempatan tenaga kerja dan pengembangan pemuda, program ini mendukung misi SDM unggul. Generasi muda Sarmi akan memiliki wawasan global, namun tetap berakar pada nilai iman dan budaya lokal, sehingga mampu membawa inovasi sekaligus memperkuat identitas daerah.

9. Program ajang prestasi olah raga dan pemberian bantuan pembinaan seluruh cabang olahraga.

Potensi olahraga di Kabupaten Sarmi cukup besar, namun pembinaannya masih terbatas. Banyak talenta muda yang tidak dapat berkembang karena minimnya fasilitas dan dukungan pembinaan. Program ini bertujuan mengembangkan olahraga sebagai sarana pembinaan fisik, mental, dan prestasi.

Pemerintah menyediakan sarana olahraga, pelatih, serta dukungan pembinaan untuk cabang-cabang olahraga unggulan. Dengan dukungan ini, anak-anak muda Sarmi diharapkan dapat berprestasi di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Program ini selaras dengan nomenklatur pengembangan olahraga prestasi, sekaligus mendukung misi SDM unggul. Olahraga tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga karakter disiplin, pantang menyerah, dan sportif yang sangat dibutuhkan dalam membangun generasi unggul.

10. Program jaminan gizi bagi anak usia 0 - 5 tahun dan ibu hamil untuk menekan angka stunting di Kabupaten Sarmi serta pemberian multi vitamin bagi remaja putri.

Masalah stunting masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Sarmi, dengan dampak jangka panjang pada kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Banyak anak-anak lahir dengan kondisi gizi yang buruk karena kurangnya asupan makanan bergizi, pengetahuan keluarga tentang pola makan sehat, serta akses layanan kesehatan yang terbatas.

Program ini hadir untuk memberikan intervensi berupa pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan remaja putri. Selain

itu, dilakukan pula edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kampanye perilaku hidup sehat. Tujuannya adalah memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting.

Sejalan dengan nomenklatur perbaikan gizi masyarakat, program ini mendukung misi peningkatan kualitas hidup. Dengan generasi yang tumbuh sehat dan kuat, Sarmi sedang menanam investasi jangka panjang untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

11. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang kesehatan

Layanan kesehatan di Kabupaten Sarmi masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang cepat, memadai, dan bermutu.

Program ini menitikberatkan pada pembangunan rumah sakit, puskesmas, posyandu, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Selain itu, tenaga kesehatan juga diperkuat agar pelayanan lebih merata hingga ke tingkat kampung.

Sejalan dengan nomenklatur peningkatan pelayanan kesehatan, program ini mendukung misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan akses kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas, angka kesakitan dapat ditekan, angka harapan hidup meningkat, dan masyarakat lebih produktif dalam mendukung pembangunan daerah.

12. Mendukung Program Nasional Makan Gratis bagi anak-anak sekolah melalui alokasi dana yang bersumber dari APBN

Banyak anak-anak di Sarmi datang ke sekolah tanpa sarapan atau asupan gizi yang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya konsentrasi belajar, kesehatan, dan perkembangan kognitif anak. Masalah gizi ini juga memperburuk ketimpangan sosial antara keluarga miskin dan mampu.

Program ini mendukung kebijakan nasional makan gratis dengan memberikan asupan gizi harian kepada siswa sekolah dasar dan menengah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah, orang tua, dan penyedia pangan lokal untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program.

Sejalan dengan nomenklatur pelayanan sosial, program ini memperkuat misi kualitas hidup dengan meningkatkan gizi anak sekaligus meringankan beban keluarga. Dalam jangka panjang, program ini membentuk generasi sehat, cerdas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

13. Program “zero pungutan” dan biaya gratis jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan SMA

Masalah utama pendidikan di Kabupaten Sarmi adalah masih adanya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Pungutan sekolah yang tidak resmi maupun biaya tambahan sering kali menjadi penghalang bagi keluarga kurang mampu. Hal ini mengakibatkan angka putus sekolah yang cukup tinggi dan memperlebar kesenjangan pendidikan.

Program ini memastikan seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA bebas dari pungutan. Dengan kebijakan ini, semua anak di

Sarmi memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah tanpa terbebani persoalan biaya. Pemerintah juga mendukung sekolah dalam menyediakan kebutuhan dasar pendidikan agar layanan berjalan optimal.

Sejalan dengan nomenklatur wajib belajar 12 tahun, program ini mendukung misi mencetak SDM unggul sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan gratis membuka jalan bagi lahirnya generasi berpengetahuan, berkarakter, dan siap bersaing dalam membangun daerah.

14. Program pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu

Banyak siswa dan mahasiswa berprestasi di Sarmi terkendala biaya sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Di sisi lain, ada pula siswa dari keluarga kurang mampu yang berpotensi namun kesulitan mengakses pendidikan karena kondisi ekonomi.

Program beasiswa ini diarahkan untuk memberikan dukungan finansial kepada dua kelompok tersebut: siswa berprestasi agar lebih berkembang, dan siswa kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan. Bantuan mencakup biaya sekolah, perlengkapan belajar, hingga dukungan hidup bagi mahasiswa di luar daerah.

Selaras dengan nomenklatur peningkatan mutu pendidikan, program ini berkontribusi langsung pada misi pembangunan SDM unggul. Dengan memberikan akses pendidikan setara, pemerintah daerah menanam investasi sosial yang akan kembali melalui kontribusi generasi muda yang lebih terdidik dan siap memajukan Sarmi.

15. Program “SARASEHAN” [Sarapan Sehat Harian] untuk semua murid TK dan SD di Kabupaten Sarmi berupa 1 [satu] gelas susu dan roti gandum [makanan lokal] setiap hari sebelum mulai aktifitas pembelajaran.

Banyak anak di TK dan SD di Kabupaten Sarmi datang ke sekolah tanpa sarapan yang cukup. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan berkonsentrasi, mudah lelah, dan mengalami gangguan pertumbuhan. Kurangnya gizi sejak dini juga berdampak pada prestasi akademik dan kualitas SDM ke depan.

Program SARASEHAN menghadirkan sarapan sehat berupa susu dan makanan lokal bergizi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Pemerintah daerah bekerja sama dengan sekolah, orang tua, dan penyedia pangan lokal untuk menjalankan program ini secara konsisten.

Sejalan dengan nomenklatur perbaikan gizi masyarakat, program ini memperkuat misi SDM unggul dengan membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sejak usia dini. Anak-anak yang sehat akan lebih siap menyerap ilmu dan berprestasi dalam pendidikan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

16. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang pendidikan

Fasilitas pendidikan di Sarmi masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Banyak ruang kelas rusak, laboratorium minim, dan sarana pendukung belajar yang tidak memadai. Kondisi ini menghambat kualitas proses pembelajaran.

Program infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun ruang kelas baru, memperbaiki fasilitas yang rusak, menyediakan laboratorium, perpustakaan, serta sarana berbasis teknologi informasi.

Dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, guru dan siswa dapat melaksanakan proses belajar yang lebih efektif.

Program ini sesuai dengan nomenklatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, sekaligus memperkuat misi SDM unggul. Infrastruktur pendidikan yang baik tidak hanya memperlancar pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

17. Program ajang prestasi seni, budaya dan agama untuk melestarikan budaya serta memperkuat iman dan taqwa.

Kabupaten Sarmi memiliki keragaman agama, etnis, dan budaya yang sangat kaya. Namun, keberagaman ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat memicu gesekan sosial. Oleh karena itu, perlu ruang ekspresi yang positif bagi masyarakat untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menumbuhkan toleransi dalam keberagaman.

Program ajang prestasi seni, budaya, dan agama hadir sebagai sarana menyalurkan kreativitas, memperkuat tradisi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan antarumat beragama. Melalui festival, lomba, dan kegiatan lintas agama, masyarakat memiliki wadah untuk berinteraksi secara harmonis.

Sejalan dengan nomenklatur, program ini memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus melestarikan nilai budaya lokal. Hal ini mendukung misi toleransi antarumat beragama, karena seni, budaya, dan agama diposisikan sebagai perekat sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat Sarmi di tengah keberagaman.

18. Program bantuan pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah.

Banyak tempat ibadah di Sarmi masih dalam kondisi kurang layak, padahal fungsinya sangat penting bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga pusat kegiatan sosial masyarakat. Keterbatasan dana dan sarana membuat pemeliharaan rumah ibadah sering terbengkalai.

Program bantuan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah diarahkan untuk memperbaiki dan membangun sarana ibadah sesuai kebutuhan umat di berbagai wilayah. Dengan dukungan ini, masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan tenteram, tanpa terbebani oleh keterbatasan fasilitas.

Sesuai nomenklatur fasilitasi sarana prasarana umat beragama, program ini mendukung misi memperkuat toleransi antar umat beragama. Pemerintah hadir untuk memastikan semua pemeluk agama mendapat perlakuan yang adil, sehingga harmoni kehidupan beragama di Sarmi semakin kuat.

19. Program bantuan insentif bagi Pendeta, Guru Injil, Guru Sekolah Minggu, Kostor, Ustadz, Guru Ngaji, Pengurus Takmir Masjid, Marbot Masjid/Mushola dan para pegiat agama.

Pemuka agama memiliki peran sentral dalam menjaga nilai moral, menguatkan keimanan umat, dan membangun kerukunan di masyarakat. Namun, kesejahteraan mereka sering kali terbatas, sehingga mengurangi fokus mereka dalam menjalankan pelayanan rohani.

Program insentif bagi pemuka agama memberikan dukungan finansial agar mereka lebih sejahtera dan bisa sepenuhnya berperan dalam membina umat. Pemerintah daerah memandang peran pemuka agama sebagai aset penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik sosial.

Sejalan dengan nomenklatur peningkatan peran pemuka agama, program ini memperkuat misi toleransi antar umat beragama. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, para pemuka agama dapat semakin aktif menjadi jembatan toleransi, penyampai nilai kebersamaan, serta motor penggerak kehidupan beragama yang harmonis di Sarmi.

20. Program “PROSPEK EMAS” [Proyek Pemerintah Daerah Sarmi Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Melibatkan Masyarakat Sarmi] [memprioritaskan dan memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek Pemerintah Daerah Sarmi serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat Sarmi].

Selama ini, kontraktor lokal di Kabupaten Sarmi menghadapi keterbatasan modal, keterampilan teknis, dan akses terhadap proyek pembangunan. Akibatnya, banyak proyek strategis daerah justru dikerjakan oleh kontraktor luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Kondisi ini menghambat berkembangnya dunia usaha lokal serta perputaran ekonomi di dalam daerah.

Program “PROSPEK EMAS” hadir untuk memberdayakan kontraktor lokal melalui prioritas keterlibatan dalam proyek daerah, pelatihan manajemen proyek, serta dukungan akses permodalan. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi antara dunia usaha, BUMD, dan masyarakat agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas.

Sejalan dengan nomenklatur pengembangan ketenagakerjaan dan dunia usaha, program ini memperkuat misi ekonomi inklusif. Dengan kontraktor lokal yang berdaya, pembangunan tidak hanya memperindah infrastruktur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan kompetensi lokal, dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

21. Program revitalisasi regulasi perijinan untuk memudahkan masyarakat membuka dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sarmi.

Proses perizinan usaha di Kabupaten Sarmi masih sering dianggap rumit, memakan waktu lama, dan tidak transparan. Hal ini menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal maupun calon investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah. Tanpa regulasi yang sederhana, iklim usaha sulit tumbuh dan ekonomi daerah tidak berkembang optimal.

Program revitalisasi regulasi perizinan usaha ditujukan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, serta menciptakan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi dalam perizinan agar pelaku usaha dapat mengurus izin dengan lebih mudah dan murah.

Selaras dengan nomenklatur peningkatan iklim investasi, program ini mendukung misi pembangunan ekonomi inklusif. Dengan regulasi yang sederhana dan transparan, masyarakat lokal lebih mudah mengembangkan usaha, sementara investor luar semakin tertarik menanamkan modalnya di Sarmi. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi

yang lebih merata, terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

22. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang air bersih/minum.

Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sarmi masih menjadi tantangan, terutama di kampung-kampung terpencil. Banyak masyarakat masih bergantung pada sumber air alami yang kualitasnya tidak terjamin, sehingga berisiko pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan sumber daya air yang lebih modern dan merata.

Program ini diarahkan untuk membangun jaringan distribusi air bersih, meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air, serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber air lokal. Pemerintah daerah juga mengintegrasikan teknologi sederhana untuk menjamin kualitas air minum.

Sejalan dengan nomenklatur pengelolaan sistem penyediaan air minum, program ini mendukung misi infrastruktur publik dengan memastikan setiap masyarakat memperoleh hak dasar air bersih. Ketersediaan air layak akan meningkatkan kesehatan, memperkuat produktivitas, dan menjadi fondasi pembangunan sosial ekonomi di Sarmi.

23. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang jalan, jembatan, irigasi, komunikasi dan energi.

Kabupaten Sarmi memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi alam yang menantang, sehingga banyak kampung masih terisolasi dan sulit dijangkau. Infrastruktur jalan dan jembatan yang terbatas menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik. Begitu pula, keterbatasan irigasi, energi, dan komunikasi menjadi faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi.

Program ini fokus pada pembangunan jalan dan jembatan penghubung antarwilayah, peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian, serta penyediaan akses energi dan komunikasi yang lebih merata. Dengan langkah ini, isolasi wilayah dapat diputus, sementara produktivitas masyarakat di sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa dapat ditingkatkan.

Selaras dengan nomenklatur, program ini mendukung misi infrastruktur publik dengan menciptakan konektivitas, kemandirian energi, dan transformasi digital. Hasilnya adalah pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing, serta integrasi sosial-ekonomi masyarakat Sarmi secara menyeluruh.

24. Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang perumahan

Kondisi perumahan di Kabupaten Sarmi masih banyak yang tidak layak huni, dengan sanitasi buruk, drainase tidak memadai, dan rentan bencana. Hal ini memengaruhi kesehatan keluarga, kenyamanan hidup, serta kualitas lingkungan secara umum. Permukiman yang kumuh menjadi salah satu masalah sosial yang harus segera ditangani.

Program ini diarahkan untuk membangun rumah layak huni, memperbaiki lingkungan permukiman, serta menyediakan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Pemerintah

daerah juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar terlibat aktif dalam menjaga lingkungan hunian.

Sejalan dengan nomenklatur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, program ini mendukung misi infrastruktur publik dengan memberikan hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Dengan perumahan yang tertata baik, masyarakat dapat hidup lebih produktif, sehat, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

25. Program Kampung Mandiri melalui pemberdayaan masyarakat setempat, menggunakan potensi sumber daya setempat dan kearifan lokal.

Program Kampung Mandiri merupakan strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek utama pembangunan melalui pemberdayaan berbasis potensi lokal. Latar belakang program ini adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta rendahnya kapasitas ekonomi mandiri di tingkat kampung. Padahal, Kabupaten Sarmi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta kearifan lokal yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun kemandirian.

Program ini mendorong pengembangan usaha produktif di tingkat kampung dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pendampingan, pelatihan, penguatan kelembagaan kampung, serta akses permodalan. Selain itu, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dijadikan pedoman dalam mengelola sumber daya agar tetap berkelanjutan dan selaras dengan identitas masyarakat adat Papua. Dengan demikian, pembangunan kampung tidak sekadar fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Sejalan dengan nomenklatur Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, inisiatif ini sangat relevan dengan misi menjamin terlaksananya Otonomi Khusus yang berpihak pada OAP, serta misi membangun ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Kampung Mandiri menjadi instrumen penting untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri secara ekonomi, dan tetap menjaga harmoni sosial-budaya. Hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan yang merata, penguatan identitas lokal, serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berakar dari masyarakat itu sendiri.

Berikut disajikan Proyek Strategis kepala daerah yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel III.7
Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Proyek Strategis Kepala Daerah Kabupaten Sarmi

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang air bersih/minum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang jalan, jembatan, irigasi, komunikasi dan energi.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penataan Bangunan Gedung
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pentaan Bangunan Dan Lingkungannya
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang jalan, jembatan, irigasi, komunikasi dan energi.	Program Penyelenggaraan Jalan
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang air bersih/minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penanggulangan Bencana Daerah
Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengelolaan Persampahan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang jalan, jembatan, irigasi, komunikasi dan energi.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang perumahan	Program Pengembangan Perumahan
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang perumahan	Program Kawasan Permukiman
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang perumahan	Program Peningkatan PSU
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemasaran Pariwisata
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program Kewirausahaan Digital (digital entrepreneurship) bagi generasi muda, angkatan kerja dan pelaku usaha di berbagai bidang usaha. [Program ini diperkenalkan sebagai tagline Pro K+DJ dibaca Pro Ke DJ]	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program pemberdayaan dan peningkatan usaha super mikro melalui bantuan keuangan dan pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan UMKM
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program “PROSPEK EMAS” [Proyek Pemerintah Daerah Sarmi Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Melibatkan Masyarakat Sarmi] [memprioritaskan dan memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek Pemerintah Daerah Sarmi serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat Sarmi].	
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program “PROSPEK EMAS” [Proyek Pemerintah Daerah Sarmi Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Melibatkan Masyarakat Sarmi] [memprioritaskan dan memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek Pemerintah Daerah Sarmi serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat Sarmi].	

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penyuluhan Pertanian
Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program revitalisasi regulasi perijinan untuk memudahkan masyarakat membuka dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sarmi	
Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program revitalisasi regulasi perijinan untuk memudahkan masyarakat membuka dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sarmi	
Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah	Program Pendaftaran Penduduk
Program revitalisasi dan peningkatan sarana pelayanan publik berbasis elektronik untuk seluruh urusan pemerintahan Daerah	Program Pencatatan Sipil
Program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara [ASN] disertai pemberian reward dalam bentuk peningkatan kesejahteraan	Program Kepegawaian Daerah
Program peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara [ASN] disertai pemberian reward dalam bentuk peningkatan kesejahteraan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemberdayaan Sosial
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Rehabilitasi Sosial
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penanganan Bencana
Program revitalisasi dan peningkatan Balai Latihan Kerja [BLK] bagi generasi muda dan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program magang bagi Pemuda Sarmi pada perusahaan-perusahaan di Dalam Negeri dan Luar Negeri [Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melakukan kerjasama dengan Perusahaan Dalam Negeri dan Luar Negeri].	Program Penempatan Tenaga Kerja
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ajang prestasi olah raga dan pemberian bantuan pembinaan seluruh cabang olahraga.	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengendalian Penduduk
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program perlindungan khusus anak
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pembinaan Perpustakaan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pengelolaan Arsip
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program jaminan gizi bagi anak usia 0 - 5 tahun dan ibu hamil untuk menekan angka stunting di Kabupaten Sarmi serta pemberian multi vitamin bagi remaja putri	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang kesehatan	
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan
Mendukung Program Nasional Makan Gratis bagi anak-anak sekolah melalui alokasi dana yang bersumber dari APBN	
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program “zero pungutan” dan biaya gratis jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan SMA	Program Pengelolaan Pendidikan
Program pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu	
Program “SARASEHAN” [Sarapan Sehat Hari] untuk semua murid TK dan SD di Kabupaten Sarmi berupa 1 [satu] gelas susu dan roti gandum [makanan lokal] setiap hari sebelum mulai aktifitas pembelajaran.	
Program Infrastruktur Pelayanan Publik bidang pendidikan	
Program ajang prestasi seni, budaya dan agama untuk melestarikan budaya serta memperkuat iman dan taqwa.	Program Pengembangan Kebudayaan
Program “PRESISI” [Percepatan dan Revitalisasi Pelaksanaan Program-Program OTSUS di Sarmi]	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Program Kampung Mandiri melalui pemberdayaan masyarakat setempat, menggunakan potensi sumber daya setempat dan kearifan lokal.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Program Penguatan Reformasi Birokrasi	

Program Prioritas Kepala Daerah	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
Program bantuan pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program bantuan insentif bagi Pendeta, Guru Injil, Guru Sekolah Minggu, Koster, Ustadz, Guru Ngaji, Pengurus Takmir Masjid, Marbot Masjid/Mushola dan para pegiat agama.	
Program “PROSPEK EMAS” [Proyek Pemerintah Daerah Sarmi Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Melibatkan Masyarakat Sarmi] [memprioritaskan dan memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek Pemerintah Daerah Sarmi serta melibatkan dunia usaha dan masyarakat Sarmi].	Program Perekonomian Dan Pembangunan

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Pengembangan wilayah berdasarkan RPJMN 2025-2029

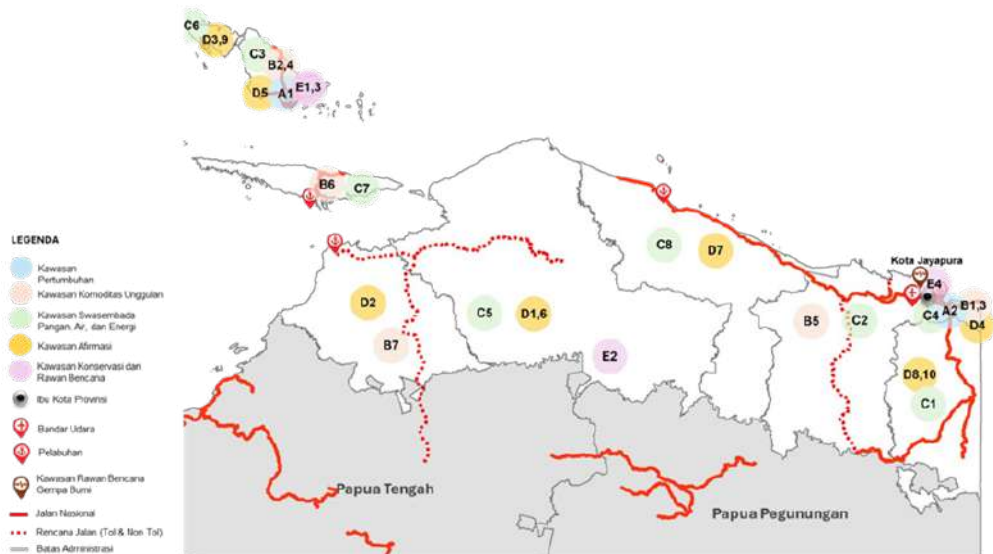
Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan terdapat arah pengembangan kawasan pada Kabupaten Sarmi sebagai berikut :

1. Kawasan potensial swasembada pangan Kabupaten Sarmi (pangan akuatik) meliputi penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi) dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan budidaya laut (marine aquaculture), perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture), serta perikanan tangkap, melalui:
 - a. penguatan produksi, dengan output: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, serta penyaluran benih ikan air laut dan tawar;
 - b. pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan output: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani;
 - c. penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang penyimpanan pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik;
 - d. penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan) yang terlatih GAP, GHP, dan PHT, dengan output: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk;

- e. penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan output: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi serta pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas;
 - f. penguatan diversifikasi pangan pada kawasan rentan pangan, dengan output: pengembangan kawasan padi dan pangan akuatik, penguatan UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
26. Wilayah kecamatan perbatasan prioritas Kabupaten Sarmi terdiri dari Kecamatan Pantai Timur, Kecamatan Sarmi Timur, Kecamatan Sarmi Selatan, Kecamatan Sarmi, Kecamatan Pantai Barat meliputi penguatan tata kelola pemerintahan, dengan output: piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara.
27. Wilayah pengendalian penyakit TBC dan penyakit malaria meliputi pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:
- a. Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak;
 - b. Eliminasi penyakit kusta, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL;
 - c. Eliminasi penyakit frambusia, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL;
 - d. Eliminasi penyakit filariasis, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL;
 - e. Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan output: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL;
 - f. Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan output: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data;
4. Wilayah penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya melalui:

- a. pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua
- b. peningkatan gizi dan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting, dengan output: pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari buffer stock, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)
- c. peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan
- d. output: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL
- e. peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting, dengan output: penyebaran informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan
- f. peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan output: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB
- g. penguatan integrasi perbaikan sektor diluar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi

Gambar III.4
Pengembangan Kewilayahan di Provinsi Papua Pada RPJM Nasional 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

B. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Sarmi

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sarmi terdiri atas:

1. Peningkatan peran dan fungsi kawasan perkotaan dengan strategi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang

- sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani wilayah belakang;
 - b. meningkatkan dan memantapkan sistem permukiman perkotaan dan perkampungan sebagai representasi keberadaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan melalui pengembangan infrastruktur.
2. Pengembangan kawasan perkampungan dengan strategi:
 - a. mengembangkan sistem pusat permukiman perkampungan melalui penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - b. mengembangkan pusat permukiman perkampungan dengan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan perkampungan dan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dengan strategi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi melalui pengembangan sistem jaringan seluler;
 - c. meningkatkan jaringan prasarana energi dengan memanfaatkan energi terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. memanfaatkan potensi air permukaan yang cukup besar di wilayah Kabupaten Sarmi sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan irigasi;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - f. meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan persampahan dan limbah.
 4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan strategi:
 - a. menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 40% (empat puluh persen) dari seluruh wilayah;
 - b. menetapkan kawasan hutan paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) dari seluruh wilayah;
 - c. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang alamnya berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan;
 - d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;
 - f. mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan

- dan penghidupan;
- g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - h. mencegah dan/atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis Kabupaten Sarmi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut; dan
 - i. menetapkan dan mengakomodasi Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo – Foja menjadi Taman Nasional.
5. Pengembangan kegiatan budidaya dengan strategi:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - b. mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi;
 - c. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan
 - d. mengelola sumber daya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya
6. Peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Sarmi dengan strategi:
- a. pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang berdaya saing;
 - b. penetapan kawasan pertanian yang berkelanjutan;
 - c. penetapan kawasan agropolitan dan kawasan perikanan;
 - d. penetapan kawasan spesifik terumbu karang sebagai daerah tangkapan ikan dengan cara tradisional;
 - e. pengembangan potensi sumber daya alam, sejarah, dan religi sebagai tujuan wisata; dan
 - f. pengembangan eksploitasi pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
7. Peningkatan fungsi kawasan dengan strategi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. menyusun perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara terbatas di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah, terutama pada Pulau Liki yang merupakan Pulau Kecil Terluar yang berbatasan langsung dengan

negara tetangga.

8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dengan strategi:
 - a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten Sarmi dari sudut kepentingan ekonomi;
 - c. mendorong perkembangan kawasan strategis Kabupaten Sarmi dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada kawasan tersebut;
 - d. menciptakan iklim investasi yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan;
 - e. melakukan promosi peluang investasi dengan lebih intensif; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

BAB 4

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab IV RPJMD Kabupaten Sarmi menyajikan uraian mengenai program perangkat daerah serta gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian ini memberikan penjelasan bagaimana visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam program nyata yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Melalui penyajian ini, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat keterkaitan antara arah kebijakan dengan pelaksanaan pembangunan.



DOMINGGUS CATUE, S.KM., M.KES
BUPATI SARMI



H.J. JUMRIATLI
WAKIL BUPATI SARMI

4.1

Program Perangkat Daerah

4.2

Penetapan Indikator Kinerja

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Sarmi dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2030. Kerangka pendanaan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah disusun. Program-program ini berfokus pada sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja berbagai sektor pemerintahan, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan harus selaras dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Sarmi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri.

Sistem pendanaan yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, serta pelaksanaannya, Kabupaten Sarmi diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel IV.1
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sarmi Tahun 2025 - 2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			477,737,270,872			563,686,891,610			571,349,268,302		559,585,793,159
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			201,235,576,889			216,763,889,533			217,728,469,533		206,265,889,533
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			201,235,576,889			216,763,889,533			217,728,469,533		206,265,889,533
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				85,088,493,983		85,794,145,983			86,544,145,983		85,654,145,983
		Presentase Pengadaan/ Peneliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Presentase)	100	100			100			100		
		Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Presentase)	100	100			100			100		
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Presentase)	100	100			100			100		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				114,900,014,040		129,557,343,550			130,281,923,550		119,709,343,550
	Meningkatnya Persentase anak usia sekolah	Presentase anak usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Dengan Satuan:Presentase)	72.34	72.56			72.98			73.56		73.86

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	Terlaksananya Program Penun jang urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
1.02. 02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			97,855,411,2 61		96,939,593,8 14		102,197,753, 250		97,057,445,9 71		95,792,371,3 38		Dinas Kesehatan				

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Prevelensi stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita) (Dengan Satuan:)														Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian ibu (AKI) (Dengan Satuan:)														Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan kasus TB (Dengan Satuan:Persentase)	90					90					90			Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	66.66666 667					75					83.33333 333		100	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Dengan Satuan:Persentase)	8.333333 333					9.09					54.54545 455		72.72727 273	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persentase)	0					90.90909 091					100		100	Dinas Kesehatan
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Dengan Satuan:Persentase)	79					87					88		90	Dinas Kesehatan
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Dengan Satuan:Persentase)	72					88.88888 889					89.65517 241		92.12121 212	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Dengan Satuan:Persentase)	90					97					98		99	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Dengan Satuan:Persentase)	NA	30	25		20	15.00455789		10		Dinas Kesehatan	
		Persentase lanjut usia yang mandiri (Dengan Satuan:Persentase)	62.1086262	64.70588235	65.15580737		65.93406593	66.66666667		67.01030928		Dinas Kesehatan	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	63.63636364	63.63636364	72.72727273		81.818182	90.90909091		100		Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (Dengan Satuan:Persentase)	5.289052891	5.015565548	4.887091338		4.664914586	4.5410937		4.166666667		Dinas Kesehatan	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (Dengan Satuan:Persentase)	0.369030391	0.691802145	0.74148972		0.755584757	0.767508794		0.777363184		Dinas Kesehatan	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100	100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	0	100	100		100	100		100		Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase)	9.090909091	18.18181818	27.27272727		36.36363636	45.45454545		54.54545455		Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026			2027			2028			2029				2030		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Per 100.000 Penduduk)	1392.43444	1417.144442		1419.045202		1427.847635		1429.720722		1433.880885				Dinas Kesehatan			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		Dinas Kesehatan			
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Masyarakat Bidang kesehatan yang diberdayakan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			89,210,905,182		149,753,382,019		154,097,353,415		154,818,189,639		155,570,641,776							
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			89,210,905,182		149,753,382,019		154,097,353,415		154,818,189,639		155,570,641,776							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21,736,793,425		20,835,233,526		20,448,119,318		20,547,829,300		20,652,158,807				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			7,437,933,703		7,477,194,507		7,526,199,172		7,569,484,109		7,614,774,420				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya Pengelolaan SDA	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			13,460,000,000		13,530,000,000		13,620,000,000		13,690,000,000		13,780,000,000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026			2027			2028			2029				2030		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	
	Meningkatnya penduduk yang berakses air bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100			100			100			100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			339,925,270		402,036,258			404,671,157			406,998,516			409,433,700		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengembangan Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	50	51		52			53			54			55		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1,389,251,516		1,396,584,618			1,405,732,672			1,413,822,399			1,422,281,688		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai (Dengan Satuan:Persentase)	50	51		52			53			54			55		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			1,610,000,000		1,610,000,000			1,680,000,000			1,680,000,000			1,680,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Meningkatnya kualitas dan ketertarikan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100			100			100			100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			944,352,524		946,698,019			949,625,626			952,211,528			954,917,235		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ber IMB (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92			93			94			95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
1.03. 09	PROGRAM PENTAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A			16,296,688,133		16,382,709,480			16,490,079,859		16,584,918,176		16,684,150,315		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Sesuai Rtrw	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai RTRW (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03. 10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN			23,863,035,000		84,640,000,000			89,040,000,000		89,440,000,000		89,840,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya Jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:Persentase)	50	51		52		53		54		55			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03. 11	PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI			444,359,145		444,359,145			444,359,145		444,359,145		444,359,145		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengembangan jasa kontruksi di Kabupaten Tana tidung (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03. 12	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG			1,688,566,466		2,088,566,466			2,088,566,466		2,088,566,466		2,088,566,466		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			21,174,315,156			21,174,315,156			21,174,315,156			21,174,315,156					
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			21,174,315,156			21,174,315,156			21,174,315,156			21,174,315,156					
1.04. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6,133,315,390		6,133,315,390		6,133,315,390		6,133,315,390		6,133,315,390		Dinas Perumahan Rakyat dan			

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA															Kawasan Permukiman
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04. 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			12,045,744,000		12,045,744,000		12,045,744,000		12,045,744,000		12,045,744,000		12,045,744,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Terpenuhi nya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	(Dengan Satuan:)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04. 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2,369,893,000		2,369,893,000		2,369,893,000		2,369,893,000		2,369,893,000		2,369,893,000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	(Dengan Satuan:)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04. 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			625,362,766		625,362,766		625,362,766		625,362,766		625,362,766		625,362,766		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	(Dengan Satuan:)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	UMUM		20,661,972,000		22,001,972,000		22,411,972,000		22,841,972,000		22,861,972,000		22,861,972,000		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			8,619,972,000		9,509,972,000		10,369,972,000		10,699,972,000		10,719,972,000		10,719,972,000		
1.05. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7,059,972,000		7,519,972,000		8,479,972,000		8,429,972,000		8,549,972,000		8,549,972,000		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN /KOTA													
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dari capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) (Dengan Satuan:Nilai)	80	81		82		83		84		85		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05. 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,110,000,000		1,490,000,000		1,340,000,000		1,670,000,000		1,520,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Persentase)	65	75		80		83.21		85.31		87.93		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05. 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			450,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman, Pencegahan,Penyela matan kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persentase)	40	45		48		53		58		60		Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			12,042,000,000		12,492,000,000		12,042,000,000		12,142,000,000		12,142,000,000		
1.05. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			8,742,000,000		8,992,000,000		9,942,000,000		9,042,000,000		8,942,000,000		Badan Penanggulan gan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	2030
	KABUPATEN/ KOTA											
		Presentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi umum & Jasa Penunjang (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	P R O G R A M PENANGGULANGAN BENCANA				3.300.000,000		3.500.000,000		2.100.000,000		3.200.000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan pasca bencana (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (Dengan Satuan: Persentase)	75	80		80		80		80		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.318.000,000		3.113.000,000		3.098.000,000		3.048.000,000		3.028.000,000
	DINAS SOSIAL			4.318.000,000		3.113.000,000		3.098.000,000		3.048.000,000		3.028.000,000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.650.000,000		950.000,000		950.000,000		950.000,000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	Meningkatnya Perbedaayan Sosial KAT	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	300									
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				940,000,000		935,000,000		920,000,000		870,000,000	
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,374,000,000		874,000,000		874,000,000		874,000,000	
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				354,000,000		354,000,000		354,000,000		354,000,000	
	Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			128,205,816,399	132,589,176,271	133,320,504,382	132,229,681,841	134,877,568,265				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7,498,203,398	8,123,543,407	8,025,675,103	8,206,739,657	8,376,750,459				
	DINAS TENAGA KERJA			7,498,203,398	8,123,543,407	8,025,675,103	8,206,739,657	8,376,750,459				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA			5,458,847,997	5,545,127,147	5,518,804,547	5,638,240,496	5,817,781,049				
		Persentase pengadaan/	100	100		100		100		100		100

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
		pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)														
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,admini strasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07. 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			32,971,402		0		0		0		0		0	32,971,402	Dinas Tenaga Kerja
	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07. 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1,012,275,77 2		1,017,619,02 5		1,024,288,38 2		1,030,179,30 5		1,036,343,15 2		1,036,343,15 2	Dinas Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas Yang Meningkat Produktivitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07. 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			400,193,481		963,747,537		881,619,481		933,900,886		881,619,481		881,619,481	Dinas Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2.07. 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			593,914,746		597,049,698		600,962,693		604,418,970		608,035,375		608,035,375	Dinas Tenaga Kerja	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	Meningkatnya Pekerja	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan (Dengan Satuan:Orang)	1	2		3		4		5		6		Dinas Tenaga Kerja		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			700,000,000			700,000,000			700,000,000			700,000,000			
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			700,000,000			700,000,000			700,000,000			700,000,000			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				250,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	0	0.45		0.6		0.75		0.9		1.05		Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak		
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan Perlindunga n Anak		
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan	Data Gender dan Data Anak (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2		2		2		2		2		Dinas Pemberdaya an Perempuan Dan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	penyusunan kebijakan															Perindungan n Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			150,000,000		100,000,000		100,000,000					100,000,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
	Terjaminnya Pemenuhan Hak Anak secara Komprehensif	Persentase ketercapaian indikator Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100				100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100,000,000		100,000,000		100,000,000					100,000,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Merlukan Perlindungan tindak Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100					100			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			12,448,321,052		12,472,093,169		12,517,093,169		12,562,093,169		12,587,093,169				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,741,937,883		3,748,000,000		3,753,000,000					3,763,000,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Capaian Realisasi anggaran perangkat daerah (Dengan Satuan:Persentase)	99,25	100		100		100					100			Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan n Anak
	DINAS KETAHANAN PANGAN			8,706,383,169		8,724,093,169		8,764,093,169		8,804,093,169		8,824,093,169				

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,270,290,000		4,288,000,000		4,328,000,000		4,368,000,000		4,388,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang mulik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100			100			100			100	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100			100			100			100	Dinas Ketahanan Pangan
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100			100			100			100	Dinas Ketahanan Pangan
2.09. 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2,673,608,949		2,673,608,949		2,673,608,949		2,673,608,949		2,673,608,949	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (Dengan Satuan:Skor)	63.07	64.00		64.2		64.5		65.00		65		Dinas Ketahanan Pangan
2.09. 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				1,667,484,220		1,667,484,220		1,667,484,220		1,667,484,220		1,667,484,220	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Dengan Satuan:Persentase)	50	56		57		58		59		100		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026			2027			2028			2029				2030		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	
2.09. 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				95,000,000			95,000,000			95,000,000			95,000,000			95,000,000	Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya pengawasan dan mutu dan keamanan pangan	Presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (Dengan Satuan:Persentase)		60		70			80			90			100			Dinas Ketahanan Pangan	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			
2.10. 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000			9,354,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (Dengan Satuan:%)	80	81		82			83			84			85			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			14,309,000,000			16,098,200,000			16,055,720,000			16,217,922,000			17,362,714,200			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			14,309,000,000			16,098,200,000			16,055,720,000			16,217,922,000			17,362,714,200			
2.11. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KO TA				8,570,000,000			9,470,000,000			8,470,000,000			8,520,000,000			8,570,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Terperuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100			100			100			100			Dinas Lingkungan Hidup	
2.11. 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				1,400,000,000			700,000,000			700,000,000			700,000,000			1,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	0	100			100			100			100		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			500,000,000		800,000,000			900,000,000		800,000,000				Dinas Lingkungan Hidup	
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (Dengan Satuan:Indeks)	95.7	84.37			84.77			84.97			85.17		Dinas Lingkungan Hidup	
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Dengan Satuan:Indeks)	50	66.54			66.74			66.94			67.14		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			600,000,000		350,000,000			350,000,000		600,000,000			600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:Persentase)	0	100			100			100			100		Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT			450,000,000		450,000,000			450,000,000		450,000,000			450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029			2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11. 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			200,000,000	400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11. 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			150,000,000	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11. 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			300,000,000	400,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana (Dengan Satuan:Persentase)	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana (Dengan Satuan:Persentase)	0	100		100			100			100			100	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2,139,000,000		3,678,200,000		4,185,720,000		4,447,922,000		4,892,714,200				Dinas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (Dengan Satuan:Persentase)	44.71	38		41		44		47		50				Dinas Lingkungan Hidup		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184	20,082,864,184			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			17,272,864,184		17,272,864,184		17,272,864,184		17,272,864,184		17,272,864,184		17,272,864,184		Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
2.12.01	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase Capaian Realisasi anggaran perangkat daerah (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95				Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Dengan Satuan:Persentase)	23	58		72		86		93		99				Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (Dengan Satuan:Persentase)	10	30		50		70		85		97				Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		Dinas Kependudukan an Dan Pencatatan Sipil		
		Persentase Akta Perkawinan yang	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029		2030
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		di terbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)										an Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang di terbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	91	92		93		95		97		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang di terbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Perceraian yang di terbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				310,000,000		310,000,000		310,000,000		310,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Pemanfaatan Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang di manfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	67	70		84		90		93		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			8,820,165,536		8,820,165,536		8,820,165,536		8,820,165,536		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG			8,820,165,536		8,820,165,536		8,820,165,536		8,820,165,536		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,820,165,536		5,820,165,536		5,820,165,536		5,820,165,536	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100			Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	800,000,000	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persentase fasilitas tata kelola desa (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100			Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	650	15.38461538		22.22222222		28.57142857		0.4		66.66666667	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2,200,000,000		2,200,000,000		2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung
	kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	persentase fasilitasi peberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (Dengan Satuan:Persentase)		94.72361809		95.9798995		97.2361809		98.49246231		10000	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat Dan Kampung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	2030
	meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	persentasi fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga adat masyarakat hukum adat (Dengan Satuan:Persentase)		0.220551 378		0.220551 378		0.220551 378		0.220551 378		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7,501,157,863	9,754,693,000	9,869,693,000	9,754,693,000	9,869,693,000	9,754,693,000	9,869,693,000	9,687,420,000	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7,501,157,863	9,754,693,000	9,869,693,000	9,754,693,000	9,869,693,000	9,754,693,000	9,869,693,000	9,687,420,000	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			1,725,484,863			1,801,820,000		1,686,820,000		1,801,820,000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan/ Pengeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			98,400,000	98,400,000	98,400,000	98,400,000	98,400,000	98,400,000	98,400,000	98,400,000	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR)	97	94		94		94		94		Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		(Dengan Satuan:Angka)												Keluarga Berencana		
	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR) (Dengan Satuan:Angka)	2.93	2.88		2.83		2.78		2.73		2.68		Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.14. 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				3,677,273,00 0		5,969,473,00 0		5,969,473,00 0		5,969,473,00 0		5,787,200,00 0	Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi Unmet Nee	(Dengan Satuan:persen)	10	9.5		9		8.5		8		7		Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Dengan Satuan:Persentase)	23.5	25.5		26.5		27.5		28.5		29.5		Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.14. 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		2,000,000,00 0	Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan:persen)	24.8	26.8		28.8		30.8		32.8		34.8		Dinas Pengendalia n Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			9,095,854,464	9,248,854,464	9,393,854,464	8,405,854,464	8,405,854,464	8,578,854,464							
	DINAS PERHUBUNGAN			9,095,854,464	9,248,854,464	9,393,854,464	8,405,854,464	8,405,854,464	8,578,854,464							
2.15. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				7,740,854,46 4		6,518,854,46 4		6,050,854,46 4		7,278,854,46 4			Dinas Perhubunga n		

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2. Persentase Ketersedian layanan administrasi kepegawaian,admini- strasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubunga n
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase Ketersedian laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubunga n
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3. Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubunga n
2.15. 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA,J)				1,355,000,00 0		2,460,000,00 0		2,875,000,00 0		2,355,000,00 0		1,280,000,00 0	Dinas Perhubunga n
	Meningkatnya Kualitas Trasportasi Darat	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubunga n
	Meningkatnya Kualitas Trasportasi Darat	1. Konektivitas Darat (Dengan Satuan:Km)												Dinas Perhubunga n
2.15. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				0		20,000,000		0		0		20,000,000	Dinas Perhubunga n
	Meningkatnya pengendalian kawasan keselamatan oprasi penerbangan (KKOP)	Persentase pengendalian KKOP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubunga n
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,309,610,271		10,099,610,271		9,859,610,271		8,959,610,271		8,909,610,271	
2.16. 01	PROGRAM PENUNJANG				9,309,610,271		10,099,610,271		9,859,610,271		8,959,610,271		8,909,610,271	Dinas Komunikasi
					6,659,610,271		6,849,610,271		6,659,610,271		6,659,610,271		6,609,610,271	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																Dan Informatika	
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1,350,000,000		1,550,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			1,300,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan Indikator Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Persentase)	95	96		97		98		99		100		100		100	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			4,897,099,499		5,037,745,180		5,108,248,589		5,208,693,240		5,309,158,492		5,309,158,492		5,309,158,492		
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM			4,897,099,499		5,037,745,180		5,108,248,589		5,208,693,240		5,309,158,492		5,309,158,492		5,309,158,492		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,770,692,110		3,780,934,478		3,780,934,478		3,780,934,478		3,780,934,478		3,780,934,478		3,780,934,478	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029			2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100			100		100			Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100			100		100			Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			76,407,389		76,810,702		77,314,111		77,758,762		78,224,014	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	55			60		65		70	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N			200,000,000		230,000,000		250,000,000				350,000,000	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Dengan Satuan:Persentase)	0	4.5	4.7			5.5		5.7		5.85	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			550,000,000		550,000,000		550,000,000				550,000,000	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	
	kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke	2.19	2.19	2.5			2.85		3.2		3.35	Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Formal (Dengan Satuan:Persentase)														Koperasi Dan Ukm
2.17. 08	PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM			250,000,000			350,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000			Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Dengan Satuan:)	6 Unit Usaha	2.15		2.85		3		3.15		3.35				Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
2.17. 09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI				50,000,000			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Meningkatnya legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Dengan Satuan:Persentase)	2 unit	5 unit		55		60		65		70				Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,184,095,319		6,493,300,084		6,817,965,090		7,158,863,344		7,516,806,514			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6,184,095,319		6,493,300,084		6,817,965,090		7,158,863,344		7,516,806,514			
2.18. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA			4,869,272,010			5,112,735,610		5,368,372,391		5,636,791,011		5,918,630,564			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terselenggaranya Program	Persentase ketersediaan	100	100		100		100		100		100				Dinas Penanaman

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	layanan administrasi kepegawaian,admini strasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)													Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18. 02	PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL			327,619,000		343,999,950		361,199,948		379,259,945		398,222,942			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi (Dengan Satuan:Persentase)	4	4		4		4		4		4		4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18. 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			455,128,048		477,884,450		501,778,673		526,867,607		553,210,987			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha (Dengan Satuan:Persentase)	70	75	80		85		85		90				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			532,076,261		558,680,074		586,614,078		615,944,781		646,742,021			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Pemanfaatan dan Infomasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Dengan Satuan:Persentase)	86	86	86		86		86		86				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			8,843,336,490	6,898,148,653		8,318,148,653		7,538,148,653		8,138,148,653					
	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA			8,843,336,490	6,898,148,653		8,318,148,653		7,538,148,653		8,138,148,653					

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
2.19. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,668,148,653			3,558,148,653			3,508,148,653			3,568,148,653			3,558,148,653	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Terselenggaranya urusan pemerintah daerah	Presentase Laporan Capaian Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100			100			100			100			Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19. 02	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,450,000,000			850,000,000			1,250,000,000			1,150,000,000			1,350,000,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	rasio wirausaha pemuda (Dengan Satuan:Persentase)	0, 22	0.31		0.35			0.39			0.42			0.44			Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19. 03	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				2,875,187,837			1,490,000,000			2,410,000,000			1,520,000,000			1,780,000,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA SEBAGAI BASIS PENCARIAN BIBIT ATLET	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi/ Nasional (Dengan Satuan:Persentase)	10	11		12			13			14			15			Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19. 04	PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS KEPRAMUKAAN				850,000,000			1,000,000,000			1,150,000,000			1,300,000,000			1,450,000,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (Dengan Satuan:Persentase)	1.57	2.03		2.44												Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000	
2.20. 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL				800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000			800,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang	Persentase perangkat daerah yang menggunakan	100	100		100			100			100			100			Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	Memanfaatkan Data Statistik	data statistik dalam pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)																
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		Dinas Komunikasi Dan Informatika		
	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			100			100	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2.22	URUSAN PEMERINDAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2,054,998,000	2,284,990,000		2,284,990,000	1,256,390,000		2,105,000,000	2,284,990,000		2,284,990,000	2,284,990,000				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN			1,590,000,000	1,590,000,000		1,590,000,000	560,000,000		1,590,000,000	1,590,000,000		1,590,000,000	1,590,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (Dengan Satuan:Persentase)	100			100			100			100			100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL			379,998,000	519,990,000		519,990,000	519,990,000		340,000,000	519,990,000		519,990,000	519,990,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (Dengan Satuan:Persentase)	100			100			100			100			100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			85,000,000	175,000,000		175,000,000	175,000,000		175,000,000	175,000,000		175,000,000	175,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	100			100			100			100			100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	informasi sejarah	(Dengan Satuan:Persentase)																
2.22. 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			0			0	1,400,000			0				0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum (Dengan Satuan:Persentase)						100								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		(Dengan Satuan:)														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5,266,810,323			5,277,466,823			5,294,373,323			5,305,129,823		5,315,886,323			
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5,266,810,323			5,277,466,823			5,294,373,323			5,305,129,823		5,315,886,323			
2.23. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,147,510,323			3,147,510,323			3,153,760,323			3,153,860,323		3,153,960,323	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
	Meningkatnya Tata kelola Brokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Capaian Realisasi anggaran perangkat daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100						100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
2.23. 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2,119,300,000			2,129,956,500			2,140,613,000			2,151,269,500		2,161,926,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	35	40		50			55			60		65		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			640,300,000			643,501,500			646,703,000			649,904,500		653,106,000			
2.24. 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			290,300,000			291,751,500			293,203,000			294,654,500		296,106,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
	Meningkatnya Tata Kelola arsip dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Dengan Satuan:Persentase)	40	60		68			75			83		90		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		
2.24. 03	PROGRAM PERLINDUNGAN			350,000,000			351,750,000			353,500,000			355,250,000		357,000,000	Dinas Perpustakaan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	DAN PENYELAMATAN ARSIP															n Dan Kearsipan
	Meningkatnya perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Dengan Satuan:Persentase)	30	50		60		70		80		85				Dinas Perpustakaa n Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			59,240,838,708	65,763,564,887	68,813,705,726	71,417,676,189	76,124,924,485								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			12,018,556,307	12,126,676,307	13,360,930,626	13,520,930,626	13,425,930,626								
	DINAS PERIKANAN			12,018,556,307	12,126,676,307	13,360,930,626	13,520,930,626	13,425,930,626								
3.25. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KO TA			5,418,556,307				6,360,930,626				6,420,930,626			6,225,930,626	Dinas Perikanan
		Presentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah. (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100								Dinas Perikanan
		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100								Dinas Perikanan
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja. (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100								Dinas Perikanan
3.25. 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3,100,000,000				3,200,000,000				3,250,000,000			3,250,000,000	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	17487	17924	18372											Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,750,000,000			1,900,000,000			1,950,000,000			2,000,000,000			2,100,000,000	Dinas Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan: Ton)	392	411		432											Dinas Perikanan	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1,750,000,000			1,850,000,000			1,850,000,000			1,850,000,000			Dinas Perikanan	
	Konsumsi ikan/ Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Dengan Satuan: kg per kapita)	48.12	51.96		54											Dinas Perikanan	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			16,266,387,272	16,266,387,272	18,769,656,990	18,769,656,990	17,347,392,490	17,347,392,490	17,894,656,990	17,894,656,990	19,084,656,990	19,084,656,990					
	DINAS PARIWISATA																	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6,016,387,272			5,944,656,990			5,797,392,490			5,794,656,990			Dinas Pariwisata	
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja. (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100			100			100			100		Dinas Pariwisata	
		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100			100			100			100		Dinas Pariwisata	
		Presentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah. (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100			100			100			100		Dinas Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
3.26. 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				6,000,000,00 0			8,250,000,00 0		6,700,000,00 0		6,950,000,00 0		7,200,000,00 0	Dinas Pariwisata			
	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Dengan Satuan:Persentase)	30.15%	40		50			60		70		80		Dinas Pariwisata			
3.26. 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				150,000,000			200,000,000		250,000,000		300,000,000		350,000,000	Dinas Pariwisata			
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Presentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Dengan Satuan:Persentase)	30	40		50			60		70		80		Dinas Pariwisata			
3.26. 04	PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1,750,000,00 0			1,975,000,00 0		2,150,000,00 0		2,350,000,00 0		3,350,000,00 0	Dinas Pariwisata			
	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Persentase)	30	40		50			60		70		80		Dinas Pariwisata			
3.26. 05	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2,350,000,00 0			2,400,000,00 0		2,450,000,00 0		2,500,000,00 0		2,550,000,00 0	Dinas Pariwisata			
	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Dengan Satuan:Persentase)	30	40		50			60		70		80		Dinas Pariwisata			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			28,344,383,000	32,225,000,000	35,340,000,000	37,155,000,000	40,525,000,000										
	DINAS PERTANIAN			28,344,383,000	32,225,000,000	35,340,000,000	37,155,000,000	40,525,000,000										

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2026		2027		2028		2029		2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,684,363,000	10,415,000,000		10,870,000,000		11,205,000,000		12,025,000,000	Dinas Pertanian	
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pertanian	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pertanian	
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan: Persentase)	100	100		100		100		100		Dinas Pertanian	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			6,240,020,000	6,660,000,000		7,040,000,000		7,420,000,000		7,780,000,000	Dinas Pertanian	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dengan Satuan: Ton)	119.5	160.2		163		165		169	173	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Produksi Hortikultura (Dengan Satuan: Ton)	160, 2	7.3		7.5		7.8		8	8.3	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Dengan Satuan: Ekor)	680	735		785		835		885	935	Dinas Pertanian	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN			7,420,000,000	9,400,000,000		10,950,000,000		12,430,000,000		14,070,000,000	Dinas Pertanian	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2029		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	PRASARANA PERTANIAN											
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Dengan Satuan:Ha)	10 Ha	10 Ha		10 Ha				10 Ha		Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1,000,000,000		1,200,000,000		1,380,000,000		1,550,000,000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100		Dinas Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100		Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				700,000,000		800,000,000		900,000,000		1,000,000,000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100		Dinas Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Bencana Pertanian (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100		Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3,300,000,000		3,750,000,000		4,200,000,000		3,550,000,000	Dinas Pertanian
	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase SDM Penyuluh Pertanian	100	100		100				100		Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	bidang penyuluhan pertanian	yang Ditingkatkan (Dengan Satuan:Persentase)														
		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2,211,512,129	2,242,231,590	2,285,382,610	2,317,088,573	2,359,336,869								
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM			2,211,512,129	2,242,231,590	2,285,382,610	2,317,088,573	2,359,336,869								
3.30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				178,744,564	179,853,847	180,888,229	181,970,533								
	Meningkatnya sarana distribusi Perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (Dengan Satuan:Persentase)														
3.30. 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			1,777,443,867	1,786,866,026	1,798,536,676	1,808,880,482	1,819,703,513								
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dengan Satuan:Persentase)	5.1	5.1	5.15	5.2	5.25	5.305								
3.30. 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			56,323,698	56,621,000	56,992,087	57,319,862	57,662,823								
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (Dengan Satuan:Persentase)	50	50	55	60	65	70								

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
																Koperasi Dan Ukm
3.30. 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			200,000,000		220,000,000		250,000,000		270,000,000		300,000,000				Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)														Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			400,000,000		400,000,000		480,000,000		530,000,000		730,000,000				
3.31. 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			400,000,000		400,000,000		480,000,000		530,000,000		730,000,000				Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Meningkatnya realisasi pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dengan Satuan:Persentase)	0.73			0.74		0.75		0.76		0.77				Dinas Perindustri an Perdagangan Koperasi Dan Ukm
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			86,088,975,627		82,712,388,871		83,248,244,198		83,783,416,102		84,298,827,619				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			86,088,975,627		82,712,388,871		83,248,244,198		83,783,416,102		84,298,827,619				
	SEKRETARIAT DAERAH			86,088,975,627		82,712,388,871		83,248,244,198		83,783,416,102		84,298,827,619				
4.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA			70,715,975,627		71,243,975,627		71,773,975,627		72,303,975,627		72,813,975,627				Sekretariat Daerah
	Terselenggaranya Program Peninjangan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100		100		100		100		100		100			Sekretariat Daerah
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	100		100		100		100		100		100			Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
		daerah (Dengan Satuan:Persentase)																
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100			100			100		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			10,575,000,000		10,575,000,000		10,575,000,000		10,575,000,000		10,575,000,000		10,575,000,000		10,575,000,000		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Persentase)	80	100		100				100			100			100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4,798,000,000		893,413,244		899,268,571				904,440,475		909,851,992				Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	80	100		100				100			100			100		Sekretariat Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			62,266,297,793		63,770,042,253		63,959,542,253		65,372,042,253		64,601,000,838						
5.01	PERENCANAAN			9,811,000,000		10,294,000,000		9,388,000,000		9,988,000,000		10,917,000,000						
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			9,811,000,000		10,294,000,000		9,388,000,000		9,988,000,000		10,917,000,000						
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,911,000,000		2,871,000,000		2,876,000,000		2,941,000,000		2,886,000,000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				100			100					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi	100	100		100				100			100					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029			2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persentase)												
		Persentase Pengadaan / Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
5.01. 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			4,750,000,00 0		4,869,000,00 0		4,952,000,00 0		4,982,000,00 0		4,961,000,00 0		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD/RPD dengan RKPD (Dengan Satuan:Persentase)	70.09	75		80		85		90		95		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
		Persentase Keselarasan RPJMD/ RPD dengan Renstra PD (Dengan Satuan:Persentase)	85.98	90		95		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
5.01. 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2,150,000,00 0		2,554,000,00 0		1,560,000,00 0		2,065,000,00 0		3,070,000,00 0		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangu n Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029		2030
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan SDA	(Dengan Satuan:Persentase) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perencanaan dan SDA (Dengan Satuan:Persentase)	100			100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	KEUANGAN			46,465,297,793	46,886,042,253	46,886,042,253	48,581,542,253	48,581,542,253	48,794,042,253	47,694,000,838		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			38,617,250,302	39,347,774,762	41,297,774,762	41,297,774,762	41,347,774,762	40,427,733,347			
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24,342,265,752		24,572,790,212		25,072,790,212		25,452,748,797	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				11,627,984,550		11,777,984,550		11,777,984,550		12,277,984,550	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar tunjangan Guru yang di alokasikan Melalui	30	30		30		30		30		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Pengelolaan Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah		
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah		
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Presentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pendapatan Daerah		
5.03	KEPEGAWAIAN			4,190,000,000		4,790,000,000		4,190,000,000		4,790,000,000		4,190,000,000				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4,190,000,000		4,790,000,000		4,190,000,000		4,790,000,000		4,190,000,000				
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				1,490,000,000		1,490,000,000		1,490,000,000		1,490,000,000		1,490,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan an Sumber Daya Manusia		
	Tingkat Penilaian SAKIP OPD	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kantor (Dengan Satuan:Persentase)	100	100				100				100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan an Sumber Daya Manusia		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2,700,000,000		3,300,000,000		2,700,000,000		3,300,000,000		2,700,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan an Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	75											Badan Kepegawaian Dan Pengembangan an Sumber Daya Manusia		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026		2027		2028		2029			2030	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Dengan Satuan:Persentase)	80										Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100			Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100			Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA			1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	70										Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100	Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	
	meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Dengan Satuan:Persentase)	63.4										Badan Kepegawaian Dan Pengembang an Sumber Daya Manusia	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39,876,168,817		40,037,345,177		39,777,468,817		39,926,168,817		9,808,809,008			
7.01	KECAMATAN				39,876,168,817		40,037,345,177		39,777,468,817		39,926,168,817		9,808,809,008			
	DISTRIK SARMI				5,372,639,907		5,604,296,267		5,372,639,907		5,372,639,907		5,604,296,267			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,372,639,907		5,604,296,267		5,372,639,907		5,372,639,907		5,604,296,267	Distrik Sarmi		
	Terselenggaranya Program Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Distrik Sarmi		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Distrik Sarmi		
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Distrik Sarmi		
	DISTRIK PANTAI TIMUR				3,379,499,290		3,379,499,290		3,379,499,290		3,379,499,290		0			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,379,499,290		3,379,499,290		3,379,499,290		3,379,499,290		0	Distrik Pantai Timur		
	Terselenggaranya Program Peninjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Distrik Pantai Timur		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum	100	100		100		100		100		100		Distrik Pantai Timur		

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026			2027			2028			2029			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan pembangunan	yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)														
	DISTRIK TOR ATAS			5,208,505,199		5,208,505,199		5,208,505,199		5,208,505,199		5,208,505,199		5,208,505,199		44,000,000
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA			5,164,505,199		5,164,505,199		5,164,505,199		5,164,505,199		5,164,505,199		5,164,505,199		0
	Terselenggaranya Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Tor Atas
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Tor Atas
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Tor Atas
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			44,000,000		44,000,000		44,000,000		44,000,000		44,000,000		44,000,000		Distrik Tor Atas
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan keturunan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Tor Atas
	DISTRIK BONGGO			4,058,217,665		3,937,737,665		3,959,517,665		4,058,217,665		4,058,217,665		4,058,217,665		3,959,517,665

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				3,944,217,66 5		3,823,737,66 5				3,845,517,66 5		3,944,217,66 5		3,845,517,66 5	Distrik Bonggo	
	Terselenggaranya Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100			100				100			100			100	Distrik Bonggo
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100			100				100			100			100	Distrik Bonggo
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100			100				100			100			100	Distrik Bonggo
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				92,000,000		92,000,000				92,000,000		92,000,000		92,000,000		Distrik Bonggo
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100			100				100			100			100	Distrik Bonggo
7.01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				22,000,000		22,000,000				22,000,000		22,000,000		22,000,000		Distrik Bonggo

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026			2027			2028			2029				
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketertarikan dan keterlibatan umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan keterlibatan umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Bonggo	
	DISTRIK APAWER HULU																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			5,354,939,907		5,354,939,907		5,354,939,907		5,354,939,907		5,354,939,907		5,354,939,907	0	Distrik Apawer Hulu	
	Terselenggaranya Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Apawer Hulu	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Apawer Hulu	
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Distrik Apawer Hulu	
	DISTRIK SARMI TIMUR																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			5,181,426,969		5,181,426,969		5,181,426,969		5,181,426,969		5,181,426,969		5,181,426,969	50,995,076	Distrik Sarmi Timur	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100				5,130,431,893		5,130,431,893		5,130,431,893	0	Distrik Sarmi Timur	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2026			2027			2028			2029				2030			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000		Distrik Sarmi Timur		
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			100			100			100	Distrik Sarmi Timur	
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20,995,076			20,995,076			20,995,076			20,995,076			20,995,076		Distrik Sarmi Timur	
	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dan keluarga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang diindikasikan (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			100			100			100	Distrik Sarmi Timur	
	DISTRIK SARMI SELATAN			2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628			0	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA				2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628			2,563,537,628		Distrik Sarmi Selatan	
	Terselenggaranya Program Peningjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Persentase)	100			100			100			100			100			100	Distrik Sarmi Selatan	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,	100			100			100			100			100			100	Distrik Sarmi Selatan	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026			2027			2028			2029				
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
		administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persentase)															
		Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100		100				100				100			100	Distrik Sarmi Selatan

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)																
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			7,416,832,058		7,454,016,219		7,491,200,377		7,528,384,539		7,565,568,700		7,565,568,700				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,416,832,058		7,454,016,219		7,491,200,377		7,528,384,539		7,565,568,700		7,565,568,700				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,416,832,058		7,454,016,219		7,491,200,377		7,528,384,539		7,565,568,700		7,565,568,700				
	PROGRAM																	
8.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			4,593,448,938		4,616,516,183		4,639,583,427		4,662,650,672		4,685,717,917		4,685,717,917		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Capaian Realisasi anggaran perangkat daerah (Dengan Satuan:Persentase)														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1,099,999,844		1,105,499,843		1,110,999,842		1,116,499,842		1,121,999,841		1,121,999,841		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Terbentuknya karakter pelajar dan masyarakat yang berlandaskan nilai- nilai Pancasila	Terbangunnya kesadaran dan pemahaman mendalam masyarakat dan generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila (Dengan Satuan:Persentase)	81	84		86		88		90		81				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1,296,135,135		1,302,615,811		1,309,096,486		1,315,577,162		1,322,057,838		1,322,057,838		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		

Kode	Bidang Urusan /Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
	Meningkatnya masyarakat dan kader partai yang berpengetahuan politik baik, bertika tinggi, dan kebudayaan demokrasi sehingga partisipasi politik meningkat dan demokrasi berjalan sehat	Persentase masyarakat yang memahami hak dan kewajiban politik serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik (Dengan Satuan:Persentase)	81														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8.01.04	PROGRAM DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			393,060,000		395,025,300		396,990,600		398,955,900		400,921,200				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas layanan dan kontribusi ormas terhadap masyarakat (Dengan Satuan:)														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			34,188,141		34,359,082		34,530,022		34,700,963		34,871,904				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penanganan konflik sosial sehingga tercipta kondisi aman dan kondusif untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang Terjadi di kabupaten Sarmini (Dengan Satuan:)														Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
TOTAL:				874,569,277,842.00	970,150,510,956.00	987,445,815,049.00	986,776,756,896.00	952,521,421,927.00										

4.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2025-2029.



Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91
4	PDRB per Kapita	Juta Rp/Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61
5	Tingkat Kemiskinan	%	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67
6	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32
8	Indeks Risiko Bencana	Poin	172,22*	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indikator Sasaran									
1	Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69
3	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99
4	Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	25,60**	21,50	20,64	19,78	18,91	18,05	17,19
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50
7	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,439*	0,439	0,434	0,428	0,423	0,417	0,412
9	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,92	0,50	0,90	1,30	1,70	2,10	2,50
10	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,33	2,28	3,22	4,17	5,11	6,06	7,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,30	3,19	3,07	2,96	2,85	2,74
12	Kontribusi PDRB Kabupaten Sarmi terhadap Provinsi	%	4,45	4,95	5,46	5,96	6,46	6,96	7,47
13	Rasio Gini	Poin	0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344
14	Tingkat kedalaman kemiskinan (PI)	Poin	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60
15	Indeks Desa	Poin	0,5069*	0,52243	0,52816	0,53389	0,53962	0,54535	0,55108
16	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	NA	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
17	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perhubungan	%	NA	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50
18	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	NA	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
19	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	NA	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidupo	Poin	NA	78,93	79,19	79,45	79,71	79,97	80,23
21	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65

*data tahun 2023

**data tahun 2022

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	63,07	63,64	64,21	64,77	65,34	65,91	66,48
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	43,89*	36,18	34,62	33,06	31,50	29,94	28,39
3	Konsumsi listrik perkapita	Kwh/Orang	NA	400,48	440,46	480,43	520,41	560,38	600,36
4	Intensitas Energi Primer	SBM/Rp milyar	NA	90,00	88,50	87,00	85,50	84,00	82,50
5	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses listrik (PLN dan nonPLN)	%	NA	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00
6	Kapasitas Air Baku	m3/detik	NA	0,25	0,34	0,44	0,53	0,62	0,72
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum	%	NA	10,00	14,50	19,00	23,50	28,00	32,50
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	59,23**	78,93	79,19	79,45	79,71	79,97	80,23
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	7,00	9,15	11,30	13,45	15,60	17,75
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	5,21	5,40	5,59	5,78	5,97	6,16
11	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	NA	23,13	26,97	30,82	34,66	38,50	42,35
12	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	NA	30,00	32,50	35,00	37,50	40,00	42,50
13	Cakupan wilayah (kampung) yang dapat diakses jaringan dan layanan transportasi darat/laut/udara	%	NA	11,96	15,17	18,37	21,58	24,79	27,99
14	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal telepon seluler kuat/sangat kuat (%)	%	NA	2,17	5,32	8,48	11,63	14,78	17,93
15	Cakupan wilayah (kampung) yang memiliki akses sinyal internet (%)	%	NA	1,09	3,75	6,42	9,08	11,74	14,41
16	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	59,28	61,29	63,30	65,31	67,31	69,32

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Persentase Penurunan Emisi GRK-Kumulatif	%	NA	23,19	24,92	26,66	28,39	30,12	31,86
18	Persentase Penurunan Emisi GRK-Tahunan	%	NA	39,01	41,93	44,84	47,76	50,68	53,60
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
20	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65
21	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	43,1	43,48	43,85	44,23	44,56	44,89	45,23
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,91	0,88	0,85	0,87	0,75	0,74	0,76
23	Rasio Penduduk	Poin	113,47	113,24	112,86	112,96	112,75	112,39	112,15
24	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	2,39	2,41	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51
II Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,26	4,87	5,48	6,08	6,69	7,30	7,91
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,05	13,76	13,34	12,92	12,51	12,09	11,67
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp/Kapita	88,76	93,40	98,04	102,69	107,33	111,97	116,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,30	3,19	3,07	2,96	2,85	2,74
5	Indeks Gini	Poin	0,372*	0,364	0,360	0,356	0,352	0,348	0,344
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,89	68,83	69,65	70,47	71,29	72,10	72,91
7	Indeks Kesehatan	Poin	76,78	77,69	78,06	78,43	78,80	79,17	79,54
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,91	70,50	70,74	70,98	71,22	71,46	71,70
9	Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk OAP	Tahun	NA	67,00	67,23	67,45	67,68	67,90	68,13
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	25,60*	21,50	20,64	19,78	18,91	18,05	17,19
11	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	NA	6691	6365	6039	5712	5386	5060
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	NA	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	NA	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
14	Angka Kejadian Malaria	per 1.000 kelahiran hidup	NA	316	300	285	269	254	238
15	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	NA	88,16	88,75	89,34	89,94	90,53	91,12
16	Indeks Pendidikan	Poin	66,42	67,76	69,20	70,65	72,10	73,54	74,99

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,38	12,65	12,92	13,18	13,45	13,72	13,99
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	NA	12,30	12,59	12,87	13,16	13,44	13,73
19	Rata-rata Lama Sekolah penduduk OAP	Tahun	NA	4,20	4,29	4,37	4,46	4,54	4,63
20	Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	Poin	1,86	1,81	1,77	1,72	1,68	1,64	1,60
21	Daya Beli Penduduk OAP	Ribu Rp.	NA	5403,00	5590,50	5778,00	5965,50	6153,00	6340,50
22	Indeks Pemenuhan Hak-Hak Orang Asli Sarmi	Poin	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	45,00	45,50	46,00	46,50	47,00	47,50
24	Cakupan kearifan lokal tangible dan intangible yang terlindungi dan berdaya	%	NA	25,00	28,75	32,50	36,25	40,00	43,75
25	Persentase luas kawasan adat yang ditetapkan negara	%	NA	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
26	- Literasi Membaca	%	NA	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00
27	- Numerasi	%	NA	1,25	4,31	7,38	10,44	13,50	16,56
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
28	- Literasi Membaca	%	NA	16,00	18,20	20,40	22,60	24,80	27,00
29	- Numerasi	%	NA	9,00	11,30	13,60	15,90	18,20	20,50
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA	26,03	28,36	30,68	33,01	35,33	37,66
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	76,00	76,40	76,80	77,20	77,60	78,00
32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	NA	39,00	39,20	39,40	39,60	39,80	40,00
33	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,439*	0,439	0,434	0,428	0,423	0,417	0,412
34	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	96,59	96,70	96,81	96,93	97,04	97,15	97,26

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	NA	10,43	11,91	13,39	14,87	16,34	17,82
36	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	NA	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00	22,50
37	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
III Aspek Daya Saing Daerah									
1	Angka Ketergantungan	Poin	66,92	65,26	63,25	60,89	58,41	55,60	52,65
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	NA	1,79	2,20	2,61	3,02	3,43	3,84
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	NA	0,75	0,96	1,18	1,39	1,60	1,81
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	27,81	28,09	28,37	28,65	28,94	29,23	29,52
5	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	-0,92	0,07	1,05	2,04	3,03	4,01	5,00
6	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,33	2,28	3,22	4,17	5,11	6,06	7,00
7	Jumlah Tamu Wisatawan	Ribu Orang	NA	11,07	14,77	18,46	22,16	25,86	29,55
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	NA	5,99	6,31	6,64	6,96	7,28	7,61
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	NA	0,58	0,61	0,65	0,68	0,71	0,74
10	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	NA	11,37	11,61	11,86	12,10	12,34	12,59
11	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	NA	1,88	2,19	2,49	2,80	3,10	3,41
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	NA	1,68	1,95	2,21	2,48	2,74	3,01
13	Return on Aset (ROA) BUMD	%	NA	2,2	2,34	2,47	2,61	2,75	2,89
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61,74	62,36	62,98	63,61	64,25	64,89	65,54
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	NA	49,54	50,13	50,73	51,32	51,91	52,51
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	NA	20,00	22,01	24,01	26,02	28,02	30,03

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	NA	81,87	82,31	82,74	83,18	83,62	84,06
18	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer pada PJU di Kabupaten Sarni	%	NA	25,61	27,19	28,77	30,35	31,92	33,50
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	NA	3,40	3,58	3,76	3,94	4,12	4,30
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	NA	0,68	0,66	0,64	0,61	0,59	0,57
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	NA	26,78	28,70	30,62	32,54	34,46	36,39
22	Ekspor Barang dan Jasa	%	NA	3,51	4,92	6,32	7,73	9,14	10,55
23	Indeks Infrastruktur	Poin	NA	58,75	59,88	61,00	62,13	63,25	64,38
24	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	NA	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
25	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perhubungan	%	NA	60,00	61,50	63,00	64,50	66,00	67,50
26	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	%	NA	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
27	Persentase Ketercapaian Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	NA	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
28	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	35,00	38,25	41,50	44,75	48,00	51,25
29	Indeks Desa Membangun	Poin	0,5069*	0,5224	0,5282	0,5339	0,5396	0,5454	0,5511
30	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Poin	NA	142,74	141,85	140,97	140,08	139,19	138,31
31	Rasio Pajak terhadap PDRB	%	NA	2,46	2,60	2,74	2,88	3,02	3,16
32	Tingkat Inflasi	%	NA	3,57	3,45	3,34	3,22	3,11	2,99
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	12,12	13,78	15,44	17,10	18,76	20,42
34	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27
35	Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp.	NA	438,31	537,48	636,64	735,81	834,97	934,14
36	Total Kredit/PDRB	%	NA	10,12	11,48	12,84	14,20	15,56	16,92
37	Inklusi Keuangan	%	NA	85,09	85,71	86,32	86,94	87,55	88,17

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
38	Kontribusi PDRB Sarmi Terhadap Papua	%	4,45	4,95	5,46	5,96	6,46	6,96	7,47
39	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	NA	0,689	0,686	0,684	0,681	0,679	0,676
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00
2	Indeks Integritas Nasional	Poin	NA	67,13	67,82	68,50	69,19	69,88	70,56
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	%	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	%	NA	87,90	88,26	88,61	88,97	89,32	89,68
7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	NA	69,31	70,33	71,35	72,37	73,39	74,41
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	NA	2,60	2,65	2,69	2,74	2,78	2,83
9	Indeks Reformasi Hukum	Poin	NA	23,40	25,10	26,80	28,50	30,20	31,90
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	NA	1,88	2,04	2,19	2,35	2,50	2,66
11	Nilai SAKIP	Poin	NA	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00

*data tahun 2023

**data tahun 2022

BAB 5

Penutup

Bab V RPJMD Kabupaten Sarmi memuat pedoman transisi, mekanisme pengendalian dan evaluasi, serta kaidah pelaksanaan pembangunan daerah. Bagian ini menjadi panduan dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Melalui pengendalian dan evaluasi, pemerintah daerah dapat menilai capaian pembangunan sekaligus melakukan penyesuaian bila diperlukan, sehingga arah pembangunan Kabupaten Sarmi tetap sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.



5.1

Pedoman Transisi

5.2

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

5.3

Kaedah Pelaksanaan

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sarmi lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Papua dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sarmi serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Pemerintah Daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sarmi maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah

- kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
 - 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Sarmi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat diubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Sarmi, 23 Oktober 2025

BUPATI SARMI
CAP/TTD
DOMINGGUS CATUE. S.KM. M.Kes.